

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta disusun sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan Daerah, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta disusun untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mengatasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam rencana pembangunan periode sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
8. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta memperhatikan:
 - a. RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. RTRW Daerah; dan
 - c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.
- (4) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
 - a. RKPD;
 - b. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
 - c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang di bidang perencanaan dan pengendalian.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...
WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dasar untuk menciptakan suatu kehidupan yang sejahtera, baik bersifat materiil maupun imateriil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus mengorbankan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berlebihan dengan harapan tatanan sosial budaya, ekonomi dan pemerintahan tetap stabil, kondusif, demokratis, bertanggung jawab dan berkeadilan. Prinsip dasar etika dalam mewujudkan keadilan hukum sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila yang meliputi prinsip-prinsip nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan dalam kehidupan sosial kenegaraan Indonesia.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development Function* (fungsi pembangunan), dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objective* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Yogyakarta diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang diwujudkan dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kemajuan pembangunan Kota Yogyakarta perlu didukung dengan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas serta mempunyai daya saing tinggi. Disisi lain diperlukan peran serta dunia usaha dan swasta dalam turut serta mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan tetap mengacu dan memperhatikan tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diharapkan menghasilkan perkembangan pembangunan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

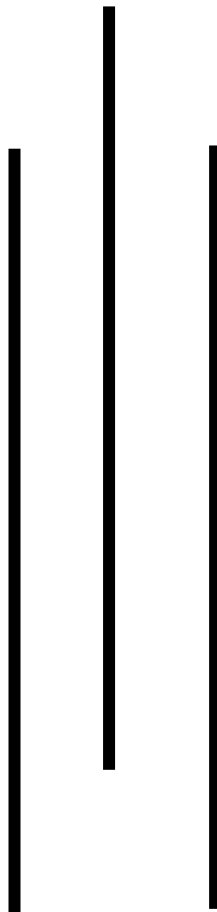
Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-40
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-57
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	II-69
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-1
2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir II-1	
2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan	II-24
2.3. Permasalahan dan isu Strategis	II-1
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-1
2.3.2. Isu Lingkungan Dinamis	II-14
2.3.3. Isu Strategis Daerah	II-23
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1	
3.1. Visi	III-1
3.2. Misi	III-4
3.3. Tujuan dan Sasaran	III-7
3.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas	III-10
3.4.1. Penahapan Pembangunan	III-10
3.4.2. Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	III-15
3.4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III-1
3.4.4. Program Prioritas	III-16
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-27
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain Terkait	I-8
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta.....	II-4
Gambar 2.2 Peta Aliran Sungai Kota Yogyakarta	II-8
Gambar 2.3 Grafik Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Tata Ruang Kota Yogyakarta.....	II-10
Gambar 2.4 Peta Bentang Lahan Kota Yogyakarta.....	II-16
Gambar 2.5 Peta Vegetasi Alami Kota Yogyakarta.....	II-18
Gambar 2.6 Peta Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta	II-19
Gambar 2.7 Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta.....	II-21
Gambar 2.8 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta.....	II-25
Gambar 2.9 Peta Risiko Untuk Setiap Jenis Bencana	II-32
Gambar 2.10 Peta Risiko Multi Bahaya Kota Yogyakarta	II-33
Gambar 2.11 Distribusi Persentase Penduduk Per Kemantren Tahun 2024	II-35
Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-36
Gambar 2.14 Struktur Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2024	II-37
Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Terhadap Provinsi dan Nasional 2020-2024	II-40
Gambar 2.15 PDRB Per Kapita Menurut ADHB (Ribu Rupiah) 2020-2024	II-41
Gambar 2.16 Rasio Gini Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional.....	II-42
Gambar 2.17 Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional	II-43
Gambar 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional.....	II-44
Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2020-2024	II-48
Gambar 2.19 Usia Harapan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 .	II-48
Gambar 2.20 Indeks Keluarga Sehat Kota Yogyakarta tahun 2023-2024	II-51
Gambar 2.20 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2021-2024	II-53
Gambar 2.21 Nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021-2024	II-61
Gambar 2.22 Inflasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-68
Gambar 2.23 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	II-70

Gambar 2.23 Nilai Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2024	II-72
Gambar 2.24 Persentase Balita Gizi Kurang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-90
Gambar 2.27 Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023	II-115
Gambar 2.25 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-117
Gambar 2.26 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020-2025.....	II-118
Gambar 2.27 Indeks Kualitas Air Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024..	II-120
Gambar 2.28 Indeks Kualitas Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-121
Gambar 2.29 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-121
Gambar 2.23 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-148
Gambar 2.24 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-159
Gambar 2.35 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-160
Gambar 2.36 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-161
Gambar 2.37 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-162
Gambar 2.38 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-162
Gambar 2.39 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-163
Gambar 2.39 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-163
Gambar 2.32 Tren Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta 2020-2024	II-5
Gambar 2.33 Tren Realisasi PAD dalam Juta Rupiah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-7
Gambar 3.1 Visi Pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan yang Relevan.....	III-2
Gambar 3.2 Keterkaitan Misi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 dengan Misi Wali Kota	III-6
Gambar 3.3 Skema Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029	III-7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta	II-1
Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Laut	II-5
Tabel 2.3 Curah Hujan Kota Yogyakarta 2020 - 2024.....	II-5
Tabel 2.4 Kelembaban Udara Kota Yogyakarta 2020 - 2024.....	II-6
Tabel 2.5 Tekanan Udara Kota Yogyakarta 2020 - 2024	II-7
Tabel 2.6 Suhu Kota Yogyakarta 2020 - 2024	II-7
Tabel 2.7 Tutupan Lahan Kota Yogyakarta.....	II-9
Tabel 2.8 Ekoregion Bentang Lahan di Kota Yogyakarta.....	II-16
Tabel 2.9 Tipe Vegetasi di Kota Yogyakarta.....	II-17
Tabel 2.10 Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta.....	II-20
Tabel 2.11 Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta	II-22
Tabel 2.12 Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2030	II-24
Tabel 2.15 Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi Air Baku PDAM Tirtamarta untuk Kota Yogyakarta Tahun 2020.....	II-26
Tabel 2.17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-28
Tabel 2.18 Cakupan Layanan Sanitasi di Kota Yogyakarta 2020-2024 ..	II-28
Tabel 2.19 Persentase Jumlah Sampah yang Berkurang Melalui 3R di Kota Yogyakarta.....	II-29
Tabel 2.20 Indeks Risiko Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2.21 Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024.....	II-34
Tabel 2.21 Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024	II-35
Tabel 2.22 <i>Sex Ratio</i> Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-36
Tabel 2.23 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Yogyakarta 2020-2024	II-37
Tabel 2.24 Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024....	II-38
Tabel 2.25 Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2025□2029	II-39
Tabel 2.26 Proyeksi Beban Ketergantungan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Usia.....	II-39
Tabel 2.27 Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-42
Tabel 2.27 Status Ketenagakerjaan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta (Agustus 2023).....	II-45
Tabel 2.28 Distribusi Pendapatan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-46
Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-47
Tabel 2.29 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.30 Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2020-2024	II-49

Tabel 2.31 Prevalensi Stunting Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	II-50
Tabel 2.34 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-51
Tabel 2.35. Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta 2020-2024	II-52
Tabel 2.36 Angka Literasi dan Numerasi	II-52
Tabel 2.38 Indeks Masyarakat Digital Indonesia.....	II-54
Tabel 2.39. Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	II-55
Tabel 2.40. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024	II-55
Tabel 2.41 Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-56
Tabel 2.42 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	II-56
Tabel 2.43 Indeks Ketimpangan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	II-57
Tabel 2.45 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.46 Angka Ketergantungan Kota Yogyakarta 2020-2024.....	II-58
Tabel 2.50 Persentase PDRB Industri Pengolahan Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB.....	II-59
Tabel 2.51 Persentase PDRB Akomodasi dan Makan Minum Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB.....	II-59
Tabel 2.47 Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-59
Tabel 2.48 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2.49 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.69 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.....	II-62
Tabel 2.52 Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto 2020-2024.....	II-63
Tabel 2.53 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024	II-64
Tabel 2.54 Kecepatan Rata-rata Kendaraan.....	II-65
Tabel 2.55. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2.56 Jenis Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-67
Tabel 2.57 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-67
Tabel 2.58 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-68
Tabel 2.61 Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-71

Tabel 2.60 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik....	II-73
Tabel 2.62 Angka Kriminalitas per 100.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.63 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.64 Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2.65 Indikator Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-75
Tabel 2.66 Dimensi dan Indikator Pilar Stabilitas Ekonomi Makro dan Pilar Dinamisme Bisnis dalam IDSD	II-77
Tabel 2.67 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.....	II-77
Tabel 2.68 Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.70 Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.71 Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.72 Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.73 Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.....	II-80
Tabel 2.74 Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024....	II-80
Tabel 2.75 Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.....	II-81
Tabel 2.76 Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-81
Tabel 2.77 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.....	II-82
Tabel 2.78 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.....	II-82
Tabel 2.79 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.....	II-82
Tabel 2.80 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-83
Tabel 2.81 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.....	II-83
Tabel 2.82 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Menengah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.....	II-84
Tabel 2.83 Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.....	II-84
Tabel 2.84 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.....	II-85
Tabel 2.86 Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024	II-85

Tabel 2.87 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-86
Tabel 2.88 Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024	II-87
Tabel 2.89 Angka Kematian Neonatal di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024	II-87
Tabel 2.90 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-88
Tabel 2.91 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-89
Tabel 2.92 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024	II-90
Tabel 2.93 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-90
Tabel 2.94 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-91
Tabel 2.95 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024	II-91
Tabel 2.96 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.97 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.98 Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-93
Tabel 2.99 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.100 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.101 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2.102 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2.103 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	II-96
Tabel 2.104 Luasan RTH Publik Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.105 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan	II-97
Tabel 2.106 Luas Permukiman Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024	II-97
Tabel 2.107 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2.108 Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024	II-98
Tabel 2.109 Data Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-99

Tabel 2.110 Jumlah Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-99
Tabel 2.111 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2.112 Persentase Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2.113 Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2.114 Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2020-2024.....	II-102
Tabel 2.115 Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-103
Tabel 2.116 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.117 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024.....	II-104
Tabel 2.118 Persentase WKBSM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024	II-105
Tabel 2.119 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Tahun 2020-2024	II-105
Tabel 2.120 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat 2020-2024.....	II-106
Tabel 2.121 Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2.122 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun 2020-2024	II-108
Tabel 2.123 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-108
Tabel 2.124 Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024	II-109
Tabel 2.125 Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-109
Tabel 2.126. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-110
Tabel 2.127. Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-110
Tabel 2.128. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2.129. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2.130. Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-112
Tabel 2.131. Cakupan Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-112

Tabel 2.132. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2020-2024	II-113
Tabel 2.133. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.134 Rasio APM SD/MI Perempuan dan Laki-Laki di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.135. Rasio APM SMP/MTs Perempuan dan Laki-Laki di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.137. Pemenuhan Energi dan Protein per Kapita per Hari 2020-2024	II-116
Tabel 2.140. Persentase Cadangan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2.141. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.142. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2019-2023...	II-119
Tabel 2.143. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Tahun 2019-2023 ..	II-120
Tabel 2.147. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.148. Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-123
Tabel 2.149. Kategori Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2024..	II-123
Tabel 2.150. Daya Tampung Depo/Sumber Lainnya	II-124
Tabel 2.151. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Tahun 2020-2024	II-124
Tabel 2.152. Persentase Cakupan Area Pelayanan Tahun 2020-2024..	II-125
Tabel 2.153. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk 2020-2024	II-125
Tabel 2.154. Rasio Anak Berakta Kelahiran Tahun 2020-2024.....	II-126
Tabel 2.155. Rasio Pasangan Berakta Nikah Tahun 2020-2024.....	II-126
Tabel 2.156. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.157. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2020-2024...	II-127
Tabel 2.158 Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.159. <i>Total Fertility Rate dan Crude Birth Rate</i> di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.160. Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-128
Tabel 2.161. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun 2020-2024	II-128

Tabel 2.162. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2.163 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-129
Tabel 2.164 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-130
Tabel 2.165 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	II-130
Tabel 2.166 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi.....	II-131
Tabel 2.167. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2.168 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB 2020-2024	II-132
Tabel 2.169 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	II-132
Tabel 2.170 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa	II-133
Tabel 2.171 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk.....	II-133
Tabel 2.172 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri.....	II-134
Tabel 2.173 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-134
Tabel 2.174 Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerja sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.175 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-136
Tabel 2.176 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2.177 Rata-Rata Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	II-137
Tabel 2.178 Rata-Rata Binaan PKK Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2.179 Persentase LSM Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-138
Tabel 2.180 Jumlah PKK Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-138
Tabel 2.181 Persentase Posyandu Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.182 Jumlah Penumpang Bis yang Masuk Terminal di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-140
Tabel 2.183 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Yogyakarta 2020-2024	II-141

Tabel 2.184 Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.185 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2.186 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2.187 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-143
Tabel 2.188 Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-143
Tabel 2.189 Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.190 Jumlah Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ...	II-144
Tabel 2.191 Jenis Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024.....	II-145
Tabel 2.192 Besar Nilai Modal Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024	II-145
Tabel 2.193 Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024	II-146
Tabel 2.194 Persentase LKM Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-147
Tabel 2.196 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-148
Tabel 2.197 Jumlah Investor PMDN/PA Tahun 2020-2024	II-149
Tabel 2.198 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-150
Tabel 2.199 Jumlah Nilai Investasi PMDN/PA Tahun 2020-2024	II-150
Tabel 2.200 Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024	II-151
Tabel 2.201 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-151
Tabel 2.202 Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-151
Tabel 2.203 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.204 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.205. Jumlah Atlet yang Memenangi Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2.206 Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang Dimenangkan dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2.207 Buku “Kota Dalam Angka” di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2.208 Status Data dan Statistik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-154

Tabel 2.209 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-154
Tabel 2.210 Rintisan Kelurahan Budaya Kota Yogyakarta 2020-2024 .	II-155
Tabel 2.211 Penyelenggaraan Pertunjukan (Festival) Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-155
Tabel 2.212 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-156
Tabel 2.213 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-156
Tabel 2.214 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.215 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.216 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2.217. Jumlah Tempat Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-159
Tabel 2.218 Lama Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-159
Tabel 2.219 PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-160
Tabel 2.226 Listrik Terjual di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-163
Tabel 2.227 Ekspor Bersih Perdagangan di Kota Yogyakarta 2020-2024	II-164
Tabel 2.228 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2.229 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2.230 Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2.231 Jumlah Transmigran di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2.232 Produksi Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-166
Tabel 2.233 Konsumsi Ikan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-166
Tabel 2.234 Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-166
Tabel 2.235 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-167
Tabel 2.236 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-167
Tabel 2.237 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 ..	II-167
Tabel 2.238 Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-168

Tabel 2.239 Penjabaran Konsisten Program RPJMD ke dalam RKPD di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-168
Tabel 2.240 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-168
Tabel 2.241 Opini BPK “WTP” Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-169
Tabel 2.242 Persentase SILPA Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-169
Tabel 2.243 Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-169
Tabel 2.244 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-170
Tabel 2.245 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-170
Tabel 2.246 Penetapan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-170
Tabel 2.247 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-171
Tabel 2.248 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-171
Tabel 2.249 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-172
Tabel 2.250 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-172
Tabel 2.251 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-172
Tabel 2.252 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-173
Tabel 2.253 Persentase Penelitian yang Sudah Ditindak Lanjuti di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-173
Tabel 2.254 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-174
Tabel 2.255 Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Yogyakarta 2020-2024	II-174
Tabel 2.256 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kota Yogyakarta 2020-2024	II-174
Tabel 2.257 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-175
Tabel 2.258 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRPD terhadap RPJMD dan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-175
Tabel 2.259 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRPD terhadap Anggaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-176
Tabel 2.260 Capaian Target Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta 2020 - 2024.....	II-2
Tabel 2.261 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024.....	II-3

Tabel 2.262 Proporsi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-5
Tabel 2.263 Proporsi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	II-6
Tabel 2.264 Proporsi Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025	II-8
Tabel 2.265 Proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Yogyakarta	II-8
Tabel 2.266 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta 2020 – 2024	II-9
Tabel 2.267 Proporsi Komponen Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024	II-10
Tabel 2.268 Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024	II-11
Tabel 2.269 Capaian Target Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) Kota Yogyakarta Tahun 2019 - 2023	II-13
Tabel 2.270 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024	II-15
Tabel 2.271 Analisis Pembiayaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.272 Analisis Rasio Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024	II-19
Tabel 2.273 Neraca Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024	II-20
Tabel 2.274 Proyeksi Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029	II-26
Tabel 3.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja RPJMD Kota Yogyakarta.....	III-9
Tabel 3.2 Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	III-2
Tabel 3.3 Rumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-18
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kota Yogyakarta	IV-3
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029.....	IV-27
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029.....	IV-29
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029	IV-31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses sistematis untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi lokal, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keterbatasan sumber daya inilah yang harus diatasi dengan membuat perencanaan pembangunan agar pilihan tindakan yang dilaksanakan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan memanfaatkan potensi untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD): Dokumen perencanaan dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD serta disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih; dan
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD): Dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai dokumen strategis, RPJMD memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Proses penyusunan RPJMD harus memastikan kesinambungan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kajian lingkungan hidup strategis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kota tentang RPJMD kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan wakil Wali Kota dilantik. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, maka kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan.

Penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan pendekatan pembangunan global, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pembangunan di Indonesia harus dilakukan secara universal, terintegrasi, dan inklusif guna memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal (*no one left behind*).

Sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap pencapaian SDGs, Pemerintah Kota Yogyakarta juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perumusan kebijakan daerah. Kota Yogyakarta selama ini dikenal sebagai pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata, dengan tantangan besar dalam hal menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta harus berorientasi pada pengembangan kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan pemerataan kesejahteraan sosial.

Dalam implementasinya, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 telah diintegrasikan dengan cakupan muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan daya dukung lingkungan. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan komitmen Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian SDGs. Berdasarkan hasil KLHS, dari 224 indikator SDGs, sekitar 138 telah tercapai, sementara sisanya masih membutuhkan upaya tambahan yang lebih konkret dalam kebijakan pembangunan daerah.

RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 menjadi landasan utama dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah, sehingga setiap kebijakan yang dirancang dipastikan bersifat terukur, sistematis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 disusun dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan fisik dan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan jangka menengah, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022–2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023-2027 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 78);
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021–2042 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2); dan
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Yogyakarta Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang merumuskan visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJP Daerah. RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJMD Kota Yogyakarta harus memedomani dokumen perencanaan pembangunan yang berada di tingkat hierarki lebih tinggi, meliputi RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2025-2045, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027, dan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Selain itu, penyusunan RPJMD juga harus memedomani dokumen perencanaan spasial, seperti RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Daerah.

Dalam hal ketentuan memedomani dokumen perencanaan pembangunan pada hierarki di atasnya dalam penyusunan RPJMD, maka hal tersebut dapat dimaknai bahwa sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang di daerah harus selaras dengan muatan yang menjadi arahan dalam skala nasional, provinsi, maupun Kota. Sementara itu, terkait dengan ketentuan memedomani RTRW, hal ini berarti bahwa muatan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah harus selaras dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah sesuai hierarki RTRW yang dipedomani.

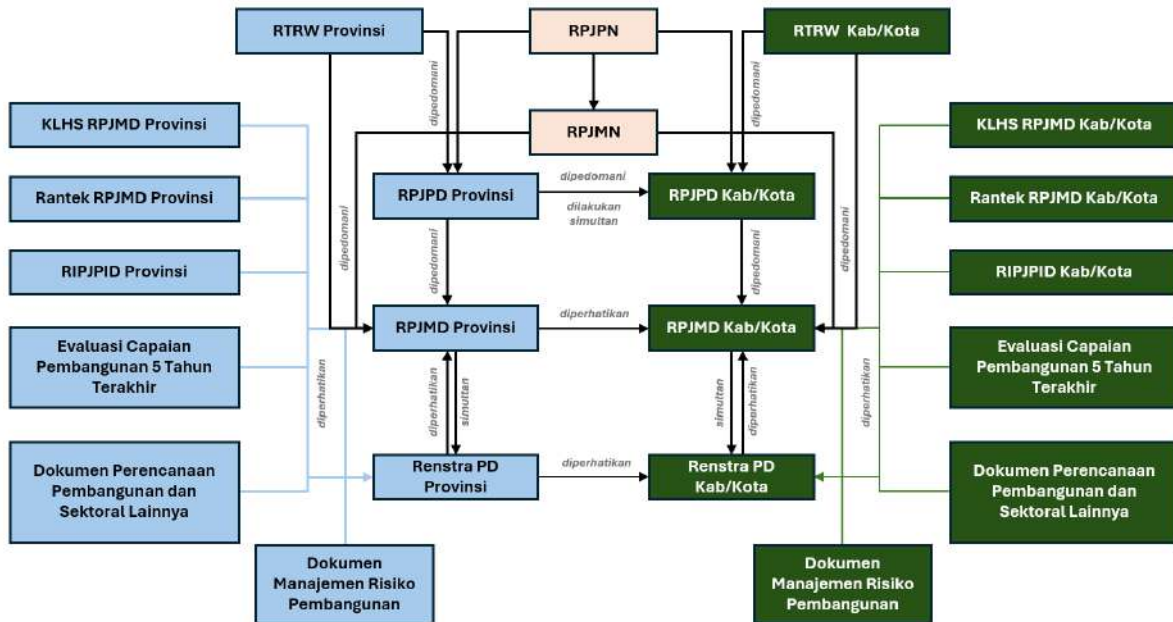
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 meliputi:

1. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJMN Tahun 2025-2029 yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - a. Penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dilakukan dengan penyesuaian kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan dimulai dari visi, misi, isu strategis, prioritas dan target nasional yang termuat dalam RPJMN 2025-2029.
 - b. Visi pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*
 - c. Misi RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
 - memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
 - melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 - memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
 - melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 - membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
 - memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
 - memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

2. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan memedomani RPJPD Kota Yogyakarta.
 - a. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan RPJPD Tahap I dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045.
 - b. Visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta untuk periode 2025-2045, yaitu “Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan”.
 - c. Adapun misi jangka panjang Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial;
 - Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan;
 - Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kestinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola; dan
 - Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan.
 - d. Pada pembangunan jangka panjang tahap 1 difokuskan pada Perkuatan Fondasi Pembangunan dengan arah kebijakan prioritas pada periode 2025-2029, meliputi:
 - pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
 - penguatan potensi daerah pada sektor ekonomi produktif;
 - kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, dan digitalisasi pelayanan publik; dan
 - pemerataan layanan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan rencana tata ruang.
3. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan memerhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.
4. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun memerhatikan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2029.
 - a. Penyelarasan RPJMD Kota Yogyakarta memerhatikan arah kebijakan yang termuat pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.
 - b. Sama halnya dengan penyelarasan dengan RPJMN, penyelarasan dengan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta guna melihat kebijakan pembangunan di tingkat provinsi yang berkaitan dengan Kota Yogyakarta.
 - c. Visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, yaitu “*Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*”.
 - d. Misi pembangunan dalam RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027, meliputi:
 - meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;

- memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
 - meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi; dan
 - melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.
5. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029.
 - a. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
 - b. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan.
 6. RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun dengan memerhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJPID) untuk menyinergikan kebijakan pembangunan dengan implementasi hasil riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan di daerah.
 7. Data capaian pembangunan 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
 8. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.
 9. Manajemen Risiko Pembangunan di Daerah.
 10. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

Adapun hubungan RPJMD Kota dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan pada skema berikut:



Gambar 1.1 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lain Terkait

Sumber: *Inmendagri No. 2 Tahun 2025*

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam membangun komitmen bersama dalam mewujudkan cita-cita Masyarakat Kota Yogyakarta secara sinergis dan berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. memberikan penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan program pembangunan pada jangka waktu Tahun 2025–2029;
2. menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD sesuai dengan urusan, kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk mencapai keselarasan dan sinkronisasi dengan RPJMD;
3. menyediakan acuan dalam penyusunan RKPDP, yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu indikatif, sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. menyediakan instrumen sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga perumusan indikator untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 5 (lima) tahun kepemimpinan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang perumusan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, Maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi Kota Yogyakarta, meliputi aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan publik. Uraian ini juga mencakup kondisi keuangan daerah, termasuk kapasitas riil pembiayaan Kota Yogyakarta untuk periode 2025–2029. Di dalamnya turut dijelaskan identifikasi permasalahan dan penentuan isu-isu strategis daerah dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan di tingkat global, nasional, dan regional.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat arah pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan melalui visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan program prioritas pembangunan. Subbab Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sekurang-kurangnya memuat rumusan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029. Sementara itu, Subbab Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029, serta program-program prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat program-program dari masing-masing Perangkat Daerah serta pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Subbab Program Perangkat Daerah mencantumkan daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang diarahkan untuk mencapai kinerja pembangunan daerah, serta indikator program, target, dan pagu indikatif masing-masing program pada periode tersebut. Selanjutnya, Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode RPJMD yang diukur melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD setelah periode berakhir atau terjadi perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1. Lokasi dan Luas Batas Wilayah Administrasi

Kota Yogyakarta merupakan ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fungsi ini mencerminkan peran Kota Yogyakarta sebagai pusat administrasi, baik pada tingkat provinsi maupun kota. Selain itu, Kota Yogyakarta juga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Nasional, dengan fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, pariwisata, serta sosial budaya.

Berdasarkan luas wilayah, Kota Yogyakarta memiliki luas sebesar 32,819 km², atau sekitar 1,04% dari total luas wilayah DIY. Dengan demikian, Kota Yogyakarta adalah wilayah dengan luas terkecil di Daerah Istimewa Yogyakarta dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya.

Secara astronomis, Kota Yogyakarta terletak di antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"-07°49'26" Lintang Selatan. Dalam konstelasi spasial kewilayahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta menempati lokasi strategis di pusat daerah dan diapit oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan batas administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Mlati);
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Berbah) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan);
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon); dan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kapanewon Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Kasihan).

Wilayah administrasi Kota Yogyakarta terdiri atas 14 Kemantren, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.535 Rukun Tetangga (RT). Kemantren Umbulharjo memiliki luas wilayah terbesar dengan luas 8,326 km² (25,36% dari luas Kota Yogyakarta). Sementara itu, Kemantren Pakualaman menjadi kemantren terkecil dengan luas wilayah sebesar 0,647 km² (1,97% dari luas Kota Yogyakarta). Pembagian administrasi Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Yogyakarta

No.	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Mantrijeron	Gedongkiwo	0,916	18	86
		Suryodiningratan	0,885	17	70
		Mantrijeron	0,871	20	75
		Total	2,672	55	231
2.	Kraton	Patehan	0,379	10	44

No.	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
		Panembahan	0,647	18	78
		Kadipaten	0,349	15	53
		Total	1,375	43	175
3.	Mergangsan	Brontokusuman	0,917	23	84
		Keparakan	0,530	13	58
		Wirogunan	0,850	24	77
		Total	2,297	60	219
4.	Umbulharjo	Giwangan	1,293	13	46
		Sorosutan	1,750	18	70
		Pandeyan	1,388	13	52
		Warungboto	0,838	9	38
		Tahunan	0,805	12	50
		Muja Muju	1,580	12	55
		Semaki	0,672	10	34
		Total	8,326	87	345
5.	Kotagede	Prenggan	1,023	13	57
		Purbayan	0,743	14	58
		Rejowinangun	1,222	13	50
		Total	2,986	40	165
6.	Gondokusuman	Baciro	1,023	21	87
		Demangan	0,746	12	44
		Klitren	0,689	16	62
		Kotabaru	0,724	4	20
		Terban	0,797	12	58
		Total	3,989	65	271
7.	Danurejan	Suryatmajan	0,295	14	40
		Tegalpanggung	0,331	16	66
		Bausasran	0,482	12	49
		Total	1,109	42	155
8.	Pakualaman	Purwokinanti	0,339	10	47
		Gunungketur	0,308	9	36
		Total	0,647	19	83
9.	Gondomanan	Prawirodirjan	0,466	18	61
		Ngupasan	0,677	13	49
		Total	1,142	31	110

No.	Kemantren	Kelurahan	Luas Area (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
10.	Ngampilan	Notoprajan	0,380	8	50
		Ngampilan	0,461	13	70
		Total	0,841	21	120
11.	Wirobrajan	Patangpuluhan	0,444	10	51
		Wirobrajan	0,649	12	58
		Pakuncen	0,678	12	56
		Total	1,771	34	165
12.	Gedongtengen	Pringgokusuman	0,487	22	84
		Sosromenduran	0,499	14	54
		Total	0,985	36	138
13.	Jetis	Bumijo	0,585	13	57
		Gowongan	0,458	13	52
		Cokrodiningratan	0,677	11	57
		Total	1,721	37	166
14.	Tegalrejo	Tegalrejo	0,820	12	48
		Bener	0,581	7	27
		Kricak	0,849	13	61
		Karangwaru	0,711	14	56
		Total	2,961	46	192
Jumlah			32,819	616	2.535

Sumber: Keputusan Wali Kota Nomor 279 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Nomor 499 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta, 2025



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta

Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, 2025

2.1.1.1.2. Geologi

Kondisi tanah di Kota Yogyakarta sebagian besarnya adalah tanah regosol atau vulkanis muda. Tanah regosol merupakan tanah hasil erupsi gunung berapi yang cenderung subur karena kaya akan unsur hara, memiliki tekstur tanah kasar berupa pasir dan/atau pasir berlempung, berwarna keabuan, namun peka terhadap erosi. Jenis tanah ini mudah meresapkan air, sehingga tanah ini dapat berfungsi sebagai median perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Kondisi tanah yang subur dan kaya unsur hara memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian.

Kota Yogyakarta terletak di atas formasi geologi yang terdiri dari batuan sedimen andesit tua (*old andesite*). Kota ini dilintasi oleh tiga sungai yang mengalir dari utara ke selatan, yaitu Sungai Code di bagian tengah kota, Sungai Winongo di bagian barat, dan Sungai Gajah Wong di bagian timur Kota Yogyakarta.

2.1.1.1.3. Topografi

Kota Yogyakarta memiliki rata-rata ketinggian dari permukaan laut yaitu 126 mdpl. Kemantren terendah yaitu Kemantren Gondomanan yaitu 96 mdpl. Sementara itu, kemantren dengan ketinggian paling tinggi adalah Gedongtengen yaitu 156,9 mdpl sebagaimana secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Laut

No.	Kemantren	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Tegalrejo	128,90
2.	Jetis	114,00
3.	Gondokusuman	152,00
4.	Danurejan	159,00
5.	Gedongtengen	156,90
6.	Ngampilan	125,00
7.	Wirobrajan	128,00
8.	Mantrijeron	113,00
9.	Kraton	114,00
10.	Gondomanan	96,00
11.	Pakualaman	157,00
12.	Mergangsan	119,30
13.	Kotagede	110,00
14	Umbulharjo	126,00
Rata-rata Kota Yogyakarta		126,00

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2024, 2025

2.1.1.1.4. Klimatologi

Kota Yogyakarta mengalami perbedaan musim hujan dan kemarau yang signifikan. Musim hujan berlangsung dari November hingga April, sedangkan musim kemarau dari Mei hingga Oktober. Pada tahun 2024, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta tercatat pada bulan Januari dengan curah hujan sebesar 498,00 mm dan 22 hari hujan. Sebaliknya, hujan tidak terjadi di Bulan Agustus. Secara keseluruhan, rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2024 di Kota Yogyakarta adalah 126,25 mm. Kelembaban udara pada tahun 2024 memiliki kecenderungan tinggi yaitu 82% dengan kelembaban terendah berada pada titik 66% yang terjadi di bulan Agustus. Sementara itu, rata-rata tekanan udara adalah 991,4 mm dengan suhu rata-rata 26,6°C.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi klimatologi pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan dalam waktu puncak musim hujan, meskipun masih berada dalam rentang periode yang sama. Selain itu, suhu di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan meskipun masih dalam musim hujan. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kenyamanan masyarakat. Untuk menghadapi musim kemarau, perlu dilakukan persiapan pola tanam yang tepat guna menghindari risiko gagal panen.

Tabel 2.3 Curah Hujan Kota Yogyakarta 2020-2024

Bulan	Curah Hujan (mm ³)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	308,20	349,80	224,00	259,00	498,00
Februari	398,40	305,30	386,00	392,90	235,00
Maret	516,80	152,10	349,00	347,50	210,00
April	207,00	237,40	308,60	380,60	113,00
Mei	275,90	2,30	169,20	76,00	13,00

Bulan	Curah Hujan (mm ³)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Juni	3,70	267,40	176,80	5,00	12,00
Juli	3,30	23,10	22,50	21,00	14,00
Agustus	13,70	24,70	74,70	1,00	0
September	6,80	78,50	163,50	-	32,00
Oktober	114,00	57,10	412,50	-	35,00
November	182,80	495,50	575,50	195,50	439,00
Desember	341,60	281,00	339,50	276,50	380,00

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025

Tabel 2.4 Kelembaban Udara Kota Yogyakarta 2020-2024

Bulan	Kelembaban Udara (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	77,59	78,90	81,00	83,00	96,00
Februari	79,47	80,40	82,00	85,00	93,00
Maret	81,49	77,20	85,00	83,00	95,00
April	78,90	74,50	84,00	83,00	93,00
Mei	79,21	74,10	82,40	79,00	90,00
Juni	75,32	77,90	83,50	80,00	96,00
Juli	71,71	72,90	80,70	79,00	93,00
Agustus	70,62	73,90	79,74	78,00	84,00
September	69,20	71,40	82,26	75,00	85,00
Oktober	75,21	75,10	87,31	76,00	90,00
November	76,61	85,20	86,79	80,00	96,00
Desember	81,32	81,40	85,00	79,00	97,00

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025

Tabel 2.5 Tekanan Udara Kota Yogyakarta 2020-2024

Bulan	Tekanan Udara (mb)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	995,06	993,6	990,20	990,00	993,70
Februari	995,48	994,0	989,30	989,50	993,60
Maret	995,18	994,4	989,20	990,90	994,00
April	995,34	995,2	990,00	990,20	992,00
Mei	995,10	994,6	990,10	992,10	992,70
Juni	995,78	966,0	990,70	992,00	993,70
Juli	995,52	996,0	990,90	993,30	994,60
Agustus	995,90	996,8	991,50	994,00	995,30
September	996,08	996,0	992,30	994,00	994,30
Oktober	995,13	995,9	991,50	994,10	994,60
November	995,09	994,1	990,50	990,50	992,50
Desember	993,40	995,1	989,23	992,00	992,30

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025

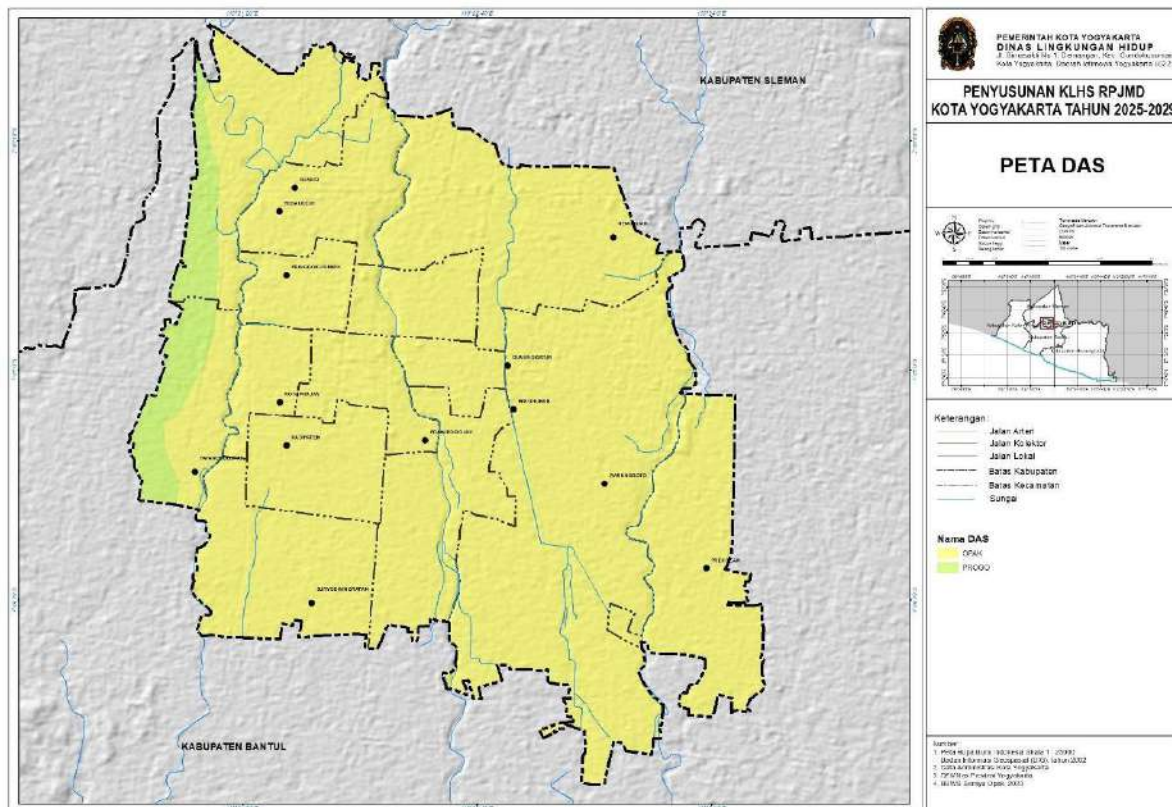
Tabel 2.6 Suhu Kota Yogyakarta 2020-2024

Bulan	Suhu Udara (°C)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	22,0–33,4	22,4–33,0	23,40-31,10	23,3-30,3	23,7-31,0
Februari	23,2–33,8	21,8–33,0	23,50-30,90	23,3-30,5	24,0-31,7
Maret	22,8–33,4	22,0–33,8	23,40-30,80	23,2-31,3	24,0-31,4
April	22,2–34,2	21,1–34,0	23,00-31,00	23,5-31,2	24,4-32,0
Mei	23,0–34,2	21,6–34,6	23,60-32,00	22,9-31,5	23,3-31,9
Juni	21,0–33,4	21,7–33,2	22,60-30,40	23,0-30,9	23,3-31,9
Juli	18,0–32,8	19,0–33,6	21,90-30,40	21,5-29,7	21,5-30,9
Agustus	19,9–35,0	20,6–33,4	22,40-30,30	20,7-30,5	21,5-31,0
September	21,8–34,6	21,0–34,2	24,20-30,40	21,3-31,2	22,9-32,2
Oktober	22,4–34,2	22,0–34,2	22,90-29,10	23,2-33,0	23,8-32,5
November	22,5–34,2	22,4–32,4	22,80-29,80	24,4-32,4	23,7-31,9
Desember	21,0–33,4	22,8–33,4	23,00-30,20	23,9-31,5	23,7-30,8

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025

2.1.1.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh keberadaan aliran sungai. Terdapat tiga aliran sungai utama di wilayah ini, yaitu Sungai Gajahwong di bagian timur, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat Kota Yogyakarta. Wilayah Kota Yogyakarta termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak dan Progo. DAS Opak merupakan bagian dari Wilayah Sungai (WS) Progo-Opak-Serayu. Ketiga sungai tersebut bermuara di Sungai Opak, membentuk sub sistem Sungai Opak.



Gambar 2.2 Peta Aliran Sungai Kota Yogyakarta

Sumber: Balai Besar Wilayah Serayu–Opak, 2023

2.1.1.1.6. Penutup Lahan

Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011). Kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan sehingga tutupan lahan yang dominan adalah lahan terbangun berupa permukiman, perkantoran, jalan, dan fasilitas umum. Penutup lahan berupa vegetasi teridentifikasi relatif di Kota Yogyakarta, hal ini dikarenakan perkembangan Kota Yogyakarta yang sangat pesat dan ketersediaan lahan dengan fungsi lindung yang terbatas.

Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2013, teridentifikasi bahwa permukiman kepadatan tinggi di Kota Yogyakarta menjadi tutupan lahan terbesar yang mencapai seluas 1.665,10 ha atau seluas 50,79% dari total luas wilayah. Tutupan lahan berikutnya yang juga cukup dominan, yaitu berupa perdagangan umum seluas 279,28 ha atau 8,52% dari total luas wilayah. Selain itu, Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan juga tergambar dari tutupan lahan berupa fasilitas pendidikan seluas 5,41% dari total luas wilayah, berupa bangunan sekolah maupun perguruan tinggi.

Pada tahun 2023, penutup lahan berupa lahan terbangun seperti permukiman, perkantoran, jalan, dan fasilitas umum masih mendominasi kondisi Kota Yogyakarta. Permukiman kepadatan tinggi di Kota Yogyakarta menjadi tutupan lahan paling dominan sebesar 1.669,24 ha atau seluas 50% dari total luas wilayah. Sementara itu, penutup lahan terluas kedua adalah perdagangan umum seluas 294,81 ha atau 8,99% dari total luas wilayah. Luasan setiap tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7 Tutupan Lahan Kota Yogyakarta

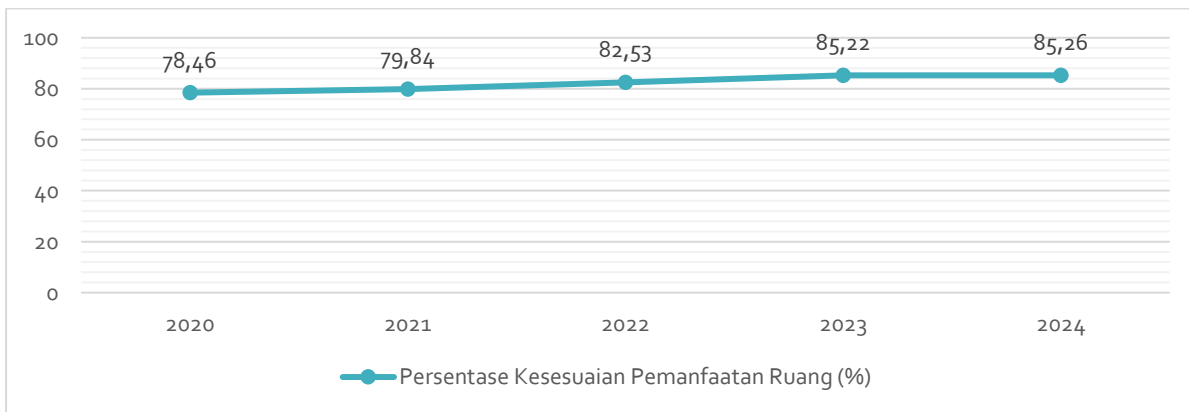
Penggunaan Lahan	Tahun 2013		Tahun 2023	
	Luasan (ha)	Persentase	Luasan (ha)	Persentase
Akomodasi dan Rekreasi	103,98	3,17	78,03	2,38
Fasilitas Kesehatan	31,52	0,96	30,87	0,94
Fasilitas Layanan Umum	22,29	0,68	12,38	0,38
Fasilitas Olahraga	18,16	0,55	3,83	0,12
Fasilitas Pemerintahan	89,25	2,72	76,15	2,32
Fasilitas Pendidikan	194,53	5,93	177,50	5,41
Fasilitas Peribadatan	23,29	0,71	8,96	0,27
Industri Non Pertanian	6,87	0,21	40,34	1,23
Industri Pertanian	7,46	0,23	3,50	0,11
Instalasi	3,71	0,11	0,30	0,01
Jalan	198,27	6,05	199,37	6,08
Jalan Arteri	2,23	0,07	2,23	0,07
Jalan Kolektor	74,09	2,26	74,11	2,26
Jalur Hijau	3,87	0,12	3,87	0,12
Kebun Binatang	18,82	0,57	16,34	0,50
Komplek Masjid Agung Kauman	2,52	0,08	2,52	0,08
Lapangan	9,82	0,30	6,36	0,19
Lembaga Usaha	14,78	0,45	26,27	0,80
Pasar	13,44	0,41	11,82	0,36
Pemukaman	37,19	1,13	37,17	1,13
Pemukaman Khusus	4,44	0,14	4,44	0,14
Perbengkelan	6,53	0,20	6,53	0,20
Perdagangan Khusus	13,63	0,42	13,63	0,42
Perdagangan Umum	294,81	8,99	279,28	8,52
Pergudangan	31,28	0,95	14,52	0,44
Perkantoran Swasta	28,08	0,86	19,32	0,59
Permukiman Kepadatan Sedang	76,48	2,33	123,12	3,76
Permukiman Kepadatan Tinggi	1669,24	50,92	1.665,10	50,79
Permukiman Khusus	28,78	0,88	28,78	0,88
Pertanian Tanah Basah	32,08	0,98	62,99	1,92
Pertanian Tanah Kering	24,62	0,75	75,51	2,30
Peternakan	0,17	0,01	0,17	0,01
Prasarana Transportasi	33,30	1,02	44,41	1,35
Rel Kereta Api	4,41	0,13	4,41	0,13
Semak Belukar	20,97	0,64	31,53	0,96
Taman Kota	13,41	0,41	8,81	0,27
Tanah Kosong	78,19	2,39	41,85	1,28
Tubuh Air/Sungai	29,29	0,89	29,31	0,89
Waduk/Embung	1,43	0,04	2,10	0,06

Penggunaan Lahan	Tahun 2013		Tahun 2023	
	Luasan (ha)	Persentase	Luasan (ha)	Persentase
Wisata Budaya	10,79	0,33	10,79	0,33
Total	3.278,03	100,00	3.278,54	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta 2025 – 2029, 2025

2.1.1.1.7. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis. Selain RTRW, Kota Yogyakarta juga memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai rencana tata ruang yang lebih rinci. Pembangunan yang dilakukan di Kota Yogyakarta harus sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam RTRW dan RDTR. Indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai tata ruang menunjukkan tingkat capaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan RTRW dan RDTR.



Gambar 2.3 Grafik Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Tata Ruang Kota Yogyakarta

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2025

Kesesuaian pemanfaatan tata ruang dari tahun 2023 ke 2024 hanya mengalami kenaikan 0,04%. Nilai kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2024 untuk pemanfaatan ruang yang diizinkan (I), diizinkan terbatas (T), diizinkan bersyarat (B), dan diizinkan terbatas bersyarat (TB) adalah sebesar 85,26% dan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang (klasifikasi X) adalah 1,22%, dengan disertai persentase luas jalan sebesar 11,95% dan sungai sebesar 1,57%.

Kemantren dengan kesesuaian pemanfaatan ruang yang paling tinggi adalah Kemantren Pakualaman sebesar 87,99%, sedangkan yang paling rendah adalah Kemantren Gedongtengen sebesar 81,56%. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang dominan di Kemantren Gedongtengen adalah pergudangan.

Meskipun indikator ini telah menunjukkan tren positif, namun sebagai upaya untuk memastikan bahwa tujuan penataan ruang dapat terwujud sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, jelas bahwa peningkatan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW menjadi salah satu kondisi yang harus terus diupayakan. Kondisi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW merupakan aspek yang penting karena akan berpengaruh pada kualitas lingkungan, aspek mitigasi bencana, termasuk mempengaruhi daya dukung dan daya tampung kawasan.

2.1.1.2. Peran Strategis dan Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan lingkup administratif, Pusat Kegiatan Nasional yang dimaksud dalam RTRW Nasional mencakup Kota Yogyakarta dan kabupaten lain sebagai Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), yaitu seluruh Kota Yogyakarta, Kapanewon Depok, sebagian Kapanewon Ngaglik, sebagian Kapanewon Mlati, sebagian Kapanewon Godean, sebagian Kapanewon Gamping, sebagian Kapanewon Ngemplak, sebagian Kapanewon Kasihan, sebagian Kapanewon Sewon, dan sebagian Kapanewon Banguntapan. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Yogyakarta berfungsi sebagai pusat kegiatan skala regional yang pelaksanaannya dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat layanan bagi masyarakat, seperti pusat transportasi darat, pusat pariwisata budaya, dan pusat permukiman perkotaan. Kawasan Perkotaan Yogyakarta tidak hanya melayani kegiatan skala regional tetapi juga lingkup beberapa provinsi, nasional, dan internasional.

Dalam konteks regional Jawa-Bali, Kota Yogyakarta memiliki posisi yang penting sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Beragam fungsi Kota Yogyakarta pada skala kewilayahan tersebut adalah:

1. Pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan.

Implikasi pada aspek tata ruang dari penetapan Kota Yogyakarta sebagai PKN adalah penetapan zonasi yang mendukung fungsi PKN sebagai “*research center*” dan menyediakan ruang yang mendukung fungsi tersebut.

2. Pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan

Implikasi penetapan pusat kegiatan ini terhadap tata ruang adalah Penetapan zona untuk pusat kegiatan industri kreatif mencakup rencana yang mendukung fungsinya dalam hal produksi, distribusi, dan layanan pariwisata yang berbasis pada “*business knowledge*”.

3. Pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Implikasi dari penetapan peran strategis ini terhadap tata ruang adalah terdapat kebutuhan untuk standarisasi dalam penyediaan ruang, layanan, dan sistem infrastruktur yang mendukung pusat perdagangan dan jasa tingkat internasional. Lahan, infrastruktur, dan aktivitas yang dikembangkan harus mengacu pada ketersediaan daya dukung dan daya tampung agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa dapat berkelanjutan.

4. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan

PKN Yogyakarta telah menjalankan perannya sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Namun, untuk mengintegrasikan beragam fungsi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka dalam hal tata ruang diperlukan rencana sistem zonasi yang mewadahi beragam pemanfaatan ruang tersebut. Selain itu, juga diperlukan penyesuaian untuk zonasi pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

5. Pusat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran (MICE).

Implikasi adanya pusat kegiatan ini terhadap tata ruang adalah perlunya penetapan zona-zona yang berdasarkan fungsinya mampu mewadahi MICE.

Kota Yogyakarta juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendorong kemajuan daerah, baik dari segi perekonomian, sosial, maupun kebudayaan. Pertama, Kawasan Balai Kota di Kemantren Umbulharjo merupakan pusat pelayanan kegiatan administrasi yang menjalankan beragam aktivitas di sektor tata kelola pemerintahan. Fungsi pusat pemerintahan yang strategis secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi struktur dan bentuk fisik perkembangan perkotaan.

Kedua, keberadaan kawasan Jalan Malioboro yang berlokasi di Kemantren Gondomanan merupakan pusat kegiatan perekonomian. Kawasan Jalan Malioboro merupakan salah satu ikon dan destinasi wisata populer dari Kota Yogyakarta dan menjangkau hingga lingkup layanan skala internasional. Oleh karena itu, kawasan Jalan Malioboro memiliki potensi pengembangan yang besar untuk mendorong perekonomian daerah dan masyarakat melalui perdagangan dan jasa maupun pariwisata.

Ketiga, Kawasan Kraton yang terletak di Kemantren Kraton dan Kawasan Pakualaman di Kemantren Pakualaman yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan budaya. Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai poin-poin keistimewaan yang salah satunya akan berimplikasi pada aspek tata ruang, khususnya berkaitan dengan Sumbu Filosofi yang membentang dari sisi utara Daerah Istimewa Yogyakarta hingga sisi selatan. Secara geografis, Kraton Yogyakarta dapat berperan sebagai pusat kebudayaan.

Di sisi lain, potensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dapat ditinjau dari aspek perwujudan sistem perkotaan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.

1. Perwujudan Sistem Perkotaan

a. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kota, meliputi:

- 1) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana rinci tata ruang Kota Yogyakarta; dan
- 2) pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi, dan penetapan rencana rinci tata ruang Kota Yogyakarta.

b. Penataan Bangunan dan Lingkungan, meliputi:

- 1) penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta; dan
- 2) penataan bangunan dan lingkungan.

c. Pembangunan Fasilitas Utama Perkotaan, meliputi:

- 1) pengembangan pusat pelayanan kegiatan administrasi kota, yang berlokasi di kawasan Balaikota, kantor Kemantren, dan kantor kelurahan;
- 2) pemantapan pusat pelayanan kegiatan perekonomian kota, yang berlokasi di Kawasan Malioboro dan Kawasan Jalan Solo; dan
- 3) pemantapan pusat pelayanan kegiatan sosial budaya, yang berlokasi di Kawasan Kraton dan Kawasan Pakualaman.

2. Perwujudan Sistem Transportasi

a. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:

- 1) penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan;
- 2) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder, yang berlokasi di Jalan Magelang, Jalan Kyai Mojo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan Bugisan, Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Bantul, Jalan Imogiri, Jalan Pramuka, Jalan Gambiran, Jalan Ngeksigondo, Jalan Gedong Kuning;
- 3) peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder; dan
- 4) pembangunan flyover, yang berlokasi di perlintasan rel KA sebidang di Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Mojo, dan Jalan Ipda Tut Harsono.

b. Pengembangan sistem jaringan kereta api, meliputi:

- 1) pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel;
- 2) pembangunan fasilitas *Park and Ride*;
- 3) pengembangan jaringan jalur ganda pada jalur regional dan nasional, yang terdiri atas:
 - (a) Jaringan jalur KA Yogyakarta–Surakarta–Madiun–Surabaya;
 - (b) Jaringan jalur Yogyakarta–Kutoarjo–Kroya–Purwokerto–Cirebon–Jakarta; dan
 - (c) Jaringan jalur KA Yogyakarta–Kutoarjo–Kroya–Bandung.
- 4) Pengembangan jaringan kereta komuter, yang terdiri atas:
 - (a) Jalur KA Yogyakarta–Wates–Kutoarjo; dan
 - (b) Jalur KA Yogyakarta–Klaten–Surakarta.
- 5) pengembangan jaringan kereta bandara;
- 6) pengembangan Stasiun Kereta Api Tugu dan Lempuyangan sebagai angkutan penumpang; dan
- 7) pengembangan stasiun kereta api dalam kota dan perkotaan.

3. Perwujudan Sistem Jaringan Energi

a. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

- 1) Pengembangan jaringan gas perkotaan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

b. Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:

- 1) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kemantren Gondokusuman;
- 2) penambahan gardu induk kota di Kemantren Wirobrajan;
- 3) penambahan gardu yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder;
- 4) peningkatan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik yang menjangkau seluruh kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, dan pusat kegiatan lainnya; dan

- 5) pengembangan sumber energi alternatif yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - a. Pengembangan sistem informasi, meliputi:
 - 1) pengembangan jaringan sistem informasi tata ruang dan pertanahan;
 - 2) pengembangan jaringan *wifi* pada lokasi pusat kegiatan masyarakat di bangunan-bangunan pelayanan publik, pusat-pusat kegiatan, dan RTH taman; dan
 - 3) pengembangan sistem jaringan informasi mendukung *smart city* Kota Yogyakarta.
 - b. Pengembangan jaringan tetap, meliputi:
 - 1) pemeliharaan jaringan *fixline*; dan
 - 2) penyediaan dan peningkatan layanan jaringan serat optik.
 - c. Pengadaan jaringan bergerak, meliputi:
 - 1) pengembangan dan penataan menara telekomunikasi.
 5. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - a. Pengembangan prasarana dan sarana sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku
 - b. Pengembangan sumber air permukaan, meliputi:
 - 1) peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya; dan
 - 2) peningkatan tampungan/resapan air dengan mengintegrasikan pemanfaatan ruang terbuka air (RTA) serta fungsi kegiatan wisata air, penataan lingkungan, konservasi, dan pengendalian banjir.
 - c. Pemeliharaan saluran irigasi teknis yang melewati Kota Yogyakarta
 6. Perwujudan Infrastruktur Perkotaan
 - a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - 1) Pengembangan SPAM jaringan perpipaan, meliputi:
 - (a) pengembangan jaringan perpipaan baru, yang berlokasi di Kemantren Kotagede, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Wirobrajan, dan Kemantren Umbulharjo;
 - (b) pemeliharaan jaringan perpipaan eksisting;
 - (c) pengembangan SPAM jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan Perdagangan dan Jasa; dan
 - (d) pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai secara terbatas.
 - 2) Pengembangan SPAM bukan perpipaan, meliputi:
 - (a) Pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai secara terbatas.
 - b. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
 - 1) Pengembangan jaringan SPAL domestik, meliputi:
 - (a) pemeliharaan jaringan SPAL domestik;

- (b) peningkatan cakupan jaringan SPAL domestik di Kemantren Gondokusuman, Kemantren Danurejan, dan Kemantren Mergangsan; dan
 - (c) pengembangan jaringan baru jaringan SPAL domestik di Kemantren Gondokusuman, Kemantren Kotagede, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Umbulharjo, dan Kemantren Wirobrajan.
- c. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3, meliputi:
- 1) pengembangan jaringan pembuangan limbah B3; dan
 - 2) pengelolaan awal limbah B3.
- d. Pengembangan jaringan persampahan kota, meliputi:
- 1) pengembangan sistem jaringan pelayanan sampah secara komunal;
 - 2) pengembangan sektor pelayanan persampahan di Sektor Gunungketur, Sektor Kotagede, Sektor Kranggan, Sektor Krasak, Sektor Malioboro, dan Sektor Ngasem Gading;
 - 3) peningkatan layanan TPS secara merata;
 - 4) pengembangan TPST;
 - 5) pengelolaan sampah setempat skala rumah tangga; dan
 - 6) penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah.
- e. Pengembangan jalur evakuasi bencana, meliputi:
- 1) pengembangan jalur evakuasi bencana lingkup kampung dan kota;
 - 2) pengembangan ruang evakuasi bencana; dan
 - 3) pembentukan Kampung Tangguh Bencana (KTB).
- f. Pengembangan sistem drainase, meliputi:
- 1) pengembangan jaringan primer di Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong;
 - 2) pengembangan jaringan sekunder; dan
 - 3) pengembangan drainase berkonsep infrastruktur hijau.
- g. Pengembangan jaringan pejalan kaki, meliputi:
- 1) pengembangan kawasan khusus pedestrian di Koridor Jalan Malioboro;
 - 2) pengembangan kawasan semi pedestrian di Koridor Jalan Urip Sumoharjo; dan
 - 3) pengembangan dan penyediaan *street furniture*.

2.1.1.3. Kondisi Ekoregion

2.1.1.3.1. Karakteristik Bentang Lahan

Secara umum, ekoregion bentang lahan di Kota Yogyakarta adalah dataran fluviiovulkanik yang merupakan bagian dari ekoregion bentang lahan vulkanik Gunung Merapi di sebelah utara. Adapun secara regional, Kota Yogyakarta secara keseluruhan berada pada bentang alam dataran fluviiovulkanik

bermaterial alluvium dengan vegetasi alami berupa vegetasi terna rawa air tawar (SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021).

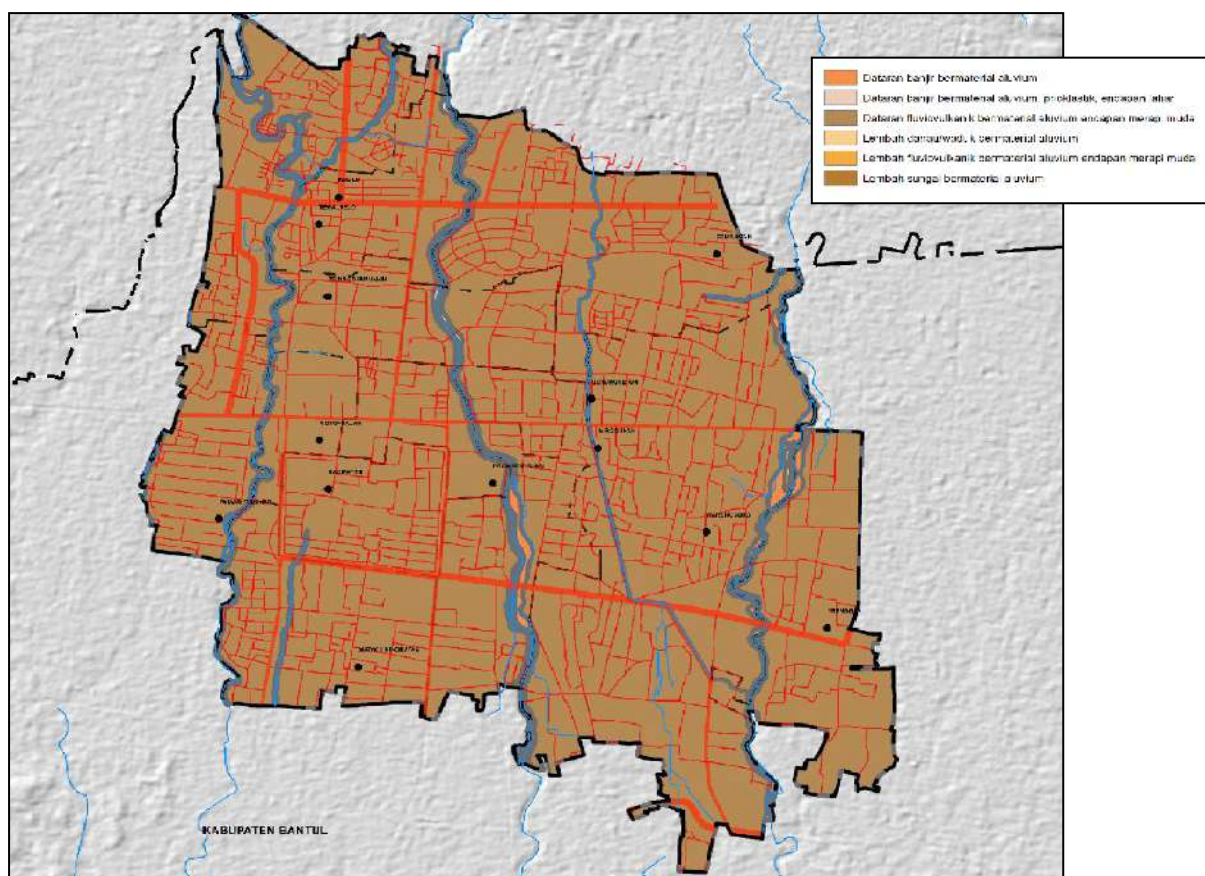
Pendekatan yang dilakukan dalam menentukan bentang lahan di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara interpretasi citra, analisis literatur, dan survei lapangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa Kota Yogyakarta memiliki ekoregion bentang lahan sebagaimana disampaikan pada tabel dan peta berikut.

Tabel 2.8 Ekoregion Bentang Lahan di Kota Yogyakarta

Ekoregion	Luasan (ha)	Persentase (%)
Dataran banjir bermaterial aluvium	89,76	2,74
Dataran banjir bermaterial aluvium, prioklastik, endapan lahar	19,75	0,60
Dataran fluviiovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda	141,34	4,31
Dataran fluviiovulkanik bermaterial aluvium merapi muda campuran	2.991,13	91,25
Lembah danau/waduk bermaterial aluvium	2,49	0,08
Lembah fluviiovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda	0,67	0,02
Lembah sungai bermaterial aluvium	32,90	1,00
Total	3.278,03	100,00%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, 2025

Dataran fluviiovulkanik bermaterial aluvium endapan merapi muda campuran merupakan bentang lahan dominan dengan luas mencapai 91% dari total wilayah. Sementara itu, berdasarkan pendetailan melalui analisis citra dan survei lapangan diketahui bahwa terdapat dataran banjir dan juga lembah. Bentang lahan berupa dataran banjir, lembah danau maupun lembah sungai merupakan bagian dari proses morfogenesis fluviiovulkanik karena aliran air berupa sungai-sungai yang mengalir Kota Yogyakarta. Bentang lahan Kota Yogyakarta dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 2.4 Peta Bentang Lahan Kota Yogyakarta

Sumb Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, 2024

2.1.1.3.2. Karakteristik Vegetasi Alami

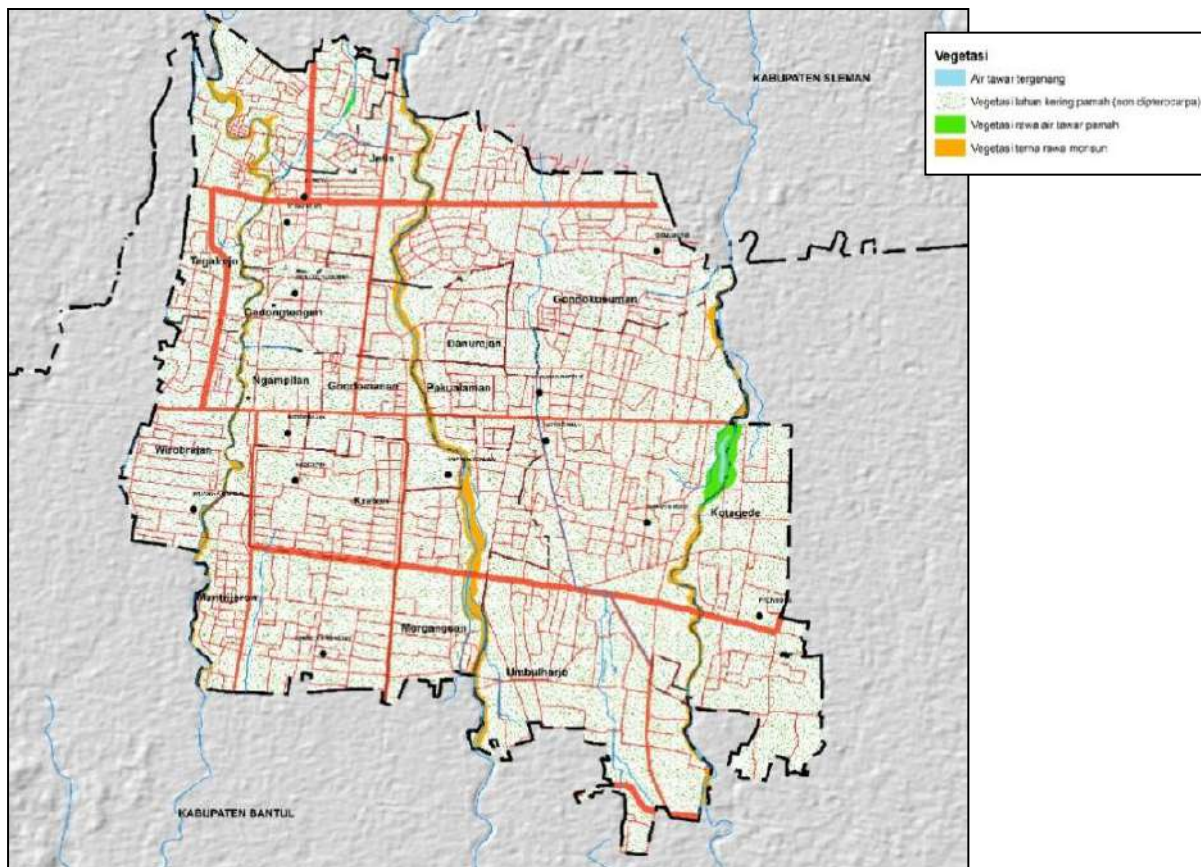
Tipe vegetasi merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam menentukan kondisi jasa lingkungan di Kota Yogyakarta. Vegetasi merupakan komponen atau aspek kedua yang menentukan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan. Komponen vegetasi dapat diartikan sebagai komunitas tumbuhan dalam lanskap yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Kota Yogyakarta secara alami memiliki tipe vegetasi berupa air tawar tergenang, vegetasi lahan kering pamah (non-dipterocarpa), vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan sedang, vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan tinggi, vegetasi terna rawa monsun, vegetasi terna rawa monsun kerapatan rendah, vegetasi terna rawa monsun kerapatan sedang, dan vegetasi terna rawa monsun kerapatan tinggi.

Adapun Kota Yogyakarta berada di ketinggian >100 meter sehingga tipe vegetasi yang dominan adalah vegetasi lahan kering pamah (non-dipterocarpa) yang mencakup 96% dari total keseluruhan wilayah. Vegetasi lahan kering pamah (non-dipterocarpa) sendiri merupakan komunitas tumbuhan yang tumbuh di geomorfologi dataran, perbukitan atau pegunungan yang terletak pada ketinggian di bawah 1000 m dari muka air laut dan berstatus kering, tidak becek, tidak basah, maupun tidak tergenang oleh air. Secara rinci, distribusi tipe vegetasi di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dan peta sebagai berikut.

Tabel 2.9 Tipe Vegetasi di Kota Yogyakarta

Vegetasi	Luas (Ha)	Persentase
Air tawar tergenang	16,62	0,51
Vegetasi lahan kering pamah (non dipterocarpa)	3.138,67	95,75
Vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan sedang	1,04	0,03
Vegetasi rawa air tawar pamah kerapatan tinggi	13,86	0,42
Vegetasi terna rawa monsun	3,60	0,11
Vegetasi terna rawa monsun kerapatan rendah	58,15	1,77
Vegetasi terna rawa monsun kerapatan sedang	43,96	1,34
Vegetasi terna rawa monsun kerapatan tinggi	2,14	0,07
Total	3.278,04	100%

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, 2025



Gambar 2.5 Peta Vegetasi Alami Kota Yogyakarta

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, 2024

2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.4.1. Daya Dukung Air

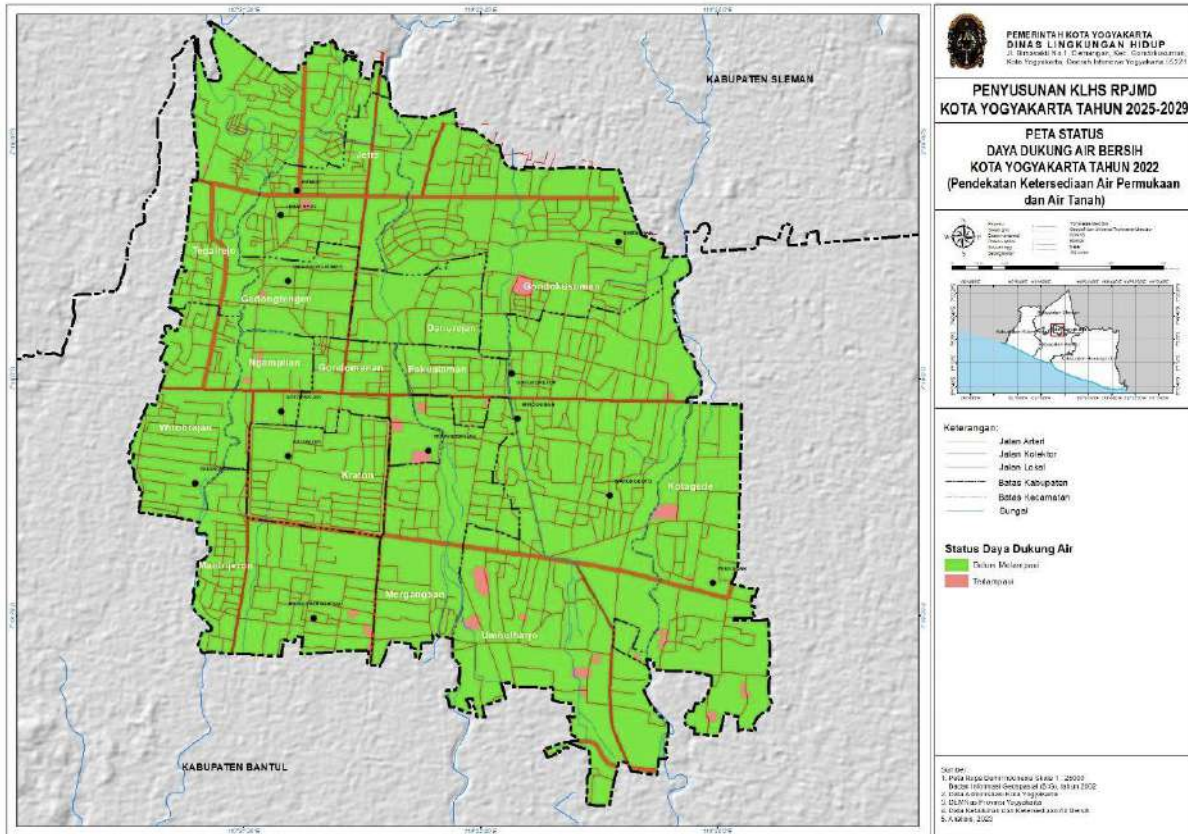
Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian, kelestarian air harus selalu dijaga karena air sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah.

Untuk menjaga kelestarian sumber daya air, dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menghemat penggunaan air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau ataupun tanah longsor dan banjir ketika musim hujan.

Berdasarkan hasil analisis antara ketersediaan air dan kebutuhan air Kota Yogyakarta pada dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, dapat diketahui status daya dukung air apakah sudah terlampaui atau belum melampaui. Menurut perhitungan, seluruh kemantren di Kota Yogyakarta masih memiliki status daya dukung air yang surplus, yang artinya ketersediaan air masih lebih banyak daripada kebutuhan air.

Surplus cadangan air yang masih tersisa dari ketersediaan air setelah dikurangi kebutuhan air Kota Yogyakarta mencapai 584,858,567.28 m³/tahun. Hal ini disebabkan karena berbagai macam faktor, antara lain karena Kota Yogyakarta berada di wilayah yang memiliki cadangan air tanah melimpah, yaitu berada di akuifer pada Cekungan Air Tanah Yogyakarta - Sleman yang meliputi dataran fluviovolkan hingga lereng Gunung Merapi di bagian utara. Hasil analisis pada dokumen KLHS RPJPD menunjukkan bahwa 99% wilayah di Kota Yogyakarta memiliki nilai status daya dukung air yang belum melampaui, dan hanya

sebesar 1% saja wilayahnya yang telah melampaui status daya dukung air tersebut.



Gambar 2.6 Peta Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2039, 2025

Tabel 2.10 Status Daya Dukung Air Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Jumlah Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Surplus/ Defisit (m ³ /tahun)	Status (Terlampai / Belum Terlampai)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
1	Danurejan	18.950	17.964.616,81	3.020.390,55	14.944.226,26	Belum	16.605	35.555
2	Gedongtengen	16.674	49.636.643,62	3.092.669,62	46.543.973,99	Belum	51.716	68.390
3	Gondokusuman	37.347	92.831.679,93	15.466.292,57	77.365.387,37	Belum	85.962	123.309
4	Gondomanan	12.941	55.561.494,39	7.760.436,04	47.801.058,36	Belum	53.112	66.053
5	Jetis	23.655	47.262.985,57	4.960.127,24	42.302.858,33	Belum	47.003	70.658
6	Kotagede	34.097	29.416.349,24	17.562.249,29	11.854.099,95	Belum	13.171	47.268
7	Kraton	18.244	44.109.797,66	2.848.733,67	41.261.063,99	Belum	45.846	64.090
8	Mantrijeron	34.146	53.499.867,04	7.914.260,91	45.585.606,13	Belum	50.651	84.797
9	Mergangsan	29.071	52.123.363,05	6.075.078,35	46.048.284,69	Belum	51.165	80.236
10	Ngampilan	15.535	42.416.479,64	4.455.158,65	37.961.320,99	Belum	42.179	57.714
11	Pakualaman	9.254	46.254.446,51	2.192.378,22	44.062.068,29	Belum	48.958	58.212
12	Tegalrejo	35.018	86.328.330,21	5.690.990,69	80.637.339,52	Belum	89.597	124.615
13	Umbulharjo	68.957	48.165.098,44	30.100.518,85	18.064.579,59	Belum	20.072	89.029
14	Wirobrajan	25.024	34.394.712,75	3.968.012,92	30.426.699,83	Belum	33.807	58.831
Kota Yogyakarta		378.913	699.965.864,84	115.107.297,56	584.858.567,28	Belum	649,843	1.028.756

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 2025

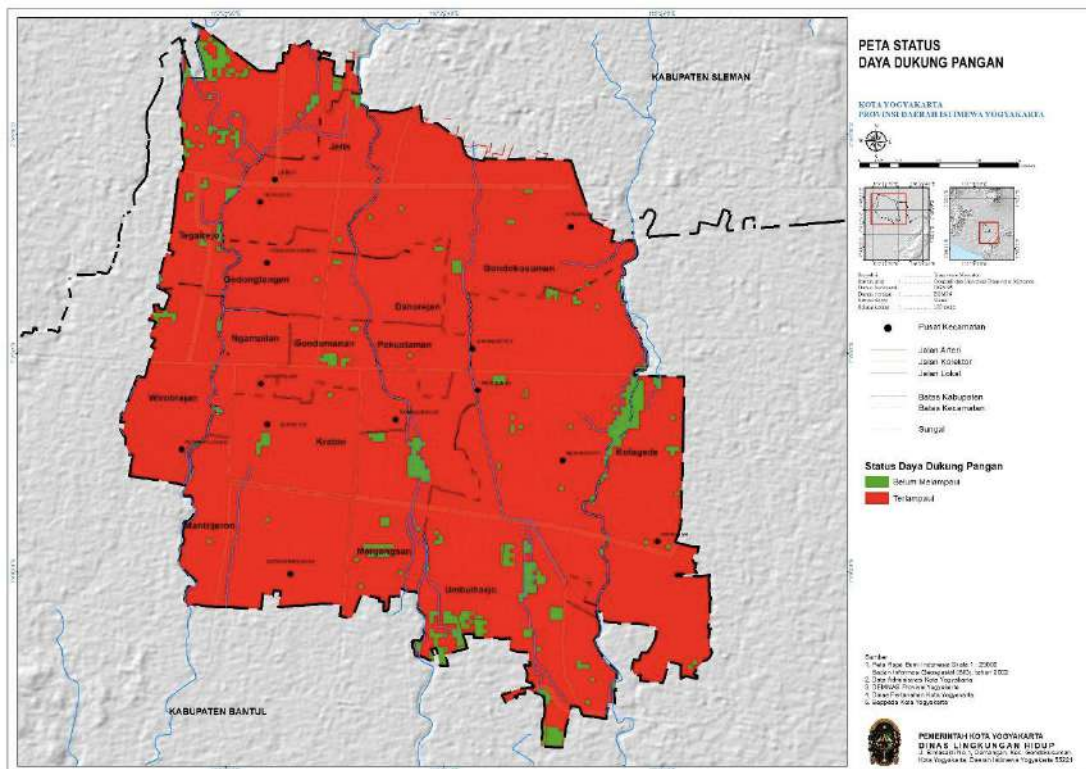
2.1.1.4.2. Daya Dukung Pangan

Ketersediaan pangan merupakan jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu daerah dalam waktu tertentu dalam bentuk natura maupun unsur gizinya dan dinyatakan dalam satuan kilo kalori per tahun (kkal/tahun). Ketersediaan pangan ditentukan berdasarkan data total produksi komoditas bahan pangan setempat yang dikonversi dalam satuan kkal per tahun.

Analisis daya dukung lahan tanaman pangan dihitung sesuai dengan pedoman Permen LH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah nilai produksi yang didapatkan dengan mengalikan jumlah produksi per komoditas dikalikan harga komoditas.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pangan pada dokumen KLHS RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, diketahui bahwa Kota Yogyakarta pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebesar 378.913 jiwa, sehingga kebutuhan pangannya adalah 290.436,814.500 kkal/tahun dengan asumsi kebutuhan energi sebesar 2.100 kkal/hari.

Hasil perhitungan status daya dukung pangan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa secara keseluruhan telah terlampaui. Hasil dari neraca antara kebutuhan pangan dengan ketersediaan pangan bernilai minus atau defisit. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan penduduknya secara mandiri, sehingga membutuhkan bahan pangan dari wilayah lain. Peta status daya dukung pangan diperoleh dari hasil analisis kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan berdasarkan sistem *grid*.



Gambar 2.7 Peta Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 2025

Tabel 2.11 Status Daya Dukung Pangan Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Jumlah Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Ketersediaan Pangan (kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)	Surplus/Defisit (kkal/tahun)	Status	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Daya Tampung Penduduk (Jiwa)
1	Mantrijeron	34.146	3.151.347.698	26,172,909,000	-23.021.561.302	Terlampau	3.924	3.924
2	Kraton	18.244	989.608.276	13,984,026,000	-12.994.417.724	Terlampau	1.232	1.232
3	Mergangsan	29.071	2.426.659.893	22,282,921,500	-19.856.261.607	Terlampau	3.022	3.022
4	Umbulharjo	68.957	10.923.645.198	52,855,540,500	-41.931.895.302	Terlampau	13.604	13.604
5	Kotagede	34.097	3.286.887.136	26,135,350,500	-22.848.463.364	Terlampau	4.093	4.093
6	Gondokusuman	37.347	2.263.633.386	28,626,475,500	-26.362.842.114	Terlampau	2.819	2.819
7	Danurejan	18.950	1.060.244.970	14,525,175,000	-13.464.930.030	Terlampau	1.320	1.320
8	Pakualaman	9.254	588.080.600	7,093,191,000	-6.505.110.400	Terlampau	732	732
9	Gondomanan	12.941	1.698.519.189	9,919,276,500	-8.220.757.311	Terlampau	2.115	2.115
10	Ngampilan	15.535	711.093.741	11,907,577,500	-11.196.483.759	Terlampau	886	886
11	Wirobrajan	25.024	2.124.634.073	19,180,896,000	-17.056.261.927	Terlampau	2.646	2.646
12	Gedongtengen	16.674	488.603.800	12,780,621,000	-12.292.017.200	Terlampau	608	608
13	Jetis	23.655	2.061.834.950	18,131,557,500	-16.069.722.550	Terlampau	2.568	2.586
14	Tegalrejo	35.018	5.418.219.677	26,841,297,000	-21.423.077.323	Terlampau	6.747	6.747
Kota Yogyakarta		378.913	37.193.012.587	290.436.814.500	-253,243,801,913	Terlampau	46.318	46.318

Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 2025

2.1.1.4.3. Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan permukiman di Kota Yogyakarta sebagian masih berada dalam status belum terlampaui, apabila dilihat dari perbandingan antara luas lahan permukiman yang tersedia dan jumlah penduduk saat ini. Namun, jika mempertimbangkan tren pertumbuhan penduduk serta tingginya angka migrasi risen, kebutuhan akan lahan permukiman diperkirakan akan terus meningkat. Migrasi risen sendiri—yakni penduduk yang berpindah tempat tinggal dalam lima tahun terakhir—di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 4,2%, dan Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan pariwisata diasumsikan mengalami tren yang serupa.

Peningkatan jumlah penduduk dan migrasi ini mendorong permintaan lahan permukiman yang semakin tinggi, sedangkan ketersediaan lahan bersifat terbatas. Berdasarkan proyeksi kebutuhan tahun 2030, rata-rata kebutuhan lahan permukiman diperkirakan sebesar 150 m² per rumah tangga. Angka ini belum mencakup kebutuhan untuk sarana dan prasarana lingkungan. Secara nominal, luas lahan permukiman mungkin masih mencukupi, tetapi dalam praktiknya terjadi ketimpangan dalam distribusi, kualitas, dan keterjangkauannya. Tekanan permintaan ini juga berimplikasi pada meningkatnya harga tanah, perluasan kawasan terbangun, dan berkurangnya ruang terbuka hijau—yang semuanya berdampak negatif pada kualitas lingkungan hunian.

Kondisi ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan aspek kesejahteraan. Akses terhadap permukiman yang layak semakin sulit dijangkau, terutama oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta mencapai 7,69%, meningkat 0,42% dari tahun sebelumnya. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, peningkatan kebutuhan lahan permukiman berisiko memperluas ketimpangan dan memperburuk kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, kawasan kumuh di Kota Yogyakarta masih cukup luas, yakni mencapai 94 hektar pada tahun 2021. Hal ini menjadi indikasi bahwa kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap hunian yang layak dan sehat, belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daya dukung lahan permukiman di Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, dinamika migrasi, dan meningkatnya daya tarik investasi di sektor hunian. Jika tidak dikelola secara berkelanjutan, hal ini dapat memicu krisis ketersediaan dan keterjangkauan permukiman, serta memperparah tekanan terhadap kualitas lingkungan kota.

Tabel 2.12 Analisis Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Yogyakarta Tahun 2030

No.	Kemantren	Luas Permukiman yang bisa dikembangkan (ha)	Jumlah Penduduk (2030)	Kepadatan Netto (jiwa/ha)	Jumlah KK (Asumsi 3 org/kk) 2030	Penduduk Migrasi Risen (4,1%)	Jml Kebutuhan Rumah(ha) 1 KK =60 m2	Luas Kaveling/ Rmh Maksimal (m2)*	Status (Terlampai<60m2), (belum terlampai>60m2)
1	Danurejan	88,27	19.012	215	6.337	8.712	52	101	Belum
2	Gedongtengen	80,08	17.786	222	5.929	7.665	46	104	Belum
3	Gondokusuman	298,27	39.022	131	13.007	17.169	103	174	Belum
4	Gondomanan	92,06	13.532	147	4.511	5.949	36	155	Belum
5	Jetis	132,64	26.024	196	8.675	10.874	65	122	Belum
6	Kotagede	248,53	35.626	143	11.875	15.675	94	159	Belum
7	Kraton	141,72	19.322	136	6.441	8.387	50	169	Belum
8	Mantrijeron	237,38	35.678	150	11.893	15.697	94	151	Belum
9	Mergangsan	203,34	30.399	149	10.133	13.364	80	152	Belum
10	Ngampilan	70,68	16.232	230	5.411	7.142	43	99	Belum
11	Pakualaman	54,9	9.669	176	3.223	4.254	26	129	Belum
12	Tegalrejo	231,08	36.589	158	12.196	16.098	97	144	Belum
13	Umbulharjo	596,89	72.05	121	24.017	31.7	190	188	Belum
14	Wirobrajan	143,65	26.043	181	8.681	11.504	69	125	Belum
	Total	2619,49	396.984	152	132.328	174.19	1.045	150	Belum

Keterangan: * Menggunakan kaveling minimum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Angka migrasi risen ini diasumsikan memiliki sebaran merata di Kota Yogyakarta.

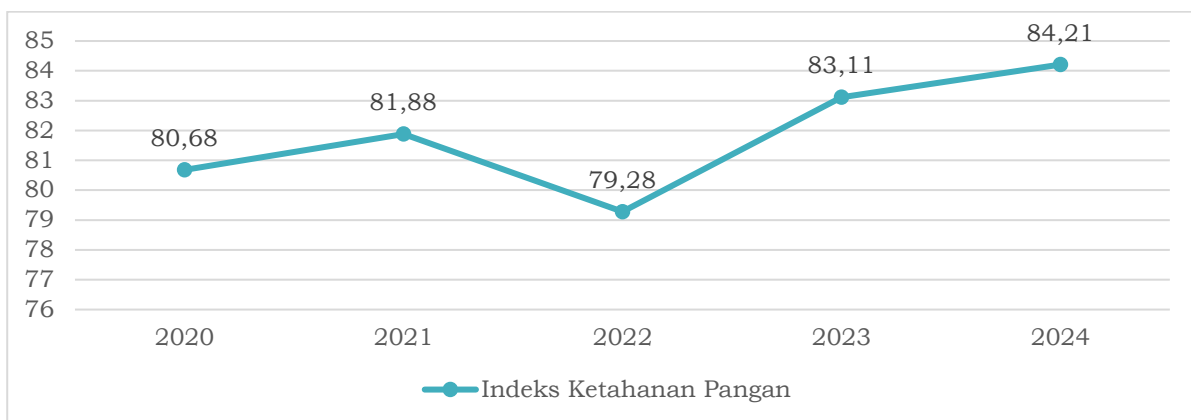
Sumber: KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, 2025

2.1.1.5. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

2.1.1.5.1. Indeks Ketahanan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai capaian ketahanan pangan dan gizi daerah. Penyusunan Indeks Ketahanan Pangan menggunakan tiga aspek ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Semakin besar nilai Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan daerah tersebut paling tahan pangan, sebaliknya semakin kecil nilai Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan bahwa daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.



Gambar 2.8 Grafik Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, nilai Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta cenderung fluktuatif meskipun dalam rentang nilai yang relatif tidak signifikan. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Pangan tercatat sebesar 80,68 sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 84,21. Apabila dilihat lebih rinci berdasarkan komponen penentu indeks ketahanan pangan, aspek keterjangkauan dan pemanfaatan menjadi aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasi nilai Indeks Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta selama ini.

2.1.1.5.2. Konsumsi Listrik per Kapita

2.1.1.5.3. Kapasitas Air Baku

Sistem penyediaan air minum di Kota Yogyakarta didukung oleh sumber air baku utama yang dikelola oleh PDAM Tirtamarta. Sistem penyediaan air tersebut memanfaatkan beberapa sumber air baku, yaitu Mata Air Umbul Wadon dan Karanggayam I, Sungai Padasan, sumur dalam, dan sumur dangkal yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Total kapasitas dari air baku yang terpasang mencapai 571,43 liter/detik dan kapasitas produksi air baku mencapai 479,95 liter/detik. Sejak tahun 2021, PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta memperoleh tambahan suplai air baku sebesar 400 liter per detik. Tambahan suplai air baku tersebut didapatkan dari terbitnya perjanjian kerjasama jual beli air bersih antara PDAM Tirtatama DIY dan Perumda PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta.

Tabel 2.13 Kapasitas Terpasang dan Kapasitas Produksi Air Baku PDAM Tirtamarta untuk Kota Yogyakarta Tahun 2020

No.	Lokasi	Kapasitas	
		Terpasang (l/detik)	Produksi (l/detik)
I	SUNGAI	46,48	46,48
1.	Padasan	46,48	46,48
II	MATA AIR	89,88	77,45
2.	Umbul Wadon	63,77	58,67
3.	Kr. Gayam I. List.	26,11	18,78
III	GRAVITASI	60,05	51,90
4.	Sumur Bedoyo	17,66	17,60
5.	Sumur Besi I	25,12	23,30
6.	Sumur Besi II	17,72	0,00
IV	SUMUR DANGKAL	79,78	61,22
7.	Sumur Candi	7,15	6,30
8.	Sumur Bulusan	4,09	0,18
9.	Sumur Jongkang	23,47	20,39
10.	Sumur Nandan List.	7,17	6,83
11.	Smr Kr. Gayam II	0,00	0,00
12.	Smr Kr. Gayam III	9,09	9,04
13.	Smr Kr. Gayam IV	4,49	4,49
14.	Sumur Kr. Wuni List	6,90	0,00
15.	Sumur Bener. 4	4,57	5,25
16.	Sumur Bener. 3	5,30	2,95
17.	Sumur Kentungan Utara	7,55	5,79
V	SUMUR DALAM	294,79	248,50
18.	Sumur K. 1	4,32	1,17
19.	Sumur K. 3	10,57	8,60
20.	Sumur K. 4	3,24	2,63
21.	Sumur K. 5	7,98	7,14
22.	Sumur K. 6	3,89	3,93
23.	Sumur B. 1	4,62	4,75
24.	Sumur B. 2	4,69	4,67
25.	Sumur B. 3	5,56	3,06
26.	Sumur B. 4	10,42	11,35
27.	Sumur B. 5	3,02	2,82
28.	Sumur B. 6	9,94	7,62
29.	Sumur B. 7	3,64	2,38
30.	Sumur B. 8	6,89	6,42
31.	Sumur B. 9	5,46	4,66
32.	Sumur B. 10	14,59	13,40
33.	Sumur B. 11	6,24	4,49
34.	Sumur B. L	1,96	1,96

No.	Lokasi	Kapasitas	
		Terpasang (l/detik)	Produksi (l/detik)
35.	Sumur B. 13	6,03	3,61
36.	Sumur B. R1	17,13	14,95
37.	Sumur B. R2	15,17	9,35
38.	Sumur N. 3	8,52	7,25
39.	Sumur N. 4	7,50	8,27
40.	Sumur N. 5	1,80	2,86
41.	Sumur N. 6	10,18	10,18
42.	Sumur N. 7	6,83	5,30
43.	Sumur N. 8	0,00	0,00
44.	Sumur N. 9	6,90	5,73
45.	Sumur N. 10	16,16	17,83
46.	Sumur Gemawang. 1	2,60	2,50
47.	Sumur Gemawang. 2	7,89	8,10
48.	Sumur Gemawang. 3	15,33	8,24
49.	Sumur A & G	23,50	16,27
50.	Sumur Kd. 1	5,16	5,83
51.	Sumur Kd. 2	9,74	7,86
52.	Sumur Pengok. 1	13,68	11,50
53.	Sumur Pengok. 2	5,64	4,86
54.	Sumur Bener. 1	4,87	3,94
55.	Sumur Bener. 2	3,13	3,02
	JUMLAH	571,43	479,95

Sumber: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, 2021

Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Penyediaan Air Minum Kota Yogyakarta tahun 2022-2050, terdapat 55 sumber air baku yang dimanfaatkan oleh PDAM Tirtamarta untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kota Yogyakarta.

2.1.1.6. Kualitas Lingkungan Hidup

2.1.1.6.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada periode waktu tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dihitung dengan menggabungkan tiga komponen indeks, meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Aspek yang mendorong kenaikan IKLH pada tahun 2024 adalah analisis hasil laboratorium parameter pemantauan kualitas air dan udara tahun 2024 yang menunjukkan kenaikan. Selain itu, terdapat kenaikan IKTL pada tahun 2024 ini terjadi karena naiknya luasan tutupan vegetasi sebanyak sekitar 5 Ha. Dari kenaikan luasan tutupan vegetasi tersebut, mampu menaikkan IKL sekitar 0,1 point.

Tabel 2.14 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	55,64	59,78	60,89	52,05	55,53

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

2.1.1.6.2. Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman

Sanitasi yang aman dalam rumah tangga berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dengan mencegah pencemaran air, tanah, dan udara. Pengelolaan limbah domestik yang baik, seperti sistem pembuangan limbah yang tertutup dan tidak mencemari sumber air, dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit serta menjaga ekosistem tetap sehat.

Selain itu, sanitasi yang memadai juga membantu mengurangi emisi gas berbahaya dari limbah organik yang membusuk, sehingga berkontribusi pada udara yang lebih bersih. Berikut adalah cakupan sanitasi layanan sanitasi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.15 Cakupan Layanan Sanitasi di Kota Yogyakarta 2020-2024

Akses Layanan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Aman	%	28,02	35,05	37,75	39,74	43,67
	KK	38.757	42.928	46.727	49.532	53.967
Akses Layak Tidak Termasuk Aman	%	70,57	63,91	61,17	59,18	55,24
	KK	97.631	78.279	75.718	73.764	68.272
Akses Belum Layak	%	1,41	1,05	1,09	1,08	1,09
	KK	1.954	1.285	1.346	1.346	1.346
Tidak Ada Akses	%	0	0	0	0	0
	KK	0	0	0	0	0
Jumlah Cakupan Layanan Sanitasi	%	100	100,01	100	100	100
	KK	138.342	122.492	123.791	124.642	123.585

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, 2025

Secara umum, rumah tangga dengan cakupan akses sanitasi aman setiap tahun mengalami peningkatan, meskipun masih di bawah 50%. Peningkatan persentase untuk Akses Aman mengalami dan penurunan Akses Layak Tidak Termasuk Aman disebabkan oleh adanya pekerjaan pembangunan sambungan rumah (SPALD-T) dimana pekerjaan tersebut mengganti akses sanitasi layak dari tanki septik individual (SPALD-S) menjadi akses sanitasi aman sambungan rumah (SPALD-T) yang disalurkan ke riol kota.

2.1.1.6.3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah memiliki kaitan erat dengan kualitas lingkungan hidup, karena jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari air, tanah, dan udara, serta meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, persentase pengurangan sampah melalui metode 3R di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi yang cukup signifikan.

Pada 2020, sekitar 26,07% sampah berhasil dikurangi, tetapi persentasenya menurun drastis pada 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 13,54% dan 12,9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah sempat mengalami kendala, yang kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, atau dampak pandemi yang

menghambat program lingkungan. Namun, pada 2023 dan 2024 terjadi peningkatan yang signifikan, dengan persentase pengurangan sampah mencapai 36,75% dan 50,03%, yang menunjukkan perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah.

Kenaikan signifikan pada 2024 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, perluasan program 3R seperti bank sampah dan pusat daur ulang, serta kebijakan pemerintah yang lebih efektif dalam mendorong pengurangan sampah. Selain itu, adanya peningkatan jumlah sampah yang berhasil dikelola pada 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa infrastruktur dan fasilitas pengolahan sampah mulai berfungsi lebih optimal. Tren ini menjadi indikator positif bagi kualitas lingkungan hidup, karena semakin banyak sampah yang dikelola dengan baik, maka semakin berkurang potensi pencemaran lingkungan, sehingga menciptakan kondisi yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Tabel 2.16 Persentase Jumlah Sampah yang Berkurang Melalui 3R di Kota Yogyakarta

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan	94,06	40,46	38,84	110,45	150,38
Total timbulan sampah	360,79	298,87	301,06	300,56	300,56
Persentase Jumlah Sampah yang Berkurang Melalui 3R	26,07	13,54	12,9	36,75	50,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

2.1.1.7. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.7.1. Indeks Risiko Bencana

Kota Yogyakarta memiliki potensi terhadap kejadian bencana, antara lain bencana banjir, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan penyebaran wabah penyakit setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2020-2024, tercatat bahwa jenis kejadian bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem.

Untuk mengukur tingkat risiko bencana berdasarkan riwayat kebencanaan yang telah terjadi serta menimbulkan kerugian maka digunakan Indeks Risiko Bencana (IRB).

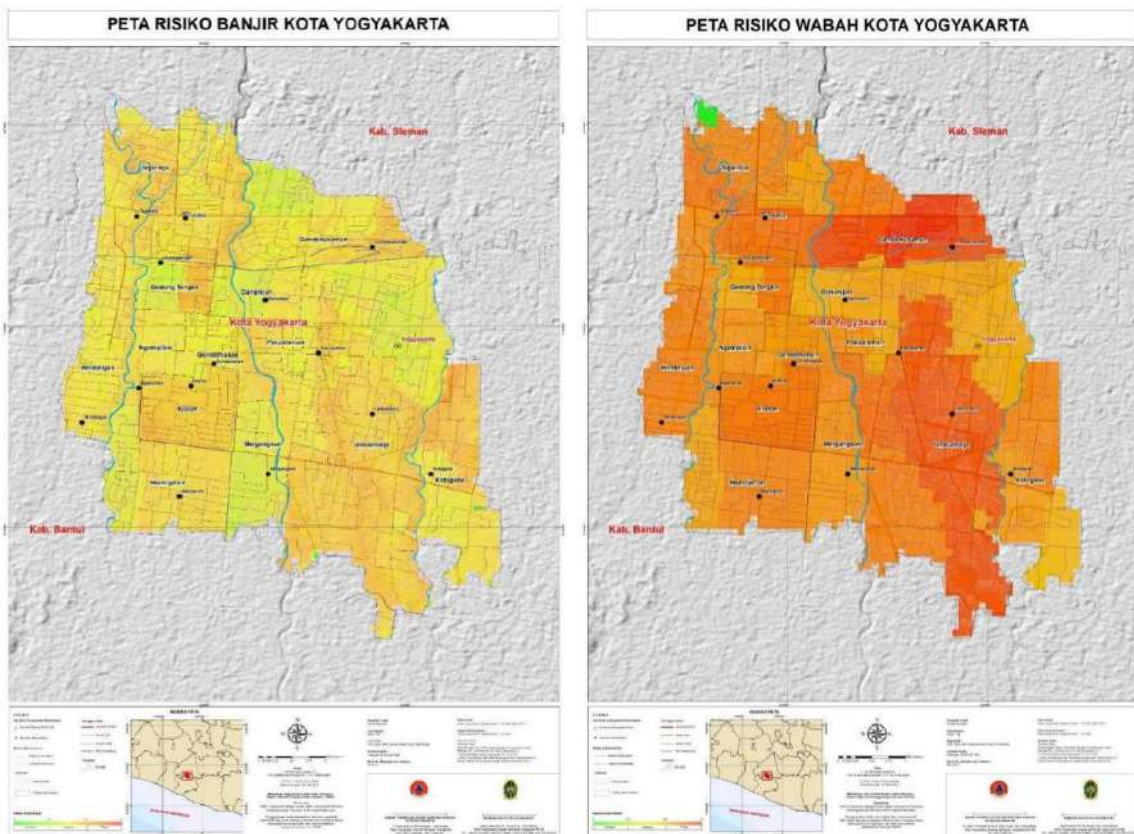
Dalam penghitungannya, IRB terdiri dari komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, nilai IRB akan berubah apabila tiga komponen tersebut mengalami peningkatan atau penurunan sebagai akibat dari program/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan ataupun meningkatkan kapasitas. IRB selama ini dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan program pencegahan ataupun penanggulangan bencana.

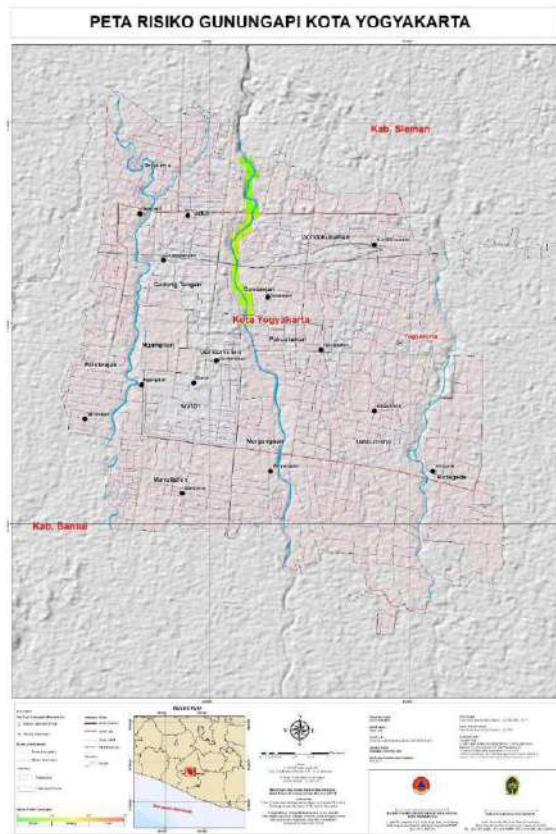
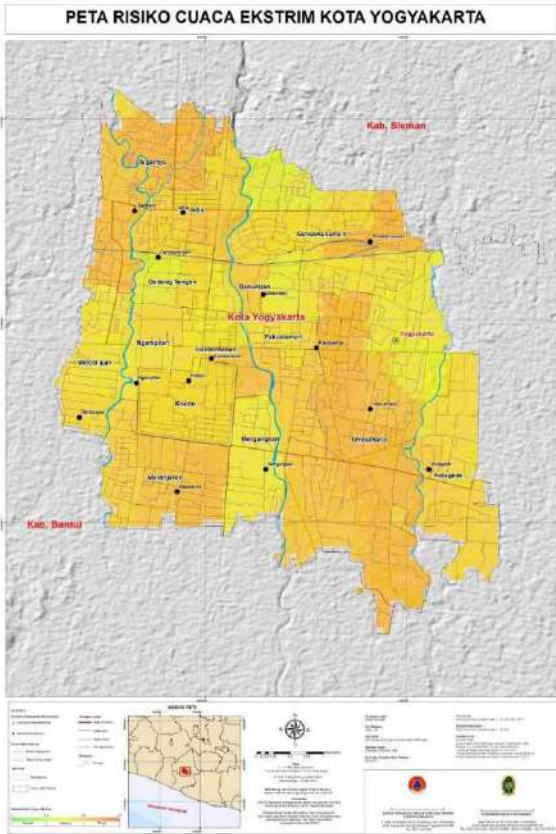
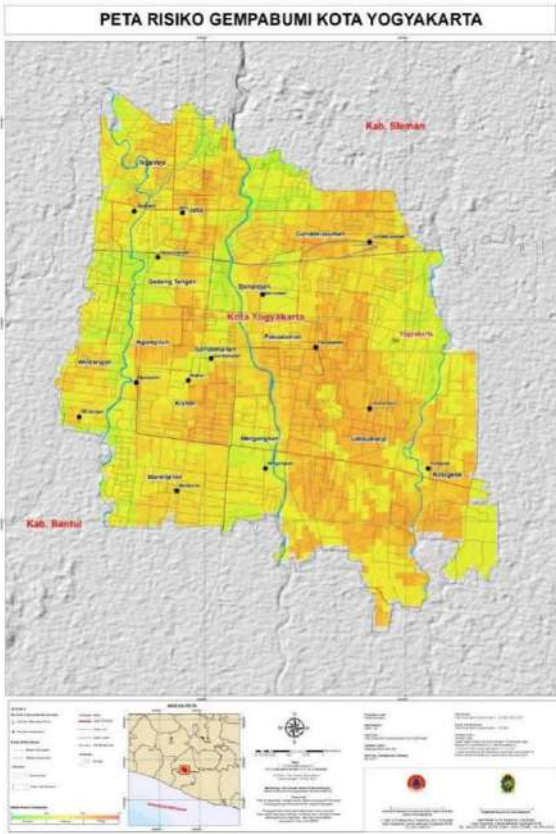
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta 2022 – 2026 terdapat 7 jenis potensi ancaman yang ada di Kota Yogyakarta meliputi banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan meteorologi dan letusan gunung api dengan gambaran risiko sebagai berikut:

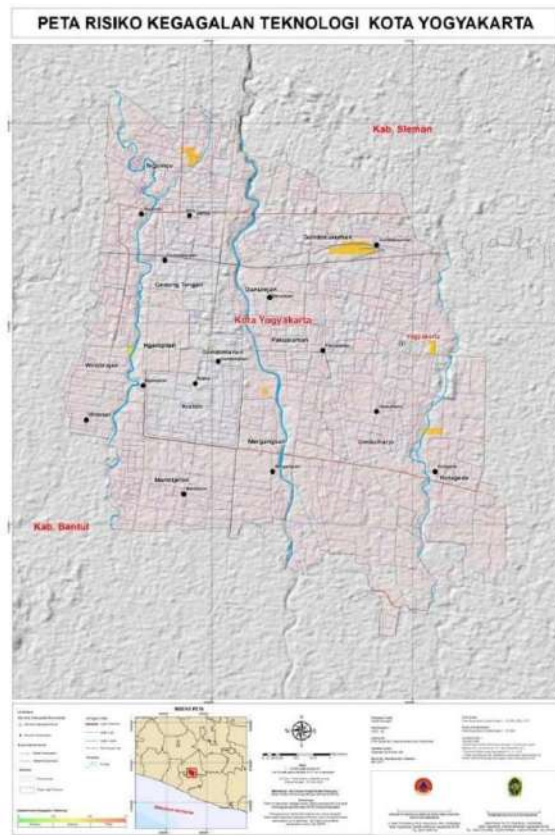
1. Kota Yogyakarta memiliki potensi risiko bencana banjir yang tinggi. Banjir tersebut terjadi karena sungai tidak mampu menampung volume air yang melimpah sehingga terjadi limpasan air. Risiko banjir yang tinggi juga

dipicu oleh aktivitas manusia seperti rusaknya bangunan pengendali banjir, sampah yang menyumbat aliran air, penebangan vegetasi di bantaran sungai, serta permukiman padat penduduk di sepanjang aliran sungai. Sementara itu, secara alamiah banjir juga dapat disebabkan karena erosi di bagian hulu, sedimentasi, dan curah hujan yang tinggi.

2. Potensi risiko bencana wabah penyakit dan cuaca ekstrem Kota Yogyakarta termasuk ke dalam tingkat risiko sedang. Hal tersebut tidak lepas dari tingginya kelas kapasitas sehingga mampu mengimbangi kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi.
3. Kota Yogyakarta berada pada daerah rawan bencana gempa bumi, namun potensi risiko bencana gempa bumi berada pada kategori sedang. Hal tersebut karena kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi diimbangi dengan kelas kapasitas yang tinggi pula sehingga dapat menekan risiko bencana yang muncul.
4. Kekeringan meteorologi berpotensi menyebabkan krisis air yang akan berdampak bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dan memberikan kerugian yang besar dalam berbagai sektor. Tingkat risiko bencana kekeringan meteorologi di Kota Yogyakarta berstatus sedang. Bencana tersebut umumnya terjadi karena musim kemarau dan penggunaan air tanah dangkal yang berlebihan.
5. Potensi risiko letusan gunung api di Kota Yogyakarta berada pada tingkat risiko rendah. Dampak letusan gunung api di Kota Yogyakarta adalah banjir lahar dingin dengan aliran ke arah sungai yang disebabkan letusan Gunung Merapi.
6. Potensi risiko bencana kegagalan teknologi di Kota Yogyakarta termasuk ke dalam level risiko sedang. Kegagalan teknologi merupakan seluruh kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.



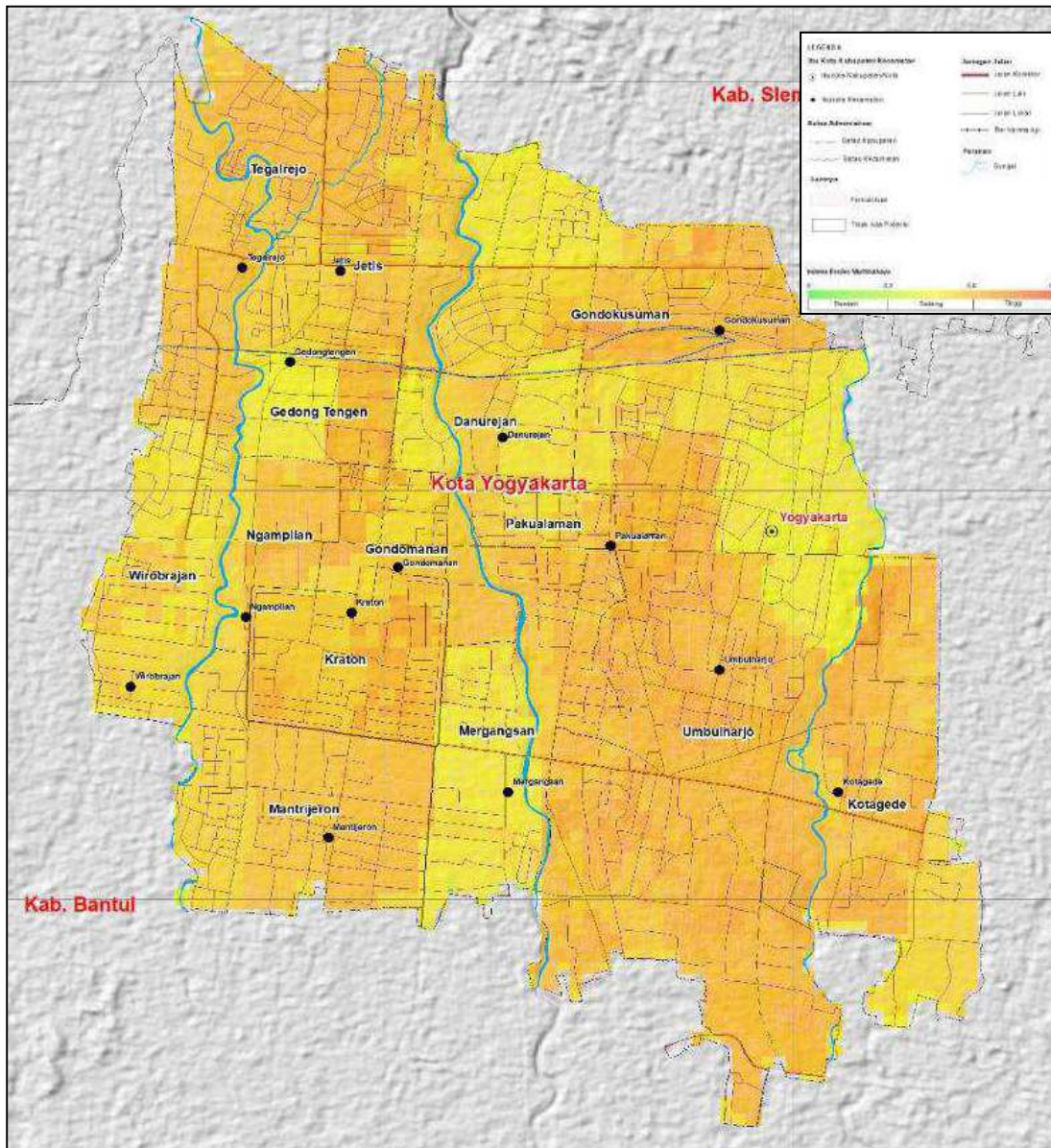




Gambar 2.9 Peta Risiko Untuk Setiap Jenis Bencana

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026, 2025

Analisis risiko bencana untuk multi bahaya di Kota Yogyakarta berada pada tingkat sedang. Meskipun kelas bahaya dan kerentanan berada pada level kelas tinggi, namun kelas kapasitas juga termasuk ke dalam kelas tinggi. Sehingga sesuai dengan rumus risiko bencana, hasil perhitungan tingkat risiko bencana menjadi dapat ditekan.



Gambar 2.10 Peta Risiko Multi Bahaya Kota Yogyakarta

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026, 2025

Data IRB Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan penurunan selama lima tahun terakhir. Rata-rata penurunan nilai IRB adalah sebesar -3,11% per tahun. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana di Kota Yogyakarta sudah berjalan secara baik dan perlu untuk terus dijaga konsistensinya, terutama yang berkaitan dengan kapasitas pemerintah.

Tabel 2.17 Indeks Risiko Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	indeks	72,86	72,57	69,46	66,62	64,22

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghadapi bencana ataupun situasi darurat. Indeks Ketahanan Daerah dihitung dengan beberapa tolak ukur, meliputi (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, pada tahun 2022 hingga 2024, besar capaian Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta berturut-turut adalah 0,65; 0,67; dan 0,69. Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Daerah bermakna bahwa semakin baik pula upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan daerah adalah melalui penyusunan peta kawasan rawan bencana. Dengan adanya informasi lokasi rawan bencana, akan memberikan manfaat positif untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan dini masyarakat khususnya di wilayah rawan bencana. Secara rinci, capaian Indeks Ketahanan Daerah di tahun 2024 untuk setiap indikator ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18 Indeks Ketahanan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Indikator	Tahun 2024
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,93
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,77
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,70
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,68
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,68
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,45
Indeks Ketahanan Daerah		0,69

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, 2025

2.1.1.8. Demografi

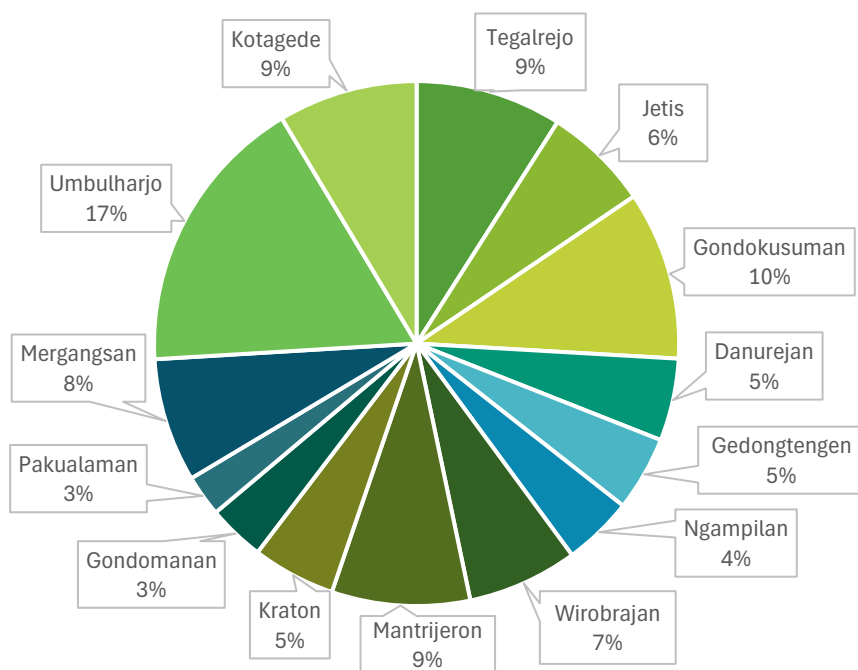
Aspek demografi merupakan bagian penting dari pengkajian terkait populasi penduduk yang mencakup berbagai elemen yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami karakteristik dari populasi penduduk di suatu wilayah.

Aspek demografi mencakup berbagai faktor yang berpengaruh terhadap struktur dan komposisi penduduk sehingga dapat memberikan gambaran pengetahuan yang digunakan sebagai acuan pertimbangan dalam pembangunan wilayah di masa yang akan datang. Aspek demografi dalam pembahasannya akan dijabarkan ke dalam beberapa poin pokok meliputi jumlah, laju pertumbuhan, komposisi berdasarkan kategori tertentu, kepadatan, dan proyeksi penduduk.

2.1.1.8.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk mengacu pada total individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk adalah salah satu elemen dari aspek demografi yang penting dan memberikan gambaran tentang ukuran populasi suatu wilayah. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2024 yaitu sebanyak 415.605 jiwa yang tersebar di 14 kemantren.

Sebaran jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kemantren Umbulharjo sebanyak 72.203 jiwa atau 17%, sedangkan jumlah paling sedikit terdapat di wilayah Kemantren Pakualaman sebanyak 10.592 jiwa atau 3% dari keseluruhan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.11 Distribusi Persentase Penduduk Per Kemantren Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2024; Hasil Olahan, 2025

Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2020-2024

No.	Kemantren	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tegalrejo	37.375	37.391	37.198	37.437	37.486
2.	Jetis	27.381	27.286	26.976	27.088	27.016
3.	Gondokusuman	43.141	43.179	42.752	43.051	43.214
4.	Danurejan	21.390	21.383	21.109	21.153	21.093
5.	Gedongtengen	19.886	19.683	19.260	19.213	19.141
6.	Ngampilan	18.483	18.285	18.075	18.071	17.925
7.	Wirobrajan	28.084	27.957	27.863	28.106	28.271
8.	Mantrijeron	35.633	35.469	35.188	35.222	35.398
9.	Kraton	21.905	21.755	21.510	21.460	21.325
10.	Gondomanan	14.990	14.869	14.725	14.702	14.590
11.	Pakualaman	10.731	10.657	10.549	10.622	10.592
12.	Mergangsan	32.013	31.875	31.584	31.665	31.697
13.	Umbulharjo	70.538	71.012	70.937	71.558	72.203
14.	Kotagede	34.567	34.708	35.071	35.357	35.654
Kota Yogyakarta		416.117	415.509	412.797	414.705	415.605

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

Adanya dinamika jumlah penduduk dipengaruhi faktor mutasi penduduk, baik migrasi masuk, migrasi keluar, kelahiran, dan kematian. Pada tahun 2024, peningkatan jumlah penduduk disebabkan adanya penurunan pada seluruh aspek tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.19 Dinamika Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024

No.	Dinamika Pertumbuhan Penduduk	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Lahir	7624	3658	3364	3275

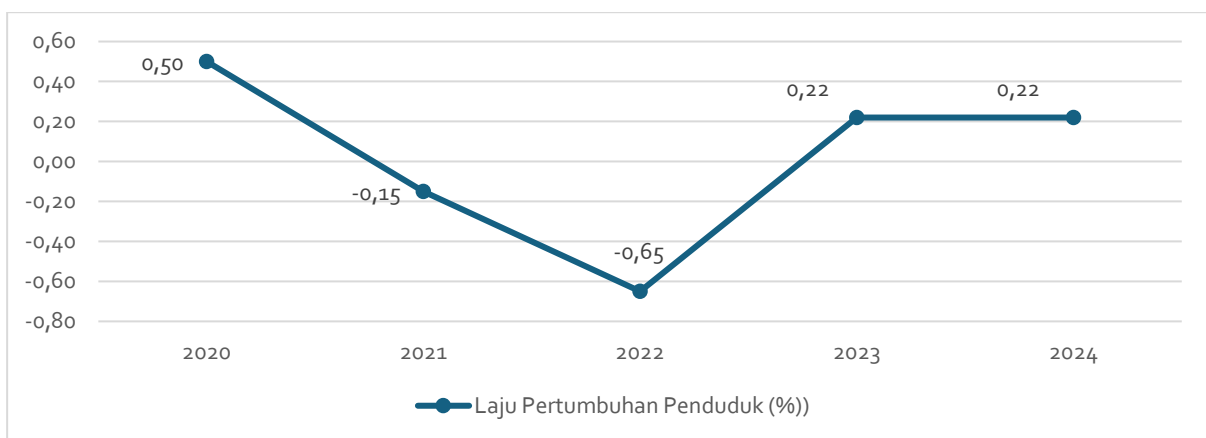
2.	Mati	9097	3733	3341	3065
3.	Datang	17309	9834	7892	7296
4.	Pergi	19594	10968	7543	7446

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

2.1.1.8.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk mengacu pada perubahan jumlah total penduduk di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kebutuhan dasar penduduk.

Tren pertumbuhan penduduk yang menunjukkan kondisi penurunan yang berarti jumlah penduduk Kota Yogyakarta relatif mengalami pertumbuhan yang lambat. Penurunan jumlah penduduk dapat disebabkan kematian ataupun migrasi ke luar serta validasi data sensus penduduk seperti yang telah dijelaskan pada tabel 2.21.



Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

2.1.1.8.3. Komposisi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Sex ratio mengacu pada perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi penduduk. *Sex ratio* dinyatakan dalam bentuk perbandingan jumlah laki-laki per 100 perempuan. Angka perbandingan ini digunakan untuk menilai keseimbangan gender dalam suatu populasi penduduk dan dapat memberikan pengetahuan tentang dinamika demografi, kesehatan, dan sosial ekonomi.

Tabel 2.20 Sex Ratio Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	2020	203.072	213.045	416.117	95,32
2.	2021	202.575	212.934	415.509	95,14
3.	2022	201.198	211.599	412.797	95,08
4.	2023	202.062	212.643	414.705	95,02
5.	2024	202.478	213.127	415.605	95,00

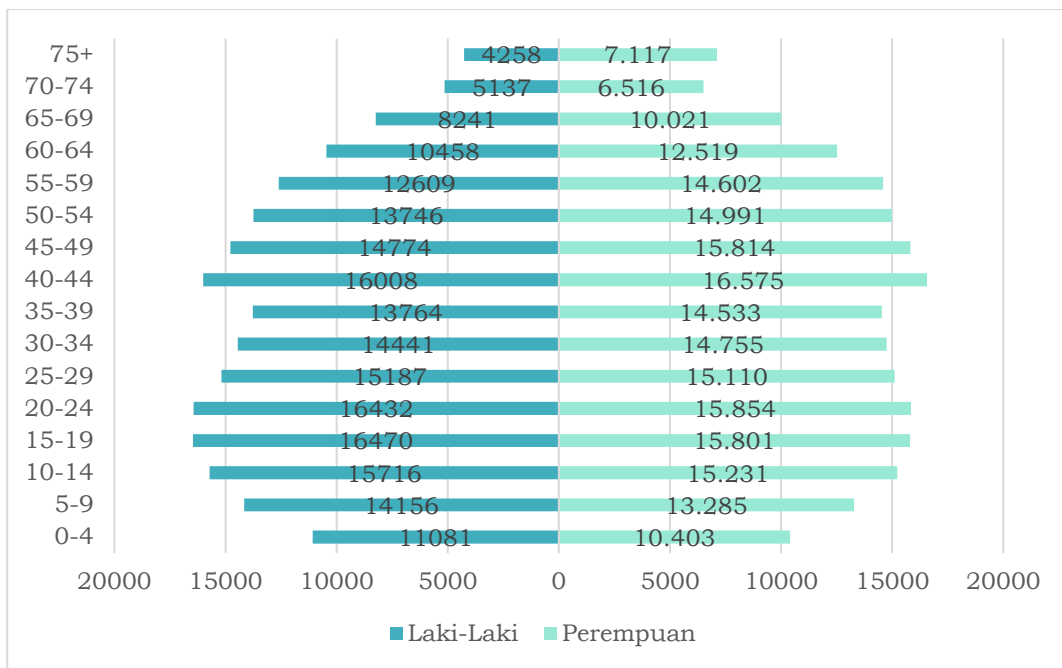
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

Pada tahun 2020-2024, *sex ratio* menunjukkan angka 95 koma sekian yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki. Adanya penurunan pada jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, dapat dipengaruhi karena faktor kematian dan migrasi ke luar.

2.1.1.8.4. Komposisi Penduduk berdasarkan Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur mengacu pada distribusi jumlah penduduk dalam suatu populasi berdasarkan kelompok umur yang berbeda. Komposisi atau struktur penduduk menurut kelompok umur disajikan dalam bentuk piramida penduduk yang menunjukkan proporsi relatif dari setiap kelompok umur dalam suatu populasi di wilayah tertentu. Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat memberikan informasi penting tentang komposisi demografis suatu populasi dan memberikan pengetahuan tentang berbagai aspek pembangunan.

Berdasarkan data tahun 2024 menunjukkan bahwa struktur piramida penduduk di Kota Yogyakarta berbentuk piramida stasioner dengan gambaran piramida seperti granat. Piramida ini merepresentasikan jumlah penduduk usia muda, dewasa, dan seimbang. Pertumbuhan penduduk juga cenderung stabil, angka kelahiran hampir seimbang dengan angka kematian. Piramida stasioner mengindikasikan adanya jumlah usia produktif yang lebih mendominasi pada populasi penduduk Kota Yogyakarta tahun 2024.



Gambar 2.13 Struktur Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025, Hasil Olahan, 2025

2.1.1.8.5. Komposisi Penduduk berdasarkan Agama

Mayoritas penduduk Kota Yogyakarta merupakan pemeluk agama Islam. Tercatat bahwa pada tahun 2020-2024 jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang beragama Islam mencapai lebih dari 80% dari total populasi setiap tahunnya. Selain itu, agama Katolik dan Kristen menjadi dua agama yang cukup banyak dianut oleh penduduk Kota Yogyakarta. Namun demikian, secara umum hampir seluruh agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia juga tercatat dianut oleh sebagian penduduk Kota Yogyakarta, seperti Budha, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Adanya keberagaman agama menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta bersifat majemuk sehingga toleransi agama sangat diperlukan untuk mempertahankan kerukunan di dalam lingkungan masyarakat.

Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Menurut Agama Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Islam	Jiwa	344.817	346.556	346.532	344.998	348.102

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Kristen	Jiwa	26.180	26.407	26.184	25.779	25.807
3.	Katolik	Jiwa	41.299	41.410	41.088	40.358	40.085
4.	Budha	Jiwa	1.222	1.212	1.171	1.139	1.076
5.	Hindu	Jiwa	478	472	478	467	481
6.	Konghucu	Jiwa	26	27	26	26	25
7.	Kepercayaan Thd. Tuhan YME	Jiwa	33	33	30	30	29

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

2.1.1.8.6. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk mengacu pada jumlah rata-rata penduduk yang tinggal dalam suatu luas wilayah tertentu. Kepadatan penduduk menjadi salah satu analisis kependudukan yang penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui seberapa padat atau jarang penduduk yang mendiami suatu wilayah. Informasi ini dapat menjadi masukan dan pengetahuan dalam pembangunan wilayah. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah total penduduk suatu wilayah dengan luas wilayah tersebut atau dengan kata lain menggunakan perhitungan kepadatan penduduk aritmatik.

Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cenderung fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir sesuai dengan dinamika perkembangan jumlah penduduk yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta tercatat 12.671 jiwa/km². Kepadatan penduduk pada tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2023, tetapi apabila dibandingkan kembali dengan data kepadatan penduduk pada tahun 2020 maka teridentifikasi adanya penurunan.

Ditinjau dari sebaran kepadatan per wilayah kemantren, kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2024 terdapat di Kemantren Ngampilan, yaitu sebesar 21.088 jiwa/km². Sedangkan, wilayah dengan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kemantren Umbulharjo, yaitu sebesar 8.657 jiwa/km².

Adanya peningkatan dan penurunan kepadatan penduduk berkaitan dengan dinamika penduduk baik alami yaitu kelahiran dan kematian maupun migrasi masuk dan ke luar. Peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan kepadatan penduduk, begitu juga sebaliknya, sebab luas wilayah bersifat tetap dan tidak berubah.

Tabel 2.22 Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Kemantren	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tegalrejo	jiwa/km ²	12.844	12.718	12.652	12.734	12.750
2.	Jetis	jiwa/km ²	16.106	15.682	15.503	15.568	15.526
3.	Gondokusuman	jiwa/km ²	10.812	10.876	10.769	10.844	10.885
4.	Danurejan	jiwa/km ²	19.445	19.264	19.017	19.057	19.003
5.	Gedongtengen	jiwa/km ²	20.715	19.882	19.455	19.407	19.334
6.	Ngampilan	jiwa/km ²	22.540	21.512	21.265	21.260	21.088
7.	Wirobrajan	jiwa/km ²	15.957	15.975	15.922	16.061	16.155
8.	Mantrijeron	jiwa/km ²	13.652	13.235	13.130	13.143	13.208
9.	Kraton	jiwa/km ²	15.646	15.764	15.587	15.551	15.453
10.	Gondomanan	jiwa/km ²	13.384	12.930	12.804	12.784	12.687

No.	Kemantren	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
11.	Pakualaman	jiwa/km ²	17.033	16.652	16.483	16.597	16.550
12.	Mergangsan	jiwa/km ²	13.858	13.919	13.792	13.828	13.841
13.	Umbulharjo	jiwa/km ²	8.687	8.515	8.506	8.580	8.657
14.	Kotagede	jiwa/km ²	11.260	11.686	11.808	11.905	12.005
Kota Yogyakarta		jiwa/km ²	12.804	12.668	12.578	12.643	12.671

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

2.1.1.8.7. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk dihitung dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik untuk tahun proyeksi 2020-2035. Adapun proyeksi penduduk pada periode tahun 2040-2045 diperoleh dari metode perhitungan yang mempertimbangkan tren pertumbuhan dengan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris. Perhitungan proyeksi penduduk dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator kependudukan utama, yaitu terkait dengan fertilitas dan mortalitas. Data yang dijadikan *baseline* adalah data jumlah penduduk pada tahun 2020.

Proyeksi penduduk pada periode tahun 2025–2029 diperoleh dari metode perhitungan yang mempertimbangkan tren pertumbuhan dengan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris. Perhitungan proyeksi penduduk mengacu pada proyeksi lima tahunan dalam dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Yogyakarta Tahun 2023. Dalam dokumen tersebut diproyeksikan jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2025 adalah sebesar 375.770 jiwa dan pada tahun 2030 sebesar 373.970 jiwa.

Menggunakan model perhitungan pertumbuhan penduduk geometris, diproyeksikan bahwa jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami tren penurunan jumlah penduduk dengan laju penurunan rata-rata sebesar $-0,1\%$ per tahun. Rincian proyeksi penduduk Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya selama periode tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.23 Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Proyeksi Penduduk Kota Yogyakarta	375.770	375.409	375.049	374.689	374.329

Sumber: *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2023; data diolah

Penurunan laju pertumbuhan penduduk juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia sehingga ke depannya diproyeksikan akan terjadi peningkatan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif.

Tabel 2.24 Proyeksi Beban Ketergantungan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-14	19,45	18,34	17,71	17,49	16,88	16,3
15-64	71,27	70,15	68,29	66,39	64,84	63,32
65+	9,28	11,51	14	16,12	18,28	20,38
Dependency Ratio	40,31	42,55	46,43	50,62	54,23	57,29

Sumber: *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Yogyakarta Tahun 2023

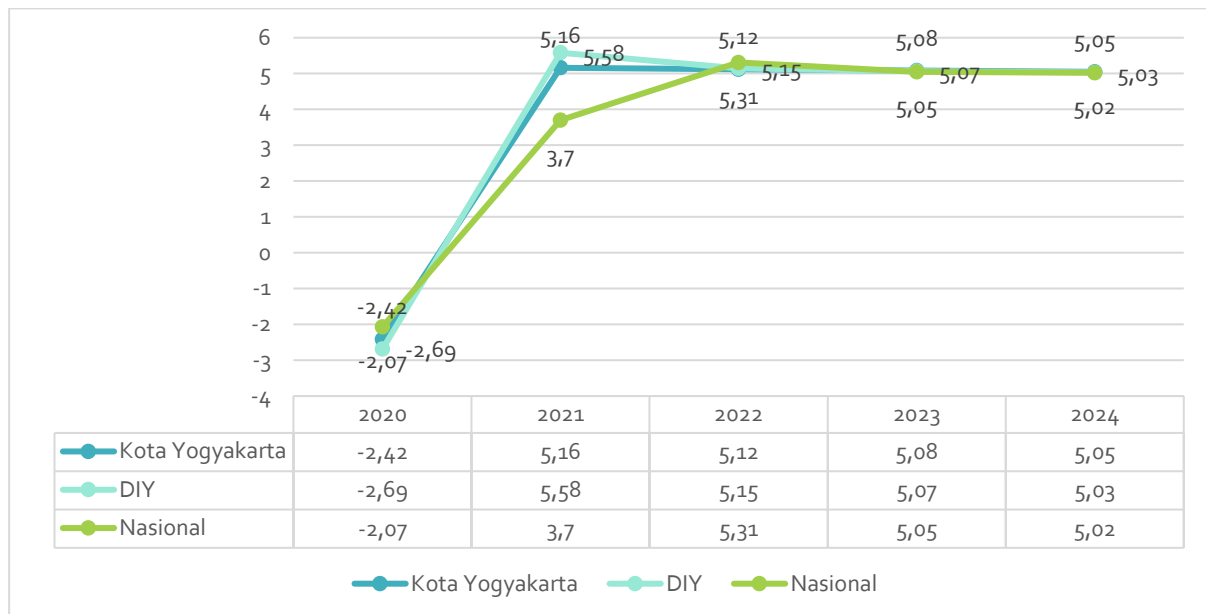
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makroekonomi yang diukur berdasarkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020–2024, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta secara umum menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, namun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan sehingga mengakibatkan kondisi khusus. Kota Yogyakarta sendiri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,42%. Sementara itu, DIY dan nasional secara berturut-turut mengalami perlambatan ekonomi sebesar -2,69%, dan -2,07%. Pada tahun berikutnya, pemulihan ekonomi berjalan cukup cepat. Kota Yogyakarta mencatat lonjakan pertumbuhan sebesar 5,16% pada 2021, melampaui nasional yang hanya 3,7%, meskipun masih sedikit di bawah DIY (5,58%). Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, Provinsi DIY dan nasional pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Terhadap Provinsi dan Nasional 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (Nasional, Provinsi, Kota Yogyakarta), 2025

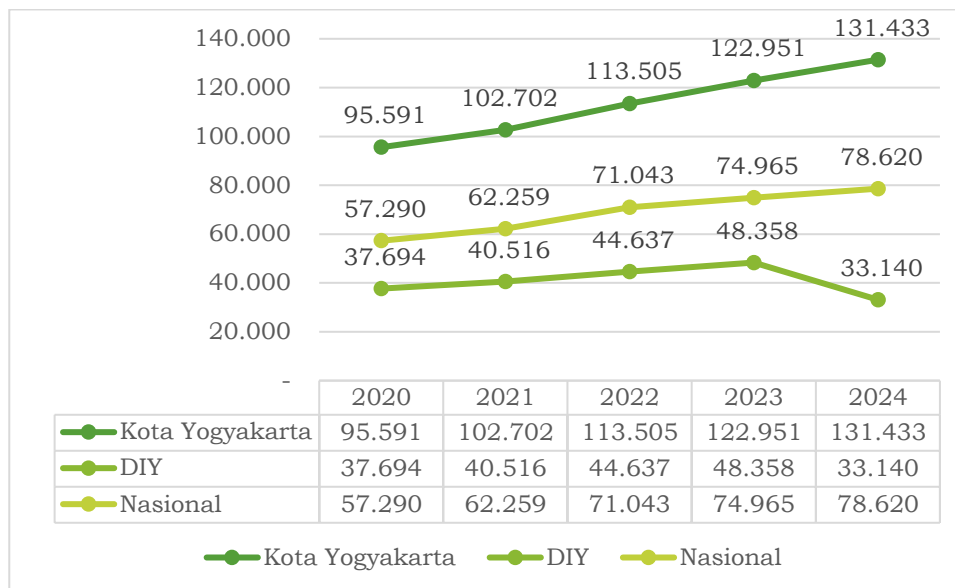
Jika dicermati dari sisi sektoral, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta terutama ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, serta industri pengolahan. Mayoritas sektor ekonomi di Kota Yogyakarta sendiri menunjukkan pertumbuhan positif setelah tahun 2020, mencerminkan pemulihan struktural meskipun laju pertumbuhan tahunan cenderung menurun dibanding fase rebound awal (2020–2021).

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir mencerminkan proses pemulihan yang berlangsung secara bertahap dan stabil. Hal ini menjadi dasar yang baik bagi perencanaan pembangunan ekonomi ke depan secara berkelanjutan.

2.1.2.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Indikator ini dihitung dengan membagi total nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk, sehingga mencerminkan rata-rata kontribusi ekonomi per individu. Besarnya nilai PDRB per kapita dipengaruhi tidak hanya oleh aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB per kapita Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Grafik berikut memperlihatkan bahwa Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata Provinsi DIY dan nasional.



Gambar 2.15 PDRB Per Kapita Menurut ADHB (Ribu Rupiah) 2020-2024

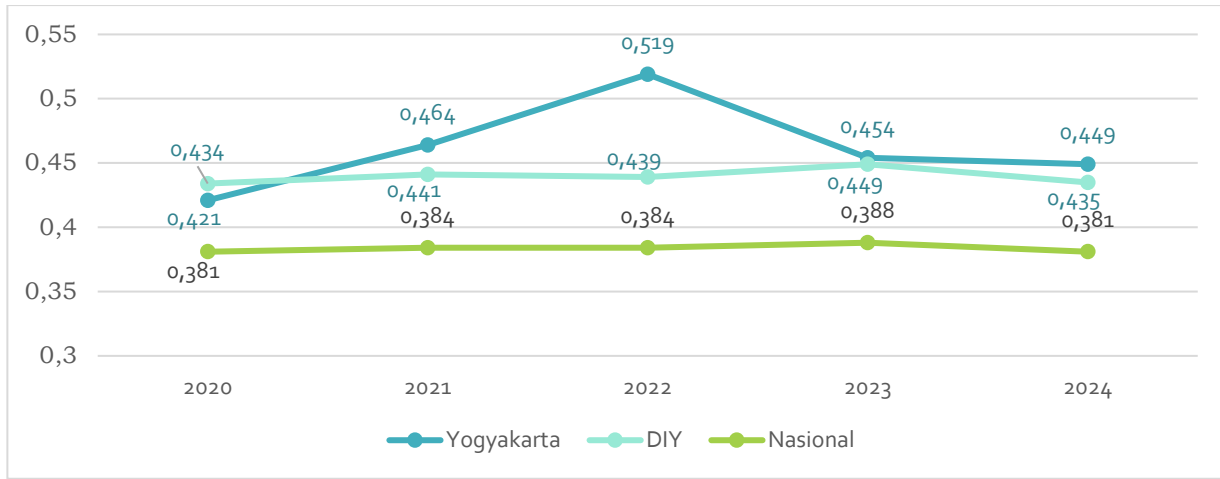
Sumber: Badan Pusat Statistik (Nasional, Provinsi, Kota Yogyakarta), 2025

Adapun pada tahun 2024, PDRB per kapita Kota Yogyakarta tercatat sebesar Rp131.433 ribu, tertinggi dibandingkan Provinsi DIY dan nasional pada periode yang sama. Capaian ini mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi lokal serta peran penting sektor-sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.1.2.1.3. Indeks Gini

Meskipun PDRB per kapita Kota Yogyakarta tergolong tinggi dan terus mengalami peningkatan, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat indikator lain seperti Indeks Gini guna memahami sejauh mana hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indeks Gini sendiri digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks ini menggunakan skala rasio berkisar antara 0 hingga 1. Adapun nilai mendekati 0 mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata, dan nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Perbandingan indeks Gini Kota Yogyakarta terhadap DIY dan Nasional dijelaskan pada grafik di bawah ini.



Gambar 2.16 Rasio Gini Kota Yogyakarta terhadap Provinsi dan Nasional

Sumber: Gini Ratio BPS Kota Yogyakarta, 2025 dan Gini Ratio Perkotaan+Perdesaan Semester 2 (September) BPS Nasional

Berdasarkan data BPS, dalam tiga tahun terakhir, Indeks Gini Kota Yogyakarta tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi DIY secara konsisten termasuk wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi secara nasional, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Kota Yogyakarta sebagai pusat perkotaan utama turut mencerminkan karakteristik ketimpangan tersebut.

Tren ketimpangan di Kota Yogyakarta meningkat dari 0,371 pada tahun 2020 menjadi 0,519 pada tahun 2022. Nilai tersebut menempatkan Kota Yogyakarta dalam kategori ketimpangan tinggi pada tahun tersebut, sedangkan di tahun-tahun lainnya berada dalam kategori moderat (antara 0,4 hingga 0,5). Tingginya Indeks Gini pada 2022 juga tercermin dalam distribusi pendapatan: kelompok 40% penduduk dengan penghasilan terendah hanya memperoleh 11,58% dari total pendapatan.

Namun demikian, pada tahun 2023, Indeks Gini Kota Yogyakarta menurun menjadi 0,449. Penurunan ini terjadi ketika Provinsi DIY dan tingkat nasional justru mengalami peningkatan ketimpangan. Fenomena ini kemungkinan dapat dikaitkan dengan membaiknya kinerja sektor pariwisata serta efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi pascapandemi di tingkat Kota Yogyakarta.

2.1.2.1.4. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penetapan garis kemiskinan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan standar kebutuhan dasar minimum untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Sebagaimana dapat dicermati pada tabel di bawah, pada periode 2020–2024, angka kemiskinan Kota Yogyakarta mengalami dinamika.

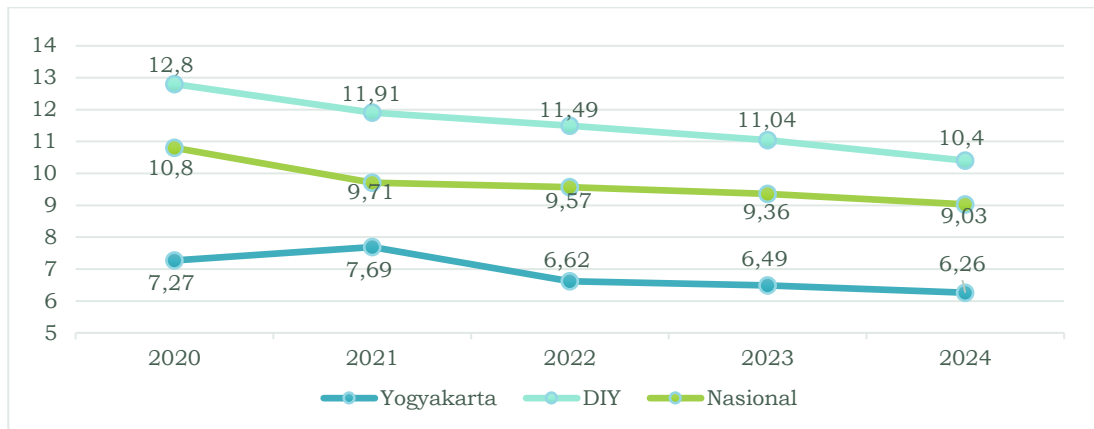
Tabel 2.25 Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan	Rupiah/Kapita/Bulan	533,423	556,674	601,905	662,267	686.973
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	29,45	34,07	29,68	29,48	28,79
Angka Kemiskinan	%	7,27	7,69	6,62	6,49	6,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Angka kemiskinan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2021 dengan persentase 7,69%, sebelum akhirnya menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak tahun 2022 hingga mencapai angka terendah 6,26% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan hasil dari implementasi berbagai program perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah pascapandemi.

Selain itu, besar kemungkinan pula bahwa penurunan ini mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun perbandingan angka kemiskinan Kota Yogyakarta dengan Provinsi DIY dan nasional disajikan pada grafik berikut.



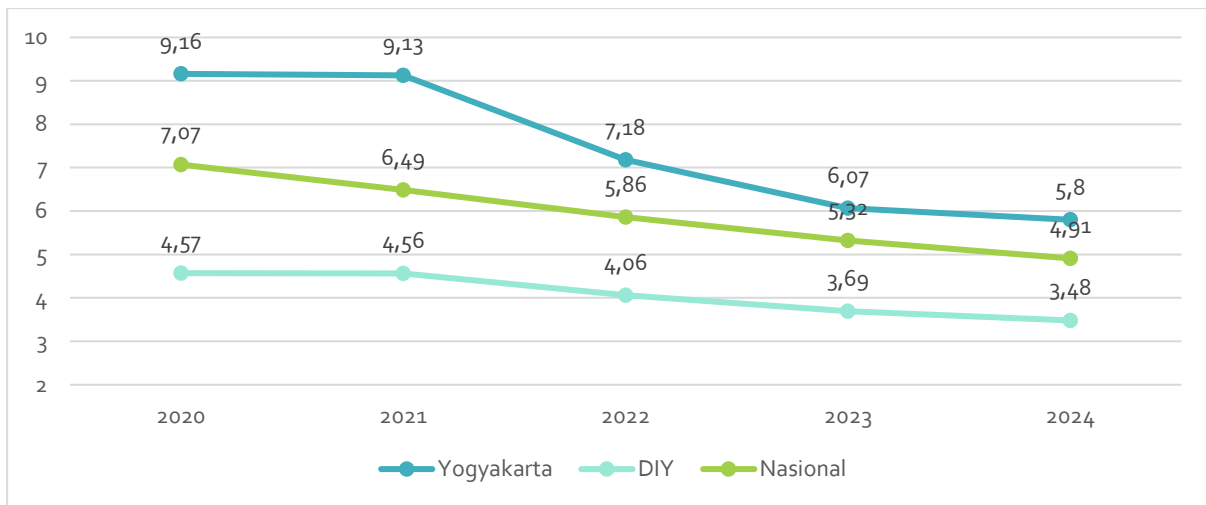
Gambar 2.17 Angka Kemiskinan di Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan perbandingan antarwilayah, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta selalu lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi DIY dan nasional. Grafik perbandingan menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024, Provinsi DIY mencatat angka kemiskinan tertinggi dengan rata-rata sekitar 11,6%, diikuti oleh nasional sebesar 9,5%, dan Kota Yogyakarta dengan angka terendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, Kota Yogyakarta mampu menjaga kinerja sosial-ekonominya dengan baik.

2.1.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka mencakup empat kelompok: a) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan; b) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha baru; c) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*); dan d) mereka yang telah memiliki pekerjaan/usaha, tetapi belum mulai bekerja/berusaha.



Gambar 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta, DIY, dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data BPS, TPT di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 tercatat sebesar 9,16%, kemudian mengalami penurunan secara bertahap dan mencapai 5,8% pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja di kota tersebut. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di tingkat Provinsi DIY dan nasional, Kota Yogyakarta menunjukkan dinamika yang relatif lebih fluktuatif, namun akhirnya memiliki tren penurunan yang serupa dengan lingkup provinsi dan nasional.

Penurunan TPT dapat diartikan sebagai hasil dari perbaikan aktivitas ekonomi dan berbagai inisiatif ketenagakerjaan yang telah dijalankan, termasuk pelatihan kerja dan program pemberdayaan usaha.

Selain itu, karakteristik demografis dan struktur angkatan kerja juga turut memengaruhi kondisi ketenagakerjaan. Salah satunya adalah tren peningkatan kelompok pemuda yang termasuk dalam kategori NEET (*Not in Education, Employment, or Training*), yang menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk memperkuat akses generasi muda terhadap pelatihan dan dunia kerja secara produktif. Adapun data mengenai statistik ketenagakerjaan pemuda berdasarkan kelompok umurnya dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.26 Status Ketenagakerjaan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta (Agustus 2023)

Laki-Laki + Perempuan											
Golongan Umur	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			Jumlah Total (Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja)	% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	TPT (%)	TPAK (%)	
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya					Jumlah Bukan Angkatan Kerja
15-24	24.570	3.045	27.615	23.407	5.627	1.300	30.334	88,97	11,03	47,65	
25-54	137.444	5.856	143.300	109	19.114	443	19.666	95,91	4,09	87,93	
55+	48.232	4.681	52.913	0	25.053	6.904	31.957	91,15	8,85	62,35	
Jumlah	210.246	13.582	223.828	23.516	49.794	8.647	81.957	305.785	93,93	6,07	73,2

Laki-Laki											
Golongan Umur	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			Jumlah Total (Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja)	% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	TPT	TPAK (%)	
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya					Jumlah Bukan Angkatan Kerja
15-24	12.327	2.113	14.440	13.119	669	861	14.649	29.089	85,37	14,63	49,64
25-54	75.374	3.464	78.838	0	1.211	228	1.439	80.277	95,61	4,39	98,21
55+	25.614	2.396	28.010	0	6.075	3.812	9.887	37.897	91,45	8,55	73,91
Jumlah	113.315	7.973	121.288	13.119	7.955	4.901	25.975	147.263	93,43	6,57	82,36

Perempuan											
Golongan Umur	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			Jumlah Total (Angkatan Kerja & Bukan Angkatan Kerja)	% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	TPT	TPAK (%)	
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya					Jumlah Bukan Angkatan Kerja
15-24	12.243	932	13.175	10.288	4.958	439	15.685	28.860	92,93	7,07	45,65
25-54	62.070	2.392	64.462	109	17.903	215	18.227	82.689	96,29	3,71	77,96
55+	22.618	2.285	24.903	0	18.978	3.092	22.070	46.973	90,82	9,18	53,02
Jumlah	96.931	5.609	102.540	10.397	41.839	3.746	55.982	158.522	94,53	5,47	64,69

Mengacu pada data terakhir dari Sakernas Agustus 2023, TPT Kota Yogyakarta tercatat sebesar 6,07%, menurun dari 9,16% pada tahun 2020. Penurunan ini mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi, sekaligus menunjukkan hasil dari berbagai intervensi kebijakan seperti pelatihan kerja, dukungan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja baru.

Meskipun demikian, jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan kelompok umur, tingkat pengangguran tertinggi justru terjadi pada kelompok usia 15–24 tahun, yaitu mencapai 11,03%, jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 25–54 tahun (4,09%) maupun 55 tahun ke atas (8,85%).

Tingginya TPT di kalangan pemuda ini mengindikasikan tantangan serius dalam menjembatani transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Fenomena ini selaras dengan tingginya jumlah pemuda yang tergolong dalam kategori NEET (*Not in Education, Employment, or Training*). Pada tahun 2023, terdapat sekitar 3.045 pemuda usia 15–24 tahun yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak sedang mengikuti pelatihan yang mengindikasikan suatu kondisi yang dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia dan berisiko memunculkan pengangguran jangka panjang.

Terlebih, jika mengacu pada definisi NEET maka sekitar 5.397 perempuan usia 15–24 tahun di Kota Yogyakarta pada tahun 2023 tergolong NEET, yaitu mereka yang tidak sedang bekerja, tidak sedang mengikuti pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan keterampilan. Adapun TPT untuk kelompok ini mencapai hingga 14%. Nilai ini menunjukkan pula adanya kerentanan kelompok ini terhadap eksklusi sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut, TPAK kelompok usia 15–24 tahun yang sebesar 47,65% mengindikasikan bahwa lebih dari separuh pemuda usia kerja di Kota Yogyakarta belum berpartisipasi aktif dalam pasar tenaga kerja. Kondisi ini kemudian menuntut perhatian khusus untuk memperluas akses pelatihan vokasi, menyediakan skema kerja magang transisi, serta meningkatkan literasi karier dan kewirausahaan sejak usia dini. Penanganan kelompok NEET secara serius bukan hanya soal mengurangi angka pengangguran, tetapi juga kunci untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memperkuat pondasi ekonomi daerah kedepannya.

2.1.2.1.6. Distribusi Pendapatan Penduduk

Distribusi pendapatan penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan ekonomi. Dalam indikator ini, penduduk dibagi menjadi tiga kelompok: kelompok 40% penduduk yang berpendapatan rendah (*bottom 40%*), kelompok 40% penduduk yang berpendapatan menengah (*middle 40%*), dan kelompok 20% penduduk yang berpendapatan tinggi (*top 20%*).

Berdasarkan standar pemerataan pendapatan dari Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dikategorikan ke dalam tiga tingkatan: (i) ketimpangan pendapatan tinggi apabila kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah hanya menerima kurang dari 12% total pendapatan; (ii) ketimpangan pendapatan sedang/menengah apabila kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12–17% dari total pendapatan; dan (iii) ketimpangan pendapatan rendah apabila kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% total pendapatan.

Tabel 2.27 Distribusi Pendapatan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	40% Penduduk Berpendapatan Terendah	Persen	15,26	13,14	11,58	14,63	14,70
2	40% Penduduk Berpendapatan Menengah	Persen	34,5	35,22	31,15	32,54	33,10
3	20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi	Persen	50,24	51,63	57,27	52,83	52,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Data distribusi pendapatan penduduk Kota Yogyakarta pada periode 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika, dengan kecenderungan membaik dalam dua tahun terakhir. Proporsi pendapatan yang diterima oleh 40% kelompok penduduk berpendapatan terendah sempat menurun dari 15,26% pada tahun 2020 menjadi 11,58% pada 2022, yang mencerminkan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi pada saat itu. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan bertahap hingga mencapai 14,70% yang menandakan adanya perbaikan dalam kaitannya distribusi pendapatan ke arah yang lebih merata.

Di sisi lain, proporsi pendapatan yang diterima oleh 20% kelompok penduduk berpendapatan tertinggi tercatat terus di atas 50%, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 57,27%. Meskipun distribusi pemerataan pendapatan kelompok atas masih dominan, penurunan proporsinya pada 2023 dan 2024 menunjukkan adanya pergeseran positif dalam konteks pemerataan distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta.

Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta mengalami perbaikan ke arah yang lebih merata, meskipun belum sepenuhnya ideal. Perkembangan ini memberikan ruang positif bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kebijakan pemerataan ekonomi, termasuk memperluas akses terhadap peluang ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta memperkuat jaring pengaman sosial.

Dengan tren pemerataan pendapatan yang mulai membaik, kebijakan lanjutan dapat diarahkan tidak hanya untuk menekan ketimpangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih inklusif oleh seluruh kelompok masyarakat. Sebab, pendekatan kebijakan terkait pemerataan sendiri dinilai penting untuk mendukung ketahanan sosial-ekonomi Kota Yogyakarta dalam jangka panjang.

2.1.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan usia harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

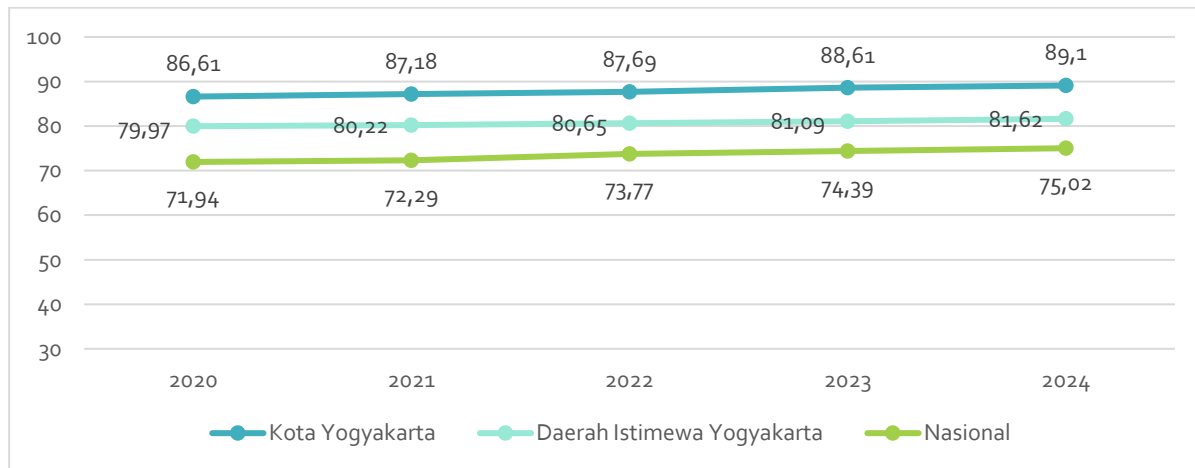
Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,765	74,76	74,83	75,52	75,73
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,43	17,6	17,61	17,62	17,66
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,46	11,72	11,89	12,11	12,12
4	Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rupiah	18.678	18.801	19.310	19.920	20.603
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	86,61	87,18	87,69	88,61	89,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Selama periode 2020–2023, IPM Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 87,69 pada tahun 2020 menjadi 89,10 pada tahun 2023. Nilai ini menempatkan Kota Yogyakarta secara stabil dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai IPM di atas 80 dan berada di atas rata-rata Provinsi DIY maupun nasional.

Dimensi kesehatan juga mencatatkan adanya tren perbaikan yang ditunjukkan oleh peningkatan usia harapan hidup dari 74,83 tahun pada 2020 menjadi 75,73 tahun pada 2024. Lebih lanjut, indikator pendidikan juga mengalami kenaikan, di mana harapan lama sekolah naik dari 17,61 menjadi 17,66 tahun, dan rata-rata lama sekolah meningkat dari 11,89 menjadi 12,12 tahun pada periode yang sama. Di sisi lain, pengeluaran riil per kapita sebagai indikator standar hidup naik dari Rp19.319 ribu menjadi Rp20.603 ribu, yang menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat.



Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2020-2024

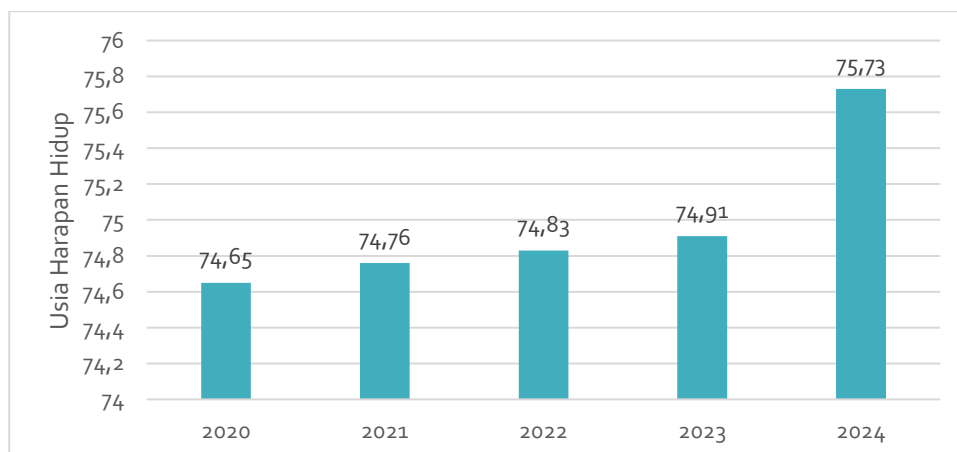
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Secara keseluruhan, kenaikan IPM Kota Yogyakarta mencerminkan kemajuan di seluruh aspek dasar pembangunan manusia. Meski demikian, perkembangan ini juga perlu disertai dengan kebijakan strategis yang mengantisipasi perubahan struktur demografi, termasuk bertambahnya proporsi penduduk lanjut usia sebagai implikasi dari meningkatnya usia harapan hidup. Hal ini krusial agar menjamin bahwa capaian pembangunan manusia tetap berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang.

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

2.1.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup menunjukkan perkiraan rata-rata tahun yang diharapkan seseorang dapat hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang biasanya dihitung dari saat kelahiran. Indikator ini digunakan sebagai indikator utama dalam mengevaluasi tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Berikut data usia harapan hidup di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024



Gambar 2.20 Usia Harapan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan grafik di atas, usia harapan hidup di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 mengalami tren peningkatan yang bersifat menerus. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang ada.

2.1.2.2.2. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

Upaya perbaikan status gizi anak balita di Kota Yogyakarta terus dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai program intervensi spesifik. Salah satu indikator yang digunakan untuk memantau capaian tersebut adalah prevalensi balita dengan status gizi buruk. Indikator ini menggambarkan proporsi anak balita yang mengalami kekurangan gizi akut berat dan memerlukan penanganan khusus. Data berikut menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.29 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah balita gizi buruk	Anak	156	103	62	37	24
Jumlah balita	Anak	11.884	11.142	11.364	10.660	11.137
Persentase balita gizi buruk	%	1,31	0,92	0,55	0,35	0,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Penurunan angka balita dengan gizi buruk pada tahun 2020-2024 sendiri telah menunjukkan adanya keberhasilan berbagai intervensi yang telah dilakukan. Salah satu faktor utama adalah penguatan surveilans gizi melalui deteksi dini *weight faltering* di posyandu, di mana balita dengan berat badan stagnan atau kurang dari rata-rata kenaikan minimal dapat segera diidentifikasi. Anak dengan status gizi buruk dan gizi kurang (*wasting*) kemudian divalidasi dan menjalani assessment di puskesmas, termasuk pemeriksaan fisik, antropometri (BB, PB/TB, LILA, LIKA), serta pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi anemia, kecacingan, dan penyakit penyerta lainnya.

Selain itu, upaya pemulihan juga dilakukan dengan pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal kepada balita gizi kurang untuk mencegah perburukan status gizi mereka. Pendampingan berkelanjutan oleh tenaga kesehatan, baik dalam bentuk pemantauan asupan makanan, pola asuh, maupun kesehatan lingkungan, turut berkontribusi dalam menekan angka gizi buruk. Untuk balita gizi buruk tanpa komplikasi medis, tatalaksana rawat jalan dilakukan di Rumah Pemulihan Gizi (RPG), sementara kasus dengan komplikasi medis dirujuk ke rumah sakit untuk perawatan intensif.

Tabel 2.30 Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah balita gizi kurang	Anak	668	630	702	545	610
Jumlah balita	Anak	11.884	11142	11364	10660	11137
Persentase balita gizi kurang	persen	5,62	5,65	6,18	5,11	5,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Meskipun prevalensi gizi buruk menunjukkan tren membaik, kondisi gizi kurang mengalami fluktuasi selama periode yang sama. Data BPS mencatat bahwa setelah menurun pada tahun 2023, angka gizi kurang kembali meningkat menjadi 5,48% pada 2024. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya rujukan balita dengan berat badan tidak naik dari posyandu ke puskesmas, yang menyebabkan keterlambatan intervensi lanjutan.

Selain itu, dalam pelaksanaan program PMT, beberapa kendala di tingkat rumah tangga turut menjadi faktor. Sebagian orang tua membagi PMT dengan anggota keluarga lain sehingga asupan anak tidak terpenuhi secara penuh. Di sisi lain, terdapat pula orang tua yang enggan memberikan PMT secara rutin karena alasan gengsi atau kurangnya pemahaman terhadap manfaatnya.

Kondisi ini menegaskan bahwa selain penguatan sistem layanan kesehatan, dibutuhkan pendekatan edukatif yang lebih intensif kepada orang tua dan pengasuh. Kepatuhan terhadap program pemulihan gizi memiliki peran penting dalam mencegah perburukan kondisi balita, terutama pada fase awal gangguan pertumbuhan.

2.1.2.2.3. Prevalensi Stunting

Prevalensi *stunting* adalah persentase anak-anak di suatu wilayah yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari tinggi badan yang seharusnya sesuai dengan usia mereka. *Stunting* pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor baik dari masalah kesehatan maupun di luar kesehatan. Berikut data prevalensi *stunting* di Kota Yogyakarta tahun 2019-2023.

Tabel 2.31 Prevalensi Stunting Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi <i>Stunting</i>	Persen	11,31	14,36	12,88	10,80	11,76

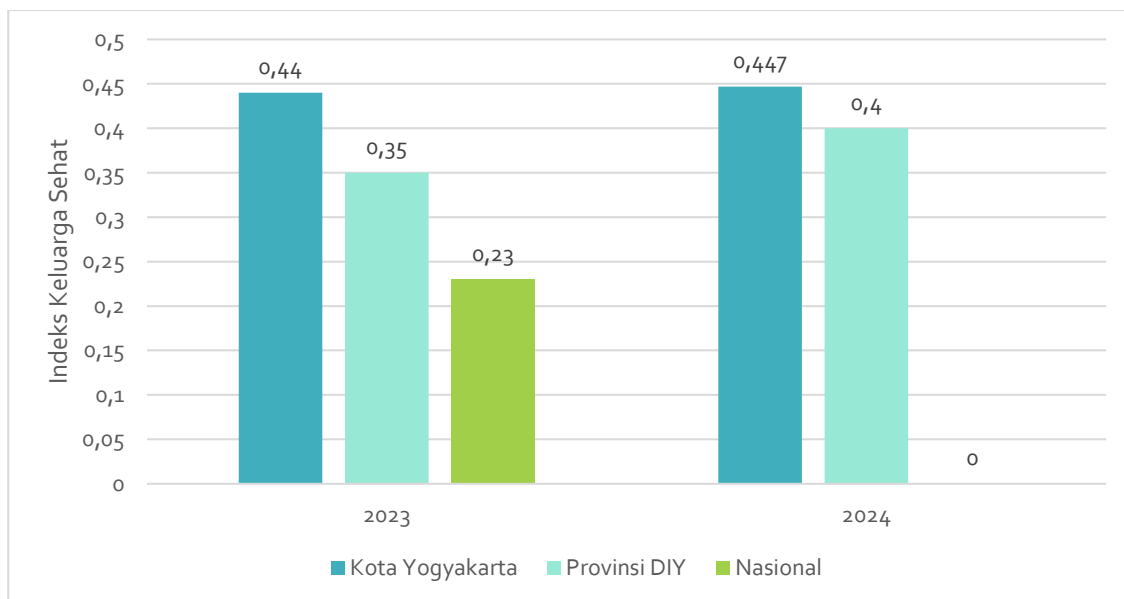
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2023

Berdasarkan data di atas, prevalensi *stunting* di Kota Yogyakarta cenderung stagnan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Perubahan tingkat prevalensi *stunting* relatif kecil sehingga tidak memberikan dampak perbaikan kondisi *stunting* secara signifikan di Kota Yogyakarta.

2.1.2.2.4. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat melalui kondisi kesehatan dan perilaku hidup sehat dalam lingkup keluarga. Tujuan utama dari IKS adalah untuk memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat.

IKS sendiri dihitung berdasarkan pemenuhan dua belas indikator keluarga sehat, yaitu (i) keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), (ii) ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, (iii) bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, (iv) bayi memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan, (v) balita dipantau pertumbuhannya setiap bulan, (vi) penderita tuberculosis (TB) paru berobat sesuai standard, (vii) penderita hipertensi berobat secara teratur, (viii) penderita gangguan jiwa berat mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, (ix) tidak ada anggota keluarga yang merokok, (x) keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, (xi) keluarga menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan (xii) keluarga memiliki akses terhadap air bersih.



Gambar 2.21 Indeks Keluarga Sehat Kota Yogyakarta tahun 2023-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, nilai Indeks Keluarga Sehat di kota ini mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan dalam cakupan layanan kesehatan dasar dan perilaku hidup sehat di tingkat rumah tangga. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi DIY dan nasional, Kota Yogyakarta menunjukkan nilai IKS yang relatif lebih tinggi. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dari sisi sistem pelayanan kesehatan berbasis keluarga.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang merata

2.1.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator ini menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan seseorang dalam pendidikan formal. Indikator ini digunakan sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan di suatu daerah. Indikator ini dapat memberikan gambaran terkait tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Semakin cepat atau mendekati waktu yang ideal untuk lulus, maka semakin baik kualitas pendidikan penduduk di daerah tersebut.

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penyediaan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan, tenaga pendidik yang adaptif terhadap perubahan metode pembelajaran, penyediaan *wifi* gratis, swadaya masyarakat semakin tinggi, serta partisipasi orang tua dalam proses pembelajaran juga semakin tinggi. Dibandingkan dengan DIY dan Nasional, rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta relatif lebih tinggi.

Tabel 2.32 Rata-Rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Yogyakarta	Tahun	11,46	11,72	11,89	12,11	12,12
Provinsi DIY	Tahun	9,55	9,64	9,75	9,83	9,93
Nasional	Tahun	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

2.1.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Secara umum persentase harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta adalah sebesar 17,43 tahun, kemudian angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada 2024 naik menjadi 17,62 tahun. Harapan lama sekolah sudah mencapai angka 17 tahun-an yang berarti rata-rata anak usia tertentu, dalam konteks ini adalah 7 tahun ke atas (Usia SD) diharapkan bersekolah formal hingga 17 tahun, yang artinya menyelesaikan wajib belajar 12 tahun hingga tingkat SMA/MA/SMK dan dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.

Tabel 2.33. Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,43	17,60	17,61	17,62	17,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

2.1.2.3.3. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, dan memahami informasi. Sedangkan angka numerasi merujuk pada tingkat kemampuan penggunaan angka, simbol, dan grafik untuk memecahkan masalah yang dimiliki oleh masyarakat. Secara umum, angka literasi dan numerasi di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.

Tabel 2.34 Angka Literasi dan Numerasi

No.	Indikator	2023			2024		
		Baik	Sedang	Kurang	Baik	Sedang	Kurang
Literasi							
1	SD	92,35	3,83	1,09	91,85	3,26	0,54
2	SMP	79,76	5,95	2,38	80,95	7,14	3,57
3	Total	88,39	4,49	1,50	88,43	4,48	1,49

Numerasi							
1	SD	66,67	26,78	3,83	82,61	11,41	1,63
2	SMP	48,81	29,76	9,52	76,19	11,90	3,57
3	Total	61,05	27,72	5,62	80,60	11,57	2,24

Sumber: Rapor Pendidikan Kota Yogyakarta, 2025

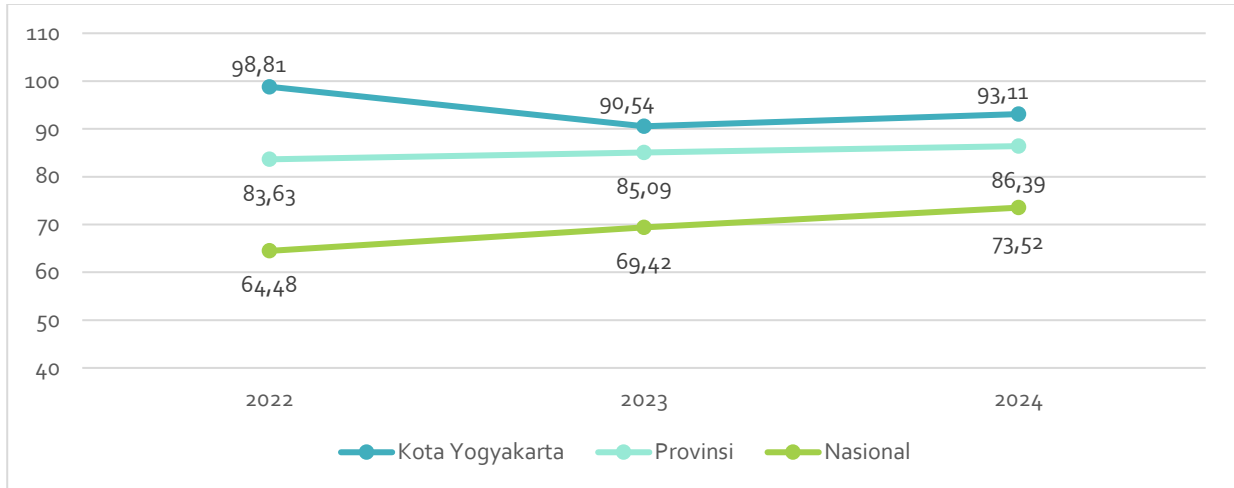
2.1.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks pembangunan literasi masyarakat merupakan pengukuran tingkat literasi masyarakat berdasarkan serangkaian upaya yang dilakukan. Indeks ini mencakup tidak hanya literasi membaca dan menulis saja, tetapi juga mencakup literasi finansial, digital, lingkungan dan literasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dan dapat berperan dalam masyarakat baik dari politik, sosial maupun ekonomi.

Indeks pembangunan literasi masyarakat di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), meliputi

- a) Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1)
- b) Ketercukupan koleksi (UPLM 2)

- c) Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3)
- d) Tingkat kunjungan masyarakat/hari (UPLM 4)
- e) Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM 5)
- f) Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi (UPLM 6)
- g) Anggota perpustakaan (UPLM 7)



Gambar 2.22 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2021-2024

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2025

Berdasarkan data Perpustakaan Nasional RI, indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi. Dibandingkan dengan Provinsi DIY dan nasional, indeks pembangunan literasi masyarakat di Kota Yogyakarta relatif lebih tinggi dan selalu berada di kategori tinggi. Hal ini menandakan bahwa perpustakaan Kota Yogyakarta dapat mendukung budaya literasi masyarakat dan masyarakat telah memiliki kemampuan literasi yang baik.

2.1.2.3.5. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI merupakan pengukuran kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Berdasarkan pengembangan dari “G20 Toolkit for measuring digital skills and digital literacy”, kerangka kerja IMDI terdiri atas empat pilar, meliputi:

1. Infrastruktur dan Ekosistem.

Merupakan pilar landasan pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Pilar ini menekankan kesetaraan akses untuk ekosistem yang inklusif dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan tuntutan dunia digital. Pilar infrastruktur dan ekosistem dapat dilihat dari tiga aspek yaitu akses dan adopsi teknologi digital, ekosistem pembelajaran, dan digitalisasi pemerintah.

2. Keterampilan Digital

Berperan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami dan menciptakan informasi secara aman. Pilar ini dapat dilihat dari tiga pengukuran yaitu komplementaritas, pengenalan dan keamanan TIK.

3. Pemberdayaan

Pilar pemberdayaan mempresentasikan operasionalisasi dari tingkat literasi dan keterampilan digital. Pilar ini melibatkan tiga pengukuran yaitu pengguna, penyedia dan platform.

4. Pekerjaan.

Pilar pekerjaan berfokus kepada keahlian digital yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan dimana digitalisasi menciptakan jenis dan tugas pekerjaan baru. Pilar ini terdiri atas dua aspek yaitu permintaan dan penawaran.

Tabel 2.35 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indikator	Satuan	2022	2023	2024
IMDI Kota Yogyakarta	%	50,16	49,94	50,64
IMDI Provinsi DIY	%	43,39	47,17	47,10
IMDI Nasional	%	37,80	43,18	43,34

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemenkomdigi RI) mengacu pada pengukuran IMDI telah dilakukan sejak tahun 2022, Kota Yogyakarta menunjukkan capaian yang konsisten dengan nilai indeks yang berada di atas rata-rata provinsi DIY dan nasional. Pada tahun 2024, nilai IMDI Kota Yogyakarta mencapai 50,64%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, setelah sempat sedikit mengalami penurunan skor pada 2023. Sebagai perbandingan, IMDI Provinsi DIY tercatat sebesar 47,10%, sementara nasional sebesar 43,34%.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta telah memiliki tingkat literasi digital yang relatif baik dalam memanfaatkan teknologi digital secara umum. Namun demikian, tren tahunan di atas juga menunjukkan pentingnya pemantauan berkelanjutan dan penguatan ekosistem digital yang adaptif, terutama dalam bidang pembelajaran daring, perlindungan data, dan pengembangan SDM digital yang relevan dengan kebutuhan kerja masa depan.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja atau buruh yang menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan indikator penting dalam menilai cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di suatu daerah. Indikator ini menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek dibandingkan dengan jumlah total pekerja.

Penurunan persentase tenaga kerja peserta Program Jamsostek pada tahun 2020 disebabkan oleh perubahan metode pendataan, di mana sebelumnya menggunakan data Wajib Laporkan Tenaga Kerja (WLTK) yang berdiri sendiri, lalu mulai 2020 diintegrasikan dengan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan ini menyebabkan perbedaan cakupan dan metode pencatatan, yang berdampak pada penurunan angka persentase meskipun jumlah nominal peserta masih cukup tinggi.

Sementara itu, pada tahun 2021, jumlah peserta Jamsostek tercatat jauh lebih rendah (hanya 343 orang), karena sumber data yang digunakan berasal dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, bukan lagi dari Pemerintah Daerah DIY seperti pada tahun sebelumnya. Perbedaan sumber data ini turut memengaruhi hasil perhitungan dan membuat tren antar tahun menjadi tidak sepenuhnya sebanding.

Perubahan sumber dan metode pendataan tersebut menyebabkan terjadinya fluktuasi tajam, terutama pada tahun 2021 ketika tercatat hanya 343 pekerja (1,36%) sebagai peserta aktif. Namun demikian, pemulihan cepat terlihat pada tahun 2022, dan pada tahun 2023, persentase pekerja yang menjadi peserta Program Jamsostek telah mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan perbaikan sistem pendataan sekaligus menunjukkan bahwa seluruh pekerja di Kota Yogyakarta yang tercatat telah sepenuhnya dilindungi oleh jaminan sosial tenaga kerja.

Tabel 2.36. Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta Program Jamsostek	Orang	57.677	58.121	343	47.777	91.276
2.	Jumlah seluruh pekerja	Orang	68.021	134.803	25.134	54.703	91.276
3.	Persentase tenaga kerja yang mengikuti Program Jamsostek	Persen	84,79	43,12	1,36	87,34	100,00

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2024

Meningkatnya cakupan Jamsostek juga mencerminkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja. Kedepannya, konsistensi dalam integrasi data dan pelaporan, serta pengawasan terhadap kepesertaan Jamsostek, menjadi penting pula guna memastikan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan benar-benar menjangkau seluruh lapisan pekerja, termasuk pekerja informal dan rentan.

2.1.2.4.2. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi strategi penting untuk melindungi pekerja, terutama di tengah dinamika pasar kerja yang semakin fleksibel. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen ini melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023–2024, yang bertujuan memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial, baik untuk jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan.

Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, perluasan perlindungan ditujukan tidak hanya bagi pekerja formal (Penerima Upah/PU), tetapi juga mencakup pekerja informal (Bukan Penerima Upah/BPU) dan tenaga kerja sektor jasa konstruksi (Jakon). Berikut ini data cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta pada tahun 2024.

Tabel 2.37. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024

No.	Rincian	Semesta	Coverage*	% Coverage
1	Penerima Upah	106.574	68.993	64,7%
2	Bukan Penerima Upah	70.380	8.413	11,9%
3	Jasa Konstruksi	5.980	5.717	95,6%
TOTAL		182.934	83.123	45,4%

* Data per 30 Juni 2024

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan DIY, 2024

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DIY per 30 Juni 2024, jumlah penduduk bekerja di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 182.934 jiwa (mengacu pada data BPS). Dari jumlah tersebut, sebanyak 83.123 orang atau 45,4% telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Rincian cakupan kepesertaan adalah sebagai berikut: (i) Penerima Upah (PU): 64,7% dari total pekerja PU (68.993 dari 106.574); (ii) Bukan Penerima Upah (BPU): 11,9% dari total pekerja BPU (8.413 dari 70.380); dan (iii) Jasa Konstruksi (Jakon): 95,6% dari total pekerja sektor Jakon (5.717 dari 5.980).

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan kepesertaan pekerja formal sudah cukup tinggi, cakupan untuk pekerja informal masih relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kedepannya diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mendorong inklusi pekerja informal ke dalam sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan.

2.1.2.4. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.4.1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan gender di suatu daerah. IPG mengukur perbedaan antara laki-laki dan Perempuan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IPG bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan mendorong kebijakan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Berikut data Indeks Pembangunan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.38 Indeks Pembangunan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	-	98,16	98,32	98,48	98,47	98,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, Indeks Pembangunan Gender di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian pembangunan gender di Kota Yogyakarta semakin merata secara jenis kelamin sehingga kesetaraan gender semakin meningkat dalam pembangunan.

2.1.2.4.2. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan perempuan dalam suatu masyarakat. IPG mengukur sejauh mana Perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki terhadap sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. Berikut data Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2019-2023.

Tabel 2.39 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pemberdayaan Gender	-	71,06	71,05	73,18	75,50	75,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2019 hingga 2023 cenderung mengalami peningkatan. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2023 masih berada di bawah nilai Indeks Pemberdayaan Gender di DIY yang sebesar 78,46. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan di Kota Yogyakarta belum berjalan secara optimal.

2.1.2.4.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal akibat kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Berikut data Indeks Ketimpangan Gender di Kota Yogyakarta tahun 2019-2023.

Tabel 2.40 Indeks Ketimpangan Gender Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Yogyakarta	indeks	0,162	0,166	0,268	0,244	0,151
Provinsi DIY	indeks	0,243	0,149	0,250	0,240	0,142

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data di atas, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2019 hingga 2023 cenderung bersifat fluktuatif menurun. Penurunan tersebut menunjukkan adanya upaya-upaya perbaikan pada dimensi-dimensi yang membentuk Indeks Ketimpangan Gender, yaitu MTF, MHPK20, Keterwakilan Legislatif, Pendidikan Minimal SMA, dan TPAK.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.4. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.4.1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi dari total jumlah penduduk pada tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat capaian pendidikan tinggi di suatu wilayah, serta potensi daya saing sumber daya manusia (SDM) yang tersedia.

Dengan mengetahui jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi, pemerintah daerah dapat merancang program atau kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan akses, partisipasi, dan kualitas pendidikan. Semakin tinggi rasio lulusan pendidikan tinggi, maka semakin besar pula potensi SDM yang berkualitas, yang dapat mendorong kemajuan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, teknologi, dan inovasi.

Tabel 2.41 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Kategori/ Jenjang Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	jiwa	71.017	71.524	71.558	72.981	74.611
2.	Jumlah Seluruh Penduduk	jiwa	373.589	376.324	412.797	414.705	415.605
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	0,190	0,190	0,173	0,176	0,180

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, jumlah lulusan S1/S2/S3 meningkat setiap tahun, dari 71.017 orang pada tahun 2020 menjadi 74.611 orang pada tahun 2024. Namun demikian, rasionya terhadap total penduduk mengalami sedikit fluktuasi, yakni

dari 0,190 pada tahun 2020, turun menjadi 0,173 pada tahun 2022, lalu kembali naik menjadi 0,180 pada tahun 2024. Penurunan rasio pada 2022 kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan pada tahun tersebut.

Meskipun terjadi variasi dalam rasio, tren peningkatan jumlah lulusan menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki potensi sumber daya manusia yang kuat. Keberadaan populasi berpendidikan tinggi ini menjadi aset penting dalam memperkuat daya saing daerah, baik di tingkat lokal maupun dalam konteks persaingan regional dan nasional.

2.1.3.4.2. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah indikator demografis yang menggambarkan jumlah penduduk usia non-produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) yang ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun). Rasio ini digunakan untuk menganalisis potensi beban ekonomi dan sosial yang ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam suatu wilayah.

Tabel 2.42 Angka Ketergantungan Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Ketergantungan	-	40,91	40,66	41,32	41,08	41,15
2	Penduduk usia <15 th & usia >64 th	jiwa	120.802	120.106	120.698	120.760	121.162
3	Penduduk Usia 15-64 th	jiwa	295.315	295.403	292.099	293.945	294.443

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, angka ketergantungan selama periode 2020–2024 cenderung stabil, dengan nilai berkisar antara 40,66 hingga 41,32. Pada tahun 2024, rasio ketergantungan tercatat sebesar 41,15, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 41 penduduk usia tidak produktif. Meskipun mengalami sedikit fluktuasi, angka ini tergolong rendah dan masih berada dalam batas yang relatif ideal secara demografis.

Stabilitas angka ketergantungan ini mencerminkan struktur penduduk yang masih didominasi oleh kelompok usia produktif, yang dapat menjadi peluang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jika diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Upaya untuk mengelola beban ketergantungan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan jumlah penduduk usia produktif, tetapi juga melalui penyediaan lapangan kerja, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, kelompok usia produktif dapat lebih optimal dalam mendukung pembangunan sekaligus menopang kebutuhan kelompok non-produktif secara berkelanjutan.

2.1.3.5. IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.5.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang sebesar 13,01% terhadap total PDRB—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Namun demikian, sejak tahun tersebut, kontribusinya terus menurun secara bertahap hingga mencapai 12,02% pada tahun 2024 (angka sangat sementara). Penurunan kontribusi ini dapat mengindikasikan terjadinya perubahan struktur ekonomi daerah, dengan sektor industri pengolahan mengalami perlambatan relatif dibanding sektor lainnya. Tabel berikut menunjukkan tren kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur PDRB Kota Yogyakarta.

Tabel 2.43 Persentase PDRB Industri Pengolahan Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB

Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i> (%)	13,01	12,56	12,17	12,20	12,02

*) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025

2.1.3.5.2. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum

Persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar 10,92%, dan terus meningkat hingga mencapai 13,44% pada tahun 2024 (angka sangat sementara).

Tabel 2.44 Persentase PDRB Akomodasi dan Makan Minum Terhadap Keseluruhan PDRB ADHB

Sektor	Satuan	2020	2021	2022	2023*	2024**
Akomodasi dan Makan Minum	Persen	10,92	11,13	12,30	12,88	13,44

*) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025

Peningkatan kontribusi sektor ini erat kaitannya dengan membaiknya sektor pariwisata pascapandemi COVID-19, yang mendorong pertumbuhan usaha penginapan, restoran, dan jasa boga lainnya. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menjadi faktor utama yang mendorong aktivitas ekonomi di subsektor ini. Perkembangan positif ini mencerminkan peran strategis sektor akomodasi dan makan minum sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Kota Yogyakarta.

2.1.3.5.3. Rasio Penduduk yang Bekerja

Indikator rasio penduduk yang bekerja dalam konteks ini dihitung sebagai persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap total angkatan kerja. Secara teknis, indikator ini identik dengan tingkat penyerapan angkatan kerja, atau dikenal pula sebagai *Employment Rate/Ratio* (ER). Indikator ini sendiri digunakan untuk melihat tingkat penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar proporsi angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan, yang pada gilirannya mencerminkan kondisi pasar kerja yang relatif sehat.

Tabel 2.45 Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020				2021	2022	2023	2024
			247.092	262.125	267.712	223.828				
1	Angkatan kerja	jiwa	247.092	262.125	267.712	223.828			216.299	

No	Indikator	Satuan	2020				2021	2022	2023	2024
			2	Bekerja	jiwa	224.468	238.202	248.484	210.246	203.748
3	Pengangguran	jiwa	22.624				23.923	19.228	13.582	12.551
4	Rasio penduduk bekerja atau ER = (2)/(1)	%	90,84				90,87	92,82	93,94	94,21

Sumber: BPS Kota Yogyakarta – Sakernas Agustus, diolah (2025)

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus yang diolah oleh BPS Kota Yogyakarta, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2020, rasio ini berada di angka 90,84%, kemudian sedikit naik menjadi 90,87% pada 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga 2024, dengan rasio masing-masing sebesar 92,82%; 93,94%; hingga mencapai 94,21% pada tahun 2024.

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk dalam kelompok angkatan kerja yang berhasil memperoleh pekerjaan. Meskipun fluktuasi terjadi pada jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja setiap tahunnya, tren rasio ini tetap mengarah positif. Hal ini mencerminkan kondisi pasar kerja yang relatif stabil dan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang membaik.

2.1.3.5.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Mengacu pada definisi Booklet Sakernas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Angka ini mencerminkan seberapa besar potensi tenaga kerja yang tersedia dan aktif di pasar kerja suatu wilayah.

TPAK sendiri merupakan indikator penting dalam perencanaan ketenagakerjaan karena memberikan gambaran mengenai potensi tenaga kerja yang siap dimobilisasi. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja terlibat dalam pasar tenaga kerja, sedangkan TPAK yang rendah dapat mengindikasikan hambatan partisipasi seperti keterbatasan akses pekerjaan, beban rumah tangga, atau ketimpangan sosial dan ekonomi.

Tabel 2.46 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020				2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,62	71,86	72,60	74,08	74,78			

Sumber: BPS Provinsi DIY – Sakernas Agustus, 2025

Selama periode 2020–2024, TPAK di Kota Yogyakarta menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2020, nilai TPAK tercatat sebesar 68,62%, kemudian terus mengalami kenaikan hingga mencapai 74,78% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik dengan bekerja maupun sedang mencari pekerjaan.

Tren peningkatan TPAK ini dapat diartikan sebagai sinyal positif terhadap dinamika ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi sehingga memperkuat potensi pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3.5.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) merupakan indikator yang menunjukkan persentase perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini penting untuk memahami sejauh mana penduduk perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi formal dan informal.

Tabel 2.47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

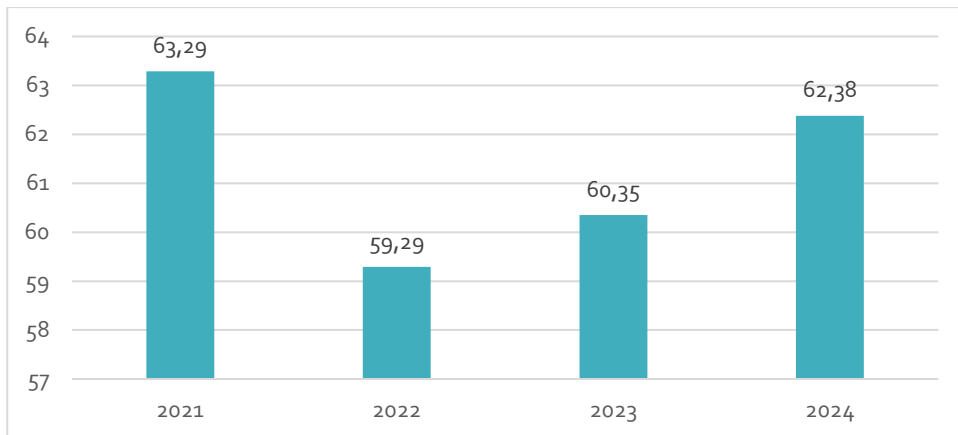
Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	61,30	65,11	63,72	64,49	64,19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Di Kota Yogyakarta, TPAK Perempuan dalam periode 2020–2024 menunjukkan pola yang relatif fluktuatif. Pada awal pandemi COVID-19 (2020), TPAK perempuan berada di angka 61,30%. Kemudian, pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 65,11% seiring dengan proses pemulihan ekonomi, di mana banyak pekerja, termasuk perempuan, kembali masuk ke pasar kerja setelah sempat terdampak pembatasan aktivitas ekonomi. Setelah itu, angka TPAK perempuan bergerak dalam kisaran 63–64%, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 64,19%. Konsistennya angka TPAK perempuan di atas 60% mencerminkan bahwa partisipasi ekonomi perempuan di Kota Yogyakarta tergolong cukup kuat.

2.1.3.5.6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks inovasi daerah memiliki peran penting bagi peningkatan produktivitas sektor ekonomi karena memberikan gambaran mengenai tingkat inovasi daerah yang telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerah masing-masing.



Gambar 2.23 Nilai Indeks Inovasi Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021-2024

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Dengan mengacu pada kriteria penilaian dalam penghitungan indeks inovasi daerah, nilai indeks inovasi daerah di Kota Yogyakarta pada periode 2021-2024 masuk dalam dua kategori. Nilai indeks inovasi daerah pada rentang 60,01 – 100 termasuk dalam kategori daerah sangat inovatif, yang dicapai Kota Yogyakarta pada tahun 2021, 2023, dan 2024.

Sementara itu, rentang 35,00–60,00 termasuk dalam kategori inovatif yang diperoleh Kota Yogyakarta pada tahun 2022. Pada tahun 2024, Kota Yogyakarta mengirimkan 44 inovasi daerah melalui Forum *Innovative Government Award* (IGA). Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mengirimkan 49 inovasi.

2.1.3.5.7. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perhitungan persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dari indikator ini, dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga dapat menggambarkan kemajuan Kota Yogyakarta. Berikut data angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.48 Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tidak/Belum Sekolah	Persen	15,09	15,9	16,48	16,57	16,90
2	Belum Tamat SD/Sederajat	Persen	10,29	10,17	10	9,84	9,69
3	Tamat SD/Sederajat	Persen	9,74	9,51	9,39	9,31	9,15
4	SLTP/Sederajat	Persen	12,49	12,3	12,17	12,04	11,83
5	SLTA/Sederajat	Persen	29,8	29,34	29,21	29,25	29,15
6	Diploma I/II	Persen	0,75	0,74	0,73	0,71	0,70
7	Diploma III/Akademi/Sarjana Muda	Persen	4,77	4,71	4,68	4,67	4,64
8	Diploma IV/Strata I	Persen	15,15	15,24	15,35	15,56	15,84
9	Strata II	Persen	1,71	1,74	1,78	1,82	1,89
10	Strata III	Persen	0,2	0,21	0,21	0,21	0,22

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data angka pendidikan yang ditamatkan di atas, pada kurun waktu 2020 hingga 2024 terdapat penurunan pada tingkat belum tamat SD/Sederajat, tamat SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma I/II, dan Diploma III/Akademi/Sarjana Muda. Sedangkan peningkatan terdapat pada kategori tidak/belum sekolah dan jenjang Diploma IV dan Strata. Peningkatan pada jenjang tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesadaran Masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan tinggi.

2.1.3.6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.6.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencerminkan nilai investasi fisik (kapital) berupa bangunan, peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Kapital ini digunakan sebagai input tidak langsung dalam proses produksi dan bersumber dari baik produksi domestik maupun impor.

PMTB menjadi indikator strategis untuk melihat kapasitas produksi jangka panjang, serta menjadi cerminan integrasi ekonomi suatu daerah dalam konteks nasional dan global. Semakin tinggi nilai PMTB, semakin besar pula potensi pertumbuhan ekonomi dan partisipasi dalam rantai pasok global.

Pertumbuhan PMTB umumnya dipengaruhi oleh aktivitas pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan, revitalisasi pasar dan fasilitas pangan, serta pembangunan sarana publik seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Di Kota Yogyakarta, besaran nilai PMTB sendiri menunjukkan fluktuasi pertumbuhan selama periode 2020–2024 sebagaimana dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.49 Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total PMTB					
a. ADHB (Juta Rp)	8.940.398,0	9.930.354,2	10.693.786,10	11.543.603,20	12.099.314,74
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	5.547.823,6	6.026.212,9	6.285.800,37	6.561.014,53	6.765.982,86
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	25,03	25,77	25,08	24,99	24,49
Pertumbuhan					
Total PMTB (%)	-13,98	8,62	4,31	4,38	3,12

*) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2020, PMTB Kota Yogyakarta mencatat pertumbuhan negatif sebesar -13,98% sebagai akibat dari kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi mulai terjadi pada tahun 2021, tercermin dari lonjakan pertumbuhan PMTB sebesar 8,62%. Tren positif berlanjut pada 2022 dan 2023, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,31% dan 4,38%.

Namun demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan kembali melambat menjadi 3,12%. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja modal dalam APBD, terutama pada kategori pembangunan gedung, jaringan jalan, dan irigasi, yang berdampak pada penurunan investasi fisik dalam perekonomian.

Lebih lanjut, meskipun nilai nominal PMTB terus meningkat setiap tahun, proporsinya terhadap total PDRB cenderung menurun sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PMTB berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan total PDRB.

2.1.3.6.2. Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa memainkan peran penting dalam mendorong integrasi ekonomi Kota Yogyakarta dengan pasar global. Peningkatan ekspor mencerminkan daya saing produk dan jasa lokal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor-sektor berorientasi ekspor.

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat peran perdagangan luar negeri adalah nilai ekspor neto, yaitu selisih antara ekspor dan impor barang serta jasa. Nilai ekspor neto yang positif menunjukkan surplus, sedangkan nilai negatif mencerminkan defisit perdagangan luar negeri.

Nilai dan Persentase Ekspor Neto Barang dan Jasa 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024
ADHB (Juta Rp)	-3.952.780,63	-3.058.410,02	-1.796.872,10	-1.948.007,18	-2.204.918,74

ADHK 2010 (Juta Rp)	1.999.019,77	2.645.298,39	3.350.111,56	3.684.535,10	3.980.795,58
Proporsi terhadap PDRB ADHB (%)	-11,06	-7,94	-4,22	-4,22	-4,46

*) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2025, 2025

Selama periode 2020–2024, nilai ekspor neto Kota Yogyakarta tercatat negatif setiap tahunnya, yang berarti nilai impor barang dan jasa masih lebih besar daripada nilai ekspornya. Meskipun demikian, terdapat tren perbaikan, terutama pada periode 2020–2022, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, nilai ekspor neto berdasarkan ADHB mencapai -Rp3,95 triliun dan secara bertahap membaik hingga mencapai -Rp1,80 triliun pada 2022. Namun, pada tahun 2024, nilai ekspor neto kembali menurun menjadi -Rp2,20 triliun.

Meskipun nilai ekspor bruto mengalami pertumbuhan, tingginya ketergantungan terhadap barang dan jasa impor menyebabkan posisi ekspor neto masih mengalami defisit. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ekspor belum sepenuhnya mampu mengimbangi permintaan terhadap barang dan jasa dari luar.

Ke depannya, untuk memperkecil defisit ekspor neto, diperlukan strategi penguatan sektor ekspor. Beberapa di antaranya ialah melalui diversifikasi produk unggulan, peningkatan kualitas dan daya saing produksi, serta perluasan akses pasar internasional. Selain itu, substitusi impor juga dapat didorong melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Harapannya, pendekatan peningkatan daya saing ini dapat menjadi salah satu mekanisme untuk memperbaiki neraca perdagangan daerah secara bertahap.

2.1.3.7. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.7.1. Indeks Kualitas Infrastruktur

2.1.3.7.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Penduduk yang tinggal di Kota Yogyakarta, belum seluruhnya memiliki akses hunian layak. Berdasarkan data di bawah, cakupan ketersediaan rumah layak huni terus mengalami peningkatan. Cakupan rumah layak huni pada tahun 2020 menunjukkan angka 97,89% dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 98,70%. Peningkatan terjadi karena adanya kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui APBD Kota Yogyakarta, APBD DIY, dan pendanaan CSR. Berikut cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.50 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	122.310	122.764	122.924	123.139	123.324
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Unit	2.640	2.187	2.027	1.812	1.627
Jumlah Seluruh Rumah	Unit	124.951	124.951	124.951	124.951	124.951
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	97,89	98,25	98,38	98,55	98,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

2.1.3.7.3. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan

Kecepatan rata-rata kendaraan ditentukan berdasarkan total jarak yang ditempuh terhadap total waktu perjalanan. Kecepatan rata-rata kendaraan berperan dalam mengetahui kondisi lalu lintas, efisiensi sistem transportasi dan infrastruktur jalan.

Tabel 2.51 Kecepatan Rata-rata Kendaraan

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kecepatan rata-rata kendaraan	(km/jam)	33,97	26,81	32,27	26,20	25,76

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

Fluktuasi kecepatan rata-rata kendaraan di Kota Yogyakarta ditandai dengan peningkatan di tahun 2020 dan 2022. Pada tahun 2020, peningkatan kecepatan rata-rata disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak dengan berkurangnya aktivitas lalu lintas yang memudahkan kendaraan lebih cepat bergerak. Sedangkan pada tahun 2022, peningkatan kecepatan rata-rata kendaraan disebabkan oleh dua aspek, yaitu penerapan sistem *gyratory* di beberapa ruas jalan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas dan survei kecepatan rata-rata kendaraan yang tidak dilakukan pada bulan September, tetapi di bulan Mei s.d Agustus.

2.1.3.8. Stabilitas Ekonomi Makro dan Iklim Investasi

2.1.3.8.1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator yang menggambarkan kapasitas fiskal daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Rasio ini diperoleh dari perbandingan antara total penerimaan pajak daerah dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kontribusi pendapatan pajak terhadap ukuran ekonomi daerah, yang mencerminkan efektivitas pemungutan pajak dari basis ekonomi lokal.

Di Kota Yogyakarta, rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan tren meningkat selama periode 2020–2023. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 0,96%, dan meningkat bertahap hingga mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 1,19%. Namun, pada tahun 2024, rasio ini sedikit menurun menjadi 1,17% sebagaimana dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.52. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penerimaan Pajak Daerah	Miliar Rupiah	342,78	372,46	482,27	552,12	575,87
PDRB ADHB	Miliar Rupiah	36.492,64	35.724,05	42.621,75	46.193,84	49.389,88
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,94	1,04	1,13	1,19	1,17

Sumber: DJPK Kemenkeu dan Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022 & 2025, Data diolah (2025)

Di Kota Yogyakarta, rasio ini mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, mencerminkan efektivitas pemungutan pajak seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun pada tahun 2024, meskipun penerimaan pajak daerah secara nominal meningkat menjadi 575,87 Miliar

Rupiah, rasio pajaknya justru menurun dari 1,19% (2023) menjadi 1,17%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak, terutama jika sektor yang tumbuh memiliki potensi pajak yang relatif rendah.

Penurunan rasio ini kemudian dapat dijelaskan oleh dinamika struktur ekonomi Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini, terdapat pergeseran kontribusi sektoral dalam PDRB, seperti meningkatnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa keuangan dan asuransi, sedangkan sektor industri pengolahan dan konstruksi justru mengalami penurunan.

Adapun sektor-sektor yang tumbuh pesat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terefleksikan dalam basis penerimaan pajak daerah. Hal ini menandakan adanya celah antara potensi ekonomi riil dengan efektivitas sistem perpajakan daerah dalam menangkap pertumbuhan tersebut.

Di sisi lain, penerimaan Kota Yogyakarta dari pos bagi hasil pajak pusat juga menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir, dari Rp57,58 miliar pada 2022 menjadi Rp52,83 miliar pada 2024. Kontraksi ini terutama disebabkan oleh penurunan drastis pada pos Pajak Bumi dan Bangunan serta nihilnya pendapatan dari PPh Pasal 25/29 di 2024. Ketidaksinkronan antara pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak daerah, dan alokasi bagi hasil menegaskan perlunya optimalisasi basis pajak, peningkatan akurasi data ekonomi sektoral, serta penguatan koordinasi fiskal antara pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan kapasitas fiskal Kota Yogyakarta.

2.1.3.8.2. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak dan retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta juga mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PERDA Kota Yogyakarta No. 10/2023).

Jumlah jenis pajak yang diberlakukan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2020-2024 tidak berubah, yaitu sepuluh jenis pajak daerah. Sumber pendapatan pajak daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari: (1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, (2) Pajak Air Tanah, (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (4) Pajak Hiburan, (5) Pajak Hotel, (6) Pajak Parkir, (7) Pajak Penerangan Jalan, (8) Pajak Reklame, (9) Pajak Restoran, dan (10) Pajak Sarang Burung Walet.

Lebih lanjut, jumlah jenis retribusi di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2024 juga tidak mengalami perubahan, yaitu 14 jenis retribusi. Retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta terdiri dari: (1) pelayanan kesehatan; (2)

pelayanan persampahan/kebersihan; (3) pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; (4) pelayanan parkir di tepi jalan umum; (5) pelayanan pasar; (6) pengujian kendaraan bermotor; (7) pengolahan limbah cair; (8) pelayanan tera/tera ulang; (9) perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing; (10) pemakaian kekayaan daerah; (11) tempat khusus parkir; (12) rumah potong hewan; (13) penjualan produksi usaha daerah; (14) izin mendirikan bangunan (IMB).

Tabel 2.53 Jenis Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pendapatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak	jenis	10	10	10	10	10
2	Retribusi	jenis	14	14	14	14	14
Jumlah			24	24	24	24	24

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Meskipun secara jenis dan jumlah tidak mengalami perubahan, nilai penerimaan dari pajak dan retribusi daerah mampu menunjukkan dinamika yang mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Penerimaan pajak dan retribusi daerah sendiri sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 dan pembatasan aktivitas masyarakat. Akan tetapi, sejak 2021, tren pemulihan ekonomi mendorong peningkatan signifikan pada realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Yogyakarta.

Pada 2024, penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp575,87 miliar dan retribusi daerah mencapai Rp76,24 miliar. Dengan demikian, total penerimaan daerah dari kedua pos penerimaan, yakni pajak dan retribusi daerah, mampu mencapai sebesar Rp652,11 miliar—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Komposisi kontribusi juga menunjukkan pola yang khas. Pajak hotel menjadi penyumbang terbesar pajak daerah tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 9,22% dari total penerimaan pajak daerah. Nilai ini mencerminkan peran penting sektor pariwisata dan perhotelan dalam perekonomian daerah Kota Yogyakarta. Sementara itu, dari sisi retribusi, kategori jasa umum mendominasi dengan kontribusi berkisar 59% dari total retribusi yang menunjukkan bahwa layanan dasar, seperti halnya kesehatan, kebersihan, dan pasar tetap menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik yang dikenai tarif oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kestabilan jumlah jenis pungutan ini di satu sisi memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi, namun di sisi lain juga menuntut optimalisasi dari sisi pengelolaan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan masyarakat untuk mencapai potensi fiskal daerah yang maksimal.

Tabel 2.54 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pendapatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Daerah	juta rupiah	342.781	372.463	482.270	552.125	575.872
2	Retribusi Daerah	juta rupiah	23.311	26.855	29.052	29.670	76.242
Jumlah		juta rupiah	483.694	366.091	399.318	511.321	652.114

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

2.1.3.8.3. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam peraturan daerah (perda). Dengan adanya perda yang mengatur investasi, maka ada dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Peraturan daerah (perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi pada perda yang membahas terkait dengan perizinan, lalu lintas barang dan jasa, serta ketenagakerjaan. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator Jumlah Perda	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Terkait Perizinan	Buah	55	60	62	63	3
2	Terkait Lalu Lintas Barang dan Jasa	Buah	49	49	49	49	0
3	Terkait Ketenagakerjaan	Buah	41	41	42	42	1

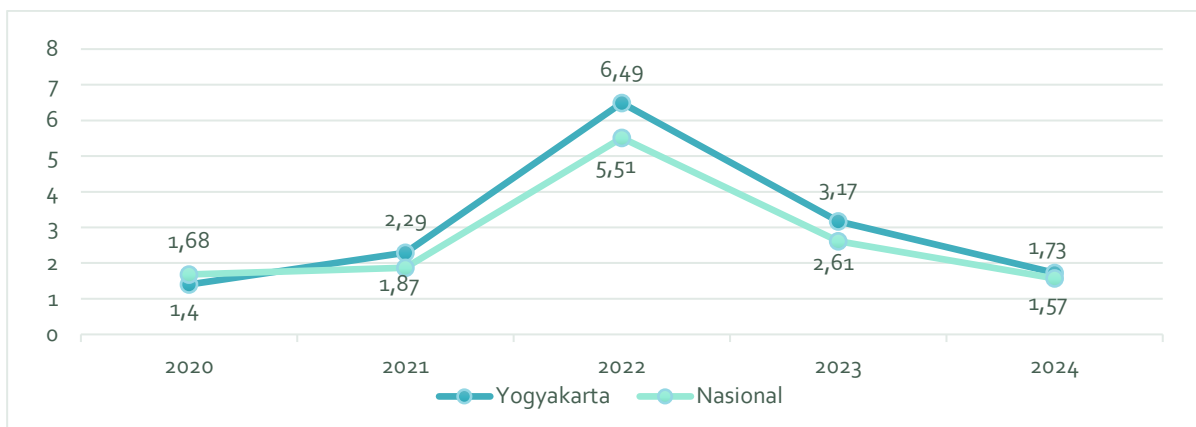
*) Data bersumber dari penetapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024 saja bukan merupakan akumulasi, dan telah sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024

Sumber: Bagian Hukum Kota Yogyakarta, 2025

Selama periode tahun 2020-2024 jumlah Perda di Kota Yogyakarta yang mendukung iklim investasi cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 terdapat tiga buah perda baru terkait perizinan, yaitu: 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat; 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Selain berkaitan dengan perizinan, terdapat Perda baru terkait ketenagakerjaan tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

2.1.3.8.4. Tingkat Inflasi

Indeks perkembangan harga atau inflasi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Berikut data indeks perkembangan harga/inflasi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024



Gambar 2.24 Inflasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, tingkat inflasi tahunan di Kota Yogyakarta periode 2020–2024 memperlihatkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 1,40%, relatif rendah karena melemahnya permintaan akibat pandemi COVID-19. Inflasi meningkat secara bertahap di tahun 2021 menjadi 2,29%, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2022 ketika inflasi melonjak hingga mencapai 6,49%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 5,51%.

Menurut publikasi "Inflasi Kota Yogyakarta 2022" oleh BPS Kota Yogyakarta, dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh di antaranya memberikan andil positif terhadap inflasi. Kontributor terbesar adalah kelompok pengeluaran Transportasi dengan andil 1,94%, diikuti kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,55%, serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,93%.

Dalam konteks kelompok pengeluaran Transportasi, salah satu penyebab kenaikan inflasi pada tahun 2022 ialah tingginya harga komoditas minyak dunia yang menyebabkan Pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite sebesar 30,72%, Solar sebesar 32,04%, dan Pertamina sebesar 16%.

Lebih lanjut, dari sisi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kenaikan harga disumbangkan oleh peningkatan harga global yang tajam dari komoditas minyak kelapa sawit (*crude palm oil*) yang menyebabkan tingginya harga minyak goreng dan kelangkaan pasokan minyak goreng.

Memasuki tahun 2023, tekanan inflasi berhasil dikendalikan dengan baik, yang tercermin dari turunnya angka inflasi menjadi 3,17%. Penurunan ini mengindikasikan efektivitas kebijakan stabilisasi harga dan perbaikan distribusi barang serta bahan pokok di kota tersebut. Adapun pada tahun 2024, inflasi Kota Yogyakarta terus menurun ke angka yang lebih rendah, yakni sebesar 1,73%, menunjukkan tingkat stabilitas harga yang semakin baik sejalan dengan inflasi nasional yang juga turun ke 1,57%.

Secara keseluruhan, tren inflasi Kota Yogyakarta selama periode lima tahun tersebut mencerminkan kondisi ekonomi kota yang responsif terhadap dinamika nasional dan global. Meski mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 akibat tekanan harga transportasi serta bahan pangan, langkah-langkah pengendalian harga yang diambil mampu menstabilkan inflasi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini memperlihatkan respons kebijakan yang relatif efektif dari pemerintah dalam mengelola fluktuasi harga dan menjaga daya beli masyarakat.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

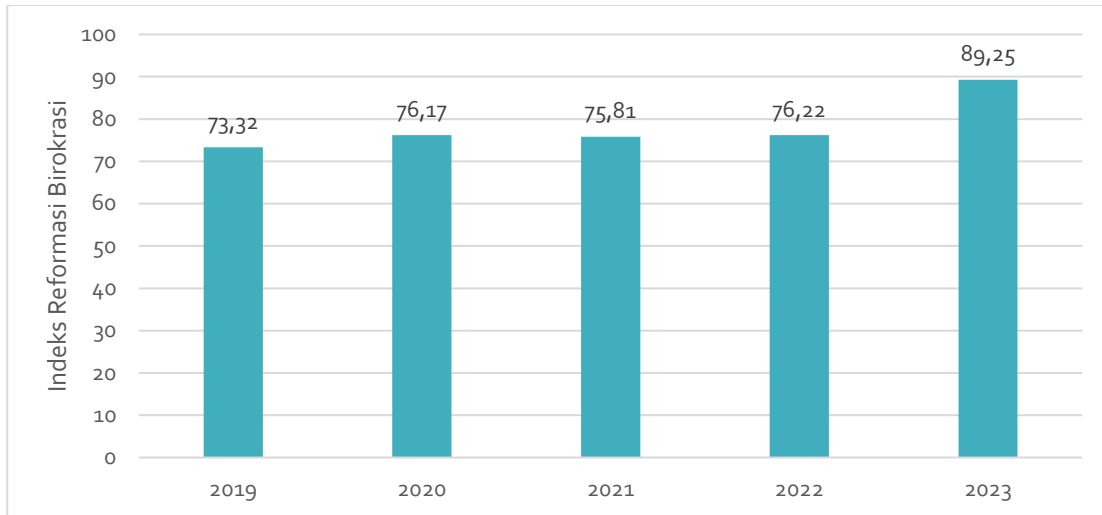
2.1.4.4. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

2.1.4.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*proses bisnis*) dan sumber daya manusia (aparatur), maka dilakukan penilaian melalui indeks reformasi birokrasi (RB). Nilai indeks reformasi birokrasi menjadi dasar pengelompokan kondisi reformasi daerah ke dalam kategori Istimewa (90–100), Memuaskan (80–90), Sangat Baik (70–80), Baik (60–70), Cukup (50–60), Kurang (30–50), dan sangat kurang (0–30).

Secara umum, nilai indeks reformasi birokrasi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung terus mengalami perbaikan. Nilai indeks reformasi birokrasi terendah yang dicapai Kota Yogyakarta tercatat pada tahun 2017 sebesar 70,63. Sementara itu, nilai indeks reformasi birokrasi tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar 89,25% dengan predikat A- atau terjadi peningkatan

Indeks RB dari predikat BB di tahun sebelumnya. Namun, hasil evaluasi tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.



Gambar 2.25 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Sumber: LHE RB dari KemenPANRB, 2025

Pada tahun 2023, beberapa komponen dan sub komponen yang masih perlu ditingkatkan antara lain:

1. RB General - Capaian pelaksanaan kebijakan RB
 - Indikator Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral
 - Indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan
 - Indikator Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas
 - Indikator Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi
 - Indikator Tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah
2. RB General – Capaian sasaran strategis
 - Indikator BerAkhhlak
 - Indikator Survei kepuasan masyarakat
3. RB Tematik – Strategi pelaksanaan RB tematik
 - Indikator Pengentasan kemiskinan (capaian *output*)
 - Indikator Digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stunting (capaian *output*)
 - Indikator Pengendalian inflasi (capaian *output*)
 - Indikator Pengentasan kemiskinan (capaian dampak)
 - Indikator Realisasi investasi (capaian dampak)
 - Indikator Pengendalian inflasi (capaian dampak)

2.1.4.4.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah penilaian hasil pelaksanaan dari SPBE yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indeks SPBE dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi sejauh mana upaya penguatan digitalisasi layanan pemerintahan serta pelaksanaan *good governance* di daerah.

Evaluasi SPBE dinilai dari 4 domain dan 8 aspek penilaian dengan rincian:

1. Domain 1 (Kebijakan SPBE)
 - Aspek 1 – Kebijakan internal terkait tata kelola SPBE
2. Domain 2 (Tata Kelola SPBE)
 - Aspek 2 – Perencanaan strategis
 - Aspek 3 – Teknologi informasi dan komunikasi
 - Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE
3. Domain 3 (Manajemen SPBE)
 - Aspek 5- Penerapan manajemen SPBE
 - Aspek 6 – Audit TIK
4. Domain 4 (Layanan SPBE)
 - Aspek 7 – Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
 - Aspek 8 – Layanan publik berbasis elektronik

Tabel 2.56 Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Domain Kebijakan	N/A	1,6	N/A	2,3	4,0
Domain Tata Kelola	N/A	2,8	N/A	2,5	3,0
Domain Manajemen	N/A	1	N/A	2,64	1,6
Domain Layanan	N/A	4,19	N/A	4,5	4,3
Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik	N/A	2,98	N/A	3,41	3,5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi, 2025

Nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Yogyakarta dari tahun 2021 menuju 2024 mengalami peningkatan sampai menjadi 3,45.

Nilai indeks SPBE dikelompokkan menjadi 5 peringkat, yaitu (1) Memuaskan (4,2 – 5,0); (2) Sangat Baik (3,5 - <4,2); (3) Baik (2,6 - <3,5); (4) Cukup (1,8 - <2,6); dan (5) Kurang (<1,8). Pada tahun 2021, 2023, dan 2024, hasil evaluasi SPBE Kota Yogyakarta mendapatkan predikat baik. Aspek SPBE di tahun 2023 yang memperoleh nilai tinggi adalah layanan publik berbasis elektronik, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggara SPBE dengan capaian nilai di atas 3,50. Sementara itu, aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk meraih hasil Indeks SPBE yang lebih baik adalah penerapan manajemen SPBE, audit TIK, kebijakan internal terkait tata kelola SPBE serta perencanaan strategis SPBE karena nilai aspek tersebut masih berada di bawah 2,60.

Pada tahun 2024, aspek SPBE yang menjadi keunggulan Kota Yogyakarta adalah layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Pengintegrasian aplikasi umum pada bidang

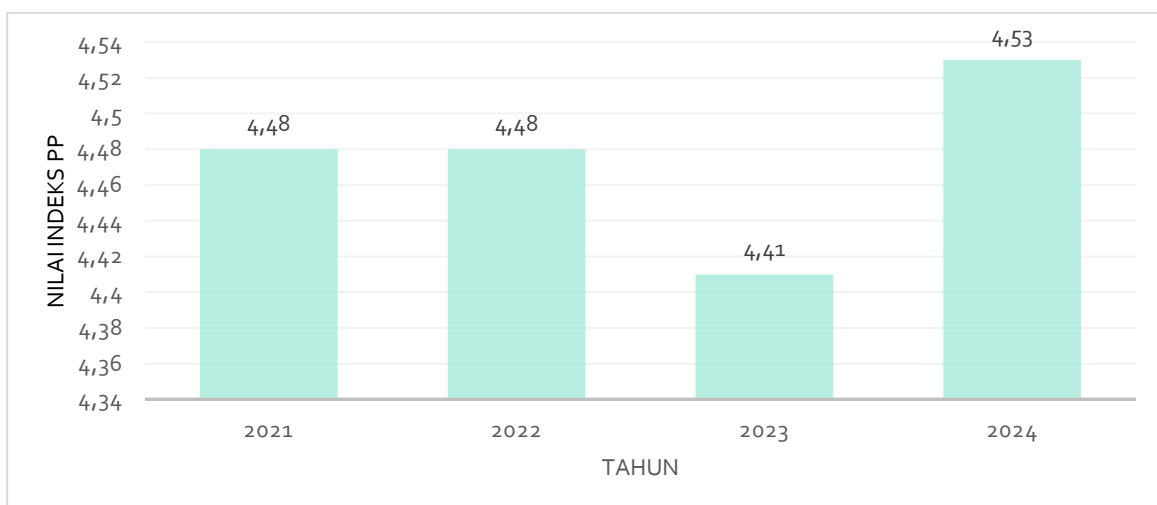
perencanaan penganggaran dan keuangan yang dibuktikan dengan penggunaan aplikasi berbagi menggunakan SIPD, layanan pengadaan barang dan jasa dengan aplikasi SPSE dari LPP, layanan kepegawaian dengan aplikasi SIMPEG serta layanan kearsipan dengan aplikasi SRIKANDI menjadi faktor pendorong tingginya capaian aspek layanan administrasi pemerintahan. Sementara itu, layanan publik berbasis elektronik dengan berbagai kolaborasi layanan yang terintegrasi dan bermanfaat bagi publik membuat layanan administrasi pemerintahan dan publik dapat saling terkait sehingga menghasilkan kolaborasi yang baik. Hal tersebut mengindikasikan adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan SPBE di dalam Pemerintahan Kota.

Kendati demikian, masih adanya kelemahan pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE, perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penerapan manajemen SPBE serta audit TIK menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan berbagai aspek SPBE dalam proses implementasinya.

Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengembangkan kebijakan internal yang berpedoman kepada berbagai landasan hukum. Pemerintah Kota juga di harapkan untuk mengembangkan perencanaan strategis SPBE dengan mengacu kepada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 132 Tahun 2022, untuk menjadi panduan bagi penyiapan aspek teknologi informasi dan komunikasi, serta penerapan manajemen SPBE. Dalam aspek manajemen SPBE, pemerintah kota diharapkan mengembangkan pedoman dan SOP untuk setiap indikator di aspek manajemen ini serta menyiapkan mekanisme implementasinya di seluruh OPD. Selain itu Pemerintah kota juga menyelenggarakan tahapan audit TIK untuk menjamin kualitas dan keandalan infrastruktur, aplikasi dan keamanan seluruh aset TIK tersebut.

2.1.4.4.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan ukuran kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh evaluator dari kementerian PANRB. IPP dinilai dari beberapa aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. IPP Kota Yogyakarta memiliki angka yang cukup tinggi dengan tren pertumbuhan yang meningkat hingga di tahun 2024, IPP Kota Yogyakarta menjadi kategori A.



Gambar 2.26 Nilai Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2024

Sumber: LHE RB dari KemenPANRB, 2025

Kenaikan nilai indeks pelayanan publik Kota Yogyakarta, sejalan dengan meningkatnya nilai atau indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nilai tersebut didapatkan dari hasil survei kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Tabel 2.57 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	80,45	80,69	81,4	84,24	85,19

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Kenaikan nilai Indeks Pelayanan Publik berdasarkan KemenPANRB dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik berdasarkan survei masyarakat menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat terus mengalami perbaikan yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

2.1.4.5. Hukum yang Berkeadilan dan Keamanan yang Tangguh

2.1.4.5.1. Tingkat Kriminalitas (Crime Rate)

Angka Kriminalitas adalah perbandingan jumlah laporan tindak kriminalitas per 100.000 penduduk. Jenis pelanggaran/kejahatan yang termasuk ke dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Yogyakarta antara lain pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian motor, pemerasan, penipuan, dan sebagainya. Kriminalitas adalah permasalahan yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Angka kriminalitas yang tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan sehingga seluruh pihak harus mendukung upaya penurunan angka kriminalitas. Keamanan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan oleh investor untuk membuat keputusan terkait investasi; tingkat kriminalitas yang tinggi dapat menciptakan persepsi negatif terhadap keamanan investasi dan potensi risiko operasional. Selain itu, tingkat kriminalitas yang rendah dapat mencerminkan stabilitas sosial yang baik sehingga mendukung keberlanjutan investasi jangka panjang.

Tabel 2.58 Angka Kriminalitas per 100.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*
Angka kriminalitas per 100.000 Penduduk	Kasus/ Jiwa	159,00	184,15	240,16	179,79	153,27

*) Diolah berdasarkan perhitungan angka kriminalitas pada BPS dengan jumlah penduduk

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta dan BPS Kota Yogyakarta, 2025; data diolah

Pada tahun 2024 angka kriminalitas didominasi oleh kasus lainnya (narkoba, UU ITE/Ilegal akses, tindak pidana perdagangan orang, dan lain-lain) sebanyak 141 kasus, kasus penipuan sebanyak 82 kasus, pencurian sebanyak 68 kasus, serta penganiayaan sebanyak 60 kasus. Selain angka kriminalitas yang dilaporkan, terdapat indikator angka kriminalitas yang tertangani. Perhitungan angka kriminalitas yang tertangani didapatkan dari hasil perbandingan jumlah tindak kriminal tertangani dengan jumlah laporan tindak kriminalitas dalam satu tahun.

Tabel 2.59 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas	Kasus	373	516	695	692	406

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas	Kasus	594	693	910	819	502
3.	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Persen	62,79	74,46	76,37	84,49	80,88

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data yang ada, angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta yang semula mengalami peningkatan, mulai menunjukkan penurunan di tahun 2024. Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai akibat adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya, angka kriminalitas yang tertangani mengalami peningkatan karena pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang membuat tingkat mobilitas masyarakat kembali meningkat. Tahun 2024 angka kriminalitas tertangani menurun selaras dengan menurunnya tindakan kriminalitas yang terjadi di 2024.

Upaya yang telah dilakukan Polresta Kota Yogyakarta untuk menekan angka kriminalitas: (1) peningkatan volume patroli, terutama di lokasi yang rawan kerumunan; (2) penempatan personal kepolisian di daerah rawan kejahatan; (3) pembentukan satgas saber pungli dan satgas anti *klithih*; (4) penetapan perda terkait pemasangan CCTV; serta (5) pelaksanaan operasi kepolisian secara terus menerus.

Tabel 2.60 Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani	Kasus	621	516	695	692	406
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	373.589	376.324	375.524	375.699	415.605
3.	Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk	Kasus	16,62	13,71	18,51	18,42	9,77

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2025

Pada indikator angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk, terjadi penurunan drastis di tahun 2024. Tahun 2022 menjadi tahun dengan capaian terburuk pada indikator angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk, yaitu sebesar 18,51 kasus. Sementara adanya angka kriminalitas yang tidak tertangani pada tahun 2021 disebabkan karena tersangka tindak kriminalitas yang tidak jelas karena korban tidak pernah bertemu dengan pelaku atau hanya berinteraksi secara *online*. Hal tersebut membuat penyelesaian tindak kriminalitas menjadi terhambat karena terbatasnya informasi atau data pelaku. Penurunan drastis pada tahun 2024 dapat menunjukkan bahwa upaya pencegahan tindak kriminal yang dilakukan berjalan cukup optimal.

2.1.4.5.2. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Selain angka kriminalitas, kondusivitas sebuah daerah dapat dilihat dari indikator sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Berikut ini realisasi beberapa indikator Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tabel 2.61 Indikator Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	persen	99,52	99,61	100	100	100
2	Persentase Penegakan PERDA	persen	92,4	89,97	100	100	100
3	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat	persen	84,18	94,73	97,72	97,22	100
4	Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	persen	88,57	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025

Indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan dan dari tahun 2022 hingga tahun 2024 telah mencapai 100% berturut-turut. Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada (K3) dilaksanakan melalui strategi penegakan Perda secara represif yustisi dan non yustisi. Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada Kota Yogyakarta mencapai 100% yang diperoleh dari rasio jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan sejumlah 5013 pelanggaran dari 5013 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 5013 pelanggaran didapat dari Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 4918 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 95 pelanggaran. Adapun kenaikan jumlah pelanggaran Perda dan Perkada pada Tahun 2023 terdapat pada pelanggaran Perda terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perkada/Perwal tentang larangan penggunaan kendaraan dengan penggerak motor listrik, dan Perda yang mengatur tentang PKL. Hal ini merupakan ekses dari pelonjakan jumlah wisatawan khususnya di Kawasan Malioboro yang berpotensi meningkatkan pelanggaran Perda dan Perkada tersebut di atas.

Pada tahun 2023 terjadi pelanggaran Perda sejumlah 95 kasus dan dapat terselesaikan semua. Jumlah pelanggaran ini turun dibandingkan dengan pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun 2022. Jumlah pelanggaran Perda Kota Yogyakarta didasarkan pada hasil penegakan secara yustisi dan telah terbukti melakukan pelanggaran Perda melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Penyelesaian penegakan Perda berdasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang selanjutnya dilakukan pelimpahan berkas pelanggaran ke Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk dilakukan sidang pelanggaran Perda. Persentase penyelesaian penegakan Perda tercapai 100% dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan tersangka pelanggaran dalam memenuhi Surat Panggilan pemeriksaan oleh PPNS. Adapun penurunan jumlah pelanggaran Perda secara yustisi dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh intensitas pelanggaran secara yustisi menurun dan penegakan

pelanggaran Perda yustisi diharapkan menjadi tindakan paling akhir dalam penyelesaian pelanggaran Perda (*ultimum remedium*).

Indikator persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat terealisasi 97,22% dengan tingkat capaiannya sebesar 100,37% pada tahun 2023 dan 2024. Indikator ini mengalami perubahan pada target kinerja menyesuaikan dengan kondisi yang dinamis pada tahun berjalan serta optimalisasi kualitas kinerja Perangkat Daerah, sehingga data pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan data pada tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi indikator kinerja persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebesar 100% selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Data potensi gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta sejumlah 150 potensi gangguan diperoleh dari laporan kegiatan operasional pengamanan, diantaranya laporan kegiatan pengamanan umum, pengamanan *event* di Kota Yogyakarta, penjagaan objek vital, adanya laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta laporan kegiatan pengamanan tertutup oleh anggota intel Pol PP. Penyelesaian terhadap laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ditindaklanjuti dengan melakukan upaya mediasi oleh petugas Satpol PP dengan tujuan untuk menghindari potensi terjadinya konflik horizontal yang lebih meluas. Dari sejumlah potensi gangguan di tahun 2024 dapat dikendalikan seluruhnya oleh petugas sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan kegiatannya.

2.1.4.6. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

2.1.4.6.1. Indeks Daya Saing Daerah Kota Yogyakarta Terhadap DIY dan Nasional

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Yogyakarta secara umum lebih tinggi dibandingkan DIY dan Nasional. Skor IDSD Kota Yogyakarta tahun 2024 adalah 4,39, sedangkan DIY dan Nasional adalah 3,97 dan 3,43. Hampir seluruh pilar IDSD Kota Yogyakarta memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan DIY maupun Nasional, kecuali pada pilar 4 (pilar stabilitas ekonomi makro) jika dibandingkan keduanya dan pilar 6 (pilar keterampilan) serta pilar 12 (pilar kapabilitas inovasi) jika dibandingkan dengan DIY.

Tingkat	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Kota Yogyakarta	4,67	4,34	5,00	3,94	4,17	4,27	4,26	4,97	4,34	4,61	3,70	4,39	4,39
D.I. Yogyakarta	4,53	3,17	4,36	4,14	4,18	4,43	3,10	4,58	2,78	4,28	3,37	4,72	3,97
Nasional	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43

Keterangan:

Pilar 1: Institusi

Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar 7: Pasar Induk

Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar 2: Infrastruktur

Pilar 5: Kesehatan

Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja

Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar 3: Adopsi TIK

Pilar 6: Keterampilan

Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025

Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pilar stabilitas ekonomi makro memberikan gambaran tentang kemampuan daerah mengelola ekonomi makro dari ancaman guncangan (*shock*) baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi ekonomi makro yang stabil menjadi kunci kepercayaan investor karena memberi rasa kepastian bagi pelaku ekonomi yang

menjalankan usaha sehingga berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas. Pilar keterampilan menggambarkan kualitas dan kuantitas pendidikan serta tenaga kerja pada suatu daerah. Sedangkan pilar kapabilitas inovasi mengukur kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong suatu daerah untuk kreatif, terkoneksi, berkolaborasi dan berkapasitas untuk mengubah ide menjadi suatu produk jasa atau barang. Indikator yang digunakan pada tingkat kota/kabupaten antara lain:

Tabel 2.62 Dimensi dan Indikator Pilar Stabilitas Ekonomi Makro dan Pilar Dinamisme Bisnis dalam IDSD

Dimensi	Indikator
Stabilitas Ekonomi Makro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas fiskal daerah 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Tingkat pengangguran terbuka 4. Indeks ketahanan pangan 5. Nilai ICOR (Investasi)
Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kerja saat ini 2. Tenaga kerja masa depan
Kapabilitas Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keanekaragaman tenaga kerja 2. Status pengembangan kluster 3. Publikasi ilmiah 4. Aplikasi kekayaan intelektual 5. Belanja riset 6. Indeks keunggulan lembaga riset 7. Aplikasi merek dagang

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2025

2.1.4.7. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.1.4.7.1. Urusan Pendidikan

a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan perhitungan dari rasio antara jumlah siswa pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Penitipan Anak dengan jumlah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Berikut data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.63 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	69,24	127,66	135,24	133,32	125,71

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di atas terdiri dari siswa yang berdomisili baik di Kota Yogyakarta maupun di luar Kota Yogyakarta. Berdasarkan data tersebut, rasio PAUD di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2022, tetapi pada dua tahun terakhir mengalami penurunan. Rasio PAUD melebihi angka 100% menunjukkan bahwa terdapat banyak anak dari luar kota yang bersekolah di TK/RA/Penitipan anak di Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2020, rasio PAUD cenderung rendah yaitu 69,24% akibat terdampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan proses pembelajaran dilakukan secara daring sehingga yang menunda untuk memasukkan anaknya pada jenjang TK. Pada tahun 2021 hingga 2022, rasio PAUD mengalami peningkatan signifikan menjadi 135,24% karena masa peralihan *new normal* dari pandemi Covid-19. Peningkatan yang cukup signifikan juga disebabkan jumlah ibu bekerja semakin tinggi dan adanya kesadaran untuk mendapatkan pendidikan lebih dini bagi anak balita. dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan karena jumlah siswa dan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan. Penurunan pada tahun 2024 diakibatkan oleh tutupnya 23 Satuan PAUD Sejenis (SPS) di 10 kemandren akibat kendala sinkronisasi Dapodik Kota Yogyakarta dan terdapat SPS yang sudah tidak aktif kegiatan pembelajarannya.

b) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang pada suatu tahun dari berbagai usia sedang sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pada suatu tahun berada pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Indikator APK dapat digunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK pada jenjang pendidikan apa pun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, meskipun mengabaikan aspek usia dari siswa yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Berikut data APK di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.64 Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	Persen	132,6	110,97	110,71	105,22	110,91
2	SMP/MTs	Persen	130,16	123,75	121,56	112,39	123,74

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan tabel di atas, APK dari setiap jenjang pendidikan memiliki nilai lebih dari 100% sehingga menunjukkan bahwa terdapat banyak penduduk dari luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020 sampai tahun 2024, APK pada jenjang SD/MI cenderung mengalami penurunan dari 132,3% menjadi 110,91%, meskipun pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sama halnya dengan APK jenjang SMP/MTs, pada kurun waktu 2020 hingga 2024 terus mengalami penurunan yaitu dari 130,16% menjadi 123,74%, meskipun tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pemberlakuan kebijakan Permendikbud terkait PPDB yang berdasar sistem zonasi, sehingga mengakibatkan minat penduduk luar kota bersekolah di Kota Yogyakarta juga menurun. Selain itu jumlah penduduk 7-12 tahun dan 13-15 tahun di Kota Yogyakarta lebih kecil dibandingkan jumlah siswa dan pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah kenaikan siswa yang seimbang.

c) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk kelompok usia tersebut. APM dianggap lebih mampu untuk menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu di jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan APK. Berikut data Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.65 Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	Persen	130,13	105,83	105,08	105,95	104,67
2	SMP/MTs	Persen	107,61	110,81	108,03	108,58	108,1

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, APM pada jenjang SD/MI pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan jumlah siswa usia 7-15 tahun dan penduduk usia 7-15 tahun. Untuk APM pada jenjang SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Nilai-nilai APM pada setiap jenjang sebagian besar berada di atas angka 100% sehingga mengindikasikan kecenderungan kondisi daya serap pendidik yang lebih baik dan semakin banyak penduduk usia sekolah pada tiap jenjang yang menikmati pendidikan sesuai dengan usianya. Selain itu kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta yang masih unggul sehingga menjadi referensi masyarakat DIY.

d) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah adalah perhitungan hasil membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Berikut data Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.66 Angka Partisipasi Sekolah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	Persen	99,99	99,99	99,99	100	99,99
2	SMP/MTs	Persen	100	99,98	99,97	99,99	99,98

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, APS pada jenjang SD/MI pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung stabil dengan capaian yang tinggi. Pada tahun 2024, jenjang SD mengalami penurunan diakibatkan terdapat 1 siswa yang tidak melanjutkan pendidikan. Pada APS pada jenjang SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 juga memiliki angka capaian yang stabil. Penurunan tahun 2024 diakibatkan terdapat sebanyak 5 siswa tidak melanjutkan sekolah karena faktor lingkungan.

e) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan jumlah seluruh murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Berikut data angka putus sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.67 Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	Persen	0	0,01	0,01	0	0,003
2	SMP/MTs	Persen	0,02	0,02	0,03	0,01	0,02

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, kondisi pendidikan di Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan angka putus sekolah di seluruh jenjang. Meski begitu, angka secara keseluruhan yang mendekati 0 menunjukkan kondisi pendidikan yang baik.

Walaupun pada kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2024 masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, sistem pendidikan yang diterapkan di Kota Yogyakarta semakin baik serta adanya peningkatan program bantuan pembiayaan bagi KMS dan penyediaan layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Masih adanya angka putus sekolah di Kota Yogyakarta disebabkan karena beberapa faktor yaitu adanya faktor lingkungan pergaulan, faktor keluarga dan ekonomi, disabilitas intelektual dan tidak adanya minat bersekolah.

f) Angka Kelulusan

Angka kelulusan menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional. Berikut data angka kelulusan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.68 Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung berada di angka yang tetap yaitu 100%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta semakin baik dengan faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

g) Angka Melanjutkan

Angka kelulusan menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa baru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Berikut data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.69 Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	107,93	104,87	104,87	112,73	115,31
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	Persen	150,28	133,07	164,65	162,87	166,93

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan. Meskipun dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan dari 107,93% menjadi 104,87% di mana hal tersebut disebabkan karena banyak faktor baik faktor ekonomi maupun non ekonomi seperti pergaulan, kurangnya dukungan dari keluarga, tidak ada motivasi untuk melanjutkan sekolah, dan adanya keinginan untuk bekerja. Pada tahun 2024, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami peningkatan karena jumlah siswa yang melanjutkan kelas 7 SMP/MTs naik dari tahun sebelumnya.

Untuk angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMA/MA pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan yaitu dari 150,28% menjadi 133,07%. Kemudian pada tahun 2022 angka tersebut meningkat menjadi 164,45%. Pada tahun 2023, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMA/MA mengalami penurunan karena adanya satuan pendidikan yang tutup dan merger sehingga

mempengaruhi daya tampung untuk peserta didik, namun demikian jumlah angka melanjutkan masih di atas 100% hal ini terjadi karena peserta didik dari luar Kota Yogyakarta masih sangat banyak yang melanjutkan sekolah di kota Yogyakarta.

h) Fasilitas Pendidikan

Bangunan pendidikan dengan kondisi baik menunjukkan perbandingan antara bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh bangunan. Data pada indikator ini menggunakan data kelas dalam kondisi baik karena data kondisi bangunan tidak didapatkan.

1) Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Berikut data ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.70 Ruang Kelas SD/MI dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, pada kurun waktu 2020 hingga 2024 hampir semua ruang kelas pada jenjang SD/MI sudah berada pada kondisi baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase ruang kelas dengan kondisi baik dan berhasil mencapai 100% karena adanya penambahan ruang belajar dan kegiatan renovasi kelas. Pada tahun 2024 terdapat empat SD negeri dan dua SD swasta yang mengalami merger.

2) Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

Berikut data ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta 2020-2024.

Tabel 2.71 Ruang Kelas SMP/MTs dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, persentase ruang kelas dengan kondisi dan berhasil mencapai 100%. Capaian ini disebabkan oleh adanya penambahan rombongan belajar, penambahan ruang kelas dan kegiatan renovasi kelas sehingga menunjukkan bahwa fasilitas SMP/MTs di Kota Yogyakarta sudah semakin baik.

i) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Berikut data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.72 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unit	232	233	234	234	220
2	Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun	Jiwa	49.828	55.663	55.387	54.377	53.546
3	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar		47	42	42	43,03	41,09

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2024, rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar menunjukkan angka 41,09, angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya diakibatkan oleh adanya empat SD negeri dan dua SD swasta yang mengalami *merger*.

j) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Berikut data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.73 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sekolah SMA/SMK/MA	Unit	75	76	78	76	77
2	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	Jiwa	19.510	19.434	19.093	19.194	19.701
3	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah	-	38,44	39,11	40,85	39,60	39,08

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Penurunan pada tahun 2024 diakibatkan pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan.

k) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Indikator ini digunakan untuk mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.74 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Guru SD/MI	Murid/Guru	15,79	14,66	15,91	14,95	15,77

2	Rasio Guru SMP/MTs	Murid/Guru	12,93	13,44	14,67	13,14	14,28
---	--------------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan guru/murid SD/MI pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2024, rasio ketersediaan guru/murid SD/MI menunjukkan angka 15,77 yang berarti satu guru dapat mengajar 15 hingga 16 murid. Pada rasio ketersediaan guru/murid SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Rasio ketersediaan guru/murid SMP/MTs di tahun 2024 menunjukkan angka 14,28 yang berarti satu guru mengajar 14 hingga 15 murid. Kondisi ketersediaan guru/murid sekolah pendidikan dasar di Kota Yogyakarta dipengaruhi adanya guru yang sudah pensiun, mutasi keluar daerah, dan masih terdapat guru yang belum masuk Data Pokok Pendidikan. Peningkatan pada jenjang SMP/MTs diakibatkan oleh peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan jenjang SMP di Kota Yogyakarta.

l) Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Indikator ini digunakan untuk mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik dan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut data rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.75 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah guru SMA/SMK/MA	Orang	2.884	2.767	2.797	2.702	2.710
2	Jumlah murid SMA/SMK/MA	Orang	36.496	34.802	36.682	37.417	37.247
3	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Murid/Guru	790,22	795,07	762,50	722,13	727,58

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid pada jenjang SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 bersifat fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 angka rasio menunjukkan angka 790,22 atau setara dengan 1 guru mengampu 11 murid dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 727,58. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada 10.000 murid diajar oleh 727,5 guru atau dengan kata lain seorang guru dapat mengampu hingga 13 murid.

m) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan SD/MI dikali dengan 10.000. Berikut data rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.76 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah guru SD per kelas	Orang	2.687	2.663	2.419	2.541	2.363
2	Jumlah murid SD	Orang	42.429	39.224	39.548	38.058	37.301

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Guru/Murid	633,29	678,92	611,66	667,67	633,50

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio menunjukkan angka 633,29 dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 633,29. Penurunan pada tahun 2024 dari 2023 diakibatkan oleh sejumlah guru yang pensiun.

n) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan SMP/MTs dikali dengan 10.000. Berikut data rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.77 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Menengah di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah guru SMP per kelas	Orang	1.795	1.574	1.367	1.530	1.390
2	Jumlah murid SMP	Orang	23.207	20.697	23.904	20.172	20.400
3	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	Guru/Murid	773,47	760,50	571,87	758,48	681,37

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 rasio menunjukkan angka 773,47 sedangkan pada taun 2024 menunjukkan angka 681,37. Sama halnya dengan sekolah dasar, penurunan pada setahun terakhir disebabkan karena adanya sejumlah guru yang pensiun.

o) Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara banyaknya lulusan siswa SD dengan banyaknya penduduk yang berusia 12 tahun atau usia rata-rata lulus SD. Berikut data proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.78 Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya lulusan SD	Orang	7.307	6.985	6.839	6.872	6.855
2	Banyaknya penduduk usia 12 tahun	Orang	6.527	6.284	7.172	6.259	6.232
3	Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar	Persen	112	111	95	110	110

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, proporsi murid yang berhasil menamatkan sekolah dasar dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung sedikit mengalami penurunan dari 112% menjadi 110%. Pada tahun 2024, penurunan disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk rentang usia SD yang menurun. Meskipun mengalami penurunan, proporsi murid yang berhasil menamatkan sekolah dasar masih berada di tingkat 110% karena jumlah lulusan melebihi dari jumlah

penduduk usia 12 tahun, karena dari data Dapodik belum bisa dipilah antara penduduk daerah dan bukan penduduk daerah.

p) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi sehingga memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Berikut data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.79 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2023
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV Jenjang SD	Orang	2572	2252	2258	2455	2300
2	Jumlah guru SD/MI	Orang	2674	2392	2411	2612	2427
	Persentase		96,19	94,15	93,65	93,99	94,77
3	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP	Orang	1467	1308	1301	1608	1563
4	Jumlah guru SMP/MTs	Orang	1744	1364	1394	1775	1650
	Persentase		84,12	95,89	93,33	90,59	94,73

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV pada jenjang SD di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 berjalan fluktuatif di mana pada tahun 2020 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV menunjukkan angka 96,19% dan pada tahun 2024 menjadi 94,77%. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV pada jenjang SMP di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 berjalan fluktuatif namun cenderung meningkat di mana pada tahun 2020, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1-D-IV menunjukkan angka 84,12% dan pada tahun 2024 menjadi 94,73%. Pada kedua jenjang, peningkatan pada setahun terakhir terjadi karena sudah banyak guru yang melanjutkan S1/D-IV, terutama guru ASN di sekolah negeri. Hal ini sesuai dengan edaran dari pemerintah pusat bahwa guru harus memenuhi kualifikasi tersebut hingga tahun 2029. Untuk sekolah swasta, dinas tidak bisa mengintervensi, tetapi memberikan himbauan berdasarkan UU Guru dan Dosen.

2.1.4.7.2. Urusan Kesehatan

1 Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi Masyarakat di mana angka kematian tersebut dihitung. Berikut data angka kematian bayi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.80 Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	bayi	35	33	27	18	21
2	Jumlah kelahiran hidup	bayi	3.118	2.757	2.499	2.427	2.148

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	per 1.000 kelahiran hidup	11,23	11,97	10,80	7,42	9,78

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian bayi menunjukkan angka 11,23 dan pada tahun 2023 menunjukkan angka 9,78. Angka kematian bayi cukup tinggi berada pada tahun 2020 dan 2021. Penyebab kematian bayi di kota Yogyakarta disebabkan karena berat badan lahir rendah, asfiksia, sepsis, kelahiran kongenital, dan pneumonia akibat Pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, peningkatan terjadi akibat meningkatnya kasus kematian bayi akibat meningkatnya kasus berat badan lahir rendah (BBLR) atau prematuritas, yaitu sebanyak 4 kasus kematian bayi, dan 6 kasus akibat kelainan kongenital. Untuk menekan angka kematian bayi dan kematian neonatus, beberapa upaya telah dilakukan meliputi:

- a. Adanya upaya deteksi dini pada pelayanan selama kehamilan dengan penerapan pemeriksaan USG pada K1 dan K5 oleh dokter Puskesmas.
- b. Adanya upaya skrining pada bayi baru lahir : Skrining hipotiroid kongenital, Skrining Penyakit Jantung bawaan kritis.
- c. Adanya dukungan dana melalui DAK Non Fisik untuk upaya penguatan pelayanan bayi.

2 Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Indikator ini menunjukkan probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Perhitungan pada indikator ini menggunakan jumlah kematian bayi di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut data angka kelangsungan hidup bayi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.81 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	11,23	11,97	10,8	7,42	9,78
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) → (1000-AKB)	988,77	988,03	989,2	992,58	990,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kelangsungan hidup bayi di Kota Yogyakarta pada kurun 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kelangsungan hidup bayi menunjukkan angka 988,77. Kemudian pada tahun 2021, angka kelangsungan hidup bayi menurun menjadi 988,03 di mana hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan kasus pneumonia pada bayi akibat Pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, angka kelangsungan hidup bayi menunjukkan penurunan dari tahun 2023 dan menunjukkan angka 990,22 yang berarti setiap 1.000 kelahiran bayi terdapat 992 bayi yang dapat hidup sampai dengan satu tahun. Pada tahun tersebut, angka kelahiran bayi (*Total Fertility Rate*) rendah sehingga setiap tahun terjadi penurunan jumlah kelahiran. Angka kematian bayi meningkat karena jumlah kasus yang meningkat dan jumlah bayi lahir hidup menurun, sehingga angka kematian bayi meningkat.

3 Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Berikut data angka kematian balita di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.82 Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)	balita	6	3	3	11	6
2	Jumlah kelahiran hidup	Balita	3.118	2.757	2.499	2.427	2.148
3	Angka kematian balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	per 1.000 kelahiran hidup	1,92	1,09	1,20	4,53	2,79

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kematian balita di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, angka kematian balita menunjukkan angka 1,92 dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 2,79. Angka penurunan pada tahun 2024 disebabkan oleh penurunan jumlah kasus infeksi seperti pneumonia, sepsis dan diare sebagai penyebab kematian balita. Hal ini menunjukkan indikator keberhasilan intervensi penyakit seperti pendekatan tatalaksana bayi sakit dengan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), cakupan imunisasi dan skrining penyakit.

4 Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Berikut data angka kematian neonatal di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.83 Angka Kematian Neonatal di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	Bayi	24	20	19	10	11
2	Jumlah kelahiran hidup	Bayi	3.118	2.757	2.499	2.427	2.148
3	Angka kematian neonatal (per 1.000 Kelahiran Hidup)	per 1.000 kelahiran hidup	7,70	7,25	7,60	4,12	5,12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kematian neonatal di Kota Yogyakarta berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian neonatal menunjukkan angka 7,70 yang berarti setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 3-4 bayi berumur kurang dari satu bulan yang meninggal dunia dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 5,12 yang berarti setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 4 bayi berumur kurang dari satu bulan yang meninggal dunia. Peningkatan dari tahun sebelumnya diakibatkan adanya peningkatan 1 kasus kematian neonatal serta jumlah bayi lahir hidup menurun, sehingga menyebabkan angka kematian meningkat. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan kematian neonatal meliputi:

- a. Adanya upaya deteksi dini pada pelayanan selama kehamilan dengan penerapan pemeriksaan USG pada K1 dan K5 oleh dokter Puskesmas.

- b. Adanya upaya skrining pada bayi baru lahir : Skrining hipotiroid kongenital, Skrining Penyakit Jantung bawaan kritis.
- c. Adanya dukungan dana melalui DAK Non Fisik untuk upaya penguatan pelayanan bayi.
- d. Adanya Sistem Komunikasi Yang Efektif melalui WAG rujukan Gadar neonatal untuk mempercepat rujukan kasus kegawatdaruratan bayi baru lahir.

5 Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu (AKI) menunjukkan rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, nifas atau pengelolaannya pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Dengan kata lain, AKI sekaligus menggambarkan risiko yang dihadapi ibu hamil selama kehamilan dan melahirkan.

Dalam implementasinya, AKI telah ditetapkan sebagai satu indikator untuk mengukur keberhasilan upaya kesehatan ibu dan derajat kesehatan masyarakat. AKI dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan menjelang kehamilan, kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut data angka kematian ibu di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.84 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	jiwa	2	16	4	0	2
2	Jumlah kelahiran hidup	jiwa	3.118	2.757	2.499	2.427	2.147
3	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	jiwa	64,14	580,34	160,06	0	93,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kematian ibu di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian ibu menunjukkan angka 64,14 kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 580,34. Pada tahun 2023, angka kematian ibu menurun menjadi 0 yang berarti tidak terdapat ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas. Kondisi tersebut dipengaruhi salah satunya oleh adanya penguatan upaya skrining pada ibu hamil, peningkatan kualitas layanan ANC interprofesi, serta adanya penguatan puskesmas PONED dan RS PONEK untuk tatalaksana kegawatan maternal. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan 2 kasus kematian ibu yang diakibatkan oleh preeklamsia berat dan komplikasinya serta faktor lain yang berkontribusi yaitu kehamilan tidak dikehendaki atau disembunyikan, sehingga deteksi dini adanya komplikasi kehamilan tidak bisa dilakukan.

6 Persentase Balita Gizi Buruk

Indikator ini menunjukkan proporsi balita (bayi di bawah usia lima tahun) yang mengalami kondisi gizi buruk dalam suatu wilayah. Gizi buruk pada balita merupakan kondisi di mana anak mengalami kekurangan gizi atau tidak mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan

dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -36,21%. Pada tahun 2020, persentase balita gizi buruk yaitu sebesar 1,31% kemudian menurun hingga tahun 2024 menjadi 0,22%. Penurunan tersebut terjadi karena dilakukannya beberapa upaya yang meliputi:

- 1) Tetap dilaksanakan surveilans gizi untuk melakukan deteksi dini khususnya *weight faltering* (kenaikan berat badan yang tidak cukup, atau masih berada di bawah rata-rata kenaikan berat badan minimal tiap bulannya) pada balita di posyandu
- 2) Dilakukan validasi dan *assesment* oleh puskesmas yang meliputi pemeriksaan fisik, pengukuran antropometri (BB, PB/TB, LILA, LIKA), pemeriksaan laboratorium (status anemia, urin rutin, kecacingan), skrining TB dan alergi, skrining perkembangan, dan *recall* asupan makan;
- 3) Petugas gizi bersama lintas program lintas sektoral melaksanakan pelacakan kasus seperti kunjungan rumah untuk melihat lingkungan dan sanitasi, melakukan penggalian data kepada orang tua untuk menanyakan pola asuh di rumah;
- 4) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pangan lokal kepada anak usia 6-29 bulan dengan status gizi kurang;
- 5) Petugas kesehatan tetap melakukan pendampingan selama anak masih mengalami status gizi buruk; dan
- 6) Pelaksanaan tatalaksana balita gizi buruk di Rumah pemulihan Gizi (RPG) bagi balita usia 6-59 bulan, sedangkan bayi gizi buruk usia 0-5 bulan dan balita gizi buruk 6-59 bulan dengan komplikasi medis dirujuk puskesmas ke rumah sakit untuk dilakukan tatalaksana balita gizi buruk rawat inap sesuai pedoman.

Berikut data persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.85 Persentase Balita Gizi Buruk Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	1,31	0,92	0,55	0,35	0,22

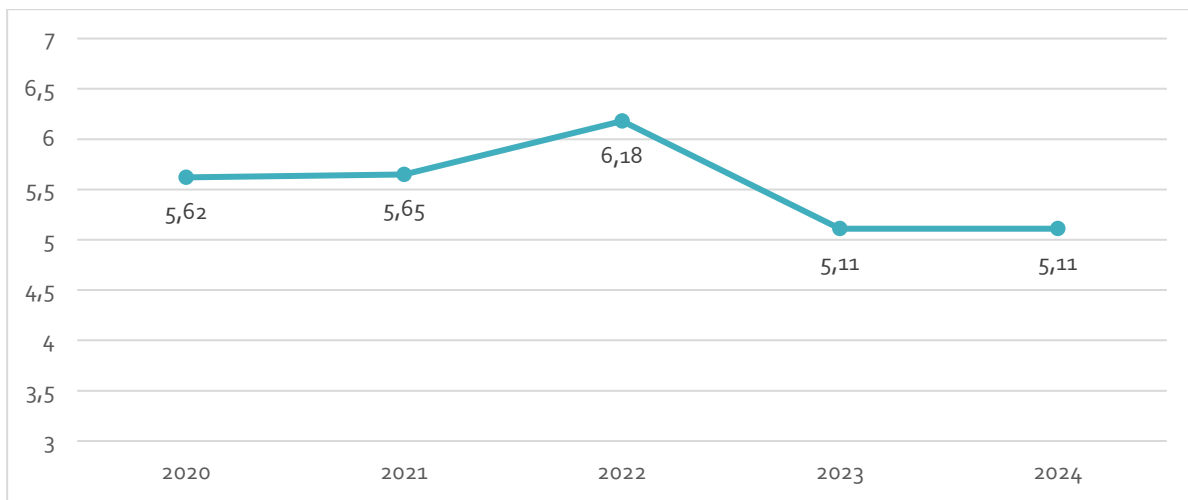
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

7 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Indikator ini menunjukkan proporsi balita (bayi di bawah usia lima tahun) yang mengalami kekurangan gizi dalam suatu wilayah. Kekurangan gizi dapat berarti kurangnya asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan fisik dan kognitif yang sehat. Prevalensi balita gizi kurang di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,07%.

Faktor peningkatan angka gizi buruk pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa kendala dalam pemantauan dan intervensi gizi. Petugas puskesmas belum secara optimal melakukan plotting di Grafik Pertumbuhan Anak (GPA) dalam Buku KIA saat pemantauan di posyandu maupun fasilitas kesehatan, sehingga deteksi dini masalah gizi pada balita belum berjalan maksimal. Selain itu, tidak semua balita dengan berat badan tidak naik (*weight faltering*) atau berat badan kurang (*underweight*) dirujuk dari posyandu ke puskesmas, yang mengakibatkan keterlambatan intervensi dan meningkatkan risiko gizi kurang (*wasting*). Penerimaan orang tua terhadap Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga masih menjadi tantangan, di mana sebagian orang tua membagi PMT dengan anak lain sehingga asupan gizi tidak mencukupi, ada yang menolak

karena gengsi, serta beberapa kurang disiplin dalam memberikan PMT kepada anak mereka.



Gambar 2.27 Persentase Balita Gizi Kurang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

8 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Indikator ini menunjukkan banyaknya balita gizi buruk yang dirawat atau ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berikut data cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.86 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 telah mencapai angka 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk yang ditemukan telah mendapatkan perawatan seluruhnya.

9 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis menggunakan perhitungan perbandingan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah selama 1 tahun terhadap jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama. Berikut data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.87 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	jiwa	429	345	458	584	386
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	jiwa	960	730	730	943	558

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	44,69	47,26	62,74	61,93	69,18

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, cakupan TBC berada di 44,69% dan pada tahun 2024 menjadi 69,18%. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dipengaruhi oleh adanya kegiatan penemuan aktif di wilayah dan kondisi pencatatan dan pelaporan kasus TB dengan SITB yang semakin lebih baik, serta adanya standar pemeriksaan untuk penegakan diagnosa TBC yang sudah menggunakan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang lebih sensitif dan akurat.

10 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan banyaknya jumlah kasus penderita TBC baik yang baru dan lama terhadap jumlah penduduk pada kurun waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan per 100.000 penduduk. Berikut data tingkat prevalensi tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

Tabel 2.88 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	114,83	126,75	191,24	195,11	178,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, tingkat prevalensi tuberkulosis di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2020, tingkat prevalensi tuberkulosis menunjukkan angka 114,83 dan kemudian pada tahun 2024 menjadi 178,27, meskipun terjadi penurunan dari tahun 2023. Penurunan pada tahun 2024 disebabkan oleh jumlah kasus TBC yang ditemukan menurun. Upaya yang telah dilakukan dalam hal ini yaitu adanya kegiatan *active case finding* TBC dilaksanakan di seluruh wilayah Puskesmas dan penjangkaran kasus melibatkan layanan swasta seperti klinik dan DPM.

11 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasien tuberkulosis yang meninggal terhadap jumlah penduduk pada kurun waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan per 100.000 penduduk. Berikut data tingkat kematian karena tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.89 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	12,58	13,55	17,65	17,45	22,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, tingkat kematian karena tuberkulosis di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, tingkat kematian karena

tuberkulosis menunjukkan angka 12,58 dan pada tahun 2024 menjadi 22,13. Hal tersebut berarti terdapat 23 pasien tuberkulosis yang meninggal per 100.000 penduduk. Tingkat kematian karena tuberkulosis tidak hanya disebabkan oleh penyakit tuberkulosis saja, namun juga terdapat komplikasi dengan penyakit lain seperti HIV dan Diabetes Melitus. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan kematian sebanyak dari tahun 2023 karena peningkatan pasien TBC secara signifikan.

12 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) terhadap jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam suatu wilayah. Berikut data proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.90 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	780	853	1.323	1.492	1.235
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA	Orang	320	345	458	584	386
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	243,75	247,25	288,86	255,48	319,95

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS menunjukkan angka 243,75% dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 319,95%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penemuan *active case finding* dengan *mobile Xray* sehingga penemuan kasus Klinis meningkat.

13 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh di suatu wilayah selama 1 tahun terhadap jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. Berikut data proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.91 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	jiwa	340	395	291	236	273
2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	jiwa	478	459	362	465	584

3	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	71,13	86,06	80,39	50,75	46,75
---	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2023

Berdasarkan data di atas, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh menunjukkan angka 71,13% kemudian pada tahun 2024 menunjukkan angka 46,75%. Angka kesembuhan yang menurun disebabkan karena lebih banyak pasien yang menyelesaikan pengobatan Tuberkulosis tetapi di akhir pengobatan tidak melakukan pemeriksaan laboratorium (BTA) sehingga tidak disimpulkan sebagai pasien sembuh tetapi pasien dengan pengobatan lengkap.

14 Penyakit Tidak Menular

Indikator ini menunjukkan jumlah individu yang menderita kondisi penyakit kronis yang umumnya tidak disebabkan oleh infeksi dan tidak ditularkan secara langsung dari satu individu ke individu lainnya. Penyakit tidak menular merupakan penyebab utama kematian dan gangguan kesehatan di seluruh dunia. Berikut data jumlah penderita penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.92 Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Jenis Penyakit	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyakit Jantung	4.367	4.242	1.147	1.622	3.631
2.	Kanker	205	217	977	997	962
3.	Gangguan Jiwa Berat	1.030	1.002	1.201	1.239	1.096
4.	Gagal Ginjal	1.109	1.031	1.301	1.632	1.538
5.	Anemia	1.200	923	2.136	2.824	1.349
6.	Stroke	398	443	725	875	1.000
7.	Asma	1.756	1.307	1.799	2.493	2.791
8.	Diabetes	10.635	13.237	13.676	14.595	17.251
9.	Hipertensi	23.032	27.843	28.420	30.273	34.753

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

Jumlah penderita penyakit tidak menular (PTM) di Kota Yogyakarta pada periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Penyakit yang paling banyak ditemukan meliputi hipertensi, diabetes, penyakit jantung, asma, gagal ginjal, dan gangguan jiwa berat, dengan hipertensi menjadi kasus terbanyak pada tahun 2024, mencapai 34.753 jiwa. Secara umum, jumlah penderita PTM mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh semakin intensifnya upaya deteksi dini melalui skrining di berbagai wilayah, sehingga lebih banyak kasus baru teridentifikasi dan mendapatkan penanganan di puskesmas. Selain itu, perubahan jumlah kasus juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, kematian, serta tingkat kesembuhan, seperti yang terjadi pada penderita anemia.

2.1.4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap

Indikator ini menunjukkan proporsi Panjang jalan dalam kondisi mantap terhadap panjang seluruh jalan di Kota Yogyakarta. Jalan dengan kondisi

mantap adalah jalan yang memenuhi syarat dan masuk ke dalam kondisi baik atau sedang. Sedangkan kondisi lainnya adalah kondisi tidak mantap adalah jalan dengan kondisi rusak ringan hingga rusak sedang. Secara keseluruhan, persentase jalan dengan kondisi mantap terhadap panjang keseluruhan jalan di Kota Yogyakarta sudah baik dengan persentase terendah 79,96% di tahun 2020 dan tertinggi di angka 98,77% pada tahun berikutnya. Angka ini kemudian kembali menurun di tahun 2020 hingga 2024, meskipun pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Faktor penyebab peningkatan pada tahun 2024 adalah diselenggarakan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan. Berikut persentase jalan dalam kondisi mantap terhadap keseluruhan Panjang jalan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.93 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	79,96	98,77	80,54	78,77	79,97

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

15 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Indikator ini menggunakan perhitungan jumlah panjang jalan dibagi jumlah penduduk yang menempati suatu kota. Berdasarkan data di bawah, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh ruas jalan cenderung tetap sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Kota Yogyakarta No. 71 Tahun 2018, sedangkan jumlah penduduk cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2024 terjadi penurunan dari tahun 2023 karena tidak ada penambahan ruas jalan baru, sehingga rasio panjang jalan hanya dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk. Berikut data rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.94 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/1.000 Jiwa	0,62	0,52	0,52	0,62	0,56

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

16 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air

Indikator ini menunjukkan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase terhadap panjang seluruh jalan di Kota Yogyakarta. Pada indikator ini terdapat kriteria tambahan yaitu syarat minimal lebar trotoar adalah 1,5m. Data yang digunakan sebagai pembilang di indikator ini hanya data trotoar saja, dan data yang digunakan sebagai penyebut adalah data panjang jalan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan data di bawah, persentase jalan yang memiliki trotoar terhadap panjang keseluruhan jalan di Kota Yogyakarta stagnan. Dalam 5 tahun terakhir, tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan jumlah panjang janganan yang memiliki trotoar yaitu sepanjang 158,98 Km, sedangkan data panjang seluruh ruas jalan di Kota Yogyakarta mengacu pada Perwal Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Kota Yogyakarta yaitu 233,21 Km. Pada tahun 2024 hanya terdapat pekerjaan pemeliharaan trotoar dan tidak ada peningkatan trotoar jalan, sehingga panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase tidak mengalami peningkatan. Berikut persentase jalan yang memiliki trotoar terhadap keseluruhan Panjang jalan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.95 Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)	Persen	68,17	68,17	68,17	68,17	68,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

17 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Indikator ini menunjukkan persentase drainase dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh drainase di Kota Yogyakarta. Pada indikator, drainase dalam kondisi baik dimaknai bahwa drainase tersebut pembuangan aliran limpasan air hujan tidak mengalami penyumbatan. Berdasarkan data di bawah, persentase drainase dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh drainase di Kota Yogyakarta sebagian besar mengalami peningkatan dan nilainya selalu berada di *range* 87% dengan nilai terbesar adalah 88,44% di tahun 2024 dan terendah adalah 87,58 di tahun 2020. Dalam 5 tahun terakhir, selalu terdapat penambahan drainase dalam keadaan baik, begitu pula dengan panjang seluruh drainase yang dimiliki Kota Yogyakarta juga selalu meningkat. Berikut persentase jalan dengan kondisi drainase baik terhadap keseluruhan panjang drainase di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.96 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	87,58	87,60	87,62	88,36	88,44

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

18 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak

Indikator ini menunjukkan persentase penduduk berakses air minum aman atau yang menggunakan jaringan perpipaan PDAM terhadap jumlah keseluruhan penduduk di Kota Yogyakarta. Asumsi yang digunakan sesuai dengan referensi BPS untuk Kota Yogyakarta 1 KK = 3,04 jiwa. Berdasarkan tabel dibawah, Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dalam tahun 2020-2024. Meskipun persentase cenderung mengalami peningkatan, capaian tergolong masih rendah, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan capaian tersebut.

Tabel 2.97 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	416,049	414,706	376,324	378,913	375,699
2	Jumlah KK	KK	136,858	136,416	123,791	124,642	123,585
3	Jumlah Penduduk Terlayani Jaringan Perpipaan Perumda Air Minum	Jiwa	72,160	74,337	74,550	72,674	72,455
4	Jumlah KK Terlayani Jaringan Perpipaan Perumda Air Minum	KK	23,737	24,453	24,523	23,906	23,834
5	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	17.34%	17.93%	19.81%	19.18%	19.29%

Sumber : Dokumen RISPAM, 2024

19 Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan

Indikator ini menunjukkan pemenuhan luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di bawah, luasan terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, penurunan persentase RTH terjadi dikarenakan penambahan luas wilayah Kota Yogyakarta sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2021 – 2041. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan RTH publik karena dilakukan pembangunan RTH Publik lingkungan permukiman sebanyak 5 lokasi baru yang tersebar di Kota Yogyakarta dengan total penambahan sekitar 0,244 ha.

Tabel 2.98 Luasan RTH Publik Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luasan RTH publik yang tersedia	Ha	263,634	263,716	264,151	264,374	264,618
2	Luas Wilayah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.281,9	3.281,9
3	Luas RTH Publik/ luas wilayah kota	Persen	8,11	8,11	8,13	8,06	8,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

Penambahan RTH dan jalur hijau di pinggir jalan sudah mengalami kejenuhan dan kesulitan mencari ruang. Oleh karena itu, kebijakan diarahkan untuk pembangunan RTH di kampung yang diharapkan setiap kampung memiliki satu ruang terbuka hijau publik sekaligus sebagai ruang untuk berinteraksi. Selain itu, pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau terdapat perhitungan baru terkait luasan ruang terbuka hijau di mana selain taman dan *roof garden*, pertanian juga termasuk sebagai RTH dengan catatan dibangun di persil milik pemerintah dan syarat-syarat tertentu lainnya.

20 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Indikator ini menunjukkan rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan di Kota Yogyakarta. Berikut luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil

pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024. Berdasarkan data di bawah, rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan data di tahun 2023 terjadi karena hasil dari pendeliniasian yang lebih mendetail dibandingkan perhitungan sebelumnya. Sebelumnya, deliniasi citra terakhir dilakukan pada tahun 2017, yang kemudian menjadi dasar data dari 2017 hingga 2022, dengan pembaruan hanya berdasarkan penambahan luasan akibat pembangunan RTHP. Selain itu, terdapat penyesuaian luas wilayah Kota Yogyakarta dari 32,5 km² menjadi 32,82 km², yang baru disesuaikan dengan deliniasi yang lebih mendetail oleh DLH pada tahun 2023 dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya.

Tabel 2.99 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan	0,0895	0,0896	0,0897	0,1549	0,1566

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a) Permukiman Layak Huni

Indikator ini menunjukkan luas permukiman layak huni di Kota Yogyakarta. Luas permukiman layak huni didefinisikan sebagai luas seluruh permukiman dikurangi luas permukiman kumuh. Data luas permukiman yang digunakan adalah data luas permukiman yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sejak tahun 2022. Pada tahun 2022, Luas permukiman layak huni yaitu 1.402,64 Ha. Sejak tahun tersebut, penanganan permukiman kumuh terus dilakukan sehingga meningkatkan luas permukiman layak huni menjadi 1.434,86 Ha di tahun 2024.

Tabel 2.100 Luas Permukiman Layak Huni Kota Yogyakarta Tahun 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
Luas Permukiman Layak Huni	1.402,64	1.411,06	1.434,86

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

b) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Indikator ini menunjukkan cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta. Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah keseluruhan rumah di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di bawah, cakupan ketersediaan rumah layak huni terus mengalami peningkatan. Cakupan rumah layak huni pada tahun 2020 menunjukkan angka 97,89% dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 98,70%. Peningkatan terjadi karena adanya kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui APBD Kota Yogyakarta, APBD DIY, dan pendanaan CSR. Berikut cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.101 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah seluruh rumah layak huni	Unit	122.310	122.764	122.924	123.139	123.324

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah seluruh rumah	Unit	124.951	124.951	124.951	124.951	124.951
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	97,89	98,25	98,38	98,55	98,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

c) Permukiman Kumuh dan Penanganannya

Indikator ini menunjukkan luas permukiman kumuh dan persentase permukiman kumuh yang tertangani di Kota Yogyakarta. Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani merupakan hasil dari luas permukiman kumuh tertangani kumulatif dibagi luas permukiman kumuh. Lokasi permukiman kumuh sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No.158 tahun 2021, dengan luasan kumuh sebesar 114,72 hektar. Sejak penetapan SK sampai dengan akhir tahun 2024, luasan kawasan kumuh terus berkurang sebanyak 57,58 Ha sehingga luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2024 adalah 57,14. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah melalui pola pemugaran dengan konsep *Mundur, Munggah* dan *Madhep Kali* (M3K) dan peremajaan dengan konsep MAHANANNI (Perumahan dan Permukiman Layak Huni menuju Kampung Madani).

Tabel 2.102 Permukiman Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2021-2024

No.	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Luas Permukiman Kumuh Awal	Ha	114,72	94,18	89,36	80,94
2	Luas Permukiman Kumuh yang tertangani	Ha	20,54	4,82	8,42	23,8
3	Sisa Luas Permukiman Kumuh	Ha	94,18	89,36	80,94	57,14
4	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	Persen	17,90	22,11	29,45	41,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a) Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas perlindungan masyarakat (linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu kelurahan. Dengan beragam dan heterogennya masyarakat yang tinggal di Kota Yogyakarta, kemungkinan terjadinya friksi dan timbulnya permasalahan di tengah lingkungan masyarakat pun semakin besar. Untuk menjaga stabilitas keadaan, maka diperlukan peran linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat secara luas. Perhitungan cakupan petugas linmas bertujuan untuk mengetahui berapa banyak petugas linmas yang bertugas di tengah masyarakat. Berikut adalah perhitungan cakupan petugas linmas di Kota Yogyakarta dengan menggunakan aspek wilayah kerja kota yaitu cakupan per 10.000 penduduk.

Tabel 2.103 Data Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah linmas	Orang	3.823	3.837	3.726	4.234	4.259
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	373.589	376.324	414.487	414.705	415.021
3	Jumlah wilayah kerja kota	Jiwa	102,33	101,96	89,89	102,10	102,62
4	Cakupan	Persen	37,36	37,63	41,45	41,47	41,50

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan tabel hasil perhitungan cakupan petugas Linmas di atas, terlihat bahwa cakupan petugas Linmas dari tahun 2020 hingga 2024 masih di bawah 50%, dengan rentang 37-42%. Meskipun demikian, cakupan ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, kenaikan cakupan Linmas dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah petugas. Peningkatan jumlah anggota Linmas ini terjadi karena tingginya minat masyarakat Kota Yogyakarta untuk secara sukarela bergabung dalam Linmas demi meningkatkan perlindungan di wilayah masing-masing, terutama pada tahun 2024 yang bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum. Cakupan petugas Linmas dalam 1 RT sudah terisi minimal 1 petugas Linmas. Berikut data sebaran jumlah petugas linmas se-Kota Yogyakarta sampai ke tingkat RT berdasarkan identifikasi data pada SIM linmas.

Tabel 2.104 Jumlah Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Kemantren	Kampung	RW	RT	Jumlah Linmas				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Tegalrejo	14	46	191	360	354	324	362	368
2	Jetis	9	37	166	266	270	265	290	274
3	Gondokusuman	17	66	271	372	395	403	450	429
4	Danurejan	16	41	155	220	220	243	269	235
5	Gedongtengen	14	36	138	208	208	208	200	229
6	Ngampilan	7	21	120	142	142	145	162	189
7	Wirobrajan	8	34	165	273	273	277	334	327
8	Mantrijeron	12	55	231	334	334	327	344	363
9	Kraton	12	43	175	249	248	202	246	264
10	Gondomanan	7	31	110	150	150	100	127	133
11	Pakualaman	7	19	83	120	120	113	129	132
12	Mergangsan	17	60	219	331	325	353	392	388
13	Umbulharjo	19	87	343	530	530	532	648	670
14	Kotagede	10	40	165	268	268	234	281	258
Jumlah Se-Kota Yogyakarta		169	616	2.532	3.823	3.837	3.726	4.234	4.259

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025

b) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat, dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Perlu adanya penanggulangan yang cepat apabila sewaktu waktu terjadi kebakaran. Cakupan pelayanan

penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Tabel 2.105 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	km ²	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
2	Luas potensi ancaman kebakaran	km ²	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2025

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Hal ini dihitung dengan cara membagi luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 luas WMK adalah sebesar 32,5 km² yang merupakan keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta dan seluruhnya berpotensi mengalami kebakaran. Hal ini pun menjadikan cakupan pelayanan kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Pada saat ini Pos Pemadam Kebakaran terdapat di 2 lokasi yaitu di Mako Balaikota dan Pos Mojo (Jl. Kyai Mojo No.70C, Bener, Kemantren Tegalrejo).

c) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap yang baik terhadap terjadinya bencana kebakaran. Daya tanggap yang baik dilihat dari adanya penanganan yang cepat dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan WMK. Tingkat waktu tanggap yaitu kurang dari atau sama dengan 15 menit setelah adanya laporan bencana kebakaran.

Tabel 2.106 Persentase Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 menit	Kejadian	32	50	56	90	71
2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	53	50	56	90	71
3.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	60,38	100	100	100	100
4.	Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	menit	13,4	6,3	9,17	9,6	8

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2025

Jumlah kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta banyak disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Kesadaran masyarakat dalam penggunaan listrik khususnya rumah tangga juga masih minim sehingga diperlukan sosialisasi terus menerus terhadap penggunaan listrik dan peralatan pendukungnya. Terjadinya penurunan frekuensi kebakaran pada tahun 2020-2024 diperkirakan karena pada masa pandemi Covid-19 aktivitas publik mengalami penurunan, keberhasilan pemerintah dalam sosialisasi pencegahan kebakaran di wilayah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. Tingkat waktu tanggap yang terjadi di daerah layanan WMK Kota Yogyakarta tahun 2020 cukup rendah dibandingkan total kejadian disebabkan oleh lokasi kejadian di luar jangkauan (2,5 km) dari pos terdekat, tingkat kepadatan lalu lintas pada jam tertentu yang menyebabkan mobilitas unit mobil pemadam kebakaran tidak leluasa bergerak, serta tingkat kesadaran lalu lintas pemakai jalan untuk memprioritaskan unit mobil pemadam kebakaran masih kurang, sehingga tingkat waktu tanggap meningkat menjadi 13,4 menit. Selanjutnya, pada tahun 2021 tingkat waktu tanggap kembali mencapai angka 100%. Hal ini disebabkan karena lokasi terjadinya kebakaran dekat dengan pos serta didukung oleh cukup tingginya kesadaran dari masyarakat dalam memberikan kesempatan berjalan mendahului. Pada tahun 2024, terdapat sarana dan prasarana REDKAR yang ada di wilayah berhasil mempersingkat waktu tanggap dan mengkondisikan wilayah sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran. Peningkatan dan pelatihan bagi personil turut memperbaiki waktu tanggap. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan pengembangan kebutuhan pelayanan tanggap bencana kebakaran untuk mengatasi kemungkinan kejadian di masa mendatang, baik dalam hal kuantitas sarana pemadam kebakaran, petugas, hingga kualitasnya. Persebaran kejadian kebakaran di tiap Kemantren berbeda, perkiraan penyebabnya antara lain keluasan wilayah dan tingkat kepadatan bangunan, aktivitas masyarakat yang berpotensi bahaya kebakaran, bangunan rumah tidak permanen dan semi permanen masih banyak, serta kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran masih perlu ditingkatkan. Bangunan yang terbakar didominasi beberapa hal, yakni bangunan perumahan yang belum permanen, penggunaan listrik yang berlebihan, penambahan kebutuhan energi listrik yang belum diikuti perbaikan jaringan kelistrikan, serta pola hidup masyarakat yang belum terbangun upaya pencegahan kebakaran.

2.1.4.7.6. Urusan Sosial

a) Persentase PPKS/PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketertelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kriteria lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Persentase PPKS/PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PPKS/PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PPKS/PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.107 Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Orang	45.424	48.798	40.655	35.843	34.723
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	47.856	50.461	42.148	37.093	34.930
3	PMKS yang memperoleh bantuan	Persen	94,92	96,70	96,46	96,63	99,41

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

Perkembangan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun mengalami peningkatan pada tahun 2020-2023 lalu stabil pada persentase 96% hingga tahun 2023 dan meningkat tahun 2024 pada persentasi 99,41%. Pada tahun 2020 terdapat *support political will* di masa pandemi berkaitan dengan mekanisme percepatan penyerapan berbagai program bantuan sosial pemerintah/pemerintah daerah di masa pandemi serta implementasi pengawasan dari BPK terkait percepatan realisasi bantuan sosial. Hal yang sama terjadi di tahun 2021, yakni persentase PMKS yang menerima bantuan meningkat menjadi 96,70% yang disebabkan oleh perluasan penerima bantuan sosial APBD dan APBN di masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2024, penerima bantuan sosial menurun karena adanya pemutakhiran data dan terdapat penerima bantuan sosial yang pindah domisili.

a) Persentase PMKS yang Tertangani

Indikator ini merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Persentase PMKS yang tertangani mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 lalu stabil pada persentase 96% hingga tahun 2023 dan meningkat menjadi 99,42% di tahun 2024.

Tabel 2.108 Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	45.942	48.873	40.907	37.827	35.260
2.	Jumlah PMKS yang ada	Orang	48.374	50.536	42.400	39.077	35.467
3.	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	94,97	96,71	96,48	96,80	99,42

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

Pada tahun 2020 telah direncanakan adanya Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM), tetapi karena pandemi maka tidak dicairkan mengingat adanya program Bantuan Sosial Tunai (BST) APBN dan Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD Kota dan DIY, sehingga dikhawatirkan mendapatkan lebih dari 1 intervensi. Kemudian di tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 96,71% yang disebabkan karena perluasan penerima bantuan sosial APBN dan APBD di masa pandemi Covid-19. Pada akhir tahun 2022, Kementerian Sosial memadankan data penerima bantuan dengan data Kemenkumham, data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta data BKN untuk mengeliminasi penerima bantuan sosial yang berstatus pemilik/pengurus perusahaan, pekerja penerima upah dengan gaji di atas UMP dan ASN/TNI/Polri/Pensiunan, sehingga terjadi pengurangan jumlah penerima

bantuan sosial. Pada tahun 2024, peningkatan persentase dari tahun 2023 terjadi karena adanya pemutakhiran data dan terdapat penerima bantuan sosial yang pindah domisili yang memperlihatkan adanya penurunan jumlah PMKS.

b) Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator ini merupakan persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dalam jangka waktu satu tahun. Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial cenderung mengalami peningkatan dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 2,52% per tahun. Pada tahun 2020 persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 94,31% yang dipengaruhi oleh kebijakan baru yang menentukan bahwa seluruh lansia miskin/terlantar yang masuk dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) mendapatkan bantuan sosial ASLUM yang memperluas sasaran penerima manfaat. PPKS yang menerima bantuan sosial untuk kebutuhan dasar di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin (ASLUM), dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Pada tahun 2021, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat menjadi 118,74% yang disebabkan karena adanya perluasan penerima bantuan sosial APBN dan APBD di masa pandemi covid-19. Tahun 2024, terjadi penurunan jumlah PMKS setelah pemutakhiran data dan cakupan PMKS penerima bantuan sosial meningkat menjadi 99,29% yang artinya pemberian bantuan sosial sesuai dengan target PMKS.

Tabel 2.109 Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Orang	32.828	35.545	40.655	35.843	34.723
2.	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Orang	34.810	29.934	42.148	37.093	34.970
3.	Persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial	Persen	94,31	118,74	96,46	96,63	99,29

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

c) Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Indikator ini merupakan persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya. Adapun persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Namun, cakupan PMKS yang menerima KUBE masih rendah. Terdapat peningkatan persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE dari tahun 2020 ke tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kondisi usaha ekonomi anggota KUBE sehingga tidak beraktivitas secara kelompok selama pandemi (beberapa KUBE tidak aktif), sehingga KUBE yang tidak aktif tidak mendapatkan akses intervensi program. Selain itu pada tahun akhir tahun 2023, terdapat penumbuhan 10 KUBE (100 anggota).

Tabel 2.110 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	3.460	3.460	3.640	3.640	3.740
2.	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	6.580	6.580	6.580	6.580	6.590
3.	Persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	52,58	52,58	55,32	55,32	56,75

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

d) Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Indikator ini merupakan perhitungan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024 telah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa panti sosial yang ada sudah berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah panti sosial sebanyak 1 panti sosial di Kotagede. Pada tahun 2024 angka turun karena terdapat 1 panti sosial yang termasuk dalam UPT.

Tabel 2.111 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	unit	16	17	17	17	16
2.	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	unit	16	17	17	17	16
3.	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

e) Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang telah menyediakan sarana dan

prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta. Selama periode tahun 2020-2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan pada persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2020 persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial telah mencapai 100% dan kemudian turun menjadi sebesar 72,41% pada tahun 2024, sehingga laju penurunan rata-rata selama periode tahun 2020-2024 adalah sebesar -7,03% per tahun. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.112 Persentase WKBSM yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	26	20	20	21	21
2.	Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	26	27	28	29	29
3.	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100	74,07	71,43	72,41	72,41

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 202

f) Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tidak memiliki data terkait korban bencana pada masa tanggap darurat. Akan tetapi, dinas tersebut memiliki data terkait dengan bencana biasa (tidak ditetapkan sebagai tanggap darurat) dengan penanganan sesuai dengan peristiwa bencana yang terjadi. Persentase korban yang menerima bantuan sosial pada tahun 2020 hingga 2024 sudah selalu mencapai 100%. Kenaikan kuantitas korban bencana penerima bantuan sosial pada tahun 2020 terjadi karena adanya bencana alam dan sosial serta wabah pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi yang kemudian berdampak pada banyaknya implementasi kebijakan atau program pemberdayaan sosial. Pada tahun 2024, terdapat kenaikan kejadian bencana sebanyak 77 bencana, meskipun begitu seluruh korban telah mendapatkan bantuan sosial.

Tabel 2.113 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang	127	11	53	103	183

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang	127	11	53	103	183
3.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

g) Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Indikator ini merupakan persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mencapai 100%. Pada tahun 2020 korban yang dievakuasi dari bencana dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap adalah sebanyak 1.043 orang yang menyebar di 14 Kemantren. Kemudian pada tahun 2021 korban yang dievakuasi dari bencana dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sebanyak 10.922 orang yang menyebar di 14 Kemantren. Pada tahun 2022 pasien covid-19 yang difasilitasi isolasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta termasuk kategori korban bencana, sehingga jumlah korban yang mendapat intervensi mencapai ribuan orang. Sementara itu, tahun 2023 korban bencana adalah mereka yang terdampak kebakaran, atap roboh, angin kencang, longsor, dsb. Pada tahun 2024, terdapat kenaikan kejadian bencana sebanyak 77 bencana, meskipun begitu seluruh korban telah mendapatkan bantuan sosial.

Tabel 2.114 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2020	2024
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta	Orang	1.043	10.922	1.273	103	183
2.	Jumlah korban bencana	Orang	1.043	10.922	1.273	103	183
3.	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: BPBD Kota Yogyakarta, 2025

h) Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar penerima jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial di tahun 2020 cukup rendah yaitu 32,29%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mendorong peningkatan angka kemiskinan sehingga jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial

yang seharusnya menerima jaminan sosial naik menjadi 9.065 orang. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya persentase tersebut pada tahun 2020 adalah adanya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin tidak dicairkan agar tidak terjadi dobel intervensi bantuan dengan Pemerintah Pusat RI dan Pemerintah Daerah DIY. Namun pada tahun 2021, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang menerima jaminan sosial meningkat menjadi 59,84% yang disebabkan karena perluasan penerima bantuan sosial APBN dan APBD di masa pandemi covid-19. Tahun 2024, penerima bantuan lebih rendah dari tahun 2023 karena sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya.

Tabel 2.115 Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Orang	2.927	4.478	764	9.111	1.160
2.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	Orang	9.065	7.483	1.340	9.111	1.367
3.	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	32,29	59,84	57,01	100,00	84,86

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.7. Urusan Tenaga Kerja

a) Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme di mana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerja sama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada dan kemudian dikalikan dengan 1.000. Pada periode tahun 2020-2024 angka sengketa pengusaha-pekerja cenderung mengalami tren peningkatan dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 0,5% per tahun. Pada tahun 2021 angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Yogyakarta mencapai 69,48 dengan jumlah perusahaan yang menurun. Meningkatnya angka sengketa pada tahun 2021 disebabkan karena adanya pandemi covid-19, sehingga terdapat beberapa perusahaan yang mengurangi pekerja. Sementara kenaikan jumlah sengketa pada tahun 2022 - 2024 disebabkan antara lain semakin banyak pekerja yang memahami aturan ketenagakerjaan terkait hak-hak pekerja yang bisa

diperjuangkan dan masih terdapat perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK sehingga pekerja menuntut upah yang layak.

Tabel 2.116 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Kasus	23	28	10	17	18
2.	Jumlah Perusahaan	Unit	1.417	403	1.701	1.761	1.725
3.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		16,23	69,48	5,88	9,65	10,43

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

b) Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah indikator yang menghitung persentase kasus yang diselesaikan dengan PB dari keseluruhan kasus yang tercatat pada tahun 2020-2024. Persentase kasus yang diselesaikan dengan PB cenderung mengalami peningkatan selama periode tahun 2020-2023 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan perusahaan menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi salah satunya dengan cara PHK karyawan dan juga menunda pembayaran kewajiban kepada karyawan.

Tabel 2.117 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	16	16	8	14	10
2.	Jumlah kasus yang tercatat	Kasus	23	28	10	17	18
3.	Tingkat penyelesaian kasus	Persen	69,57	57,14	80,00	82,35	55,56

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

c) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Indikator besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Selama periode tahun 2020-2024 persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan cenderung mengalami tren peningkatan dengan laju rata-rata sebesar 10,88% per tahun. Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurun akibat dampak pandemi covid-19. Banyak perusahaan melakukan efisiensi, salah satunya dengan tidak membuka lowongan pekerjaan. Kemudian terjadi penurunan persentase dari tahun 2022 ke tahun 2023. Menurunnya persentase pencari kerja yang ditempatkan dikarenakan tingginya pencari kerja yang terdaftar. Walaupun terdapat kenaikan penempatan pada tahun 2023, tetapi terjadi juga kenaikan pendaftar. Sementara kebanyakan pendaftar adalah angkatan kerja di usia 30 tahun ke atas, sehingga lebih sulit untuk ditempatkan di sektor formal. Pada tahun 2024 juga mengalami kenaikan menjadi 95,95%. Meskipun persentase pencari kerja yang ditempatkan naik, tetapi pencari kerja yang ditempatkan dan pencari kerja yang terdaftar berkurang.

Tabel 2.118 Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	665	748	1071	1349	1137
2.	Pencari kerja yang mendaftar	Orang	833	1.174	1.278	1.783	1.185
3.	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	79,83	63,71	83,80	75,66	95,95

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

d) Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Meningkatnya perselisihan antar buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2022–2023 disebabkan oleh: (1) semakin banyak pekerja yang memahami aturan ketenagakerjaan terkait hak-hak pekerja yang bisa diperjuangkan; dan (2) masih terdapat perusahaan yang memberikan upah di bawah UMK sehingga pekerja menuntut upah yang layak. Secara umum, persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2024 selalu mencapai 100%. Data jumlah perselisihan dan persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.119 Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah penyelesaian perselisihan	Kasus	23	28	10	17	18
2.	Jumlah kejadian perselisihan	Kasus	23	28	10	17	18
3.	Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

e) Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga Kerja perlu ditingkatkan kualitas dan *skill*-nya melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi agar lebih menguasai bidangnya. Pada tahun 2020 hanya dilaksanakan 3 jenis pelatihan saja dari 20 jenis pelatihan yang direncanakan. Hal ini dikarenakan kebijakan pengalihan anggaran (*refocusing*) untuk penanganan Pandemi Covid-19, sehingga pendaftaran pelatihan hanya sampai bulan April tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang dilatih menunjukkan peningkatan, hal ini dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 di Tahun 2021 sudah mulai membaik, sehingga kegiatan pelatihan bisa dilaksanakan walaupun ada beberapa kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring. Pada tahun 2022 hingga 2023 proses pelaksanaan pelatihan sudah normal pasca pandemi, sehingga terdapat penambahan jumlah pelatihan yang dapat dilaksanakan. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi terdapat animo dari masyarakat terkait pelaksanaan pelatihan setir mobil dan pelatihan satpam yang banyak sehingga ditambahkan di anggaran perubahan. Tahun 2024 mengalami penurunan dari 2023 karena adanya pendaftar yang tidak sesuai kuota sehingga terjadi kendala pada penyerapan pendaftar.

Tabel 2.120. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	20	363	328	473	483
2.	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	Orang	571	633	634	763	913
3.	Persentase tenaga kerja terbina kompetensi	Persen	3,50	57,35	51,74	61,99	52,9

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2020-2021, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah turun menjadi sebesar 6,986% hingga pada tahun 2021 turun menjadi 6,91%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya proses mobilisasi penduduk seperti kematian dan perpindahan penduduk, adanya perubahan jumlah seleksi CPNS, mutasi kerja, dan pensiunan di setiap tahunnya.

Tabel 2.121. Partisipasi Perempuan pada Lembaga Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	Orang	5.352	5.263	5.949	5.879	5.837
2	Jumlah pekerja perempuan	Orang	76.638	76.154	74.032	69.692	68.827
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	6,98	6,91	8,04	8,44	8,48

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

b) Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang diduduki perempuan dalam DPRD Kota Yogyakarta dihitung dengan membandingkan jumlah kursi yang diduduki perempuan terhadap jumlah total kursi dalam keanggotaan DPRD. Analisis ini diperlukan untuk mengukur keterwakilan perempuan. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lembaga legislatif dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi setiap warga negara. Selama periode tahun 2020-2024 proporsi perempuan dalam DPRD masih cukup rendah, yaitu sebesar 17,5% pada tahun. Data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut. Penurunan terjadi karena mengikuti periodisasi masa jabatan DPRD tahun 2024-2029 yang telah dilantik pada tanggal 12 Agustus 2024.

Tabel 2.122. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang	5	6	7	7	5
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	40	40	40	40	40
3.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persen	12,5	15	17,5	17,5	12,5

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2025

c) Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dengan jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2020-2023 cenderung menurun tetapi pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Partisipasi pekerja perempuan di lembaga swasta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan lembaga pemerintahan. Partisipasi di lembaga swasta tahun 2023 mencapai 43,58%. Sebagai catatan, perhitungan jumlah perempuan di lembaga swasta merupakan hasil persentase antara jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dibandingkan dengan seluruh jumlah pekerja perempuan.

Tabel 2.123. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	33.944	33.489	31.600	30.371	47.805
2.	Jumlah pekerja perempuan	Orang	76.638	76.154	74.032	69.692	68.827
3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	44,29	43,98	42,68	43,58	69,46

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

d) Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Yogyakarta. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Rasio KDRT di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2024 sudah cukup rendah dengan menghambat laju kenaikan jumlah KDRT sehingga rasio KDRT semula 0,15% pada tahun 2020 menjadi 0,10% pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terkait tindak kekerasan yang ada di wilayahnya, sosialisasi menerus terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di Kota Yogyakarta, sosialisasi layanan UPT PPA, serta meningkatnya peran kader-kader berbasis masyarakat seperti Satgas Sigrak, FPKK, Mitra Keluarga, dan Relawan SAPA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani

melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi pada dirinya maupun di sekitarnya.

Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.124. Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah KDRT	Orang	203	235	147	152	142
2.	Jumlah Kepala Keluarga	Orang	139.654	140.288	139.479	144.759	145.394
3.	Rasio KDRT	Persen	0,15	0,17	0,11	0,11	0,10

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

e) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam UPT

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Persentase tersebut dihitung dengan membandingkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh UPT terhadap jumlah pengaduan yang masuk ke UPT. Selama periode tahun 2020-2024 cakupan penanganan pengaduan kekerasan telah mencapai 100%, yang artinya seluruh pengaduan oleh perempuan dan anak telah ditangani oleh petugas terlatih di dalam UPT. Telah optimalnya cakupan tersebut disebabkan oleh beberapa hal: (1) adanya UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) No. 12/2022, sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis kekerasan yang perlu dilaporkan; (2) meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa kekerasan adalah tidak bisa dibenarkan, masyarakat tahu di mana mengadukan jika terjadi kekerasan dan tahu aksesnya harus ke mana; (3) meningkatnya peran Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Yogyakarta dalam upaya deteksi dini adanya tindak kekerasan dan jangkauan kasus; serta (4) sekolah mulai membuka diri ketika terjadi kekerasan di lingkungan sekolah untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

Data cakupan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.125. Cakupan Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Orang	145	165	192	194	199
2.	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Orang	145	165	192	194	199
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

f) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang menerima layanan kesehatan dari tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A serta PPT/PKT di rumah sakit. Persentase ini diperoleh dengan membandingkan jumlah korban yang mendapatkan layanan kesehatan dengan total korban yang datang ke fasilitas tersebut.

Pada periode 2020-2024, cakupan layanan kesehatan ini telah mencapai 100%, yang berarti semua korban yang mengakses layanan telah ditangani oleh puskesmas atau rumah sakit yang memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan terlatih. Fluktuasi cakupan layanan bagi korban perempuan dan anak bergantung pada kebutuhan yang muncul akibat kasus kekerasan. Tingginya kasus KDRT di Kota Yogyakarta, khususnya kekerasan fisik, berkontribusi terhadap naik turunnya permintaan layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Data cakupan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Yogyakarta selama tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.126. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Yogyakarta yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS pada suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu	Orang	34	31	15	47	54
2.	Jumlah seluruh korban KtP/A yang datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS pada suatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu	Orang	34	31	15	47	54
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

g) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan layanan bantuan hukum. Persentase tersebut dihitung dengan membandingkan jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum. Selama periode tahun 2020-2024, cakupan

penanganan pengaduan kekerasan telah mencapai 100%, yang artinya seluruh korban yang membutuhkan bantuan hukum telah diberikan layanan tersebut. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 yang mengatur persyaratan baru bagi pasangan yang mengajukan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan dalam SEMA tersebut, para penggugat diwajibkan untuk terlebih dahulu berpisah tempat tinggal minimal selama enam bulan. Kebijakan ini tampaknya memberikan dampak positif, mendorong pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian dan memberi kesempatan bagi upaya perdamaian sebelum proses perceraian diajukan. Data penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.127. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Orang	42	60	70	103	76
2.	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang	42	60	70	103	76
3.	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

h) Rasio APM Perempuan dan Laki-Laki di SD

Rasio APM SD/MI antara perempuan dan laki-laki di Kota Yogyakarta dihitung dengan membandingkan APM SD/MI perempuan dengan laki-laki. Analisis rasio ini bermanfaat untuk melihat bagaimana ketimpangan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan usianya. Apabila rasio kurang dari satu, maka partisipasi perempuan berusia 7-12 tahun yang bersekolah SD/MI, lebih rendah dibandingkan laki-laki. Untuk rasio APM SD/MI di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2023 cenderung mengalami penurunan, tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan APM SD/MI laki-laki hingga telah mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2023. Sementara APM SD/MI perempuan cenderung stagnan, tetapi pada tahun 2024 mengalami peningkatan sedikit. Pada tahun 2024 menunjukkan partisipasi perempuan bersekolah lebih tinggi dibandingkan laki-laki, tetapi tidak ada ketimpangan signifikan. Rasio APM SD/MI perempuan dan laki-laki tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128 Rasio APM SD/MI Perempuan dan Laki-Laki di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	APM Laki-Laki	Persen	99,85	99,7	100	100	99,20
2	APM Perempuan	Persen	99,74	99,62	99,86	99,49	99,52
3	Rasio Perempuan/Laki-Laki		0,999	0,999	0,999	0,995	1,003

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025; data diolah

i) Rasio APM Perempuan dan Laki-Laki di SMP

Rasio APM SMP/MTs antara perempuan dan laki-laki di Kota Yogyakarta dihitung dengan membandingkan APM SMP/MTs perempuan dengan laki-laki. Analisis rasio ini bermanfaat untuk melihat bagaimana ketimpangan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan usianya. Apabila rasio kurang dari satu, maka partisipasi perempuan berusia 13-15 tahun yang sekolah SMP/MTs, lebih rendah dibandingkan laki-laki. Untuk rasio APM SMP/MTs di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2023 cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2024, angka rasio menunjukkan lebih dari satu, artinya partisipasi perempuan bersekolah di tingkat SMP lebih tinggi, yaitu di angka 1,113. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah siswa perempuan, sedangkan siswa laki-laki mengalami penurunan. Rasio APM SMP/MTs perempuan dan laki-laki tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129. Rasio APM SMP/MTs Perempuan dan Laki-Laki di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2023
1	APM Laki-Laki	Persen	81,89	77,6	76,16	91,34	82,68
2	APM Perempuan	Persen	68,07	74,81	85,06	75,17	93,72
3	Rasio Perempuan/ Laki-Laki		0,831	0,964	1,117	0,823	1,113

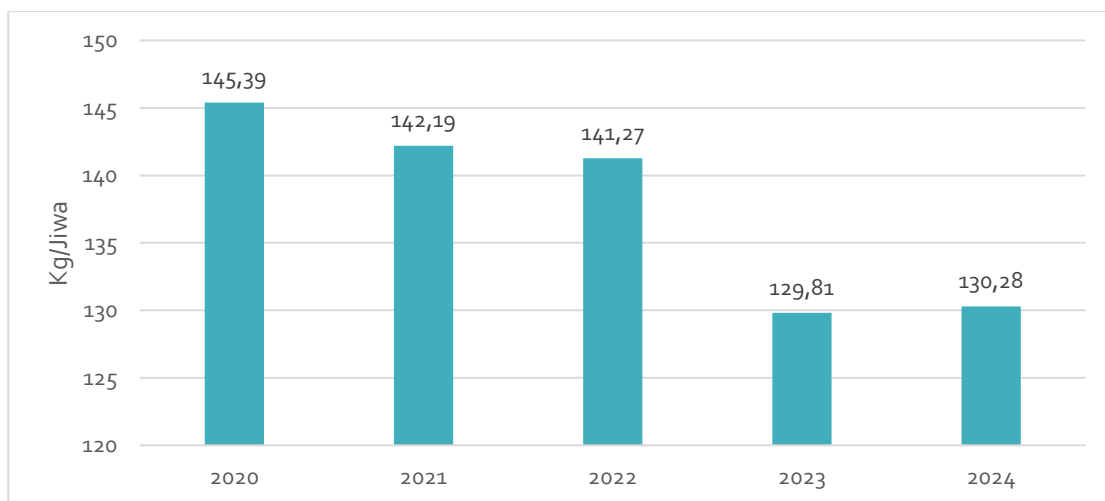
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025; data diolah

2.1.4.7.9. Urusan Pangan

a) Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama diperoleh dari hasil perbandingan jumlah penduduk dengan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap pangan utama. Selama kurun waktu 2020 hingga 2023, ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun.

Gambar 2.28 Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

Pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama sebesar 142,19 kg/tahun/jiwa. Hingga tahun 2023, ketersediaan pangan utama Kota Yogyakarta selalu berada di atas angka 100 kg/jiwa. Secara umum, realisasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pangan utama penduduk di Kota Yogyakarta telah tercukup dengan optimal. Adapun ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta tidak hanya

berasal dari hasil produk di dalam wilayah, tetapi juga berasal dari daerah lain di sekitar wilayah Kota Yogyakarta.

j) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal / Kapita / Hari dan protein 57 Gram / Per kapita / Per hari.

Tabel 2.130. Pemenuhan Energi dan Protein per Kapita per Hari 2020-2024

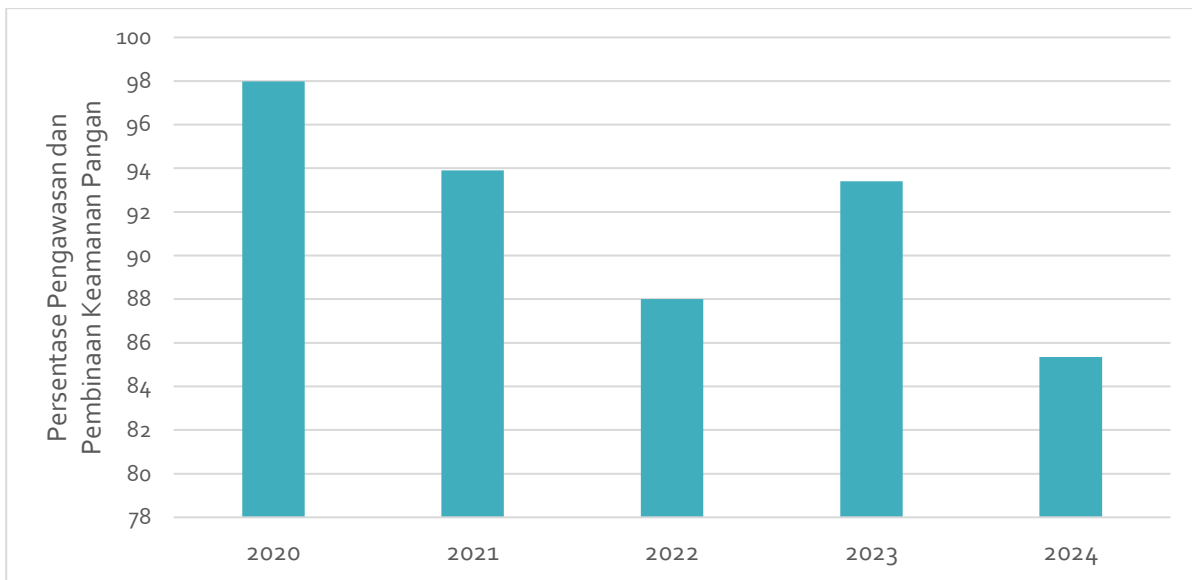
No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan Energi per Kapita per Hari	Kkal	2.595	2.607	2.692	2.745,3	2.773,7
2	Pemenuhan Protein per Kapita per Hari	Gram	83,7	80,61	79,03	84,3	86,7
3	Persentase Pemenuhan Energi per Kapita per Hari	Persen	117,95	124,14	128,21	130,73	132,08
4	Persentase Pemenuhan Protein per Kapita per Hari	Persen	146,84	141,42	138,65	147,89	152,11

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

Selama lima tahun terakhir, ketersediaan energi dan protein per kapita di Kota Yogyakarta menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020, besar persentase pemenuhan energi per kapita per hari adalah 117,95% dan pada tahun 2024 menjadi 132,08%. Sementara itu, pada persentase pemenuhan protein per kapita per hari pada tahun 2020 sebesar 146,84% dan pada tahun 2024 menjadi 152,11%. Pemenuhan Energi dan protein mengalami peningkatan karena peningkatan permintaan bahan pangan yang masuk dari daerah produksi ke Kota Yogyakarta. Peningkatan ataupun penurunan dipengaruhi oleh panen di daerah produksi. Harga bahan pangan utama juga berpengaruh terhadap naik turunnya ketersediaan energi dan protein di Kota Yogyakarta.

k) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, dilakukan perhitungan rumus pangan aman dengan menghitung persentase jumlah sampel yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku terhadap jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.



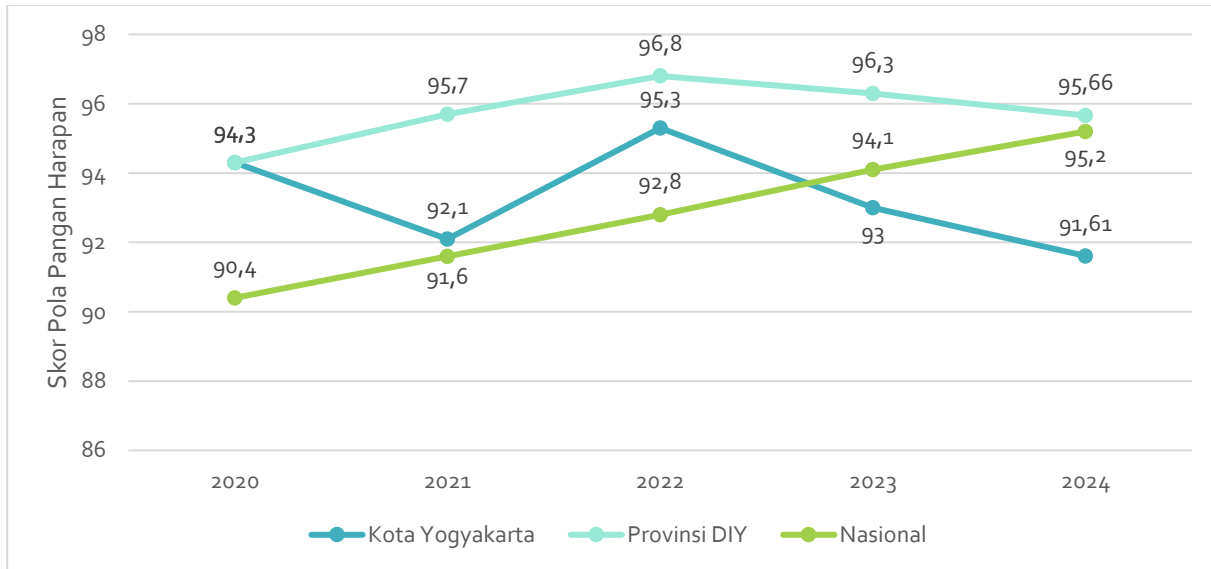
Gambar 2.29 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kota Yogyakarta berada di atas angka 85 persen selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Kendati demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 85,35. Berdasarkan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, penurunan pada tahun 2021 dan 2022 disebabkan karena pengurangan jumlah pengambilan sampel (kegiatan *monitoring*) disebabkan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2024, penurunan diakibatkan oleh kondisi kualitas produk pangan yang beredar dipengaruhi oleh musim dan cuaca ekstrim. Pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi mengenai mutu dan keamanan pangan asal ikan serta Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) telah dilakukan di berbagai aspek masyarakat seperti pedagang pasar, kelompok tani, masyarakat umum dan juga anak sekolah. Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara intensif, bersinergi dengan dinas terkait yaitu Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Dinas Perdagangan. Paguyuban pedagang ikan yang telah dibina sepakat untuk melakukan perbaikan terhadap manajemen lapaknya. Pengawasan mutu dan keamanan PSAT dilakukan secara intensif di pasar modern dan pasar tradisional, baik kepada pelaku usaha/ pedagang maupun kelompok tani.

l) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. PPH merupakan salah satu indikator yang termasuk ke dalam analisis kesejahteraan masyarakat. Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat mempengaruhi kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan dapat menyebabkan malnutrisi ataupun penyakit lainnya. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Yogyakarta selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2020, besar PPH adalah 94,3 persen. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan sehingga skor PPH menjadi 91,61 persen. Walau menurun tapi masih masuk dalam kategori baik, dan menunjukkan keberagaman konsumsi pangan. Pada tahun 2024, kelompok pangan padi-padian tidak mencapai skor maksimal yaitu 23 dari 25, hal tersebut dikarenakan adanya penurunan konsumsi padi-padian yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai mengurangi jumlah konsumsi nasi. Konsumsi kelompok pangan umbi-umbian mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.



Gambar 2.30 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2020-2025

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2025

m) Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan berfungsi untuk memastikan pada kabupaten/kota tertentu setiap tahunnya agar mempunyai inventarisasi cadangan pangan sebesar 100 ton bahan pangan utama untuk keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Persentase cadangan pangan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Berdasarkan data yang ada, selama sembilan tahun ke belakang selalu berada di atas angka 100 persen. Kota Yogyakarta sudah memiliki cadangan pangan yang bersumber dari APBD dan melakukan kerja sama pangan darurat dengan BULOG sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI No. 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria Kota Yogyakarta memiliki sebesar minimum 120 ton. Pada tahun 2020, Kota Yogyakarta melakukan pencadangan beras sendiri, yaitu sebesar 16,75 ton sehingga persentase cadangan pangan mencapai 116,75 persen. Kemudian pada tahun selanjutnya, terdapat penambahan cadangan pangan beras sehingga sampai dengan tahun 2024, besar persentase cadangan pangan mencapai 165,05 persen. Tahun 2024, cadangan pangan tidak mengalami penambahan karena pengadaan cadangan beras tidak terealisasi yang disebabkan oleh adanya faktor eksternal.

Tabel 2.131. Persentase Cadangan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Cadangan Pangan	Ton	116,75	131,75	146,75	165,05	165,05
Persentase Cadangan Pangan	Persen	116,75	131,75	146,75	165,05	165,05

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

n) Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah sistem pendeteksi dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi. Informasi tersebut menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi. Pendekatan SKPG mencakup tiga indikator yaitu pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi. Indikator

pertanian berkaitan dengan ketersediaan pangan daerah, indikator kesehatan terkait dengan preferensi energi, sementara indikator sosial-ekonomi berkaitan dengan kemiskinan keluarga sejahtera dan prasejahtera. Setiap indikator tersebut dihitung dan ditotal sebagai penentu tingkat risiko kerawanan pangan daerah. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, Kota Yogyakarta tercatat tidak memiliki daerah yang terkena atau termasuk rawan bencana sehingga seluruh wilayah di Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori aman pangan (tidak ada wilayah rawan pangan). Kendati demikian, daerah tersebut sudah tertangani sesuai dengan standar yang berlaku sehingga persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani mencapai 100 persen.

Tabel 2.132. Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Daerah Terkena atau Termasuk Rawan Pangan yang Sudah atau Sedang Ditangani Sesuai Standar yang Berlaku	%	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.10. Urusan Pertanahan

a) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Indikator ini menunjukkan persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di bawah, persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah cenderung naik setiap tahunnya. Persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,06% per tahun. Tahun 2023 menjadi capaian tertinggi persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah. Kenaikan ini terjadi karena Banyaknya permohonan penyertifikatan tanah baik Hak Milik dan HGB (perorangan dan Badan Hukum) serta banyaknya penyertifikatan Hak Pakai, termasuk oleh Pemkot Yogyakarta berupa penyertifikatan jalan. Berikut persentase luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.133. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Luas Lahan Bersertifikat terhadap Luas Wilayah	Persen	82,02	81,76	83,04	85,75	88,99

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2024

o) Penyelesaian Kasus Tanah

Indikator ini menunjukkan persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Yogyakarta. Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah merupakan jumlah kasus diselesaikan terhadap jumlah kasus terdaftar. Berdasarkan data di bawah, persentase penyelesaian kasus sengketa tanah fluktuatif. Hal ini terjadi menyesuaikan jumlah kasus terdaftar yang berubah-ubah setiap tahunnya. Setiap tahun terdapat kasus sengketa tanah yang tidak selesai tertangani dengan persentase paling sedikit ditangani terjadi di tahun 2021 yaitu hanya sebesar 45,45% atau 5 kasus ditangani dari 11 kasus terdaftar, sedangkan kasus terbanyak yang ditangani adalah tahun 2023 dengan persentase 100% atau seluruh kasus tertangani dari 4 kasus terdaftar yang jumlahnya lebih sedikit dari tahun 2021. Berikut adalah persentase penyelesaian kasus sengketa tanah di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.134. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Tahun 2019-2023

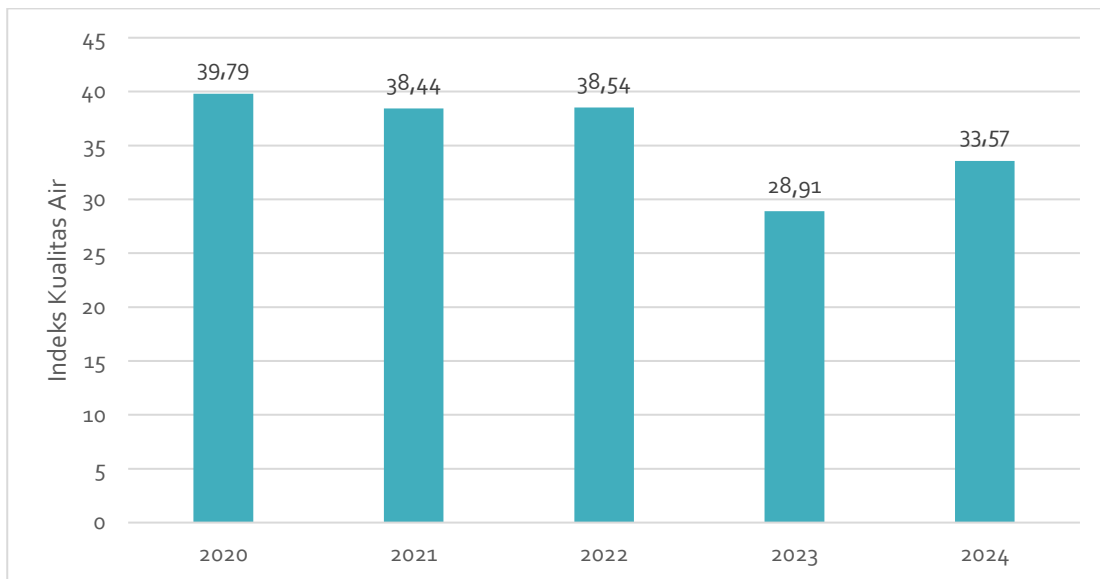
Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah	Persen	60,00	57,14	45,45	85,00	100,00

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2024

2.1.4.7.11. Urusan Lingkungan Hidup

a) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air merupakan salah satu komponen penyusun di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Semakin tinggi indeks kualitas air maknanya semakin tinggi pula mutu air di wilayah tersebut. Selama kurun waktu 2020 sampai 2024, indeks kualitas air di Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan dari 39,79 di tahun 2020 menjadi 33,57 di tahun 2024 atau pertumbuhan rata-rata -3,00% per tahun. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan kualitas air di Kota Yogyakarta akibat pencemaran.

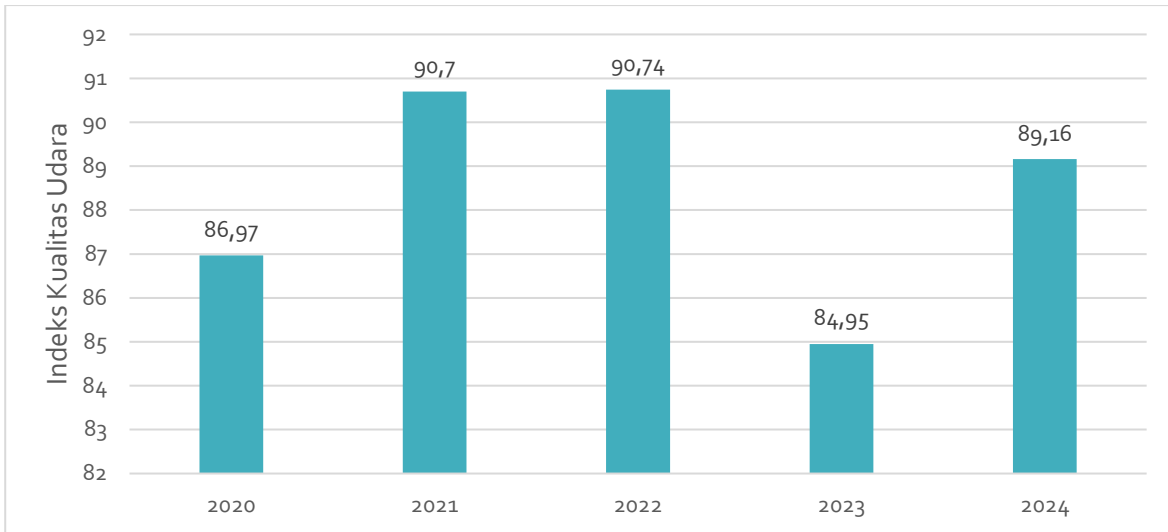


Gambar 2.31 Indeks Kualitas Air Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

p) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Nilai indeks kualitas udara dapat mengindikasikan bagaimana tingkat polusi di suatu wilayah selama periode tertentu. Berdasarkan data yang ada, indeks kualitas udara Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan capaian tertinggi sebesar 90,74 dan mengalami penurunan di tahun selanjutnya menjadi 84,95. Pada tahun 2024, indeks kualitas udara kembali meningkat menjadi 89,16. Adapun rata-rata pertumbuhan indikator ini adalah 0,73% per tahun. Peningkatan pada periode tahun 2020-2022 salah satunya disebabkan oleh faktor pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal tersebut berimplikasi pada penurunan aktivitas dan mobilitas masyarakat sehingga polusi berkurang dan kualitas udara bertambah baik.

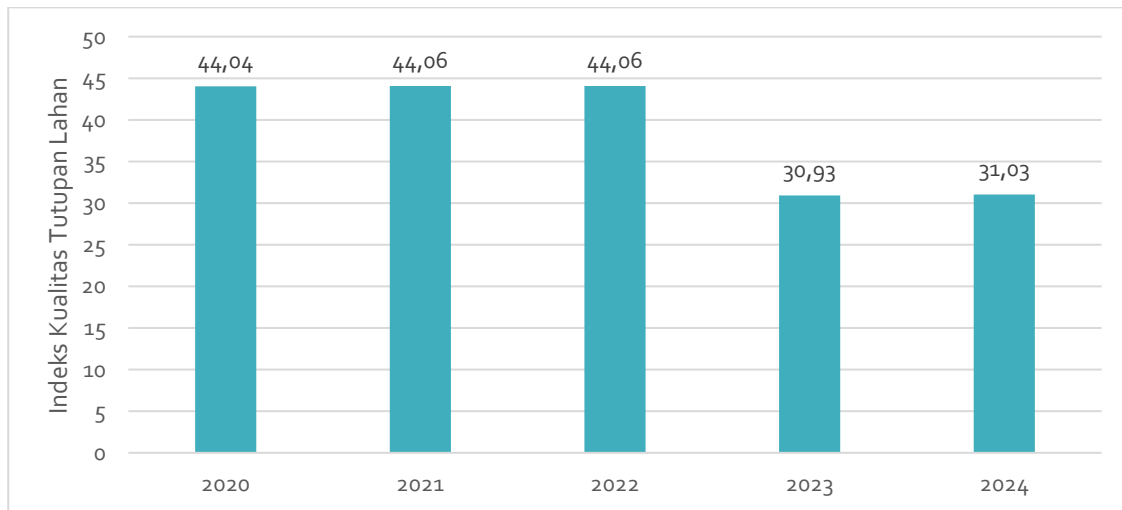


Gambar 2.32 Indeks Kualitas Udara Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

q) Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Semakin tinggi indeks kualitas tutupan lahan maka hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup akan semakin baik. Indeks ini berhubungan dengan beberapa aspek seperti luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Indeks ini menghitung tutupan lahan hutan dan tutupan vegetasi non hutan seperti ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati.



Gambar 2.33 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

Indeks kualitas tutupan lahan Kota Yogyakarta mengalami kondisi yang konstan dan penurunan pada periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, besar nilai indeks ini adalah 44,04 dan di tahun 2024 menurun menjadi 31,03. Kenaikan IKL pada tahun 2024 dari tahun 2023 terjadi karena meningkatnya luasan tutupan vegetasi yang terbaharui pada tahun 2024, sebanyak sekitar 5 Ha. Adanya kenaikan luasan tutupan vegetasi tersebut, membuat IKL naik sekitar 0,1 point.

Pertumbuhan rata-rata indikator ini adalah -7,36% per tahun pada kurun waktu 2020-2024. Berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, capaian indeks kualitas tutupan lahan yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lahan di Ruang Terbuka Hijau terutama di jalur hijau yang menjadi kewenangan DLH sulit untuk dikembangkan. Selain

itu, perhitungan indeks kualitas tutupan lahan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dasar perhitungan indeks kualitas tutupan lahan untuk Kota Yogyakarta hanya berdasarkan luas tutupan vegetasi.

r) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota

Tujuan dilakukannya pembinaan dan pengawasan adalah menegakkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan agar menaati peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, kerusakan lingkungan dapat dicegah dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Indikator ini merupakan hasil perbandingan antara jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota yang ditangani dengan total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota. Berdasarkan data yang ada, indikator ini mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Capaian tertinggi terdapat di tahun 2020 dengan nilai 76,47% dan capaian terendah terjadi di tahun 2021 yang nilainya hanya 19,23%. Secara umum, pertumbuhan rata-rata indikator ini pada periode tahun 2020-2024 adalah 25,50% per tahun.

Tabel 2.135. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	76,47	19,23	53,57	41,18	50,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

s) Pengelolaan Sampah

Mengacu pada SNI 19-2454-2022, timbulan sampah dapat diartikan sebagai banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di dalam satuan volume atau berat per kapita per hari atau perluas bangunan atau perpanjang jalan. Hasil perhitungan timbulan sampah yang ditangani diperoleh dengan cara membagi volume timbulan sampah yang ditangani dengan besar total timbulan sampah. Beberapa faktor penyebab meningkatnya timbulan sampah adalah bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas daerah yang semakin berkembang. Banyaknya sampah yang tertangani akan berdampak positif pada penurunan pencemaran lingkungan.

Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas perekonomian maupun rumah tangga di Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah sebanyak 360,79 ton/hari dan di tahun 2024 jumlah ini mengalami penurunan yang pesat, yaitu sebesar 300,56 ton/hari. Hal

tersebut dipengaruhi oleh upaya pemerintah kota untuk menekan jumlah sampah yang dibuang ke fasilitas pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan produksi sampah maupun pengolahan sampah secara mandiri akibat kondisi darurat sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta dan kabupaten lain seperti Kabupaten Sleman dan Bantul karena kapasitas TPST Piyungan yang semakin penuh. Pengurangan sampah dilakukan sejak dari sumber atau hulu yaitu dari sampah rumah tangga, yang didukung oleh adanya Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA). GZSA yakni metode pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri antara sampah organik dan sampah anorganik. GZSA meminimalkan produksi sampah anorganik dengan penyaluran ke bank sampah terdekat maupun pelapak, sedangkan produksi sampah organik rumah tangga diolah dengan biopori, losida, BSF dll.

Tabel 2.136. Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Potensi Timbulan Sampah	ton/hari	360,79	327,4	303,13	300,56	300,56
2	Penanganan (Terangkut ke TPA)	ton/hari	262,32	255,34	258,49	244,15	97,21
		%	72,71	85,44	85,86	81,23	32,34
3	Pengurangan melalui TPS 3R	ton/hari	94,06	40,46	38,84	110,45	150,38
		%	26,07	13,54	12,9	36,75	50,03
4	Sampah Sudah Terkelola	ton/hari	356,38	295,8	297,33	354,6	247,59
		%	98,78	90,35	98,09	117,98	82,38
5	Sampah Belum Terkelola	ton/hari	4,41	31,6	5,8	54,04	52,97
		%	1,22	9,65	1,91	17,98	17,62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025, diolah

Pada Tahun 2024, terdapat 3 fasilitas pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta, yaitu UPS Nitikan, UPS Kranon, dan UPS Karangmiri. Selain itu Kota Yogyakarta mempunyai Bank Sampah dengan jumlah 694 bank sampah dengan jumlah sampah yang dapat dikelola rata-rata 3,68 ton/hari. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah dengan pembangunan UPS. Namun, salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunannya adalah ketersediaan lahan yang terbatas. Saat ini, lahan yang tersedia hanya di sisi selatan sehingga untuk pembangunan UPS di sisi utara memerlukan kerja sama lebih lanjut, khususnya terkait dengan penyediaan lahan.

Tabel 2.137. Kategori Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2024

No.	Kategori Bank Sampah	Jumlah
1	Pembina	18
2	Inovatif	32
3	Reguler	458
4	Pembinaan	181
5	Bank Sampah Baru	5
Jumlah		694

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota YK 2024, 2025

Pengangkutan sampah dilakukan dari sumber sampah/lokasi pembuangan sementara (TPS)/depo dengan total jumlah depo yang ada di Kota Yogyakarta yaitu berjumlah 13 depo, dengan rincian daya tampung sebagai berikut:

Tabel 2.138. Daya Tampung Depo/Sumber Lainnya

No.	Depo/ Sumber Lainnya	Kapasitas Depo/ TPS (ton)
1	Mandala Krida	150
2	THR	100
3	Pengok	100
4	Lapangan Karang	100
5	Pringgokusuman	150
6	RRI	100
7	Argolubang	70
8	Ngasem	50
9	Utoroloyo	50
10	Serangan	50
11	Dukuh	30
12	Kebun Raya	50
13	Sorosutan	50
Total		1.050

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2024

Berdasarkan data yang ada, sebanyak 17,62% (52,97 ton/hari) sampah yang belum terkelola dari keseluruhan timbulan sampah pada tahun 2024. Mengacu pada hasil survei EHRA tahun 2018, sebagian masyarakat masih melakukan pembuangan secara sembarangan baik di sungai maupun tempat terbuka dan melakukan pembakaran.

t) Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R

Salah satu upaya untuk mengurangi jumlah sampah adalah dengan gerakan 3R, yaitu *reduce* (mengurangi), *reuse* (menggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang). Indikator persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R menunjukkan persentase sampah yang dapat dikelola melalui gerakan 3R antara lain meliputi pembuatan pupuk kompos, mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bernilai guna dan ekonomis, bank sampah, dan sebagainya sehingga sampah tidak dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) serta secara langsung akan mengurangi jumlah timbulan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

Tabel 2.139. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	Persen	26,07	13,54	12,90	36,75	50,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

Capaian persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 fluktuatif menunjukkan tren penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 26,07% kemudian turun menjadi 13,54%. Kendati demikian, di tahun 2023 terjadi lonjakan capaian yang sangat pesat hingga tahun 2024 menjadi 50,03%. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi darurat sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya akibat

TPST Piyungan yang sudah tidak dapat menampung sampah secara optimal. Oleh karena itu, gerakan 3R menjadi semakin gencar dilakukan guna menekan jumlah sampah yang dibuang.

u) Persentase Cakupan Area Pelayanan

Cakupan area pelayanan menunjukkan seberapa besar jangkauan pelayanan pengelolaan sampah di suatu daerah. Indikator ini diperoleh dari hasil perbandingan antara luas area pelayanan pengelolaan sampah dengan luas area kota. Data Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa di tahun 2020 hingga 2024, persentase cakupan area pelayanan sudah mencapai 100%. Hal tersebut berarti sudah seluruh wilayah kota telah terlayani fasilitas pengelolaan sampah. Secara administrasi Kota Yogyakarta memiliki TPS/Depo yang tersebar untuk dan sudah melayani seluruh area di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.140. Persentase Cakupan Area Pelayanan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a) Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah. KTP atau Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,30% per tahun. Pada tahun 2020, rasio penduduk ber-KTP menunjukkan angka 0,98% dan pada tahun 2024 menjadi 0,992%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan rasio penduduk ber-KTP meliputi layanan rekam KTP di sekolah dan lembaga permasyarakatan, jemput bola dengan metode *mobile* ke Masyarakat lansia, ODGJ, dan difabel dengan dasar informasi dari wilayah. Berikut data rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.141. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk	0,98	0,98	0,996	0,991	0,992

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

v) Rasio Anak Berakta Kelahiran

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah anak berakta kelahiran dengan jumlah anak seluruhnya. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran sehingga menjadi data penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat di dalam data kependudukan. Rasio anak berakta kelahiran di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 memiliki besar nilai yang selalu stabil, yaitu di angka 1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh anak sudah memiliki akta kelahiran. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan Kado Ananda bayi yang lahir di rumah sakit/klinik bersalin yang telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dibuatkan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di tempat tersebut. Berikut data rasio anak berakta kelahiran di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.142. Rasio Anak Berakta Kelahiran Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Anak Berakta Kelahiran	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

w) Rasio Pasangan Berakta Nikah

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasangan nikah berakta nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah. Akta nikah merupakan bukti pernikahan yang sah diakui oleh negara dan agama. Rasio pasangan berakta nikah di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio pasangan berakta nikah menunjukkan angka 0,75 dan pada tahun 2024 menjadi 0,88. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya layanan *Mantul Tenan* (Manten Anyar Entuk Telu Dokumen – KK, KTP, Akta Nikah), adanya layanan *Mantab* (Manten Anyar Dapat Empat untuk penduduk muslim – KTP, KK, 2 Buku Nikah), adanya layanan di JSS untuk pemutakhiran data perkawinan untuk mengubah status dari tercatat menjadi kawin tercatat. Namun, angka rasio tersebut belum mencapai angka 1 sehingga mengindikasikan bahwa belum semua pasangan yang sudah menikah di Kota Yogyakarta melaporkan pernikahannya. Berikut rasio pasangan berakta nikah di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.143. Rasio Pasangan Berakta Nikah Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pasangan Berakta Nikah	0,75	0,79	0,86	0,87	0,88

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

x) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Indikator ini menggunakan perhitungan jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk wajib KTP. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020-2024 berjalan fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang relatif kecil. Pada tahun 2020 cakupan penerbitan KTP menunjukkan angka 98,02% dan pada tahun 2024 menjadi 99,20%, angka ini hampir 100% yang menggambarkan bahwa jumlah KTP yang diterbitkan untuk jumlah penduduk wajib KTP sudah hampir 100%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa upaya yang telah dilakukan meliputi adanya layanan *drive thru*, jemput bola rekam dan cekat KTP pemula di sekolah-sekolah. Berikut data cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.144. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Persen	98,02	97,52	99,58	99,12	99,20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

y) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Indikator ini menggunakan perhitungan jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran bersangkutan terhadap jumlah kelahiran. Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 telah mencapai angka 100%. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan Kado Ananda bayi yang lahir di rumah sakit/klinik bersalin yang telah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dibuatkan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di tempat tersebut. Berikut data cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.145. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.13. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

a) Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga menunjukkan perbandingan antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Indikator ini merupakan salah satu parameter untuk melihat keberhasilan program keluarga berencana. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta berada di bawah angka 2. Jumlah tertinggi terdapat di tahun 2020, yaitu sejumlah 1,20 jiwa dan tahun selanjutnya terus mengalami penurunan sehingga di tahun 2024 capaian indikator ini sebanyak 1,14 jiwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar keluarga hanya terdiri dari 1 hingga 2 anak. Dengan demikian, program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah menunjukkan hasil yang positif dan masyarakat memiliki kesadaran untuk menerapkan program keluarga berencana tersebut.

Tabel 2.146 Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jiwa	1,20	1,19	1,17	1,15	1,14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2025

z) Determinan Fertilitas

Pertumbuhan penduduk perlu dikendalikan karena pertumbuhan penduduk tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, akan tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan menghambat proses pembangunan karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang selalu bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indikator urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.147. Total Fertility Rate dan Crude Birth Rate di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Kesuburan Umum/Total Fertility Rate (TFR)	TFR	1,67	1,53	1,67	NA	NA
2	CBR (Crude Birth Rate)	CBR	7,48	6,53	6,03	5,87	5,17

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2023; DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2025

Total Fertility Rate (TFR) merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan seorang perempuan selama masa reproduksinya yaitu pada usia 15-49 tahun. Tingkat kesuburan umum mengalami penurunan 2021. Pada tahun 2020, TFR sebesar 1,67 kemudian menurun menjadi 1,53 pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 1,67 pada tahun 2022.

CBR (*Crude Birth Rate*) dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan angka yang semakin baik mencapai 5,17 CBR pada tahun 2024. Hal ini didukung dengan adanya pembinaan Kampung KB baik melalui Pelaksanaan Operasional Lini Lapangan, Pertemuan Pokja Kampung KB, pertemuan Kampung KB berbasis Tribina, penyampaian informasi-informasi terkait program Bangsa

Kencana melalui kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU). Adanya kerja sama dengan DP3AP2 DIY dalam kegiatan Sosialisasi Dampak Kependudukan dan Arah Kebijakan DP3AP2 DIY Tahun 2022 untuk FAPSEDU. Kemudian dilakukan *monitoring* dan evaluasi program pengendalian penduduk melalui sosialisasi advokasi SSK bersama dengan BKKBN Perwakilan DIY implementasi materi pendidikan kependudukan. Selain itu pelaksanaan bakti sosial pelayanan KB yang bekerja sama dengan fasilitas layanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dengan antusias masyarakat yang tinggi menunjukkan kesadaran masyarakat untuk berkeluarga berencana, serta adanya keterpaduan antara BKB dengan PAUD, posyandu, dapur balita dan dapur sehat.

aa) Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur yang salah satunya menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan melalui program maupun non-program. Adapun rasio akseptor KB adalah hasil perbandingan antara jumlah akseptor KB dengan jumlah pasangan usia subur.

Tabel 2.148. Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Akseptor KB	Persen	65,46	69,90	74,04	62,58	62,60

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2025

Rasio akseptor KB di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 74,04% dan capaian terendah di tahun 2023 dengan realisasi 62,58%, kemudian kembali meningkat di tahun 2024 sebesar 62,60%. Penurunan jumlah akseptor KB disebabkan oleh pasangan usia subur yang memutuskan untuk memiliki anak sehingga statusnya berganti menjadi IAS (Ingin Anak Segera).

bb)Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara peserta KB aktif dengan pasangan usia subur. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menika usia 15-49 menunjukkan peningkatan dan penurunan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Capaian tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 74,04% dan terendah pada tahun 2023 dengan capaian 62,58%, kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 62,80%. Penurunan capaian indikator ini terjadi karena banyak pasangan usia subur yang sebelumnya telah menjalani program KB namun berhenti karena berganti status menjadi IAS (Ingin Anak Segera).

Tabel 2.149. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	65,46	69,90	74,04	62,58	62,80

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2025

cc)Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)

Angka kelahiran remaja per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun merupakan perbandingan antara jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 dengan jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada

pertengahan tahun yang sama. Selama tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator ini menunjukkan fluktuasi peningkatan dan penurunan. Adapun capaian tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 3,4 dan terendah di tahun 2022 dan 2023 sebesar 1,5. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 2,2. Penurunan capaian indikator ini disebabkan oleh meningkatnya edukasi mengenai pendewasaan usia perkawinan (PUP) pada penduduk terutama perempuan usia 15-19 tahun sehingga dapat menurunkan angka perkawinan dini dan kelahiran di bawah usia ideal.

Tabel 2.150. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	per 1.000 wanita	2,1	3,4	1,5	1,5	2,2

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2025

dd) Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di bawah 20 Tahun

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun merupakan hasil perhitungan dari pembagian jumlah kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun dengan jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun. Usia istri yang masih di bawah 20 tahun memiliki risiko tinggi pada saat melahirkan bagi ibu hamil maupun anak yang dilahirkan. Secara umum, cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun menunjukkan penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian indikator ini sebesar 0,58% dan di tahun 2024 menjadi 0,07%. Hal tersebut menunjukkan semakin sedikit pasangan usia subur yang memiliki istri dengan usia di bawah 20 tahun. Tren positif dari indikator ini juga didorong karena semakin meningkatnya edukasi mengenai pendewasaan usia perkawinan (PUP) pada penduduk terutama perempuan usia 15-19 tahun, pendampingan dari TPK di wilayah, serta adanya kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanggulangan kehamilan remaja kurang dari 20 tahun, sehingga menurunkan angka perkawinan dini.

Tabel 2.151 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun	Persen	0,58	0,28	0,26	0,15	0,07

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2025

ee) Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani terhadap jumlah pasangan usia subur. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah. Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 berjalan fluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2020, cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) menunjukkan angka 9,45% kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 11,15%, kembali meningkat menjadi 16,18% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 12,55%. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu

perubahan dalam data dasar statistik rutin, usia pasangan usia subur, kesadaran pria ber-KB yang relatif masih rendah, dan tingkat pendidikan wanita. Banyaknya PUS yang makin sadar pentingnya berKB dan meningkatnya jumlah layanan KB di semua Fasyankes termasuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi baik melalui media cetak maupun elektronik membuat adanya peningkatan PUS yang ber-KB tidak terpenuhi. Berikut data cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.152 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	9,45	11,15	11,09	16,18	12,55

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

ff) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP terhadap jumlah akseptor KB. MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menunjukkan angka 45,02%, kemudian mengalami penurunan hingga pada tahun 2024 menjadi 40,11%. Meskipun data jumlah akseptor KB meningkat, di sisi lain persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menurun, hal ini dapat disebabkan karena masyarakat memilih menggunakan metode kontrasepsi non-MKJP atau akseptor KB MKJP (PUS) berganti menjadi IAS (Ingin Anak Segera) serta lulus PUS (Menopause). Berikut data persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.153 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Pasangan	9.985	10.229	10.031	9.988	9.538
Jumlah akseptor KB	Pasangan	22.177	23.978	27.306	24.453	23.782
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	45,02	42,66	36,74	40,85	40,11

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

gg) Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi terhadap jumlah akseptor KB. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif namun cenderung meningkat. Meningkatnya persentase keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dikarenakan Kesadaran masyarakat terhadap kemanfaatan pemakaian kontrasepsi meningkat karena terlaksananya komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai KB yang lebih masif oleh bidan, tenaga lini kalaongan, dan tim pendamping keluarga pasca KB, serta adanya SE Gubernur DIY No.II tahun 2022 terkait dengan KB pascasalin sehingga PUS lebih senang menggunakan alat kontra sepsi yang moderen dalam hal ini adalah MKJP . Kendati demikian,

pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1,22%. Namun, pada tahun 2024 meningkat kembali secara signifikan menjadi 20,63%. Berikut data persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.154 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Persen	14,44	17,30	19,71	1,22	20,63

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

hh) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Indikator ini menunjukkan perbandingan dari anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB. Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan kelompok kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balita. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 fluktuatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB menunjukkan angka 80,42% hingga 100% pada tahun 2024.

Tabel 2.155. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Orang	3.980	3.952	4.007	1.886	2.829
Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS	Orang	4.949	5.039	6.787	1.888	2.829
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB	Persen	80,42	78,43	59,04	99,89	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan tabel 2.167, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Yogyakarta di tahun pasca pandemi mengalami penurunan dikarenakan penambahan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB tidak sebanding dengan penambahan anggota kelompok BKB yang berstatus pasangan usia subur. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan jumlah anggota kelompok BKB melalui posyandu balita (keanggotaan posyandu secara langsung menjadi anggota kelompok BKB).

Jumlah Anggota kelompok BKB yang ber-KB mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2022 menggunakan sumber data kombinasi (manual dan newsiga), pada tahun 2022 merupakan masa transisi penggunaan sumber data newsiga, sehingga cakupan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB belum semua ter-*input* kedalam sistem sehingga perlunya ditambahkan dari data manual. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan pada sistem sudah menyaring secara otomatis untuk PUS yang berusia 49 Tahun, sehingga untuk anggota yang ber-KB namun sudah tidak PUS maka tidak akan tercatat dalam SIGA.

Jika melihat dari Persentase Cakupan Anggota BKB ber-KB pada Tahun 2023, mengalami kenaikan 99,89%. Kenaikan-kenaikan tersebut disebabkan jumlah BKB yang mengalami pertambahan pula. Hal ini disebabkan adanya Integrasi Layanan Primer di Posyandu termasuk berintegrasi dengan kelompok BKB. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan PUS BKB untuk ber-

KB adalah melalui penggerakan pelayanan KB MKJP. Berikut data cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kota Yogyakarta.

ii) Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Indikator ini menunjukkan perbandingan dari anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber-KB. Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 fluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2020, cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB menunjukkan angka 76,89%, pada tahun 2022 menurun secara signifikan menjadi 54,04% dan pada tahun 2024 menunjukkan angka 76,02%. Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan penambahan jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB tidak sebanding dengan penambahan anggota kelompok BKR yang berstatus pasangan usia subur. Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, dikarenakan tahun 2024 pelaporan melalui SIGA lebih tertib dan adanya upaya mendorong kelompok BKR agar kualitasnya semakin meningkat, di antaranya melalui adanya bantuan operasional kegiatan dan stratifikasi kelompok kegiatan, serta peningkatan penggerakan pelayanan KB MKJP. Berikut data cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.156 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB	Persen	76,89	77,32	54,04	71,54	76,02

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

jj) Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Indikator cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB) menunjukkan fluktuasi dalam persentase partisipasi dari tahun 2020 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa persentase cakupan meningkat karena adanya penurunan jumlah anggota BKL yang merupakan Pasangan Usia Subur (PUS). Pada tahun 2020, cakupan berada pada 73,21% dan dan pada 2021 hingga 2022 menunjukkan penurunan drastis hingga angka 7,54%, sebelum akhirnya naik kembali hingga tahun 2024 menjadi 72,36%. Peningkatan persentase cakupan ini dikarenakan jumlah anggota BKL yang termasuk dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) mengalami penurunan, sehingga meskipun jumlah total peserta program mungkin menurun, persentasenya tetap meningkat karena basis perhitungan yang lebih kecil. Pada tahun 2024 pelaporan melalui SIGA lebih tertib dan adanya upaya untuk mendorong kelompok BKL agar semakin meningkat kualitasnya, diantaranya adalah melalui adanya bantuan operasional kegiatan dan stratifikasi kelompok kegiatan, sehingga terdapat peningkatan BKL ber-KB.

Tabel 2.157 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB	Persen	73,21	65,28	7,54	70,54	72,36

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

kk) Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa

Indikator ini menunjukkan jumlah cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) bagi remaja/mahasiswa. Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Indikator ini mencerminkan jumlah remaja yang terlibat aktif dalam PIK untuk mendapatkan informasi dan konseling yang dibutuhkan. Pada 2020, cakupan remaja berada pada angka 378,57%, cakupan tersebut meningkat tajam menjadi 514,29% pada tahun 2022, dan akhirnya berada pada angka 507,14% pada tahun 2024.

Fluktuasi yang pada cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling (PIK) terjadi karena adanya covid-19 dan *lockdown* di tahun 2020-2021 yang menyebabkan penurunan kelompok PIK yang aktif. Lalu jumlah kelompok PIK R/M yang aktif meningkat tajam sejak tahun 2022, karena sudah pasca pandemi covid-19, yang menunjukkan bahwa program PIK terus berkembang dan menjangkau lebih banyak remaja dan mahasiswa yang membutuhkan layanan informasi dan konseling di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.158 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa	Persen	378,57	378,57	514,29	500,00	507,14

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

ll) Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Indikator cakupan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang didayagunakan oleh perangkat daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk menunjukkan konsistensi sebesar 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Cakupan ini tetap terjaga karena adanya PKB yang purnatugas digantikan oleh penambahan PKB baru melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 11 orang. Dengan demikian, perangkat daerah di Kota Yogyakarta berhasil mempertahankan cakupan 100% dalam mendukung program Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk secara optimal setiap tahunnya.

Tabel 2.159 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

mm) Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

Indikator ini menunjukkan cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang menggunakan KB secara mandiri. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh penggunaan sumber data kombinasi (manual dan newsiga), di mana tahun 2022 merupakan masa transisi ke penggunaan sistem data newsiga. Akibatnya, cakupan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB belum seluruhnya ter-input ke dalam sistem, sehingga diperlukan penambahan data manual.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan anggota kelompok UPPKS yang ber-KB dan ber status PUS karena sistem secara otomatis menyaring anggota PUS yang berusia 49 tahun. Oleh karena itu, anggota yang ber-KB namun sudah tidak termasuk dalam kategori PUS tidak akan tercatat dalam SIGA. Hal ini bertujuan untuk peremajaan data agar lebih terbaru dan aktual. Meskipun demikian, jika dilihat dari persentase cakupan anggota BKL ber-KB pada tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan PUS UPPKS ber-KB adalah melalui penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Tabel 2.160 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB	Orang	1.389	966	946	295	392
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS	Orang	1.644	1.484	2260	459	574
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	Persen	84,49	65,09	41,86	64,27	68,29

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

nn) Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Indikator ini menggunakan perhitungan perbandingan jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan dan Gudang alat kontrasepsi kota terhadap perkiraan permintaan masyarakat. Berikut data cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.161 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat di Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota	IUD	523	543	1.543	2.096	1621	2.096
		Kondom	1.858	453	359	241	167	241
		Pil KB	2.287	4.200	3.850	4.140	1365	4.140
		Suntikan	2.175	8.180	8.320	9.420	7890	9.420
		Susuk KB/Implan	221	712	791	1.260	595	1.260
		Total	7.064	14.088	14.863	17.157	11.638	17.157

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2.	IUD	7.433	7.579	1.374	6.395	5817	6.395
	Kondom	14.218	102	159	9.581	9273	9.581
	Pil KB	2.342	2.384	2.180	1.358	985	1.358
	Suntikan	5.331	5.354	6.880	2.500	1970	2.500
	Susuk KB/Implan	997	1.073	677	555	414	555
	Total	30.321	16.492	11.270	20.389	18459	20.389
3.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Persen	23,3	85,42	131,88	84,15	63,05

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat menunjukkan sebesar 23,3%. Pada tahun 2021 dan 2022, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat meningkat hingga 131,88%. Pada tahun 2023, cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi mengalami penurunan menjadi 84,15%. Lalu menurun kembali pada tahun 2024 sebesar 63,05%. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, namun secara target khususnya pada pelayanan KB reguler di faskes maupun bakti sosial pelayanan KB MKJP telah tercukupi dan mencapai target.

oo) Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerja sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Indikator ini menunjukkan perbandingan jumlah fasilitas kesehatan dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS. Peserta yang terdaftar BPJS dapat menggunakan layanan KB secara gratis berupa pelayanan Vasektomi & Tubektomi, pemasangan alat kontrasepsi dan konsultasi, pemasangan dan pelepasan alat KB spiral dan KB suntik. Berikut data persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.162 Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerja sama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Faskes dan Jejaringnya yang bekerja sama Dengan BPJS	Persen	91,8	71,43	69,57	90,91	94,03

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, persentase fasilitas kesehatan dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 berjalan fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase menunjukkan 91,8%. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan hingga sebesar 69,57%. Penurunan yang terjadi disebabkan karena adanya beberapa fasilitas kesehatan

yang gulung tikar karena tidak bekerja sama dengan BPJS. Pada tahun 2023, persentase mengalami peningkatan menjadi 90,91% dan pada tahun 2024 sebesar 94,03%. Hal tersebut diakibatkan oleh meningkatnya kesadaran fasilitas kesehatan dan jejaringnya untuk melaksanakan pelayanan KB bagi masyarakat dan bekerja sama dengan BPJS untuk mempermudah pelayanan tersebut.

pp) Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga

Indikator ini menunjukkan perbandingan jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui delapan fungsi keluarga. Delapan fungsi keluarga meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Berikut data cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui delapan fungsi keluarga di Kota Yogyakarta tahun 2014-2023.

Tabel 2.163 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga di Kota Yogyakarta 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data di atas, cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui delapan fungsi keluarga di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 sudah stabil mencapai angka 100%. Untuk mendukung pelaksanaan delapan fungsi keluarga, terdapat pembinaan melalui beberapa kelompok kegiatan yang meliputi Bina Keluarga Sejahtera (BKS), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) dengan sasaran yang berbeda-beda pada setiap kelompok kegiatan.

qq) Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD

Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD selama kurun tahun 2020 hingga 2024 di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi peningkatan dan penurunan. Tahun 2020 menjadi capaian terendah dengan nilai 0,16% dan tahun 2024 menjadi yang tertinggi dengan nilai 0,36%. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan alokasi anggaran khususnya pada program Keluarga Sejahtera yaitu pada komponen pembiayaan kegiatan kelompok kegiatan Bina Keluarga Sejahtera, pelaksanaan Survey Ketahanan Keluarga, serta pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan pada Kader TPK dan Posyandu.

Tabel 2.164 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Persen	0,16	0,25	0,25	0,24	0,36

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
melalui APBD dan APBDesa						

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

a) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Indikator ini menunjukkan rata-rata jumlah kelompok yang dibina oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Rata-rata kelompok binaan LPM di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2019 hingga 2023 cenderung meningkat tetapi tidak signifikan dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 0,27% per tahun. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023 rata-rata kelompok binaan LPM konsisten sebesar 13,84 kelompok dengan total jumlah kelompok binaan LPM sebesar 623 kelompok. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen yang tinggi dari kelompok binaan LPM dan disertai dengan pendampingan yang baik. Berikut data rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.165 Rata-Rata Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kelompok binaan LPM	kelompok	616	617	623	623	623
2.	Jumlah LPM	kelompok	45	45	45	45	45
3.	Rata-rata binaan LPM	kelompok	13,69	13,71	13,84	13,84	13,84

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2024

rr) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Indikator ini menunjukkan jumlah kelompok binaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terhadap jumlah seluruh PKK. PKK merupakan wadah kegiatan bagi kaum wanita untuk mengembangkan kreativitas. Kelompok binaan PKK merupakan kelompok yang dibentuk di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan berdasarkan kewilayahan atau 137 kegiatan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan Pada tahun 2020 rata-rata binaan PKK menunjukkan angka 1,61 dan pada tahun 2023 turun menjadi 1,53, kemudian meningkat kembali sedikit pada tahun 2024 sebesar 1,57. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya penurunan jumlah PKK Dasawisma dan RW yang aktif, serta tidak adanya pertemuan dan revitalisasi kelembagaan PKK saat masa Pandemi Covid-19. Adanya peningkatan pada tahun 2024 merupakan hasil perbaikan data yang menjadi lebih lengkap hasil akumulasi dari tahun 2023. Berikut data rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.166 Rata-Rata Binaan PKK Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	4.819	4.819	4.422	4.422	5.033
2.	Jumlah PKK	Kelompok	2.992	3.212	2.881	2.881	3.208
3.	Rata-rata binaan PKK	Kelompok	1,61	1,50	1,53	1,53	1,57

ss) Persentase LSM Aktif

Indikator ini menunjukkan perbandingan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang aktif terhadap seluruh LSM. LSM merupakan suatu lembaga bentukan dari inisiatif masyarakat yang secara sukarela memberikan pelayanan tanpa tujuan untuk memperoleh keuntungan. Persentase LSM aktif di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung fluktuatif, tetapi data jumlah LSM mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase LSM aktif menunjukkan angka 59% dan pada tahun 2024 turun menjadi 57,89%. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya LSM yang tidak mau melaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta dan banyak lembaga yang tidak aktif selama pandemi Covid-19. Selain itu, jika Kesbangpol mengadakan acara yang melibatkan LSM, tetapi LSM tersebut tidak hadir tanpa keterangan dalam 5 acara atau lebih, maka LSM tersebut dikategorikan tidak aktif, namun tidak menutup kemungkinan suatu saat akan aktif kembali. Perlu dilakukan peremajaan data terus-menerus. Berikut data persentase LSM aktif di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.167 Persentase LSM Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah LSM yang Aktif	Unit	13	12	2	10	11
2.	Jumlah seluruh LSM	Unit	22	17	15	26	19
3.	Persentase LSM aktif	Persen	59,09	70,59	13,33	38,46	57,89

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, 2025

tt) Persentase PKK Aktif

Indikator ini menunjukkan jumlah PKK yang aktif berkegiatan pada suatu wilayah. Keaktifan PKK ditinjau untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Jumlah kelompok PKK RT di Kota Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan meskipun PKK Dasawisma cenderung mengalami penurunan sebelum tahun 2024. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya penggabungan wilayah sehingga terjadi penurunan jumlah Dasawisma. Berikut data kegiatan PKK pada tiap jenjang administrasi di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024.

Tabel 2.168 Jumlah PKK Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta	kelompok	1	1	1	1	1
2.	Jumlah TP PKK Kecamatan Se Kota Yogyakarta	kelompok	14	14	14	14	14
3.	Jumlah TP PKK Kelurahan Se Kota Yogyakarta	kelompok	45	45	45	45	45
4.	Jumlah kel. PKK RW se Kota Yogyakarta	kelompok	575	617	616	616	616
5.	Jumlah kel. PKK RT	kelompok	2.357	2.532	2.532	2.534	2.532
6.	Jumlah kel. Dasawisma	kelompok	4.819	4.819	4.422	4.422	5.033

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, 2025

uu) **Persentase Posyandu Aktif**

Indikator ini menunjukkan perbandingan jumlah posyandu aktif terhadap jumlah seluruh posyandu. Posyandu berfungsi sebagai pelayanan kesehatan terutama bagi bayi dan balita, serta pelayanan keluarga berencana. Data persentase posyandu aktif di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2020 terlihat angka cukup kecil yaitu 31,9%. Hal ini dipengaruhi karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan sistem pelayanan di posyandu dan menyebabkan penurunan kegiatan pendampingan sehingga kegiatan pencatatan menjadi terkendala. Selain itu, terdapat perubahan definisi operasional posyandu aktif. Pada tahun 2020, posyandu aktif ditentukan oleh 5 kriteria yaitu frekuensi layanan, jumlah kader, cakupan pelayanan, alat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, serta pengembangan program. Perubahan indikator tidak bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi secara optimal terkait dengan situasi pandemi. Pada tahun 2022, persentase posyandu aktif meningkat menjadi 96% , hingga mencapai 100% di tahun 2023 dan 2024 di mana hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang telah membaik sehingga posyandu sudah bisa berjalan secara konvensional dan mulai rutin buka setiap bulan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2022 tentang rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, Posyandu dikatakan aktif jika:

- Melakukan kegiatan rutin posyandu (pelayanan kesehatan ibu hamil/balita/remaja/usia produktif/lansia) 1 kali dalam satu sebulan minimal 8 kali per tahun.
- Memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil dan atau balita dan atau remaja.
- Memiliki minimal 5 orang kader. Namun DO tersebut tidak berbeda jauh dengan indikator sebelumnya serta situasi pandemi lebih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan oleh petugas.

Tabel 2.169 Persentase Posyandu Aktif Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah posyandu aktif	Unit	199	446	598	622	622
2.	Jumlah seluruh posyandu	Unit	623	623	623	622	622
3.	Posyandu Aktif	Persen	31,9	71,6	96,0	100,0	100,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.15. Urusan Perhubungan

Sesuai dengan yang tertulis dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86/2017, terdapat sepuluh indikator pada urusan perhubungan, di antaranya adalah jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis, persentase layanan angkutan darat, persentase kepemilikan KIR angkutan umum, pemasangan rambu-rambu, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, serta jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun. Dalam urusan perhubungan juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang dijelaskan melalui poin-poin berikut.

a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Terminal Giwangan merupakan terminal penumpang yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri tidak memiliki terminal dengan tipe terminal barang (kargo). Jumlah penumpang angkutan umum berupa bis yang masuk ke terminal bis di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan pada 2020-2021. selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 jumlah penumpang yang masuk ke terminal bis Kota Yogyakarta sebesar 1,2 juta jiwa dan kemudian turun menjadi 733 ribu jiwa di tahun 2021. Kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2024 menjadi 1,7 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan dua kemungkinan, yaitu penurunan jumlah masyarakat yang masuk ke daerah Kota Yogyakarta atau penurunan jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan umum berupa bus pada periode 2020-2021 karena Covid-19. Jumlah penumpang yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena masih efek pemulihan dari Covid-19 serta adanya diversifikasi pelayanan bus yang semakin bervariasi menjadikan bus pilihan baru untuk masyarakat bepergian. Berikut rincian jumlah penumpang bis yang masuk ke terminal Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.170 Jumlah Penumpang Bis yang Masuk Terminal di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penumpang bis (yang masuk terminal)	Jiwa	1.214.302	733.727	1.120.971	1.399.968	1.704.088

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

b) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki nilai yang fluktuatif, yakni sebanyak 1.246 unit angkutan umum pada tahun 2020 kemudian turun menjadi 729 unit angkutan umum pada tahun 2023, lalu kembali meningkat menjadi 948 unit pada tahun 2024. Nilai indikator jumlah uji KIR angkutan umum yang menurun diduga karena kendaraan mereka banyak yang tidak beroperasi atau bahkan dijual, serta adanya beban administrasi. Adanya peningkatan Uji KIR disebabkan sejak tahun 2024, pengujian kendaraan bermotor tidak ada biaya administrasi dan tidak ada denda, sehingga wajib uji kendaraan bermotor tidak banyak yang mengujikan kendaraannya karena tidak ada beban administrasi apabila tidak mengujikan kendaraan mereka.

Tabel 2.171 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	1.003	1.207	1.246	729	948

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

c) Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api

Terminal bis diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bis di Kota Yogyakarta, yaitu Terminal Giwangan yang terdapat di Kemantren Umbulharjo. Selain itu terdapat dua stasiun kereta api yang berada di Kota Yogyakarta, yaitu Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan. Data tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.172 Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Terminal Bis	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Halte Permanen Transjogja	Unit	69	65	65	64	64
3.	Jumlah Halte Portabel Bus Transjogja	Unit	77	70	70	70	71
4.	Jumlah Stasiun Kereta Api	Unit	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A, di mana terminal tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Terdapat juga sejumlah halte untuk bus Transjogja. Bus Transjogja menggunakan dua jenis halte, yaitu halte permanen dan halte portabel. Secara umum, jumlah halte cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2024.

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan berada di bawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6. Stasiun Yogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kemantren Gedongtengen. Sedangkan Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kemantren Danurejan.

Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas masuk/ keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umum maupun moda transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di Kota Yogyakarta yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, diduga saat ini bis bukanlah sebuah moda yang menarik atau mungkin saja tidak adanya daya tarik yang dimiliki oleh terminal.

d) Persentase Layanan Angkutan Darat Aktif

Persentase layanan angkutan darat menunjukkan cakupan angkutan darat dalam melayani penumpang. Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. Selama periode tahun 2020-2024, fluktuatif, peningkatan persentase layanan angkutan darat mengalami peningkatan yang signifikan di periode 2020-2022, tetapi

cenderung menurun pada 2023-2024. Pada tahun 2020 persentase layanan angkutan darat di Kota Yogyakarta adalah sebesar 21,41% dan kemudian meningkat menjadi 28,04% pada tahun 2022. Lalu mengalami penurunan hingga tahun 2024 sebesar 14,03%. Kenaikan persentase layanan di awal periode 5 tahun terakhir disebabkan oleh penurunan jumlah penumpang angkutan darat yang cukup signifikan di Kota Yogyakarta. Penurunan persentase layanan angkutan darat disebabkan ritase bus mengalami penurunan karena ada beberapa PO (Perusahaan Otobus) yang mengurangi unitnya untuk beroperasi dan ada juga PO yang bangkrut, sedangkan jumlah penumpang mengalami kenaikan karena masih efek pemulihan covid serta diversifikasi pelayanan bus yang semakin bervariasi menjadikan bus pilihan baru untuk masyarakat bepergian. Data jumlah angkutan darat, jumlah penumpang angkutan darat, serta persentase layanan angkutan darat pada setiap tahun selama periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.173 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah angkutan darat	Unit	260.000	205.748	242.136	525.396	514.687
2.	Jumlah penumpang angkutan darat	Jiwa	1.214.302	733.727	1.120.971	3.275.515	3.667.767
3.	Persentase layanan angkutan darat	Persen	21,41	28,04	21,60	16,40	14,03

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

e) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun yang berkaitan, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dengan pembilang dua. Angkutan umum yang dimaksudkan adalah kendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Yogyakarta dan belum tentu berdomisili di Kota Yogyakarta. Dengan kata lain adalah angkutan umum atau kendaraan yang hanya lewat wilayah Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Indikator kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta mengalami tren penurunan selama periode tahun 2020-2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 9,72%. Penurunan terjadi karena banyak wajib uji kendaraan yang tidak mengujikan kendaraannya atau karena kendaraannya sudah tidak beroperasi dan telah dijual. Sedangkan, adanya peningkatan pada tahun 2024 disebabkan ada beberapa angkutan umum yang menumpang menguji.

Tabel 2.174 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
-----	-------------------	--------	------	------	------	------	------

1.	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum	Unit	1173	894	1.031	729	823
2.	Jumlah angkutan umum pada tahun N	Unit	9546	11.399	10.649	9.585	8.467
3.	Kepemilikan angkutan umum KIR	Persen	12,29	7,84	9,68	7,61	9,72

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

f) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan panjang jalan dalam kilometer dengan jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta pada tahun terkait. Rasio ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya. Selama periode tahun 2020-2024 panjang jalan di Kota Yogyakarta tidak mengalami perubahan. Sementara jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta fluktuatif mengalami peningkatan dan penurunan selama periode tersebut. Hal ini menyebabkan naiknya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini terjadi karena mutasi kendaraan dari menuju wilayah lainnya ke Kota Yogyakarta lebih besar daripada mutasi kendaraan keluar dari Kota Yogyakarta ke wilayah lain. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Pendaftaran kendaraan baru juga menjadi faktor peningkatan jumlah kendaraan. Data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang Jalan	Km	233,21	233,21	233,21	233,21	233,21
2.	Jumlah Kendaraan	Unit	291.978	288.360	295.022	298.139	304.073
3.	Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan	Km/unit	0,000799	0,000809	0,000790	0,000782	0,0008

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.16. Urusan Komunikasi dan Informasi

a) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi menunjukkan jangkauan luas wilayah yang memiliki akses layanan telekomunikasi di suatu daerah. Berdasarkan data yang ada, sudah seluruh wilayah di Kota Yogyakarta terlayani telekomunikasi. Hal tersebut berarti tidak ada area *blank spot* sehingga masyarakat di Kota Yogyakarta dapat mengakses layanan telekomunikasi dengan baik di seluruh titik.

Tabel 2.176 Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Wilayah Yang Ter-coverage	Km	35,75	35,75	32,8	32,8	32,8
2.	Luas Wilayah Keseluruhan	Km	32,5	32,5	32,8	32,8	32,8
3.	Cakupan Layanan Telekomunikasi		1,10	1,10	1,00	1,00	1,00

2.1.4.7.17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Jumlah koperasi di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2024 cenderung menurun. Dari 364 unit koperasi pada tahun 2020, turun hingga menjadi 346 unit koperasi pada tahun 2024. Walaupun begitu, persentase koperasi yang aktif dari jumlah keseluruhan selalu mencapai 100%. Data koperasi aktif di Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.177 Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif	unit	364	364	345	347	346
2	Jumlah Koperasi Seluruh	unit	364	364	345	347	346
3	Persentase Koperasi Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, 2025

Tren penurunan yang terjadi disebabkan adanya pindah kewenangan binaan ke DIY/Kabupaten lain berdasarkan NIK serta adanya pembubaran jumlah koperasi. Di sisi lain pemerintah Kota Yogyakarta, melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, juga mendorong kelompok masyarakat untuk meningkatkan status kelembagaannya menjadi berbadan hukum koperasi sehingga ada penambahan jumlah koperasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 meskipun tidak signifikan. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM juga menyelenggarakan perlombaan atau kompetisi antar koperasi dan diharapkan hadiah yang diperoleh dapat digunakan untuk pengurusan legalitas koperasi. Sementara apabila dilihat dari jumlah anggota koperasi, terjadi tren yang positif pada kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, tercatat jumlah anggota koperasi sebanyak 69.875 anggota. Terdapat kenaikan jumlah anggota meskipun ada penurunan pada jumlah koperasi.

Tabel 2.177 Jumlah Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
2020	364	71.426
2021	364	70.490
2022	345	79.508
2023	347	81.077
2024	346	69.875

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2025, 2025

Apabila ditinjau dari jenis koperasi, pada tahun 2024 di Kota Yogyakarta terdapat 16 jenis koperasi yang sebagian besar terdiri dari jenis Koperasi Pegawai Negeri/ Pusat Koperasi Pegawai Negeri. Sementara itu, koperasi sekunder merupakan jenis koperasi yang memiliki jumlah anggota terbanyak. Jika dilihat dari sebaran koperasi, Kemantren Umbulharjo memiliki unit koperasi terbanyak di tahun 2024 sebesar 77 unit koperasi sedangkan Kemantren Pakualaman memiliki 7 unit koperasi dan menjadi yang terendah di antara kemantren lainnya.

Beberapa kendala yang dihadapi koperasi adalah 1) Sumber Daya Manusia karena sebagian besar anggota koperasi adalah lansia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakan program koperasi *goes to school* yang bertujuan menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam koperasi; 2) Omset yang didapatkan oleh koperasi terbatas karena ada persaingan dengan pihak lain seperti perbankan.

Tabel 2.178 Jenis Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024

Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota
Koperasi Unit Desa	1	1.365
Koperasi Jasa	6	123
Koperasi Peternak	1	46
Koperasi Industri/Kerajinan	7	759
Koperasi Simpan Pinjam	28	9.124
Koperasi TNI/POLRI	8	2.645
Koperasi Wanita	18	1.457
KPN/PKPN	84	11.705
Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka	10	1.214
Koperasi Angkutan	4	73
Koperasi Veteran/Pensiunan	14	1.170
Koperasi Karyawan Swasta/BUMN	76	12.864
Koperasi Serba Usaha	66	4.681
Koperasi Pasar/Kaki Lima	6	6.262
Koperasi Lainnya	15	439
Koperasi Sekunder	2	16.128

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2025, 2025

b) Besar Nilai Modal Koperasi berdasarkan Sumber

Koperasi menggunakan modal usaha yang berasal dari modal sendiri ataupun modal luar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta (2024), sumber permodalan sendiri memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan modal dari luar. Rincian besar nilai permodalan untuk setiap jenis koperasi di tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.179 Besar Nilai Modal Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024

Jenis Koperasi	Modal Sendiri (Ribu Rupiah)	Modal Luar (Ribu Rupiah)
Koperasi Unit Desa	341.111	-
Koperasi Jasa	1.029.498	252.589
Koperasi Peternak	227.866	-
Koperasi Industri/Kerajinan	18.848.894	67.342
Koperasi Simpan Pinjam	17.744.575	26.114.440
Koperasi TNI/POLRI	22.982.216	5.874
Koperasi Wanita	3.995.123	22.667
KPN/PKPN	94.572.419	5.800.037
Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka	177.695	-
Koperasi Angkutan	4.314.606	69.333
Koperasi Veteran/Pensiunan	2.133.564	10.000

Jenis Koperasi	Modal Sendiri (Ribu Rupiah)	Modal Luar (Ribu Rupiah)
Koperasi Karyawan Swasta/BUMN	87.359.196	7.979.664
Koperasi Serba Usaha	9.039.081	383.690
Koperasi Pasar/Kaki Lima	5.314.309	-
Koperasi Lainnya	1.586.690	92.359
Koperasi Sekunder	10.000.302	892.600
Jumlah Total	279.667.146	41.690.596
2023	290.323.276	55.890.871
2022	290.703.261	123.060.008
2021	310.669.192	56.002.589
2020	292.158.264	41.934.900

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Koperasi Pegawai Negeri/Pusat Koperasi Pegawai Negeri merupakan jenis koperasi dengan nilai modal tertinggi dibandingkan koperasi lainnya. Dengan total Rp. 94.572.419.000 untuk modal sendiri dan Rp. 5.800.037.000 untuk modal dari luar. Sementara itu, Koperasi Mahasiswa/Pemuda/Pramuka menjadi jenis koperasi dengan nilai modal terendah, yaitu sebesar Rp. 177.695.000 yang berasal dari modal sendiri.

c) Capaian Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi

Volume usaha koperasi memberikan informasi terkait besar total nilai penjualan ataupun pendapatan barang dan jasa dari hasil usaha koperasi. Dengan demikian, semakin besar volume usaha koperasi maknanya semakin besar pula nilai pendapatan dari koperasi tersebut. Sementara itu, sisa hasil usaha adalah keuntungan bersih dari hasil usaha anggota koperasi. Sisa hasil usaha bukan berasal dari pendapatan usaha koperasi dan didistribusikan kepada anggota secara adil.

Tabel 2.180 Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kota Yogyakarta Tahun 2024

Jenis Koperasi	Volume Usaha (Ribu Rupiah)	Sisa Hasil Usaha (Ribu Rupiah)
Koperasi Unit Desa	30.500	1.140
Koperasi Jasa	265.191	5.128
Koperasi Peternak	20.000	19.860
Koperasi Industri/Kerajinan	6.868.074	780.260
Koperasi Simpan Pinjam	81.459.525	1.493.580
Koperasi TNI/POLRI	26.067.672	1.074.415
Koperasi Wanita	4.776.210	239.034
KPN/PKPN	99.907.998	3.001.788
Kop. Mahasiswa/Pemuda/Pramuka	755.098	38.999
Koperasi Angkutan	3.116.117	414.591
Koperasi Veteran/Pensiunan	2.578.656	133.166
Kopkar Swasta/BUMN	144.134.200	11.347.307
Koperasi Serba Usaha	17.508.579	711.583
Koperasi Pasar/Kaki Lima	5.824.174	79.941
Koperasi Lainnya	1.403.500	135.327

Jenis Koperasi	Volume Usaha (Ribu Rupiah)	Sisa Hasil Usaha (Ribu Rupiah)
Koperasi Sekunder	2.491.140	77.749
Jumlah Total	397.206.633	19.553.868
2023	397.157.423	18.321.721
2022	366.330.175	17.878.270
2021	389.328.165	21.643.492
2020	444.606.264	44.965.068

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2025, 2025

Jika dianalisis dari aspek volume usaha, Koperasi swasta/BUMN memiliki nilai terbesar dibandingkan jenis koperasi lainnya di tahun 2024, yaitu sebanyak Rp. 144.134.200.000,00 sedangkan koperasi peternak menjadi yang terendah dengan besar Rp. 20.000.000,00. Sementara itu, berdasarkan aspek sisa hasil usaha, koperasi unit desa memiliki nilai SHU terendah, yakni Rp. 1.140.000,00. Koperasi swasta/BUMN tetap menjadi yang tertinggi dengan SHU sebesar Rp. 11.347.307.000,00.

d) Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Non-Bank (LKM) Aktif

LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Terdapat tiga jenis LKM yang ada di Kota Yogyakarta, meliputi Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Keberadaan LKM ini ikut memengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan simpan pinjamnya. Namun, jumlah LKM aktif di Kota Yogyakarta tidak mengalami perubahan selama tahun 2020-2023, yaitu sejumlah 57 LKM. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 50 LKM karena Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam sudah tidak ada aktivitas lagi, sedangkan adanya penambahan Koperasi Simpan Pinjam disebabkan adanya koperasi baru dan koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar. Data jumlah LKM berdasarkan jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.181 Persentase LKM Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Variabel	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam	Unit	10	10	10	10	10
2.	Badan Usaha Kredit Pedesaan	Unit	14	14	14	14	14
3.	Koperasi Simpan Pinjam	Unit	33	33	33	33	36
	Jumlah	Unit	57	57	57	57	50

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, 2025

e) Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Industri mikro dan kecil merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial untuk memberdayakan masyarakat menengah ke bawah, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan. Industri mikro dan kecil mendominasi industri di Kota Yogyakarta, dengan angka di 100% selama periode tahun 2020-2024. Namun ternyata jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang cukup signifikan selama tahun 2020-2024. Data jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

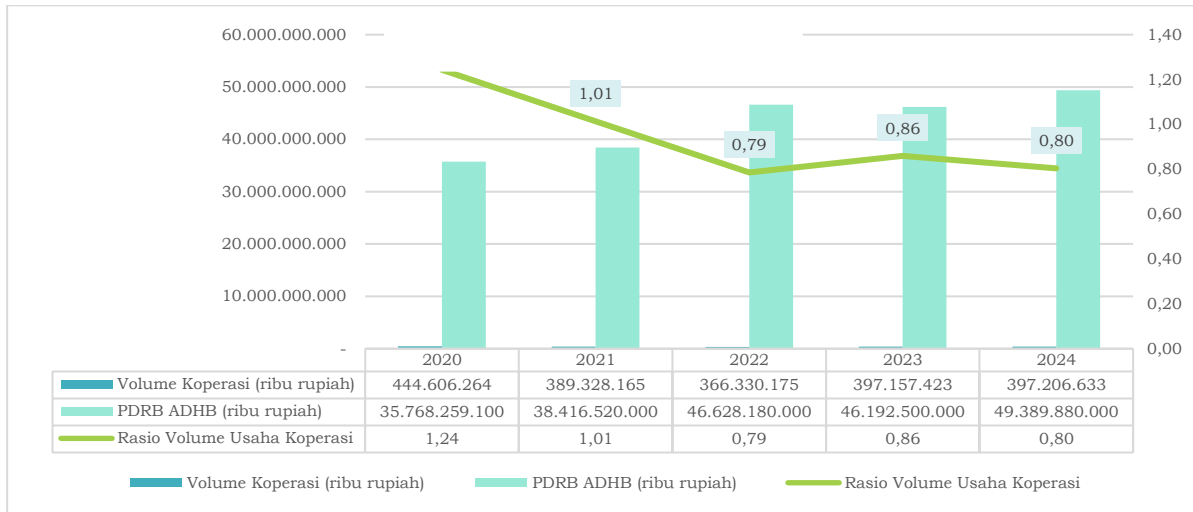
Tabel 2.182 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah usaha mikro dan kecil	unit	14.654	18.402	6.835	6.835	6.835
2.	Jumlah Seluruh UKM	unit	14.654	18.402	6.835	6.835	6.835
3.	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2024; Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, 2025; data diolah

f) Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Volume Usaha Koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dibutuhkan indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB. Rasio tersebut merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).



Gambar 2.34 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021-2025, diolah

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kota Yogyakarta pada periode 2020-2024 masih berkisar di angka 1%, bahkan pada tahun 2022-2024 berada di bawah 1%. Rasio tertinggi justru terjadi pada tahun 2020 di masa pandemi covid-19, di mana PDRB ADHB mengalami penurunan secara signifikan dari 36,559 triliun rupiah di tahun 2019 menjadi 35,768 triliun rupiah di tahun 2020. Di sisi lain, volume usaha koperasi meningkat dari 424,85 milyar menjadi 444,60 milyar. Pada tahun 2021 dengan membaiknya Perekonomian pasca pandemi PDRB ADHB mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 38,41 triliun rupiah. Peningkatan PDRB ADHB tersebut terus terjadi dengan signifikan sampai dengan tahun 2024 dimana PDRB ADHB ada pada angka 49.389,88 triliun rupiah. Di sisi lain, volume usaha koperasi mengalami fluktuasi yang kurang signifikan pada periode 2021-2023 sehingga rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami penurunan dari 1,01 di tahun 2021 menjadi 0,80 di tahun 2024. Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mendasarkan data rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB kebijakan pengembangan koperasi harus dilakukan.

2.1.4.7.18. Urusan Penanaman Modal

a) Jumlah Investor PMDN/PA

Indikator jumlah investor PMDN/PA di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini bersumber dari jumlah perusahaan yang memproses perizinan berusaha di OSS RBA periode tahun 2023. Data tahun 2020 menunjukkan angka 676 investor, dan naik pada tahun 2021 dengan 4.907 investor. Tahun 2022 menunjukkan penurunan kembali ke 480 investor, sebelum melonjak drastis pada tahun 2023 dengan 14.017 investor dan tahun 2024 dengan 14.485 investor.

Mulai pada tahun 2023, terdapat perbedaan pada sistem OSS di mana pada tahun-tahun sebelumnya, usaha mikro tidak masuk dalam perhitungan jumlah investor baru, sedangkan saat ini, usaha mikro dimasukkan ke dalam jumlah investor baru. Hal tersebut disebabkan karena di DIY, usaha mikro menjadi unsur penting dalam investasi. Peningkatan jumlah investor di Kota Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya peraturan yang mendorong kemudahan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi, promosi investasi melalui media sosial, pembuatan video, dan foto promosi investasi, serta kemudahan proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS turut berkontribusi dalam peningkatan ini. Selain itu, layanan perizinan berusaha yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dan sosialisasi perizinan berusaha kepada pelaku usaha di Kota Yogyakarta juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha. Namun, jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan karena tidak tersedianya lahan yang cukup untuk berinvestasi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.183 Jumlah Investor PMDN/PA Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Investor PMDN/PA	Investor	676	4.907	480	14.017	14.485

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

b) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta baik dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Data yang tercatat berasal dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha/perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM adalah pelaku usaha skala kecil, skala menengah, dan skala besar.

Terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta baik dari Perusahaan PMA maupun PMDN. Namun jumlah perusahaan PMDN terjadi penurunan di tahun 2023 hal ini dikarenakan yang tercatat hanyalah Pelaku Usaha Sekala Menengah dan Besar (NON UMK). Data yang tercatat bersumber dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disampaikan oleh Perusahaan. Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Pelaku Usaha/Perusahaan yang wajib menyampaikan LKPM adalah Pelaku Usaha Skala Kecil, Skala Menengah dan Skala Besar. Namun untuk LKPM Skala Kecil saat ini belum dapat ditarik datanya sehingga terjadi penurunan pada angka Perusahaan PMDN. Tahun 2024 data yang disajikan merupakan data LKPM Triwulan IV (Januari 2024). Berdasarkan data tersebut, terjadi peningkatan kembali jumlah perusahaan PMDN. Peningkatan perusahaan PMDN diikuti dengan peningkatan daya serap tenaga kerja PMDN.

Tabel 2.184 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*
Penanam Modal Asing (PMA)							
1	Tenaga Kerja	Jiwa	12	19	302	637	399
2	Perusahaan	Unit	3	3	34	51	49
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		63,67	4,00	6,33	8,88	12,49
Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)							
1	Tenaga Kerja	Jiwa	4.053	8.774	1.066	1.497	1.799
2	Perusahaan	Unit	673	4.907	446	216	269
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		13,83	6,02	1,79	2,39	6,93
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja			77,50	10,02	4.053	8.774	1.066

*) LKPM Triwulan IV (1-10 Januari 2024)

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta, 2025

c) Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA

Secara umum, realisasi investasi pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi karena tahun 2020 masih merupakan masa transisi Covid-19. Selain itu, perkembangan investasi di Kota Yogyakarta didukung dengan adanya penambahan personil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pendampingan, pembinaan, dan pengawasan, serta adanya sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha di Kota Yogyakarta. Banyak pelaku usaha yang wajib Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mulai menaati kewajibannya untuk menjalankan kewajiban lapor LKPM yang di tahun sebelumnya belum dijalankan. Peningkatan kapasitas pelayanan investasi dengan didukung semua program penunjang capaian sasaran investasi juga turut berperan. Selain itu, dukungan promosi investasi melalui pameran investasi dan publikasi di berbagai media sosial turut menunjang kenaikan investasi di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.185 Jumlah Nilai Investasi PMDN/PA Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PA	Juta Rp	243.232,32	252.276,09	428.457,16	862.424,00	867.697,84

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025

2.1.4.7.19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a) Indeks Pembangunan Olahraga

Indeks Pembangunan Olahraga adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan olahraga di suatu daerah. Indeks Pembangunan Olahraga mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada perkembangan olahraga. Indeks Pembangunan Olahraga (SDI) Kota Yogyakarta tahun 2024 mengungkapkan bahwa kota ini masih berada dalam kategori rendah dengan skor keseluruhan 0,387. Dimensi yang diukur mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), Ruang Terbuka, Literasi Fisik, Partisipasi, Kebugaran Jasmani, Kesehatan, Perkembangan Personal, Ekonomi, dan Performa. Dimensi SDM dan Ruang Terbuka mencatat skor terendah masing-masing 0,042 dan 0,175, menunjukkan kekurangan serius dalam jumlah dan kualitas tenaga profesional serta ketersediaan fasilitas olahraga. Meski literasi fisik memiliki skor tinggi (0,742), partisipasi aktif dalam olahraga masih rendah (0,302). Kebugaran Jasmani, dengan skor 0,376, menunjukkan bahwa

implementasi kesadaran olahraga masih kurang. Skor dimensi Kesehatan yang berada pada angka 0,624 yang cukup tinggi, menunjukkan literasi atau kesadaran masyarakat untuk sehat sudah cukup tinggi baik secara fisik dan psikis.

Tabel 2.186 Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2024

Dimensi	2024
Sumber Daya Manusia	0,042
Ruang Terbuka	0,175
Literasi Fisik	0,742
Partisipasi	0,302
Kebugaran Jasmani	0,376
Kesehatan	0,624
Perkembangan Personal	0,607
Ekonomi	0,309
Performa	0,309
Indeks Pembangunan Olahraga Kota Yogyakarta	0,387

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2024

d) Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Persentase organisasi pemuda yang aktif mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 berada pada angka 82,05%, persentase ini meningkat menjadi 92,31% pada tahun 2021 dan 2022, serta kembali mencapai 100% pada tahun 2023 hingga 2024. Adanya peningkatan tersebut disebabkan terdapat penambahan Organisasi Kepemudaan (OK) dari Forum Komunikasi Orkestra Pelajar (FKOP) Kota Yogyakarta. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program dan inisiatif untuk mengaktifkan kembali dan mendukung organisasi pemuda di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.187 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	82,05	92,31	92,31	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

e) Persentase Wirausaha Muda

Persentase wirausaha muda di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021, persentase meningkat sedikit menjadi 8,65%. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan besar hingga 52,40%, yang menunjukkan dorongan kuat untuk wirausaha muda pada tahun tersebut. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan sedikit peningkatan menjadi 52,60%, serta menjadi 53,85% pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan jumlah wirausaha muda dari alumni kegiatan Pelatihan Kreativitas Pemuda di tahun 2024. Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program dan inisiatif yang mendukung pengembangan wirausaha muda di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.188 Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Wirausaha Muda	Persen	7,21	8,65	52,40	52,60	53,85

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

f) Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga di Kota Yogyakarta tetap berada pada angka 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh cabang olahraga yang ada mendapatkan pembinaan secara konsisten setiap tahunnya. Jumlah cabang olahraga yang dibina terdiri dari 51 cabang olahraga yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), 10 cabang olahraga di bawah *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCCI), dan 11 cabang olahraga yang dikelola oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). Konsistensi ini mencerminkan komitmen dan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan setiap cabang olahraga mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk berkembang. Pembinaan yang mencakup berbagai cabang olahraga ini juga menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi di berbagai bidang olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 2.189 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

g) Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Indikator cakupan pembinaan atlet muda menunjukkan persentase pembinaan atlet muda di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan mencerminkan upaya pembinaan yang konsisten untuk meningkatkan prestasi olahraga. Cakupan pembinaan atlet muda mulai tercatat pada tahun 2020, cakupan pembinaan mencapai 100% dan konsisten bertahan hingga tahun 2024. Jumlah atlet pelajar disesuaikan dengan target pembinaan yang akan dicapai dalam kejuaraan yang diikuti, dengan harapan peningkatan prestasi olahraga. Pembinaan yang konsisten dan menyeluruh ini bertujuan untuk mempersiapkan atlet muda secara optimal sehingga mereka dapat berprestasi di berbagai kejuaraan. Program pembinaan mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan teknis, fisik, hingga mental, untuk memastikan bahwa atlet muda memiliki kesiapan yang komprehensif dalam menghadapi kompetisi. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelatih, pemerintah, dan organisasi olahraga, turut berperan dalam keberhasilan program pembinaan ini. Salah satu program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah program sentra pembinaan olahraga untuk atlet yang terdapat di satuan pendidikan dasar SD dan SMP.

Tabel 2.190 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

h) Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada atlet yang tercatat memenangi kejuaraan, yang mungkin disebabkan oleh pembatalan atau penundaan banyak kejuaraan akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, jumlah atlet berprestasi meningkat menjadi 12 atlet, pada tahun 2023, jumlah ini melonjak signifikan menjadi 38 atlet, hingga pada tahun 2024 menjadi 54 atlet. Dalam setiap fase atau tahun, atlet mengalami masa puncak performa, sehingga perolehan medali tidak dapat ditentukan secara pasti karena kekuatan atlet dari daerah lain juga mengalami perubahan. Pada tahun 2024, prestasi

atlet berasal dari berbagai cabang olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 2.191. Jumlah Atlet yang Memenangi Kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Jiwa	0	0	12	38	54

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

i) Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak ada prestasi yang tercatat, kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi banyak kegiatan olahraga dan kompetisi.

Pada tahun 2022, jumlah prestasi kembali meningkat secara signifikan menjadi 23, pada tahun 2023 mencapai 29 prestasi, serta pada tahun 2024 menjadi 30 prestasi. Masing-masing cabang olahraga mengalami naik turun prestasi dalam setiap kejuaraan yang diikuti, yang menunjukkan dinamika kompetisi dan perubahan kekuatan atlet dari daerah lain. Prestasi yang diraih oleh atlet-atlet ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan dukungan dari berbagai pihak. Kenaikan jumlah prestasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas pembinaan dan kesiapan atlet untuk berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Program-program pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan fasilitas serta sumber daya yang memadai sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa mendatang.

Tabel 2.192 Jumlah Prestasi Cabang Olahraga yang Dimenangkan dalam Satu Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	Kejuaraan	0	0	23	29	30

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.20. Urusan Statistik

a) Buku “Kota dalam Angka”

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tata kala waktu. Namun sebaliknya yang terjadi sering kali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang *update*. Pada data tersebut menginformasikan bahwa buku statistik Kota Yogyakarta telah tersedia, yaitu tahun 2020-2025 sudah terdapat buku “kota dalam angka” Kota Yogyakarta.

Tabel 2.193 Buku “Kota Dalam Angka” di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
-----------	--------	------	------	------	------	------

Buku “kota dalam angka”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
-------------------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta, 2025

vv) Buku “PDRB”

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik dilaksanakan. Penyusunan buku PDRB dilakukan sebagai pelaksanaan penyelenggaraan statistik. Pada data di bawah menginformasikan bahwa buku PDRB Kota Yogyakarta telah tersedia tahun 2020-2023. Namun, untuk tahun 2024 masih belum rilis.

Tabel 2.194 Status Data dan Statistik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Buku “PDRB”	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.21. Urusan Persandian

a) Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kebudayaan

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi menunjukkan angka yang konsisten tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 hingga 2024, persentase ini stabil di angka 100%, menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah mengadopsi penggunaan sandi dalam komunikasi mereka. Adopsi sandi dalam komunikasi ini penting untuk meningkatkan keamanan informasi dan mencegah kebocoran data. Konsistensi pada angka 100% dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan komitmen dan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya keamanan informasi dalam komunikasi mereka. Implementasi ini juga menunjukkan efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian untuk memastikan bahwa semua perangkat daerah mengikuti standar keamanan yang ditetapkan.

Tabel 2.195 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.22. Urusan Kebudayaan

a) Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya

Rintisan Kelurahan Budaya adalah kelurahan yang memiliki keterikatan bersama untuk mempertahankan kelestarian budaya setempat. Tahun 2022 terjadi peningkatan Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) yang signifikan dibanding Tahun 2021 yaitu 24 RKB dengan 17 RKB yang aktif. Tujuh (7) RKB diantaranya merupakan RKB baru yang ditetapkan berdasarkan akreditasi yang mengacu Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2020 tentang RKB dengan mempertimbangkan parameter upacara adat dan tradisi, kesenian dan permainan tradisional, Bahasa sastra dan aksara, kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional serta tata ruang, cagar budaya dan warisan budaya yaitu RKB Notoprajan, RKB Kadipaten, RKB Bumijo, RKB Demangan, RKB Tahunan, RKB Wirogunan dan RKB Mantrijeron. Pada tahun 2024 terdapat 36 RKB, RKB dalam kategori tumbuh ada 22 kelurahan dan berkembang 14 kelurahan. Dua

kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta masuk dalam pra-RKB dan 7 kelurahan telah masuk dalam kategori Kelurahan Budaya.

Tabel 2.196 Rintisan Kelurahan Budaya Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya	RKB	N/A	24	31	31	36

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021, 2023, dan 2024, 2025

ww) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Peningkatan jumlah kegiatan seni budaya yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 menunjukkan upaya yang signifikan dalam mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Kota Yogyakarta. Kegiatan seni budaya yang diselenggarakan pada tahun 2024 juga ditujukan untuk memfasilitasi lembaga budaya yang telah terdaftar dengan Nomor Induk Kebudayaan (NIKFluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perubahan kebijakan, anggaran, dan kondisi eksternal seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan signifikan pada tahun 2020 dengan hanya 32 hari kegiatan.

Kegiatan seni budaya pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan menjadi 231 hari, dibandingkan dengan 191 hari pada tahun 2023. Keberhasilan berbagai kegiatan seni budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dicapai berkat kerja sama dengan *stakeholder* terkait di bidang kebudayaan. Selain itu, respons positif dan peran serta masyarakat yang tinggi sangat memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kota Yogyakarta. Peningkatan jumlah kegiatan ini mencerminkan komitmen Dinas Kebudayaan dalam melibatkan masyarakat dan *stakeholder* dalam setiap program budaya, serta memastikan bahwa setiap kegiatan budaya dapat dinikmati dan diakses oleh masyarakat luas, sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal.

Tabel 2.197 Penyelenggaraan Pertunjukan (Festival) Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya	Hari	32	41	177	191	231

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2025

xx) Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Adanya kenaikan jumlah objek Warisan Budaya Cagar Budaya (WBCB) yang dikaji dan ditetapkan menyebabkan objek WBCB yang dilestarikan semakin meningkat. Pada tahun 2020 hingga 2024, persentase pelestarian stabil pada angka 100%, menunjukkan bahwa semua objek WBCB yang dikaji dan ditetapkan telah dilestarikan sepenuhnya. Adanya kenaikan jumlah objek WBCB yang dikaji dan ditetapkan sehingga objek WBCB yang dilestarikan semakin meningkat. Peningkatan ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dengan *stakeholder* terkait dalam upaya pelestarian cagar budaya maupun warisan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Tim Ahli Cagar Budaya sebagai partner Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta dalam melakukan kegiatan rekomendasi Cagar Budaya memiliki kecakapan dan kompetensi yang mumpuni sehingga dapat membantu upaya pelestarian secara maksimal. Selain itu, masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya pelestarian dengan kesediaan atas rekomendasi BWB menjadi BCB dan juga semangat

masyarakat untuk melakukan pelaporan dan perlindungan terhadap objek yang berpotensi untuk direkomendasikan sebagai BCB.

Tabel 2.198 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2025

Adapun jika dilihat lebih detail, cagar budaya yang berada di kawasan sumbu filosofis hampir separuh dari total cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan ditetapkan Sumbu Filosofis sebagai Warisan Budaya Dunia yang harus dilestarikan oleh segenap masyarakat, baik Kota Yogyakarta maupun masyarakat luar yang beraktivitas di Kota Yogyakarta.

2.1.4.7.23. Urusan Perpustakaan

a) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Penurunan jumlah kunjungan pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh perbedaan kriteria penghitungan kunjungan. Sebelum tahun 2023, penghitungan jumlah kunjungan didasarkan pada kunjungan ke perpustakaan dan kunjungan ke layanan lainnya seperti *wifi* dan *website*. Sedangkan, pada tahun 2023 dan 2024, perhitungan hanya berdasarkan pada pengunjung yang mengakses atau berkunjung ke perpustakaan secara fisik (baik perpustakaan Kotabaru, Pevita, Keliling, maupun perpustakaan digital/e-YK) tanpa menghitung frekuensi kunjungan penggunaan layanannya.

Perubahan metode penghitungan ini menyebabkan penurunan yang terlihat dalam data jumlah pengunjung pada tahun 2023 dan 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 2022, jumlah kunjungan mencapai puncaknya dengan 418.738 kunjungan, namun pada tahun 2023 jumlah ini turun menjadi 193.899, hingga menjadi 121.531. Penurunan ini tidak serta-merta menunjukkan penurunan minat, melainkan refleksi dari perubahan metodologi penghitungan kunjungan yang lebih spesifik dan terbatas pada kunjungan fisik ke perpustakaan. Selain perbedaan metodologi, juga terdapat perubahan nama indikator menjadi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat seperti yang tercantum pada Gambar 2.20 tentang Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Hal ini juga menunjukkan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mengadaptasi dan memperbarui cara mereka menghitung dan melacak pengunjung untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan terpilah, yang pada akhirnya akan membantu dalam perencanaan dan pengembangan layanan perpustakaan di masa mendatang.

Tabel 2.199 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Kunjungan	256.476	337.069	418.738	193.899	121.531

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2025

yy) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Indeks koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan peningkatan pada tahun 2020, terjadi lonjakan besar dengan koleksi mencapai 0,81. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, indeks koleksi buku mengalami penurunan. Pada tahun 2024, indeks koleksi buku yang tersedia tercatat

sebanyak 0,67, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penghapusan aset buku pada bulan Oktober 2023. Buku-buku yang dihapus dari koleksi perpustakaan adalah buku yang rusak secara fisik dan buku yang informasinya sudah usang atau tidak relevan lagi (*out of date*). Penghapusan aset buku ini merupakan bagian dari upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjaga kualitas koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Dengan memastikan bahwa hanya buku-buku yang masih dalam kondisi baik dan informatif yang tersedia, perpustakaan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada pengunjung. Upaya ini juga mencerminkan komitmen untuk memperbarui dan meningkatkan koleksi buku secara berkala, sesuai dengan perkembangan informasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2024, kenaikan koleksi buku disebabkan adanya penambahan koleksi dari kegiatan DAK Fisik berupa DAK Koleksi perpustakaan sebanyak 824 judul dan penambahan koleksi tahun 2024 dari belanja rutin sebanyak 669 judul. Jumlah 33.436 judul buku adalah jumlah judul buku yang tersedia di dalam aplikasi Inlislite.

Tabel 2.200 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Judul	35.220	35.962	33.246	31.764	33.436
Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan	Eksemplar	43.247	46.443	49.065	46.813	50.034
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah		0,81	0,77	0,68	0,68	0,67

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.24. Urusan Kearsipan

a) Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Kerja di Kota Yogyakarta telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Hal ini tercermin dari persentase yang stabil di angka 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Konsistensi ini menunjukkan keberhasilan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam memastikan semua perangkat daerah mengikuti standar pengelolaan arsip yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari adanya tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) yang setiap tahun selalu melakukan pendampingan pada OPD dan Unit Kerja di Kota Yogyakarta. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan arahan, pelatihan, dan evaluasi terkait pengelolaan arsip, sehingga memastikan bahwa semua perangkat daerah mampu mengelola arsip mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan yang rutin ini menciptakan kesadaran dan keterampilan di kalangan pegawai untuk mengelola arsip secara efektif dan efisien. Selain itu, dukungan dari manajemen dan koordinasi yang baik antara DPK dan OPD serta Unit Kerja berkontribusi terhadap tercapainya standar pengelolaan arsip yang baku. Dengan pengelolaan arsip yang baik, kualitas layanan publik dapat ditingkatkan, serta memastikan bahwa informasi dan dokumentasi penting dapat diakses dan dikelola dengan benar.

Tabel 2.201 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
-----------	--------	------	------	------	------	------

Persentase Daerah Arsip Secara Baku	Perangkat yang Mengelola	Persen	100	100	100	100	100
-------------------------------------	--------------------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2025

zz)Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 16 kali bekerja sama dengan BKPSDM dan Pusdiklat ANRI. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup berbagai forum dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan para pengelola arsip di Kota Yogyakarta. Rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis dan Motivasi Kinerja SDM,
2. Evaluasi Pengawasan Kearsipan Internal dan Penyerahan Penghargaan,
3. Forum Komunikasi Arsiparis (4 Kegiatan),
4. Forum Komunikasi DPK (5 Kegiatan),
5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis,
6. Bimbingan Teknis Tim Pengawasan Kearsipan Internal,
7. Bimbingan Teknis Pengelola Arsip di Perangkat Daerah Pemkot YK),
8. Bimbingan Teknis (Aplikasi SRIKANDI Versi 3,
9. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan SOP Layanan Arsip Bersifat Tertutup.

Pendekatan ini memastikan bahwa para pengelola kearsipan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terbaru yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mereka dengan efisien dan efektif. Forum komunikasi dan bimbingan teknis ini memberikan platform untuk berbagi pengalaman, belajar dari praktik terbaik, dan memperkuat jaringan profesional di bidang kearsipan. Dengan demikian, kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan berkontribusi secara signifikan terhadap pengelolaan arsip yang lebih baik dan lebih sistematis di Kota Yogyakarta. Hal ini juga mencerminkan komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk terus mengembangkan kompetensi tenaga kearsipan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sudah dilaksanakan sebanyak 9 kali pada tahun 2020. Serta tahun 2024 sudah dilaksanakan kegiatan sebanyak 16 kali.

Tabel 2.202 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kali	9	14	7	10	16

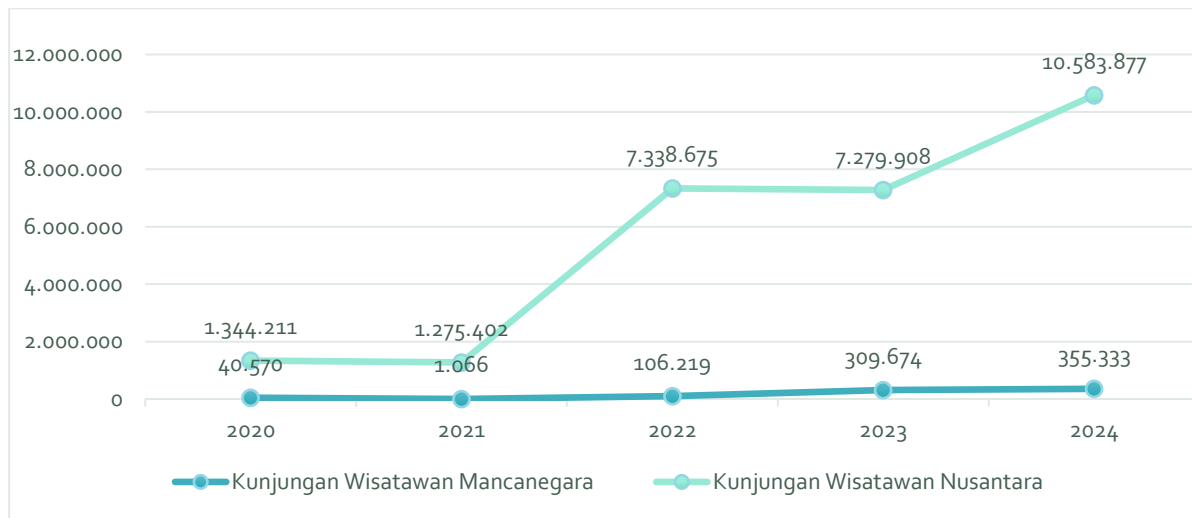
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.25. Urusan Pariwisata

a) Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan mengalami penurunan yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas dan aktivitas wisata. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, jumlah kunjungan meningkat tajam, dan mencapai lebih dari 10 juta kunjungan pada tahun 2024. Dengan berbagai upaya tersebut, jumlah kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta menunjukkan

peningkatan yang signifikan pada tahun 2024, menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.



Gambar 2.35 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta didukung oleh berbagai potensi wisata. Potensi ini meliputi berbagai macam jenis wisata yaitu wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi, wisata Pendidikan, wisata belanja, dan desa wisata.

Tabel 2.203. Jumlah Tempat Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2023	2024
Wisata Sejarah, Budaya, Religi	Tempat	20	19
Pendidikan	Tempat	14	14
Belanja	Tempat	6	7
Desa Wisata	Tempat	25	18
Total	Tempat	65	58

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka, 2025

aaa) Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, lama kunjungan mencapai puncaknya dengan rata-rata 1,63 hari. Namun, pada tahun 2021, durasi kunjungan menurun signifikan, kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas dan aktivitas wisata. Pada tahun 2024, durasi rata-rata kunjungan wisatawan mencapai 1,88 hari, yang menunjukkan peningkatan. Hal ini menandakan bahwa pariwisata di Kota Yogyakarta semakin baik.

Tabel 2.204 Lama Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Lama Kunjungan Wisata	hari	1,63	1,52	1,86	1,87	1,88

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2025

bbb) PAD Sektor Pariwisata

Indikator PAD sektor pariwisata terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan BLUD Taman Pintar. Kontribusi sektor pariwisata terhadap

pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Yogyakarta menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Tahun 2021 menunjukkan penurunan signifikan yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang mempengaruhi mobilitas dan aktivitas pariwisata serta berdampak negatif pada ekonomi lokal. Namun, pada tahun 2022 - 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami peningkatan signifikan, mencapai 36,13% pada tahun 2024.

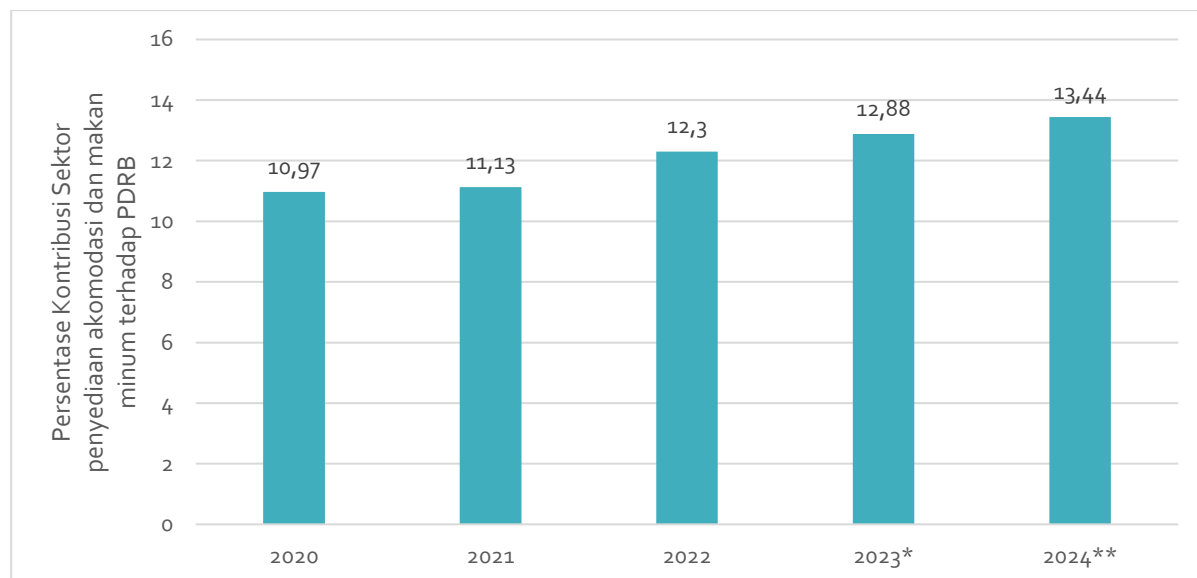
Tabel 2.205 PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Hotel	Rp	78.279.066.037	69.577.661.221	178.609.791.299	204.454.322.895	205.248.934.658
Pajak Restoran	Rp	43.521.758.533	46.257.454.698	71.705.360.981	85.517.019.289	91.034.025.025
Pajak Hiburan	Rp	3.870.424.584	2.972.217.801	9.295.272.146	11.634.345.114	12.635.843.220
BLUD Taman Pintar	Rp	4.887.231.981	2.824.712.530	11.442.681.284	13.473.282.544	-
Total Sektor Pariwisata	Rp	130.558.481.135	121.632.046.250	271.053.105.710	315.078.969.842	308.918.802.903
Total PAD	Rp	563.174.371.397	598.121.885.338	725.577.542.998	805.346.115.793	855.100.858.914
PAD Sektor Pariwisata	Persen	23,18	20,34	37,36	39,12	36,13

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

ccc) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta

Perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidak tersedia secara khusus. Selama ini, kontribusi sektor pariwisata ditinjau dari kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Dari tahun 2020-2024, nilai PDRB akomodasi dan makan minum cenderung meningkat. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 10,97% hingga tahun 2024 meningkat sebesar 13,44%.



Gambar 2.36 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

*) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2025, 2025

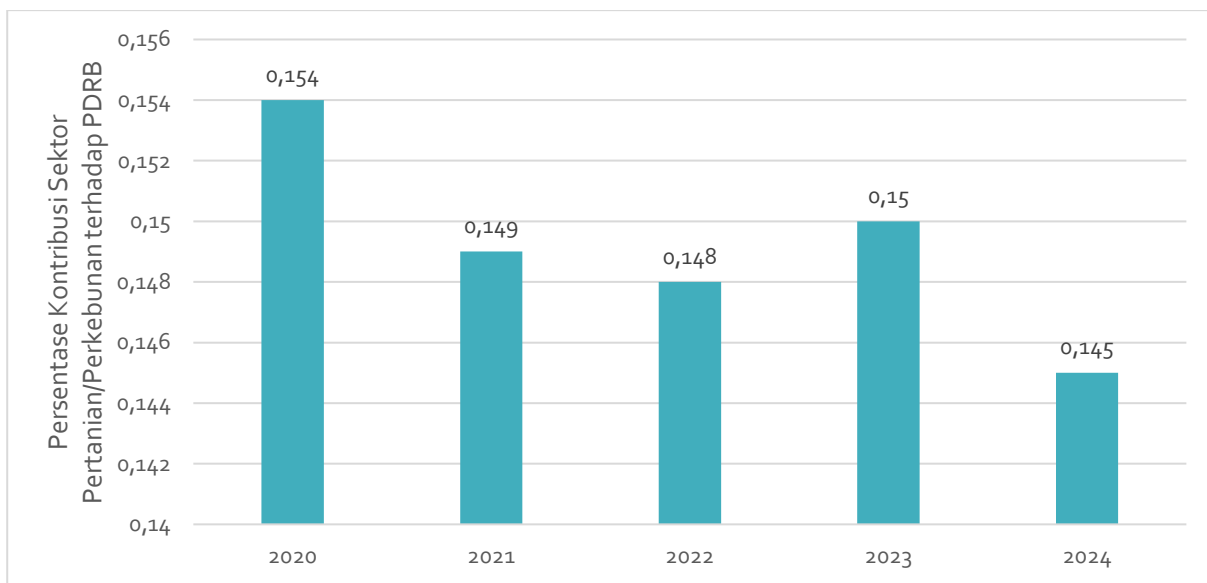
2.1.4.7.26. Urusan Pertanian

a) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB di Kota Yogyakarta menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan ini mencerminkan perubahan

signifikan dalam struktur ekonomi Kota Yogyakarta yang semakin bergeser dari sektor agraris ke sektor jasa dan industri. Faktor utama yang mendorong penurunan ini karena bentuk morfologi merupakan kawasan perkotaan sehingga muncul perubahan penggunaan lahan di perkotaan, selain itu kontribusi pertanian terhadap PDRB tergolong kecil yang menandakan bahwa karakter wilayah dengan morfologi perkotaan.

Selain itu, perubahan iklim dan degradasi lahan turut mempengaruhi produktivitas sektor pertanian dan perkebunan. Di sisi lain, investasi dan tenaga kerja cenderung lebih diarahkan ke sektor-sektor yang dinilai lebih menguntungkan seperti pariwisata dan perdagangan. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui inovasi teknologi, diversifikasi produk, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, dan dukungan kebijakan pemerintah yang memadai. Namun demikian, tantangan-tantangan seperti perubahan iklim, urbanisasi yang terus berlanjut, dan persaingan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya tetap menjadi faktor yang perlu dihadapi.

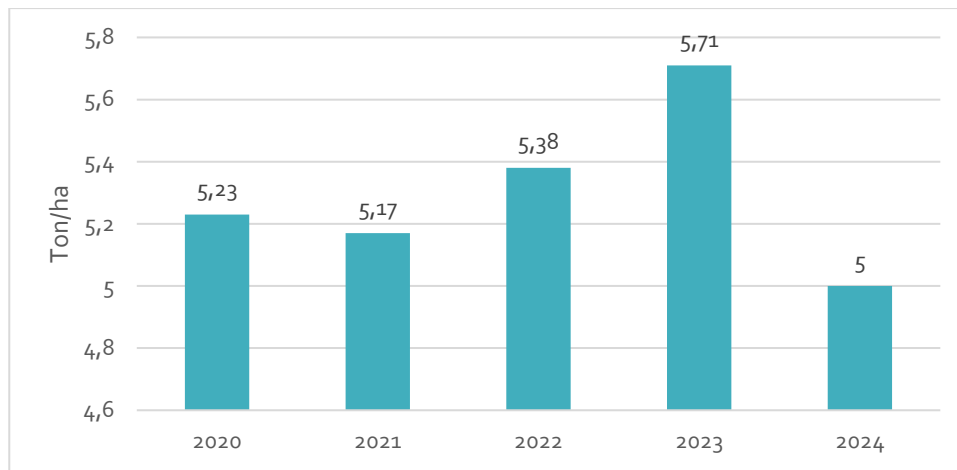


Gambar 2.37 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

ddd) Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan produktivitas ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, kualitas tanah yang menurun, serangan hama, dan praktik pertanian yang mungkin kurang optimal. Untuk mengatasi fluktuasi produktivitas ini, perlu adanya kebijakan yang mengarah pada urban farming untuk cadangan bagi penduduk yang termasuk dalam kelompok desil 1-4 sebagai sumber gizi dan pariwisata.

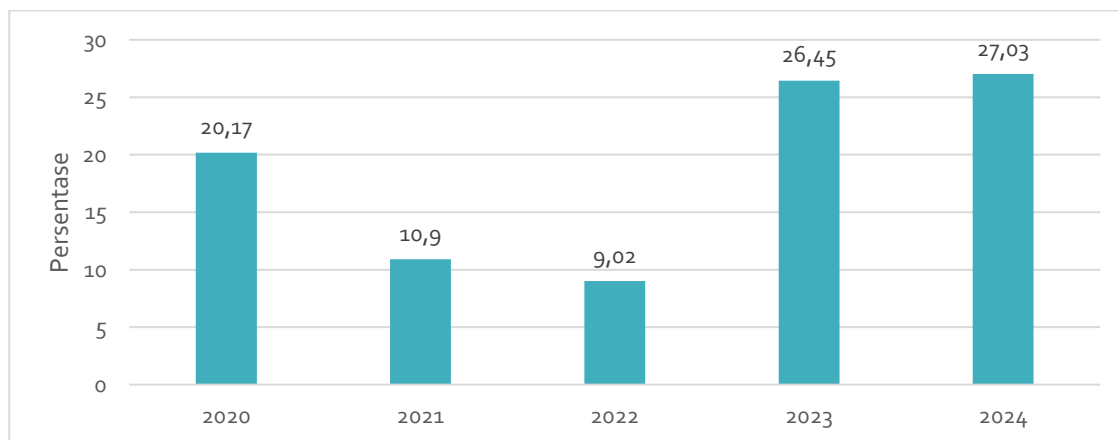


Gambar 2.38 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

eee) Cakupan Bina Kelompok Petani

Program Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta berjalan dengan lancar, terutama karena adanya keterlibatan aktif dari petani dan pihak-pihak terkait dalam perencanaan serta pelaksanaan program tersebut. Partisipasi aktif dari petani dan penyuluh sangat berperan penting dalam kesuksesan program ini.



Gambar 2.39 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

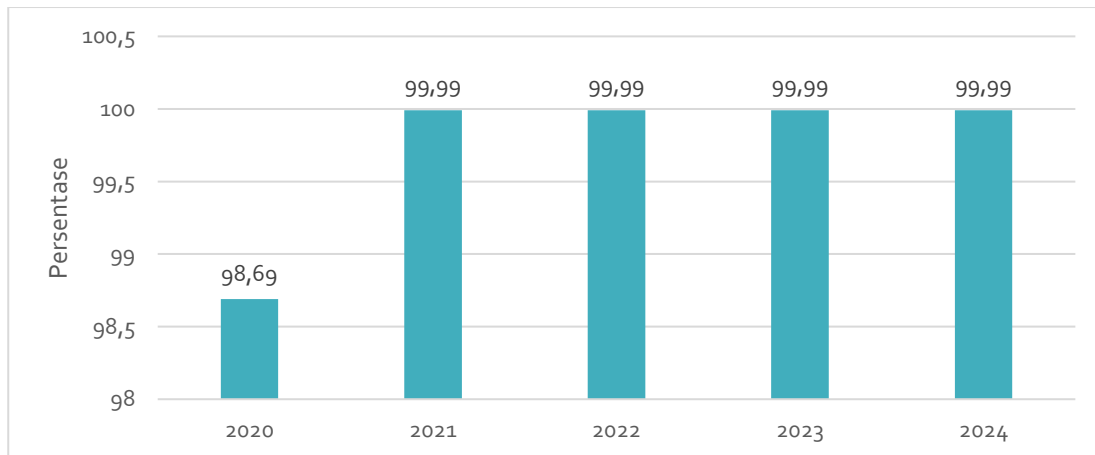
Dari data yang disajikan, cakupan bina kelompok petani mengalami fluktuasi cenderung naik pada tahun 2020-2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pelaksanaan program penyuluhan pertanian, di mana berbagai faktor seperti kondisi cuaca, kualitas tanah, akses terhadap teknologi pertanian, dan kerja sama antara petani dan penyuluh memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan program. Keterlibatan dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan hasil dari program penyuluhan pertanian di masa depan.

2.1.4.7.27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari PLN, pada tahun 2020 hingga 2024, persentase rumah tangga pengguna listrik menunjukkan angka yang hampir sempurna, yakni 99,99%. Hal ini mencerminkan keberhasilan program elektrifikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan PLN untuk memastikan hampir semua rumah tangga di Kota

Yogyakarta memiliki akses terhadap listrik. Namun, penurunan jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun-tahun sebelumnya terjadi akibat validasi data jumlah pelanggan rumah tangga non PLN. Selain itu, jumlah rumah tangga juga mengalami penurunan akibat validasi data jumlah rumah tangga. Proses validasi ini penting untuk memastikan akurasi dan keandalan data yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor kelistrikan.

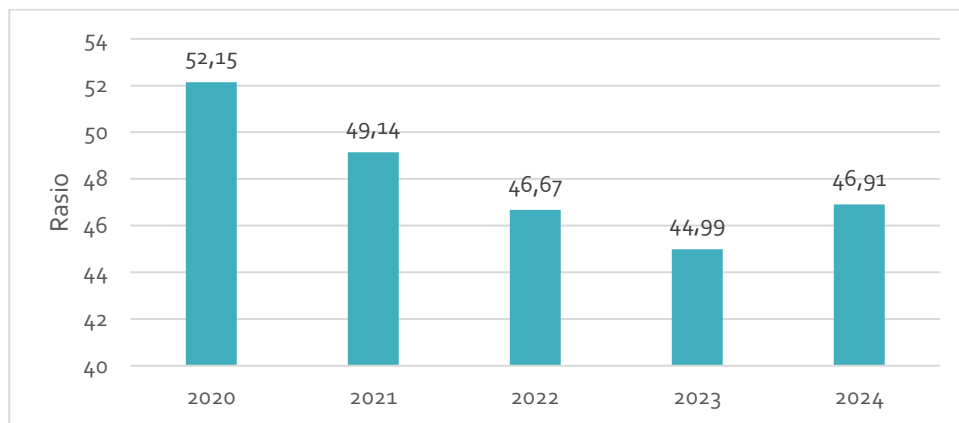


Gambar 2.40 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: PLN Kota Yogyakarta, 2025

fff) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan daya listrik di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 52,15%, dan terus menurun menjadi 44,99% pada tahun 2023. Lalu rasio ini meningkat pada tahun 2024 menjadi 46,91%. Fluktuasi ini perlu mendapatkan perhatian untuk memastikan bahwa pasokan listrik dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah pelanggan PLN dan aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta.



Gambar 2.41 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

Sementara itu, berdasarkan data daya terpasang, produksi dan distribusi listrik PT. PLN pada unit layanan pelanggan PLN di Kota Yogyakarta, angka realisasi mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kebutuhan daya listrik yang diimbangi dengan peningkatan produksi listrik sehingga jumlah listrik terjual meningkat tiap tahunnya pada jangka waktu 2020-2024.

Tabel 2.206 Listrik Terjual di Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
-----	-----------	--------	------	------	------	------	------

1	Daya Terpasang	VA	762.701.517	791.607.967	819.287.617	857.406.717	903.839.167
2	Produksi Listrik	KWh	1.091.697.928	1.091.264.920	1.580.609.856	1.701.127.448	1.730.439.409
3	Listrik Terjual	KWh	1.057.979.600	1.056.546.446	1.181.475.531	1.284.740.244	1.397.546.913

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta 2025

2.1.4.7.28. Urusan Perdagangan

a) Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai ekspor bersih berada di Rp3.952.780,63 juta. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2022 mencapai titik terendah pada tahun yang sama dengan nilai Rp 1.796.872,10 juta. Pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya hingga tahun 2024, menjadi Rp 2.204.918,74.

Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan perdagangan, kondisi ekonomi global, serta tantangan dalam sektor perdagangan dan ekspor. Data ini memberikan gambaran tentang pentingnya pemantauan dan evaluasi kebijakan perdagangan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan sektor ekspor di masa mendatang.

Tabel 2.207 Ekspor Bersih Perdagangan di Kota Yogyakarta 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Bersih Perdagangan	Juta Rp	3.952.780,63	3.058.410,02	1.796.872,10	1.948.007,18	-2.204.918,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2025

ggg) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Penurunan cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal dari tahun 2022 ke tahun 2023, yang terlihat dari penurunan persentase dari 0,87% menjadi 0,60%, dapat dijelaskan oleh adanya proses kurasi produk yang lebih ketat. Seleksi peserta yang lebih ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar tertentu yang dapat ikut serta dalam program pembinaan. Meskipun cakupan peserta menjadi lebih kecil, langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas keseluruhan dari kelompok usaha yang dibina dan memastikan daya saing mereka di pasar yang lebih luas. Seiring berjalannya waktu, diharapkan strategi ini akan berdampak positif pada peningkatan mutu produk dan kemampuan bersaing usaha informal. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2024 bahwa cakupan bina kelompok pedagang/usaha meningkat menjadi 0,64%.

Tabel 2.208 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	Persen	0,29	0,65	0,87	0,60	0,64

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.29. Urusan Perindustrian

a) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Pada tahun 2020, cakupan bina kelompok pengrajin mengalami penurunan hingga 0%. Hal ini disebabkan oleh adanya peralihan pendampingan Kelompok PEW ke Bidang UMK, yang mengubah fokus dari pendampingan kelompok pengrajin. Selain itu, Bidang Industri lebih memfokuskan pendampingannya kepada kelompok sentra dan calon sentra, yang menyebabkan tidak ada data mengenai cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun tersebut. Namun, sejak

tahun 2021 hingga 2024, cakupan bina kelompok pengrajin kembali mencapai 100%, menunjukkan bahwa program pendampingan telah berjalan dengan baik dan kembali menyoar kelompok pengrajin.

Tabel 2.209 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	0	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta, 2025

hhh) Pertumbuhan Industri

Berdasarkan data di atas, proporsi jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2020 hingga 2024 cenderung mengalami fluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 turut mempengaruhi penurunan jumlah industri kecil dan menengah. Rendahnya proporsi jumlah industri kecil dan menengah di Kota Yogyakarta disebabkan karena 90% industri yang beroperasi di Kota Yogyakarta mayoritas adalah industri rumah tangga, lahan yang terbatas di Kota Yogyakarta dan penggunaan lahan sebagian besar (>60%) peruntukannya untuk permukiman menyulitkan industri kecil dan menengah untuk *upscaling* usahanya. Tidak ada kawasan khusus industri di Kota Yogyakarta sehingga industri banyak berlokasi di lingkungan permukiman ditambah dengan penanganan limbah yang kurang optimal menyebabkan industri kecil dan menengah sulit untuk ekspansi usahanya di Kota Yogyakarta

Tabel 2.210 Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Unit Usaha Industri Mikro dan Kecil	Unit	4.375	5.579	7.534	7.970	8.052
Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	Persen	52,87	27,52	35,04	5,79	1,03

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.30. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dengan melakukan pemerataan daerah. Data transmigran tahun 2020 Kota Yogyakarta tidak bisa memberangkatkan transmigran karena pandemi covid-19. Penempatan jumlah transmigran pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami fluktuasi. Jumlah KK yang diberangkatkan, disesuaikan dengan alokasi pembagian lokasi penempatan yang diberikan oleh Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi, penempatan transmigran se-Indonesia turun akibat dampak pengurangan anggaran di Pusat.

Tabel 2.211 Jumlah Transmigran di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepala Keluarga	KK	0	5	8	4	6
2	Individu	Jiwa	0	16	31	13	22

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.31. Urusan Kelautan dan Perikanan

a) Produksi Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan mencapai 48.590 kg. Peningkatan ini disebabkan oleh banyaknya kelompok

yang menerima bantuan hibah budidaya yang secara langsung menambah hasil panen dan produksi. Selain itu, bimbingan teknis dan pendampingan budidaya yang dilakukan oleh Dinas kepada kelompok-kelompok penerima bantuan juga berperan penting dalam meningkatkan produksi. Stimulan berupa bibit lele yang diberikan kepada kelompok-kelompok tersebut turut mendukung peningkatan produksi perikanan.

Tabel 2.212 Produksi Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan	Kg	42.100	42.875	43.204	44.282	48.590

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

iii) Konsumsi Ikan

Data dalam tabel menunjukkan konsumsi ikan per kapita per tahun di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa konsumsi ikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimulai dari 35,33 kg/kapita/tahun pada tahun 2020 dan terus meningkat hingga 36 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh kegiatan sosialisasi Gemar Ikan yang dilakukan di sekolah-sekolah dasar negeri serta antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan tersebut, yang berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan manfaat konsumsi ikan dan mendorong pola makan sehat di kalangan masyarakat Yogyakarta.

Tabel 2.213 Konsumsi Ikan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	35,33	35,62	35,89	35,89	36,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

iii) Cakupan Bina Pengusaha Budidaya Perikanan

Pada tahun 2020-2024, cakupan bina pengusaha budidaya perikanan mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Peningkatan minat masyarakat dalam budidaya ikan di Kota Yogyakarta selama beberapa tahun terakhir didorong oleh akses yang lebih baik terhadap hibah melalui program pokok pikiran yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan finansial dan pendampingan dari pemerintah berhasil meningkatkan partisipasi dan minat masyarakat dalam usaha budidaya perikanan.

Tabel 2.214 Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan	Persen	10,64	4,41	13,41	38,14	35,14

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.32. Urusan Perencanaan Pembangunan

a) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Tabel ini menunjukkan ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Yogyakarta dari tahun 2020 hingga 2024. Dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa dokumen perencanaan RPJPD selalu tersedia setiap tahunnya, ditandai dengan indikator "Ada" pada setiap kolom tahun. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan jangka panjang di Kota Yogyakarta, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan

jangka panjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberlanjutan ketersediaan dokumen ini penting untuk memastikan perencanaan yang terstruktur dan terarah dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.215 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025

kkk) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Perda atau Perkada di Kota Yogyakarta selalu ada dari tahun 2020 hingga 2024. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara terus-menerus mengupayakan perencanaan pembangunan yang terarah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penyusunan dan penetapan dokumen RPJMD yang berkelanjutan mencerminkan komitmen kuat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah yang telah direncanakan.

Tabel 2.216 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025

lll) Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kota Yogyakarta telah tersedia dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Keberadaan dokumen ini setiap tahunnya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Ini juga mencerminkan adanya sistem perencanaan yang baik dan terstruktur, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk mencapai target pembangunan tahunan.

Tabel 2.217 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025

mmm) Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta telah tersedia dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta selalu memiliki panduan resmi mengenai perencanaan tata ruang yang sah setiap tahunnya. Ketersediaan dokumen RTRW yang ditetapkan dengan PERDA memastikan bahwa pengembangan wilayah kota dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang

telah disepakati, mendukung pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Tabel 2.218 Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025

nnn) Penjabaran Konsisten Program RPJMD ke dalam RKPD

Penjabaran konsisten program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta telah tercapai 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program yang direncanakan dalam RPJMD telah secara konsisten diterjemahkan ke dalam RKPD setiap tahunnya. Konsistensi ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah kota dalam mengikuti rencana pembangunan yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah, memastikan bahwa setiap langkah operasional tahunan selaras dengan visi jangka panjang yang telah ditetapkan.

Tabel 2.219 Penjabaran Konsisten Program RPJMD ke dalam RKPD di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penjabaran Konsisten Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025

ooo) Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Penjabaran konsistensi program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Yogyakarta telah tercapai 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program yang direncanakan dalam RKPD telah secara konsisten dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya. Konsistensi ini mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam memastikan bahwa rencana kerja tahunan yang telah disusun dapat terlaksana dengan dukungan anggaran yang memadai, serta menunjukkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Tabel 2.220 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.33. Urusan Keuangan

a) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Upaya yang dilakukan untuk mencapai hal ini antara lain melalui rekonsiliasi belanja, aset, dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK SKPD) secara berkala. Selain itu, pendampingan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan penggunaan sistem informasi manajemen untuk aset dan persediaan juga turut berkontribusi dalam menjaga kualitas laporan keuangan sehingga dapat

memperoleh predikat WTP. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam mengelola keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel.

Tabel 2.221 Opini BPK “WTP” Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK “WTP”	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

ppp) Persentase SILPA

Realisasi belanja yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga lebih banyak dana yang dialokasikan dan digunakan untuk berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian, persentase SILPA yang menurun mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan terarah.

Tabel 2.222 Persentase SILPA Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase SILPA	Persen	25,23	17,53	14,71	12,88	8,98

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

qqq) Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana

Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan, terbukti dengan persentase 0% program/kegiatan yang tidak terlaksana dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang didukung oleh koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen dan dedikasi pemerintah kota dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.223 Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persen	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025

rrr) Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase belanja pendidikan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024 dan cenderung meningkat. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah kota dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, meskipun persentasenya belum stabil dan konsisten. Sedangkan fluktuasi yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, dan kebutuhan mendesak lainnya yang mempengaruhi alokasi dana pendidikan. Jika melihat dari jumlahnya, persentase belanja pendidikan sudah sesuai dengan amanat pusat yang mewajibkan minimal 20% dari total anggaran belanja Kota Yogyakarta.

Tabel 2.224 Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	22,16	23,64	22,23	26,22	27,58

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

sss) Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, peningkatan yang cenderung tajam pada persentase belanja kesehatan disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mendesak pemerintah untuk mengalokasikan anggaran lebih dalam penanganannya. Selain itu, fluktuasi yang terjadi mencerminkan adanya perubahan prioritas dalam pengalokasian anggaran serta respons terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat yang dinamis. Faktor-faktor seperti kebijakan kesehatan, situasi darurat kesehatan, dan program kesehatan baru dapat mempengaruhi alokasi anggaran di sektor ini.

Tabel 2.225 Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	21,40	25,89	13,22	13,96	16,65

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

ttt) Penetapan APBD

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta selalu dilakukan tepat waktu dari tahun 2020 hingga 2024. Setiap tahun, APBD ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditentukan, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan proses perencanaan dan penganggaran secara disiplin dan teratur. Tepatnya penetapan APBD ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah dapat berjalan sesuai rencana, serta menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat berdampak pada layanan kepada masyarakat dan pencapaian target pembangunan daerah.

Tabel 2.226 Penetapan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.34. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a) Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Adanya Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Konversi memberikan peluang lebih luas bagi pegawai di Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kompetensinya baik yang difasilitasi oleh BKPSDM Kota Yogyakarta maupun secara mandiri. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rata-rata lama pendidikan dan pelatihan adalah 105 jam per tahun, dan meningkat menjadi 115 jam per tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkup pemerintahan Kota Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada kinerja pegawai serta pelayanan publik yang lebih baik.

Tabel 2.227 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	jpl	105	110	115	115	115

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, 2025

uuu) Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, sebesar 7,32% ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, angka itu naik hingga tahun 2022 persentasenya mencapai 100% dan terus berada di angka tersebut. Peningkatan ini mencerminkan adanya perhatian dan komitmen yang besar dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN di Kota Yogyakarta.

Adanya dukungan Teknologi Informasi memberikan dampak positif, yakni dapat mengintervensi lebih banyak pegawai kota Yogyakarta untuk ikut serta dalam pengembangan kompetensi ASN. Selain itu, adanya Kepwal Konversi memberikan peluang lebih luas bagi pegawai di Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kompetensinya, baik yang difasilitasi oleh BKPSDM Kota Yogyakarta maupun secara mandiri. Peserta yang mengikuti diklat dengan metode klasikal (tatap muka) sebanyak 4.879 orang dan metode daring 11.395 peserta dengan berbagai macam materi atau judul kediklatan. Perhitungan peserta diklat metode daring didasarkan pada jumlah kegiatan yang diikuti sehingga satu pegawai dapat terhitung untuk beberapa kegiatan diklat. Metode daring menjadi tren pembelajaran mandiri yang efisien untuk pengembangan kompetensi pegawai. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan kinerja ASN dan pelayanan publik yang lebih baik.

Tabel 2.228 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	7,32	35,93	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, 2025

vvv) Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, hanya 51,56% pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, tetapi angka ini meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2021 dengan 67%. Setelah itu, terjadi penurunan drastis hingga tahun 2024 hanya 6,95%.

Penurunan ini disebabkan oleh adanya penyederhanaan birokrasi yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pejabat dalam jabatan struktural (pengawas dan administrator) menjadi jabatan fungsional tertentu. Hal ini berkorelasi dengan jumlah pejabat ASN yang mengikuti pelatihan kepemimpinan. Meski demikian, upaya peningkatan kompetensi pejabat ASN terus dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang optimal.

Tabel 2.229 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	51,56	67,00	10,77	10,89	6,95

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, 2025

www) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) pada instansi pemerintah menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah JPT tercatat sebanyak 29 orang dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 dan tahun 2024 dengan 32 orang.

Variasi jumlah eksisting JPT ini berkorelasi dengan faktor pensiun dan mutasi JPT. Selain itu, proses seleksi terbuka yang membutuhkan waktu cukup panjang juga mempengaruhi jumlah JPT yang terisi. Dalam beberapa tahun terakhir, proses ini semakin diperpanjang karena posisi Wali Kota Yogyakarta belum definitif, yang mana tugas dan wewenangnya dibatasi oleh peraturan. Hal ini berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses seleksi terbuka untuk mengisi posisi JPT.

Tabel 2.230 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Pegawai	29	32	30	30	32

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, 2025

xxx) Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jumlah pemangku Jabatan Administrasi atau Fungsional Umum (JFU) mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024 dengan angka stagnan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Jumlah yang stagnan ini disebabkan oleh penyederhanaan birokrasi dan pensiun PNS. Penyederhanaan birokrasi mengakibatkan pengurangan jumlah pejabat struktural yang diubah menjadi jabatan fungsional tertentu, sementara pensiun PNS berkontribusi langsung terhadap pengurangan jumlah keseluruhan JFU di instansi pemerintah.

Tabel 2.231 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah	Pegawai	1.327	1.586	1.709	1.853	1.853

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, 2025

yyy) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu (JFT) mengalami fluktuasi pada 5 tahun terakhir. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mutase ke jabatan structural dan pensiunnya pns pada tahun ganjil. Faktor lain yang mempengaruhi fluktuasi jumlah JFT yaitu sebagian PPPK Tenaga Pendidik dan PPPK Tenaga Kesehatan sampai dengan akhir tahun sementara waktu statusnya belum masuk dalam Jabatan Fungsional Tertentu sehingga terjadi penurunan pada tahun tertentu.

Tabel 2.232 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
JFT Pendidikan	Pegawai	1668	1526	1466	1314	1350
JFT Kesehatan	Pegawai	802	764	1068	935	1050
JFT Teknis	Pegawai	275	263	630	421	606
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta	Pegawai	2745	2553	3164	2670	3006

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

2.1.4.7.35. Urusan Penelitian dan Pengembangan

a) Persentase Penelitian yang Sudah Ditindak Lanjuti

Indikator ini menunjukkan tingkat implementasi dari kegiatan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan data yang ada, capaian indikator persentase penelitian yang sudah ditindak lanjuti menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Tahun 2020 hingga 2021, realisasi indikator ini mencapai 100% yang berarti seluruh hasil penelitian telah ditindak lanjuti. Adapun di tahun 2022, capaian indikator ini menurun menjadi 90% dan kembali menjadi 100% di tahun 2024.

Tabel 2.233 Persentase Penelitian yang Sudah Ditindak Lanjuti di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penelitian yang Sudah Ditindak Lanjuti	Persen	100	100	90	N/A	100

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.36. Urusan Pengawasan

a) Persentase Tindak Lanjut Temuan

Pengawasan dalam proses kinerja pemerintah kota diperlukan untuk menindaklanjuti pelanggaran maupun ketidaksesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab. Pengawasan yang dilakukan salah satunya adalah dengan memeriksa temuan pelanggaran dan menindaklanjuti temuan tersebut. Hal tersebut dinilai melalui indikator persentase tindak lanjut temuan. Indikator ini didapatkan dari hasil perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan. Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, persentase tindak lanjut temuan mengalami peningkatan dengan capaian yang tinggi.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 dijelaskan bahwa pada tahun 2020 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 22 dari 24 rekomendasi karena rekomendasi yang bersifat kebijakan serta membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang oleh OPD yang melaksanakan tindak lanjut rekomendasi tersebut. Tahun 2021 jumlah OPD dan temuan yang dihasilkan banyak bersifat administrasi sehingga cepat ditindaklanjuti. Selain itu juga didukung oleh OPD yang telah melaksanakan fungsi tugas pokoknya dengan baik dan menjalankan 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) secara baik, OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan inspektorat dan obyek pemeriksanya, dan koordinasi dengan OPD mitra serta adanya timbal balik kerja sama dari OPD.

Tabel 2.234 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	98,39	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Inspektorat Kota Yogyakarta, 2025

zzz) Persentase Pelanggaran Pegawai

Adanya fungsi pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) diharapkan mampu meminimalkan jumlah pelanggar dan pelanggaran serta pemberian sanksi tindak lanjut dalam kinerja pemerintah kota. Persentase pelanggaran pegawai didapatkan dari hasil perbandingan jumlah ASN yang dikenai sanksi dengan jumlah total ASN.

Tabel 2.235 Persentase Pelanggaran Pegawai Kota Yogyakarta 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	0,45	0,14	0,15	0,36	0,18

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan grafik di atas, persentase pelanggaran pegawai mengalami fluktuasi cenderung menurun selama kurun waktu 2020 hingga 2024 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata -0,41% per tahun. Penurunan ini berkorelasi dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Pelanggaran pegawai sebagian dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi disharmoni rumah tangga, penawaran dan pilihan profesi lainnya, kondisi sosial - ekonomi pegawai yang mempengaruhi etos kerja dan motivasi pegawai.

aaaa) Jumlah Temuan BPK

Jumlah temuan BPK dapat digunakan untuk menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan dan sumber data publik. Oleh karena itu, jumlah temuan BPK menggambarkan bagaimana tingkat pengelolaan keuangan di suatu daerah. Semakin sedikit jumlah temuan BPK maknanya semakin baik pengelolaan keuangan serta sesuai dengan peraturan dan standar yang ada. Berdasarkan data yang ada, jumlah temuan BPK memiliki kecenderungan yang menurun selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020, banyaknya jumlah temuan BPK adalah 52 temuan. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya, jumlah temuan BPK mengalami penurunan sehingga pada tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 36 temuan. Hal tersebut mencerminkan bahwa perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan serta pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah berjalan secara optimal.

Tabel 2.236 Persentase Tindak Lanjut Temuan Kota Yogyakarta 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah temuan	Rekomendasi	52	9	7	8	36
2	Jumlah rekomendasi	Rekomendasi	61	21	19	18	96
3	Tindaklanjut rekomendasi yang sudah sesuai	Rekomendasi	59	21	12	18	96
4	Tindaklanjut rekomendasi yang belum sesuai	Rekomendasi	2	0	7	0	0

Sumber: Inspektorat Kota Yogyakarta, 2025

2.1.4.7.37. Urusan Sekretariat Dewan

a) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota

Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat kelengkapan DPRD merupakan pedoman kerja bagi DPRD Kota Yogyakarta sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Adanya rencana kerja tahunan juga dapat menjadi acuan dalam mengukur kinerja, evaluasi pencapaian, dan menyusun rencana perbaikan ke depan. DPRD Kota Yogyakarta telah memiliki Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan kota di setiap tahunnya. Hal tersebut menggambarkan kinerja DPRD Kota Yogyakarta yang proaktif dalam mengatur dan merencanakan kegiatan pada setiap alat kelengkapan.

Tabel 2.237 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2025

b) Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, DPRD perlu menyusun dan mengintegrasikan program-program kerja yang dimiliki dengan RPJMD dan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. DPRD akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam menyusun dan mengintegrasikan program-program tersebut dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA, dan fungsi anggaran. Berdasarkan data yang tersedia dari tahun 2020 hingga tahun 2024, setiap tahunnya program-program kerja DPRD telah tersusun dan terintegrasi di dalam dokumen rencana lima tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran.

Tabel 2.238 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2025

c) Terintegrasi Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Selain penyusunan dan pengintegrasian program kerja DPRD dalam dokumen RPJMD dan RKPD, juga diperlukan adanya pengintegrasian program DPRD ke dalam dokumen anggaran Setwan DPRD. Pengintegrasian tersebut juga dilakukan Bersama dengan BAPPEDA dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat dewan DPRD. Berdasarkan data yang ada, setiap tahunnya telah dilakukan pengintegrasian program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD Kota Yogyakarta.

Tabel 2.239 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap Anggaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2025

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; (2) kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) penerimaan daerah; (4) pengeluaran daerah; (5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; (6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Perwujudan ruang lingkup tersebut dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu APBD merupakan komponen yang krusial karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2) belanja daerah; dan (3) pembiayaan daerah. Analisis APBD Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025 – 2029 menggunakan data tahun anggaran 2020 – 2024. Penentuan batas rentang waktu ditujukan untuk memudahkan analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu yang digunakan untuk memproyeksi keuangan daerah di masa mendatang. Diharapkan proyeksi keuangan daerah dapat mendukung penyusunan rencana pembangunan daerah yang lebih optimal dan lebih tepat sasaran.

2.2.1.1.1. Pendapatan Daerah

Menurut Permendagri 86 tahun 2017, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah merupakan

komponen penting dalam APBD karena memengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui dokumen RPJMD Tahun 2017 – 2022, menetapkan beberapa arah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah: (1) mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) meningkatkan kualitas bahan pendukung kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah; (3) meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD; (4) membentuk BPR syariah; (5) mengoptimalkan peran *XT square* terhadap pemberdayaan UMKM; (6) Meningkatkan kualitas kerja sama daerah.

Capaian realisasi pendapatan daerah pada periode tahun anggaran 2020 – 2024 selalu melampaui 100%. Capaian realisasi pendapatan lebih dari 100% berarti pendapatan riil sudah melebihi pendapatan yang ditargetkan. Capaian realisasi tertinggi pada periode lima tahun terakhir yaitu sebesar 105,77% di tahun 2023. Target dan realisasi pendapatan daerah secara umum juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta mengalami tren peningkatan pada periode tahun 2020 – 2024 dengan laju rata-rata sebesar 3,46% per tahun. Target dan realisasi pendapatan daerah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 karena pengaruh pandemi Covid-19. Namun, target dan realisasi pendapatan daerah kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Rincian target, realisasi, serta capaian pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.240 Capaian Target Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta 2020 - 2024

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang
2020	1.636.876.158.348,6	1.699.751.020.194,3	103,84	62.874.861.845,7
2021	1.631.391.993.906,0	1.707.273.287.342,5	104,65	75.881.293.436,5
2022	1.812.383.542.864,0	1.889.922.124.719,6	104,28	77.538.581.855,6
2023	1.891.691.059.144,0	2.000.846.169.483,5	105,77	109.155.110.339,5
2024	2.012.798.122.693	2.081.580.284.914,3	103,42	68.782.162.221,30

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Disebutkan dalam PP RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pendapatan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Pendapatan Transfer, dan (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 – 2024 pada setiap komponen dapat dilihat pada tabel 3.2. PAD Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,28% per tahun selama periode tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2024, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Yogyakarta adalah 41,08% dengan proporsi yang mengalami tren positif sebesar 1,43% per tahun selama periode tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.241 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN (RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	1.699.751.020.194	1.707.273.287.342	1.889.922.124.720	2.000.846.169.484	2.081.580.284.914
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	563.174.371.397	598.121.885.338	725.577.542.998	805.346.115.793	855.100.858.914
Pajak Daerah	342.780.587.013	372.462.884.357	482.269.519.901	552.124.822.067	575.887.653.496
Retribusi Daerah	23.310.646.522	26.855.366.529	29.051.817.794	29.669.773.143	76.242.064.340
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	34.859.626.699	23.991.239.142	31.556.606.183	32.830.241.609	31.847.065.857
Lain-Lain PAD yang Sah	162.223.511.163	174.812.395.310	182.699.599.120	190.721.278.974	171.124.075.221
B. PENDAPATAN TRANSFER	1.105.993.726.262	1.078.659.260.088	1.164.344.581.722	1.195.471.353.691	1.225.143.426.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	818.760.445.269	812.159.214.937	894.708.151.723	866.426.526.418	934.903.824.677
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	48.878.978.276	62.643.616.366	57.580.293.987	54.633.493.787	52.835.068.000
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	627.247.170.000	617.524.294.000	611.115.719.499	640.404.377.241	673.920.861.000
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	42.628.557.012	36.468.809.740	78.219.658.794	13.825.807.247	45.033.949.392

URAIAN	REALISASI PENDAPATAN (RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	100.005.739.981	95.522.494.831	147.792.479.443	157.562.848.143	163.113.946.285
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	112.688.603.600	72.692.053.000	73.496.525.000	82.504.747.000	53.929.174.000
Dana Insentif Daerah (DID)	-	72.692.053.000	73.496.525.000	82.504.747.000	53.929.174.000
Dana Penyesuaian	112.688.603.600	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	174.544.677.393	193.807.992.151	196.139.904.999	246.540.080.273	236.310.427.323
Pendapatan Bagi Hasil	120.965.338.876	-	145.324.342.606	153.071.631.950	150.610.796.469
Bantuan Keuangan	-	193.807.992.151	50.815.562.393	93.468.448.323	85.699.630.854
Pendapatan Lainnya	53.579.338.517	-	-	-	-
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	30.582.922.535	30.492.141.917	-	28.700.000	1.336.000.000
Pendapatan Hibah	30.582.922.535	298.000.000	-	28.700.000	1.336.000.000
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	30.194.141.917	-	-	-

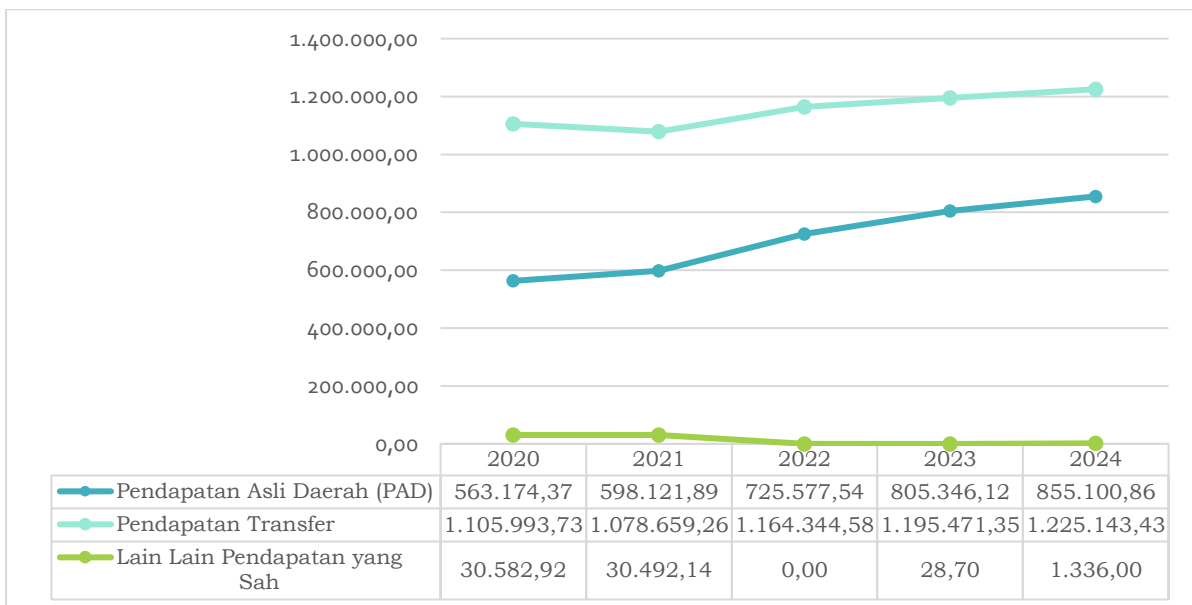
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-rata yang lebih rendah dibandingkan PAD, yaitu sebesar 2,70%. Pendapatan Transfer memiliki proporsi paling besar dalam pendapatan daerah Kota Yogyakarta sepanjang tahun anggaran 2020 – 2024, yaitu sebesar 58,86% di tahun 2024. Proporsinya mengalami tren yang menurun yaitu -0,61% per tahun selama periode tahun 2020 – 2024. Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki proporsi kontribusi yang paling kecil, yaitu sebesar 0,06% pada tahun 2024 dan mengalami penurunan proporsi yang cukup drastis sebesar -1,74% selama periode tahun 2020-2024. Berikut Tabel 3.3 menunjukkan proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 – 2024 dan Gambar 2.262 menunjukkan tren realisasi pendapatan pada masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.242 Proporsi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Uraian	Proporsi Pendapatan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33,13%	35,03%	38,39%	40,25%	41,08%
Pendapatan Transfer	65,07%	63,18%	61,61%	59,75%	58,86%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1,80%	1,79%	0,00%	0,00%	0,06%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025, data diolah



Gambar 2.42 Tren Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta 2020–2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Kuatnya peranan PAD dalam pembentukan pendapatan daerah mengindikasikan postur pendapatan daerah relatif kuat. Sebab pemanfaatan potensi-potensi daerah telah dilakukan secara lebih optimal.

PAD Kota Yogyakarta memiliki laju pertumbuhan yang lebih besar daripada laju pertumbuhan pendapatan daerah. Laju pertumbuhan PAD dalam rentang tahun 2020 – 2024 mencapai 5,28% per tahun, sementara laju pendapatan daerah adalah sebesar 3,46% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk tahun-tahun mendatang, dengan upaya dan kebijakan yang tepat, peranan PAD dalam membentuk struktur pendapatan daerah Kota Yogyakarta akan semakin signifikan. Peranan PAD yang terus menguat menunjukkan Kota Yogyakarta semakin mandiri secara keuangan dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintahan pusat semakin kecil.

i. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

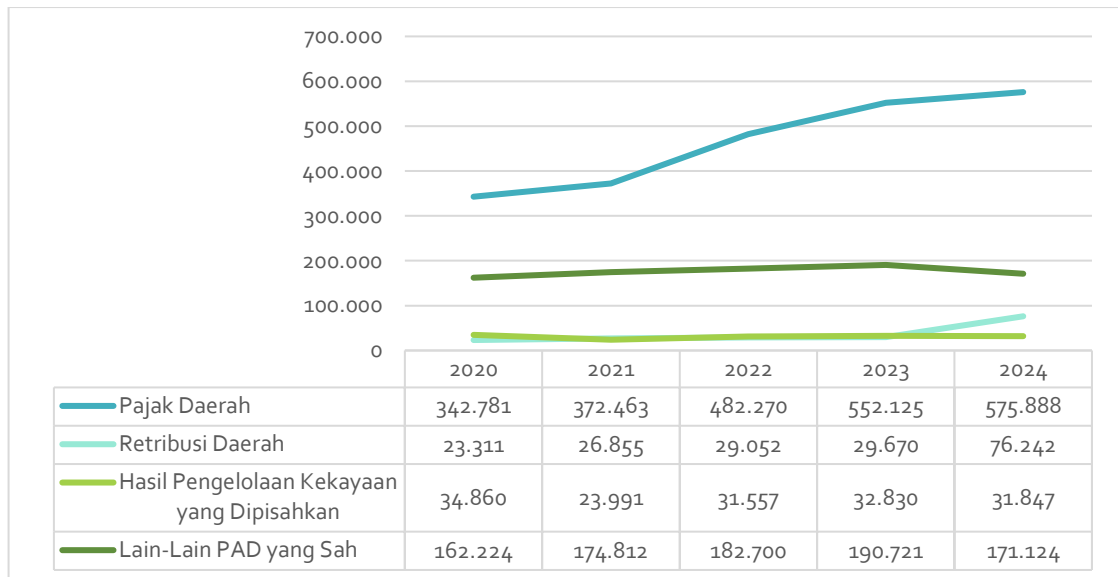
Disebutkan dalam PP RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa PAD terdiri dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi PAD pada periode 2020 – 2024 melebihi target yang ditetapkan, pada tahun 2023 realisasi sebesar 105,77%. Proporsi paling tinggi adalah pajak daerah, yang berkontribusi sebesar 68,56% terhadap PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2023, kemudian diikuti secara berurutan oleh Lain-Lain PAD yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, serta Retribusi Daerah. Urutan persentase kontribusi pada setiap komponen PAD tidak mengalami perubahan selama periode tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.243 Proporsi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Uraian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Proporsi PAD				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	60,87%	62,27%	66,47%	68,56%	67,3%
Retribusi Daerah	4,14%	4,49%	4,00%	3,68%	8,9%
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	6,19%	4,01%	4,35%	4,08%	3,7%
Lain-Lain PAD yang Sah	28,81%	29,23%	25,18%	23,68%	20,0%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan Evaluasi Hasil RPJMD 2024, 2025; data diolah

Secara umum, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024. Pada periode tersebut, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Namun, dua komponen PAD lainnya justru mengalami tren penurunan di tahun 2024. Sepanjang periode 2020-2024, Pajak Daerah tetap menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PAD.



Gambar 2.43 Tren Realisasi PAD dalam Juta Rupiah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025

Pajak daerah memiliki kontribusi paling besar pada PAD Kota Yogyakarta. Tingginya perolehan pajak didukung dengan adanya penambahan jenis maupun nominal penerimaan pada pajak yang ada. Pada tahun 2024, Pajak Daerah Kota Yogyakarta ditargetkan sebesar Rp 532.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 575.887.653.496,00 atau 108,25%, yang berarti melebihi target. Penerimaan pajak daerah pada setiap kota/kabupaten dapat berbeda-beda, berdasarkan pada potensi daerah yang termanfaatkan.

Walaupun PAD Kota Yogyakarta terus bertumbuh dan proporsinya terhadap pendapatan daerah meningkat, masih terdapat peluang untuk optimalisasi. Hal ini dapat dilihat melalui indikator seperti rasio pajak daerah (*local tax ratio*) atau penerimaan pajak daerah terhadap PDRB pada yang mencerminkan potensi fiskal daerah yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

ii. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan transfer terbagi atas tiga komponen utama: (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan; (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya; dan (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dana perimbangan merupakan komponen yang memiliki persentase paling tinggi pada periode 2020-2024.

Pada tahun 2024, struktur Dana Transfer Kota Yogyakarta disusun oleh 76,26% Dana Perimbangan; 4,44% Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat Lainnya; dan 19,3% Pendapatan Transfer Antar Daerah. Dana perimbangan terdiri dari empat sub komponen: (1) Dana Bagi Hasil (DBH); (2) Dana Alokasi Umum (DAU); (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Proporsi Dana Perimbangan mengalami tren fluktuatif pada periode tahun 2020-2024 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 sebesar 3,78% per tahun. Sementara proporsi Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami tren positif pada periode tahun 2020-2024, meskipun tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,32% dari tahun 2023. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari tiga sub komponen: (1) Pendapatan Bagi Hasil; (2) Bantuan Keuangan; (3)

Tabel 2.244 Proporsi Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025

URAIAN	Proporsi Per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	74,03%	75,29%	76,84%	72,48%	76,26%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	10,19%	6,74%	6,31%	6,90%	4,44%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	15,78%	17,97%	16,85%	20,62%	19,3%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; data diolah

iii. **Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah, selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan struktur Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Yogyakarta (Tabel 2.266), komponen dengan kontribusi paling besar adalah Pendapatan Hibah. Bahkan pada tahun 2020, 2023 dan 2024, Lain-Lain Pendapatan yang Sah 100% berasal dari Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah dalam rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Pada tahun 2022, Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Yogyakarta adalah nol rupiah.

Tabel 2.245 Proporsi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kota Yogyakarta

URAIAN	Proporsi Per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Hibah	100,00%	0,98%	-	100,00%	100,00%
Dana Darurat	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%

Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00%	99,02%	-	0,00%	0,00%
---	-------	--------	---	-------	-------

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; data diolah, 2025

2.2.1.1.2. Belanja Daerah

Disebutkan dalam PP RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan pembelanjaan di masa mendatang. Pada periode tahun 2020 – 2024, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan strategi untuk meningkatkan perencanaan dan pengendalian anggaran. Arah kebijakan tersebut tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2020 – 2024, yaitu 1) meningkatkan kualitas dokumen penganggaran dan 2) mengoptimalkan pengendalian anggaran. Pada RPD Kota Yogyakarta 2023-2026, perencanaan keuangan daerah selama 4 tahun diharapkan dapat melaksanakan 100% anggaran APBD.

Pada periode 2020 – 2023, rata-rata capaian realisasi belanja Pemerintah kota Yogyakarta sebesar 87,74%. Hal ini menunjukkan masih adanya deviasi dari capaian realisasi belanja. Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan: (1) penentuan target yang perlu direncanakan dengan baik, misalnya terkait capaian tahun sebelumnya, besarnya anggaran dan rencana alokasinya; serta 2) optimalisasi realisasi belanja daerah, khususnya untuk pelaksanaan program maupun kegiatan. Capaian yang baik adalah berada di sekitar 100%, mengindikasikan capaian yang optimal. Capaian tertinggi belanja daerah Kota Yogyakarta pada periode RPJMD sebelumnya terjadi pada tahun 2023 sebesar 92,23% dengan realisasi 1,97 triliun rupiah pada tahun 2023.

Pada periode RPD 2024, capaian belanja daerah melampaui target sebesar 103,57% senilai 2,09 triliun rupiah dengan target 2,03 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan telah terpenuhinya kebutuhan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Tabel 2.246 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta 2020 – 2024

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah Berkurang
2020	1.837.219.591.471	1.517.599.468.488	82,60	- (319.620.122.983)
2021	1.944.826.298.734	1.691.968.885.089	87,00	- (252.857.413.645)
2022	2.049.712.899.206	1.826.804.253.747	89,12	- (222.908.645.459)
2023	2.138.486.539.080	1.972.232.487.692	92,23	- (166.254.051.388)
2024	2.038.785.607.725	2.091.367.191.908,80	102,57%	+ (7.418.415.817)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, APBD Kota Yogyakarta Tahun 2024, Evaluasi RPJMD Tahun 2024, 2025; data diolah

Tren proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 2.268. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi mendominasi struktur Belanja Daerah Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, belanja operasi mengalami penurunan. Kemudian belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal memiliki proporsi terbesar kedua selama periode tahun 2020-2024 dengan tren yang kembali naik pada tahun 2024. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selama periode tahun 2020 – 2024 proporsi belanja ini tidak lebih dari 0,5%, kecuali pada tahun 2020 tepat saat pandemi Covid-19 muncul proporsi Belanja Tidak Terduga meningkat cukup signifikan mencapai 4,9%. Sementara Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Proporsi Belanja Transfer selama periode tahun 2020-2024 berada di rentang 0,04% - 0,1% dengan tren proporsi yang fluktuatif dan meningkat di tahun 2024.

Tabel 2.247 Proporsi Komponen Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

Belanja Daerah	Proporsi Per Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	82,26%	85,44%	85,40%	87,05%	85,6%
Belanja Modal	12,75%	14,19%	14,42%	12,76%	14,2%
Belanja Tidak Terduga	4,90%	0,32%	0,14%	0,16%	0,2%
Belanja Transfer	0,09%	0,06%	0,05%	0,04%	0,1%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; data diolah

Tabel 2.248 Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

URAIAN		REALISASI BELANJA (RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA DAERAH		1.517.599.468.488	1.691.968.885.089	1.826.804.253.747	1.972.232.487.692	2.091.367.191.909
A. BELANJA OPERASI		1.248.329.702.539	1.445.551.076.433	1.560.028.542.837	1.716.767.689.465	1.790.533.974.907
1	Belanja Pegawai	728.710.179.779	693.434.145.524	723.429.936.615	728.873.804.149	785.769.268.630
2	Belanja Barang dan Jasa	455.864.521.552	675.659.110.064	731.190.485.910	832.193.676.370	877.250.892.537
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	38.725.063.808	44.321.476.345	76.596.866.312	133.034.964.396	102.778.648.641
6	Belanja Bantuan Sosial	25.029.937.400	32.136.344.500	28.811.254.000	22.665.244.550	24.735.165.100
B. BELANJA MODAL		193.523.645.424	240.007.571.436	263.386.424.104	251.570.529.367	296.224.425.411
1	Belanja Tanah	17.920.111.920	31.234.102.680	801.666.600	1.349.053.990	2.201.626.190
2	Belanja Peralatan dan Mesin	54.368.762.898	57.237.140.570	121.999.668.034	96.478.793.958	107.853.441.626
3	Belanja Gedung dan Bangunan	41.131.637.106	52.693.245.460	86.723.158.187	85.468.822.761	108.885.066.704
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.226.071.861	84.799.299.230	46.670.655.758	61.694.240.928	71.714.876.776
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.834.203.994	14.043.783.496	7.191.275.525	6.579.617.730	5.386.845.115
6	Belanja Modal Lainnya	6.042.857.645	-	-	-	182.569.000
C. BELANJA TIDAK TERDUGA		74.385.331.448	5.350.719.740	2.518.441.916	3.060.960.000	3 545 062 000
1	Belanja Tidak Terduga	74.385.331.448	5.350.719.740	2.518.441.916	3.060.960.000	3 545 062 000

URAIAN		REALISASI BELANJA (RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
D. BELANJA TRANSFER		1.360.789.078	1.059.517.480	870.844.890	833.308.860	1.063.729.590
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	466.746.200	232.293.000	221.477.000	344 897 000
2	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	583.430.060	592.771.280	638.551.890	611.831.860	718 832.590
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	777.359.018	-	-	-	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa satu-satunya komponen belanja daerah yang konsisten mengalami tren positif sejak tahun 2020, yaitu belanja operasional. Tidak seperti komponen belanja operasional, belanja modal dan transfer mengalami fluktuasi, meskipun pada tahun 2023-2024 mengalami peningkatan. Pada periode tahun 2020 – 2024 realisasi belanja operasional mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan terbesar hingga 15,6%. Hal ini menyebabkan ketimpangan proporsi yang semakin besar antara belanja operasional dengan komponen belanja lainnya, sehingga menjadi isu utama dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian anggaran. Realisasi belanja tidak terduga sebenarnya mengalami peningkatan pada periode tahun 2022-2024, tetapi realisasi belanja tidak terduga bersifat insidental sehingga pertumbuhan dari tahun ke tahun tidak menjadi perhatian utama.

2.2.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Disebutkan dalam PP RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan analisis belanja daerah, analisis terhadap pembiayaan daerah dilakukan sebagai bahan penentuan kebijakan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan neto. Nominal pembiayaan neto yang positif menunjukkan bahwa daerah mampu mencukupi pengeluaran pembiayaan dikarenakan penerimaan pembiayaan yang lebih besar. Secara umum, pembiayaan neto di Kota Yogyakarta selama tahun 2020 hingga 2024 selalu menunjukkan capaian positif dengan persentase capaian mencapai 100% atau lebih. Capaian target pembiayaan neto Kota Yogyakarta periode 2020 – 2024 ditunjukkan pada berikut.

Tabel 2.249 Capaian Target Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Netto) Kota Yogyakarta Tahun 2019 - 2023

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah/ Berkurang
2020	200.343.433.122	200.762.753.122	100,21%	419.320.000
2021	313.434.304.828	313.436.954.088	100,00%	2.649.260
2022	237.329.356.342	238.344.608.963	100,43%	1.015.252.621
2023	246.795.479.936	246.798.479.936	100,00%	3.000.000
2024	177.018.541.626	210.448.161.728	118,88%	33.429.620.102

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, DJPK Kemenkeu, 2025; data diolah

Dapat dilihat pada tabel 2.271 terkait realisasi pembiayaan daerah Kota Yogyakarta. Penerimaan pembiayaan Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan. Tingginya penerimaan pembiayaan daerah Kota Yogyakarta banyak didukung oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan proporsi yang

selalu berada di atas 99% selama periode tahun 2020 – 2024, sementara penerimaan pembiayaan lainnya berasal dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (hanya tahun 2020), Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah (hanya tahun 2020). Pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan daerah Kota Yogyakarta mencapai 275,4 miliar rupiah. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2020 – 2024, hanya berasal dari Penyertaan Modal Daerah. Persentase pengeluaran pembiayaan daerah di Kota Yogyakarta hanya berkisar 9% - 28% dari penerimaan pembiayaan daerah. Dengan demikian, pembiayaan neto dan SILPA yang dihasilkan cukup besar, sehingga diperlukan perencanaan dan realisasi keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Tabel 2.250 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN (RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN NETO		200.762.753.122	313.436.954.088	238.344.608.963	246.798.479.936	210.448.161.728
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN		220.762.753.122	382.916.954.088	329.756.608.963	301.465.479.936	275.412.161.728
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	220.340.133.122	382.914.304.828	329.753.108.963	301.462.479.936	275.412.161.728
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	410.000.000	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	2.649.260	3.500.000	3.000.000	3.000.000
6	Penerimaan Piutang Daerah	12.620.000	-	-	-	-
7	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN		20.000.000.000	69.480.000.000	91.412.000.000	54.667.000.000	64 967 000 000
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	69.480.000.000	91.412.000.000	54.667.000.000	64 967 000 000

NO	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN (RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025

2.2.1.1.4. Analisis Pembiayaan Keuangan Daerah

Analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Yogyakarta ditinjau berdasarkan surplus/defisit anggaran dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Kondisi surplus berarti pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Defisit anggaran kemudian perlu untuk dibiayai melalui penerimaan pembiayaan daerah. Sementara sisa lebih pembiayaan anggaran adalah pendapatan dikurangi belanja daerah dan kemudian ditambah pembiayaan neto daerah. Kondisi keuangan daerah Kota Yogyakarta pada periode 2020 – 2024 selalu mengalami surplus anggaran yang cenderung fluktuatif dengan kisaran 9,79 – 63,1 miliar rupiah, kecuali pada tahun 2020 sebesar 182,1 miliar karena berkurangnya aktivitas pembangunan dan aktivitas operasional perangkat daerah. Hal ini mengindikasikan kondisi realisasi anggaran yang baik, sebab Kota Yogyakarta dapat membiayai seluruh belanja daerah dengan sumber daya yang dimiliki.

Apabila ditinjau dari SiLPA, Kota Yogyakarta memiliki SiLPA dengan jumlah yang cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, Kota Yogyakarta memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 200,6 miliar rupiah. Jumlah SiLPA yang terus menurun mengindikasikan kondisi keuangan yang lebih baik dalam konteks pembangunan daerah. Sebab hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan belum dilakukan secara optimal. Analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Yogyakarta tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.251 Analisis Pembiayaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN KEUANGAN DAERAH				
	(JUTA RUPIAH)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah	1.699.751	1.707.273	1.889.922	2.000.846	2.081.580
Belanja Daerah	1.517.599	1.691.969	1.826.804	1.972.232	2.091.367
Surplus/Defisit (Pendapatan-Belanja)	182.152	15.304	63.118	28.614	-9.787
Pembiayaan Neto Daerah	200.763	313.437	238.345	246.798	210.448
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Pendapatan-Belanja+Pembiayaan Neto)	382.914	328.741	301.462	275.412	200.661

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; data diolah

2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan/aset daerah, kewajibannya, serta ekuitas dana pada periode tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening. Neraca daerah Kota Yogyakarta secara rinci ditunjukkan pada tabel 3.14.

2.2.1.2.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar (*current asset*) dan aset tidak lancar (*non-current asset*). Pada umumnya, jumlah aset Kota Yogyakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik aset lancar maupun aset tetap. Pada tahun 2024, jumlah aset Kota Yogyakarta mencapai 5,96 triliun rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya 7,26% pada 2020 – 2024. Komponen aset dengan jumlah paling dominan yaitu Aset Tetap, sebesar 4,70 triliun rupiah (78,83% dari total aset) pada tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 9,17%. Pada tahun 2024, komponen lainnya yaitu Aset Lancar sebesar 402,8 miliar rupiah (6,76% dari total aset); Investasi Jangka Panjang sebesar 835,4 miliar rupiah (14,01% dari total aset); dan Aset Lainnya sebesar 23,8 miliar rupiah (0,40% dari total aset).

2.2.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban muncul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain. Selain itu, kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Total kewajiban dalam neraca daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 sebesar 11,3 miliar rupiah. Total kewajiban secara umum mengalami peningkatan, rata-rata pertumbuhan kewajiban daerah Kota Yogyakarta yaitu 9,25% per tahun pada periode 2020 – 2024. Seluruh kewajiban berasal dari komponen Kewajiban Jangka Pendek karena Kota Yogyakarta tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

2.2.1.2.3. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban dalam neraca. Jumlah ekuitas dana Kota Yogyakarta sebesar 5,95 triliun rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan rata-rata ekuitas sebesar 7,55% pada 2020 – 2024.

Analisis rasio keuangan (Tabel 3.13) di antaranya terdiri dari rasio lancar (*current ratio*), rasio total hutang terhadap total aset (*debt ratio*), dan rasio total hutang terhadap total ekuitas (*debt to equity ratio*). Rasio lancar merupakan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio lancar Kota Yogyakarta pada tahun 2020 – 2024 menunjukkan perbandingan yang besar antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2024, rasio lancar sebesar 35,42. Nilai rasio lancar yang tinggi menunjukkan bahwa nilai aset jauh melampaui kewajiban jangka pendek, sehingga daerah memiliki kemampuan yang tinggi dalam membayar kewajibannya.

Rata-rata pertumbuhan rasio lancar sebesar 1,12% per tahun pada 2020 – 2024. Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh kewajiban dan jumlah seluruh aset. Nilai rasio tersebut sangat rendah, menunjukkan bagian aset yang digunakan untuk membayar kewajiban juga sangat kecil. Pada tahun 2024, rasio total hutang terhadap total aset sebesar 0,002. Rasio total hutang terhadap total ekuitas menunjukkan kemampuan modal pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban. Nilai rasio hutang terhadap ekuitas hampir sama dengan nilai rasio hutang terhadap aset, disebabkan nilai aset dan ekuitas yang hampir sama, dengan nilai kewajiban yang relatif rendah dibandingkan aset maupun ekuitas. Dalam rasio keuangan, rasio lancar termasuk dalam analisis Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*), yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sementara itu, rasio hutang terhadap aset maupun ekuitas termasuk dalam analisis Rasio Solvabilitas, ditujukan untuk mengukur perbandingan dana yang harus dikeluarkan untuk membayar kewajiban terhadap aset maupun modal yang dimiliki. Dengan demikian, berdasarkan analisis neraca daerah, dapat disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik, sehingga perlu dipertahankan maupun ditingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Tabel 2.252 Analisis Rasio Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%/Tahun)
Rasio Likuiditas						
Rasio Lancar	57,54	43,40	40,64	29,32	35,42	0,118
Rasio Solvabilitas						
Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	-0,006
Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas	0,002	0,003	0,002	0,003	0,002	-0,006

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; data diolah

Tabel 2.253 Neraca Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
ASET		4.506.498,95	4.723.776,07	5.743.650,89	5.869.669,86	5.961.574,54	7,26%
A.	ASET LANCAR	532.923,74	548.024,35	492.456,40	480.904,03	402.836,72	5,18%
1	Kas dan Setara Kas	382.962,46	328.899,56	301.635,94	275.412,16	200.661,25	3,06%
2	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
3	Piutang Pajak Daerah Neto	76.155,99	94.324,41	100.932,76	101.112,78	105.696,47	14,56%
4	Piutang Retribusi Daerah Neto	1.170,75	1.356,22	2.640,84	4.500,70	4.081,66	29,38%
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Neto	20.644,08	53.611,51	36.229,32	34.490,02	32.674,48	16,10%
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
8	Piutang Transfer Antar Daerah Neto	1.594,38	4.551,38	1.406,85	335,12	5.715,72	324,79%
9	Piutang Lainnya	-	-	-	-	-	-
10	Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman Neto	-	-	-	-	-	-
11	Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Neto	223,88	377,13	273,63	273,63	273,63	6,42%

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
12	Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan Neto	1,19	1,08	0,6	0,6	0,6	-18,78%
13	Bagian Lancar Tagihan Sewa Neto	376,37	285,91	216,86	99,25	122,31	1,62%
14	Beban Dibayar Dimuka	451,38	1.270,59	1.537,64	2.020,27	1.968,38	31,90%
15	Persediaan	49.343,25	63.346,56	47.581,97	62.659,49	51.642,21	10,39%
B.	INVESTASI JANGKA PANJANG	540.866,73	617.580,91	707.966,21	763.350,63	835.411,61	9,52%
1	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	540.866,73	617.580,91	707.966,21	763.350,63	835.411,61	9,52%
C.	ASET TETAP	3.376.707,49	3.503.363,20	4.516.745,23	4.591.932,40	4.699.485,34	9,17%
1	Tanah	1.906.244,30	1.979.608,64	2.770.495,12	2.774.152,49	2.749.707,82	10,76%
2	Peralatan dan Mesin	806.756,27	891.412,02	1.001.277,43	1.056.927,40	1.138.952,55	9,03%
3	Gedung dan Bangunan	1.127.571,46	1.162.663,31	1.337.765,40	1.398.178,36	1.514.564,56	7,75%
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.219.972,70	2.305.923,22	2.373.881,36	2.488.585,91	2.541.200,16	3,44%
5	Aset Tetap Lainnya	42.180,67	45.722,11	48.792,96	49.672,07	51.529,79	5,16%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.523,37	24.668,84	26.213,04	7.237,95	5.606,96	-20,95%
7	Akumulasi Penyusutan	-2.749.541,28	-2.906.634,94	-3.041.680,09	-3.182.821,79	-3.302.076,49	4,69%

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
D.	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
1	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
E.	ASET LAINNYA	56.000,99	54.807,61	26.483,04	33.482,81	23.840,87	-14,04%
1	Tagihan Jangka Panjang	1.236,23	873,31	573,97	273,63	235,44	-32,48%
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.408,30	6.408,30	6.408,30	6.408,30	6.408,30	0,00%
3	Aset Tidak Berwujud	50.474,68	57.114,89	56.655,00	77.150,02	77.904,15	12,38%
4	Aset Lain-lain	22.617,39	23.614,11	635,3	775,78	1.614,60	9,33%
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-27.488,17	-35.950,35	-39.764,95	-61.994,02	-63.097	24,77%
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
7	Kas yang dibatasi penggunaannya	2.752,56	2.747,34	1.975,43	10.869,12	775,38	82,27%
	KEWAJIBAN	9.261,20	12.626,65	12.118,21	16.399,66	11.373,16	9,25%
A.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.261,20	12.626,65	12.118,21	16.399,66	11.373,16	9,25%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.800,72	2.905,54	2.148,89	2.020,97	711,08	-23,27%
2	Pendapatan Diterima di Muka	2.106,06	3.078,23	3.217,51	5.277,23	4.731,79	26,09%
3	Utang Belanja	4.354,42	6.642,88	6.751,82	9.101,47	5.930,28	13,54%

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan (%/Tahun)
B.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
	Utang kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-
							-
	EKUITAS	4.497.237,74	4.711.149,42	5.731.532,67	5.853.270,20	5.950.201,38	7,55%
A.	EKUITAS	4.497.237,74	4.711.149,42	5.731.532,67	5.853.270,20	5.950.201,38	7,55%
B.	Surplus/Defisit-LO	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.506.498,95	4.723.776,07	5.743.650,89	5.869.669,86	5.950.201,38	7,49%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, 2025; data diolah

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kota Yogyakarta bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Perkiraan pendapatan daerah disajikan secara indikatif dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat tahun perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

APBD Kota Yogyakarta pada periode tahun 2025-2029 diproyeksikan seperti pada tabel 2.275. Laju kenaikan rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta pada periode tahun 2025-2029 diproyeksikan sebesar 4,25% per tahun, lebih besar dibandingkan tren pada lima tahun ke belakang, yaitu 3,98% per tahun. PAD Kota Yogyakarta diproyeksikan masih didominasi oleh pajak daerah, yaitu mencapai 690 miliar rupiah pada tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 69% dari total PAD Kota Yogyakarta. Pajak daerah sebagai sumber utama PAD diproyeksikan akan naik rata-rata sebesar 3,94% per tahun. Laju kenaikan tersebut turun dibandingkan tren kenaikan pajak daerah pada lima tahun ke belakang sebesar 5,17% per tahun. Sementara sumber PAD dari retribusi daerah diproyeksikan mengalami kenaikan dengan laju rata-rata sebesar 5% per tahun. Proyeksi laju kenaikan retribusi relatif lebih besar dibandingkan pajak daerah. Laju peningkatan retribusi daerah juga meningkat secara signifikan dibandingkan tren pada lima tahun ke belakang yang justru mengalami tren penurunan dengan laju rata-rata sebesar -2,2% per tahun.

Laju kenaikan rata-rata pendapatan transfer pada periode tahun 2025-2029 diproyeksikan sebesar 3,04% per tahun, lebih besar dibandingkan tren pada lima tahun ke belakang, yaitu sebesar 2,68% per tahun. Pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan masih mendominasi pendapat transfer dan juga pendapatan daerah secara keseluruhan, yaitu mencapai 971 miliar rupiah pada tahun 2025. Pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan berkontribusi sebesar 89,44% terhadap pendapatan transfer dan berkontribusi sebesar 46,56% terhadap total pendapatan daerah. Laju peningkatan rata-rata pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar 5,04% per tahun, jauh lebih besar dibandingkan tren pada lima tahun ke belakang, yaitu sebesar 0,22% per tahun. Sementara pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan akan mengalami tren penurunan dengan laju penurunan rata-rata sebesar -22,4% per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan tren pada lima tahun ke belakang, yaitu sebesar 16,33% per tahun.

Belanja daerah Kota Yogyakarta pada periode tahun 2025-2029 diproyeksikan mengalami peningkatan dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 3,12% per tahun, lebih kecil dibandingkan tren pada lima tahun ke belakang, yaitu sebesar 3,26% per tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah, di luar tunjangan guru, paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling

rendah 40% dari total belanja APBD, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Daerah harus menyesuaikan porsi belanja yang telah diatur dalam undang-undang tersebut paling lama pada Januari 2027. Maka dari itu, tantangan utama dalam penganggaran belanja daerah Kota Yogyakarta adalah menurunkan persentase belanja pegawai dan meningkatkan persentase belanja modal. Sebab, pada tahun 2023 persentase realisasi belanja pegawai Kota Yogyakarta terhadap keseluruhan belanja daerah masih pada angka 36,96%. Sementara persentase realisasi belanja modal Kota Yogyakarta masih pada angka 12,76%.

Berdasarkan proyeksi APBD Kota Yogyakarta pada periode tahun 2025-2029, daerah akan selalu mengalami defisit. Namun defisit ini akan mengalami tren penurunan dengan laju rata-rata sebesar -10,52% per tahun. Defisit anggaran diproyeksikan dapat ditutupi melalui penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Secara umum, SiLPA menunjukkan tren yang meningkat. Besarnya penerimaan pembiayaan, melalui SiLPA, memungkinkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan investasi dengan melakukan penyertaan modal. Kota Yogyakarta diproyeksikan akan memiliki pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal daerah dengan tren yang meningkat dengan laju rata-rata sebesar 17,06%, lebih besar dibandingkan tren pada lima tahun ke belakang, yaitu sebesar 10,05% per tahun.

Tabel 2.254 Proyeksi Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2029

Uraian	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.029.431.321	1.038.923.638.543	1.085.664.820.470	1.135.633.061.493	1.181.114.714.568
Pajak Daerah	690.352.270.160	711.800.000.000	743.200.000.000	777.000.000.000	805.750.000.000
Retribusi Daerah	85.145.886.873	89.403.181.217	93.873.340.277	98.567.007.291	103.495.357.656
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.702.267.311	36.300.000.000	37.100.000.000	38.000.000.000	38.700.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	191.829.006.977	201.420.457.326	211.491.480.192	222.066.054.202	233.169.356.912
PENDAPATAN TRANSFER	1.085.735.923.406	1.062.820.973.406	1.113.884.040.450	1.167.500.260.846	1.223.797.292.262
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	971.113.447.880	1.021.261.340.880	1.072.324.407.924	1.125.940.628.320	1.182.237.659.736
Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.622.475.526	41.559.632.526	41.559.632.526	41.559.632.526	41.559.632.526
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.085.765.354.727	2.101.744.611.949	2.199.548.860.920	2.303.133.322.339	2.404.912.006.830
BELANJA					
BELANJA OPERASI	1.891.021.834.648	1.909.932.052.994	1.976.027.685.542	2.044.987.085.166	2.116.946.825.000
BELANJA MODAL	272.871.909.262	275.600.628.355	289.380.659.772	303.849.692.761	319.042.177.399
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
BELANJA TRANSFER	2.063.729.590	1.236.390.757	1.332.962.724	1.437.077.731	1.549.324.948
JUMLAH BELANJA	2.180.957.473.500	2.201.769.072.107	2.281.741.308.039	2.365.273.855.657	2.452.538.327.348
SURPLUS/DEFISIT	(95.192.118.773)	(100.024.460.158)	(82.192.447.119)	(62.140.533.318)	(47.626.320.518)
PEMBIAYAAN DAERAH					

Uraian	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	140.192.118.773	151.365.491.158	121.418.447.119	130.338.706.695	132.110.579.141
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	140.192.118.773	151.365.491.158	121.418.447.119	130.338.706.695	132.110.579.141
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000	51.341.031.000	39.226.000.000	68.198.173.377	84.484.258.623
Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000	51.341.031.000	39.226.000.000	68.198.173.377	84.484.258.623
PEMBIAYAAN NETTO	95.192.118.773	100.024.460.158	82.192.447.119	62.140.533.318	47.626.320.518

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, 2025

2.3. Permasalahan dan isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.1. Belum Tuntasnya Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu terus diupayakan penuntasannya. Belum tuntasnya pengentasan kemiskinan di Kota Yogyakarta tersebut menjadi permasalahan sekaligus tantangan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi sosial, ekonomi, infrastruktur wilayah, dan kebijakan publik. Dengan konteks multidimensi yang berkaitan dengan permasalahan kemiskinan, maka diperlukan upaya bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dengan fokus intervensi sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. Selain itu, perlu pengembangan kebijakan yang tidak hanya fokus melihat penyelesaian kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan akses ke layanan sosial, perbaikan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Secara komparatif, angka kemiskinan di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di tingkat provinsi maupun nasional. Data terakhir tahun 2024 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Yogyakarta sebesar 6,26%, masih jauh di bawah angka kemiskinan DIY sebesar 10,40% atau angka kemiskinan nasional sebesar 8,57%. Meskipun kondisi faktual menunjukkan tren yang semakin membaik selama kurun waktu empat tahun terakhir, namun konteks kemiskinan masih tetap perlu mendapatkan *highlight* prioritas sebagai permasalahan pembangunan yang akan terus diupayakan penyelesaiannya pada periode pembangunan ke depan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan terputusnya rantai kemiskinan melalui berbagai intervensi pembangunan, seperti pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Perhatian utama dalam upaya penyelesaian permasalahan kemiskinan di Kota Yogyakarta ini adalah berkaitan dengan penanganan kemiskinan yang selama ini masih belum optimal. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi di Kota Yogyakarta. Selain itu fakta bahwa standar minimal upah bagi pekerja yang relatif rendah dibandingkan kota besar lain di Indonesia juga memberikan pengaruh, terutama terhadap penduduk yang bekerja pada sektor non-formal.

2.3.1.2. Ketimpangan Pendapatan yang Menghambat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Kota Yogyakarta. Secara konseptual, ketimpangan pendapatan mengindikasikan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara penduduk Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut kemudian berpotensi menimbulkan dampak terusan berupa masalah sosial dan ekonomi di masyarakat.

Nilai indeks gini Kota Yogyakarta tercatat menjadi yang paling tinggi di DIY, bahkan melebihi nilai indeks gini nasional. Sementara itu indeks gini DIY

tercatat merupakan yang paling tinggi dibandingkan wilayah provinsi lain. Artinya, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta yang diukur menggunakan indeks gini terindikasi menjadi yang paling tinggi di Indonesia. Pada tahun 2024, nilai indeks gini Kota Yogyakarta teridentifikasi 0,449 atau masuk dalam kategori moderat, sedangkan DIY 0,435 dan nasional 0,381. Nilai indeks gini tertinggi tercatat pada tahun 2022 mencapai 0,519 yang masuk pada kategori ketimpangan tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa sudah adanya pertumbuhan ekonomi, tetapi belum sepenuhnya inklusif dan masih perlu intervensi kebijakan yang lebih efektif.

Data proporsi penguasaan pendapatan antarkelompok pendapatan semakin memperkuat kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta. Dengan melihat data tahun 2024 pada BPS Kota Yogyakarta yang menunjukkan bahwa pendapatan penduduk pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah sebesar 14,70%, maka masuk dalam kategori kondisi ketimpangan sedang sesuai kategorisasi versi bank dunia. Namun demikian, apabila mengacu pada data tahun 2022 yang menunjukkan bahwa pendapatan penduduk pada 40% Penduduk Berpendapatan Terendah sebesar 11,58%, maka Kota Yogyakarta masuk dalam kategori ketimpangan tinggi.

Kondisi lain yang perlu menjadi perhatian adalah berkaitan dengan peningkatan yang signifikan dari penguasaan pendapatan pada 20% penduduk berpendapatan tertinggi dari 50,24% di tahun 2020 menjadi 52,20% di tahun 2024. Kondisi tersebut berdampak terhadap penurunan proporsi penguasaan pendapatan pada kelompok ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu, tren penurunan persentase penguasaan pendapatan oleh 40% penduduk berpendapatan terendah dan 40% penduduk berpendapatan menengah perlu menjadi kondisi yang ditekankan sebagai pertimbangan dalam perumusan bentuk intervensi dan arah kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta.

Penyelesaian permasalahan ketimpangan pendapatan dilakukan sekaligus dalam rangka memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus didorong ke depan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat pada kategori tertentu, namun dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh kalangan. Sebagai tindak lanjut, maka orientasi pengembangan kebijakan penyelesaian permasalahan kesenjangan tidak hanya terfokus pada upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi bagi kelompok 40% pendapatan terendah tetapi juga peningkatan dan penjagaan kemampuan ekonomi bagi kelompok 40% pendapatan menengah.

2.3.1.3. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi merupakan arah pembangunan sektor kesehatan yang akan terus diupayakan untuk dapat tercapai. Konteks ketercapaian derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat diukur dengan merujuk pada kondisi mortalitas (kematian), morbiditas (kesakitan), status gizi, dan usia harapan hidup. Dengan kata lain, derajat kesehatan yang tinggi terjadi pada saat sebagian besar masyarakat di Kota Yogyakarta memiliki status kesehatan yang baik yang ditandai dengan tingginya harapan hidup, rendahnya angka penyakit, serta kualitas hidup yang lebih baik. Derajat

kesehatan yang tinggi juga mencerminkan terpenuhinya akses yang merata dan berkualitas terhadap layanan kesehatan, perilaku hidup sehat, maupun lingkungan yang mendukung kesejahteraan.

Secara tidak langsung, derajat kesehatan yang belum terpenuhi secara optimal juga akan memberikan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Meskipun usia harapan hidup Kota Yogyakarta terus mengalami tren peningkatan yang positif, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta. Beberapa kondisi yang mencerminkan adanya permasalahan dalam aspek kesehatan, antara lain 1) kematian bayi; 2) kelangsungan hidup bayi; 3) kematian balita; 4) kematian neonatal; 5) prevalensi stunting; 6) tingkat prevalensi tuberkulosis; 7) tingkat kematian karena tuberkulosis; 8) cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; dan 9) proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS.

Angka kematian bayi menunjukkan penurunan dari 11,23 (tahun 2020) menjadi 9,78 (tahun 2024). Di tahun 2020 hingga 2022, angka kematian bayi mencapai kisaran angka 10-11 per 1.000 kelahiran hidup. Indikator angka kelangsungan hidup bayi juga cenderung mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 sebesar 988,777 menjadi 990,22 di tahun 2024. Indikator angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar 1,92 dan di tahun 2024 sebesar 2,79. Indikator angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan peningkatan dari 7,70 (tahun 2020) menjadi 5,12 (tahun 2024). Sementara itu, indikator prevalensi stunting mengalami tren peningkatan dari 11,31% pada tahun 2019 menjadi 11,76% pada tahun 2023. Tren yang cenderung negatif pada beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan kesehatan pada penduduk usia bayi dan balita yang perlu segera mendapatkan intervensi penanganan secara tepat.

Di sisi lain, tingkat prevalensi tuberkulosis tercatat meningkat dari 114,83 pada tahun 2020 menjadi 178,28 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Capaian tersebut juga berkorelasi dengan indikator tingkat kematian karena tuberkulosis yang memiliki tren peningkatan dari 12,58 kematian per 100.000 penduduk di tahun 2020 menjadi 22,13 kematian per 100.000 penduduk di tahun 2024. Indikator lain yang berkaitan dengan tuberkulosis adalah cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang cenderung turun, yaitu dari 78,44% di tahun 2020 menjadi 61,93% di tahun 2024. Penurunan juga terjadi pada proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS dari 71,13% (2020) menjadi 46,75% (2024), meskipun faktanya banyak pasien yang menyelesaikan pengobatan tuberkulosis, namun tidak melakukan pemeriksaan laboratorium (BTA) di akhir pengobatan sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai sembuh.

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan belum tuntasnya upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang kualitas kesehatan masyarakat mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan terkait pola hidup sehat. Selain itu, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif juga masih belum optimal

diberikan sehingga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk meningkatkan pemenuhan derajat kesehatan masyarakat tersebut, maka perlu adanya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan kesehatan.

2.3.1.4. Keterbatasan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Pengarusutamaan gender menjadi salah satu hal yang diupayakan untuk dicapai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Perempuan memiliki peran penting untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Artinya, partisipasi perempuan dalam pembangunan dikatakan baik ketika perempuan terlibat secara aktif, setara, dan signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pelaksanaan program, maupun akses terhadap sumber daya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Selama ini, permasalahan yang terkait dengan masih rendahnya keterlibatan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada beberapa indikator, yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga swasta, keterwakilan perempuan di DPRD, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, dan persentase PKK yang aktif.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan capaian yang relatif rendah, masih jauh dari ketentuan keterwakilan ideal sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, yaitu sebesar 30%. Data partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah tercatat paling tinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 8,44% dan terendah di tahun 2021 sebesar 6,91%. Indikator partisipasi perempuan di lembaga swasta juga mengalami peningkatan dari capaian 44,29% di tahun 2020 menjadi 69,48% pada tahun 2024. Sementara itu, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif juga memiliki capaian yang belum optimal, yaitu berada di kisaran angka 12-17% pada kurun waktu 2020-2024.

Dalam aspek yang lain, jumlah PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sempat mengalami tren yang fluktuatif sebelum 2024, tetapi pada tahun 2023 ke 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah PKK tersebut juga berdampak pada kenaikan jumlah kelompok binaan PKK (dasawisma) dari 4.819 pada tahun 2023 menjadi 5.033 pada tahun 2024.

2.3.1.5. Tantangan dalam Mewujudkan Keluarga Berkualitas Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Keluarga yang berkualitas akan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, pemerintah memiliki andil melalui edukasi serta pemberdayaan masyarakat. Selain meningkatkan kemandirian keluarga, pengendalian penduduk juga menjadi hal yang penting dalam membangun keluarga yang berkualitas karena banyaknya jumlah anggota keluarga akan berdampak pada besar kecilnya

kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan secara tidak langsung mendukung tercapainya keluarga yang berkualitas. Selama ini, pemerintah telah menggalakkan program keluarga berencana dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung upaya pengendalian penduduk. Meskipun program tersebut mampu menekan pertumbuhan penduduk, namun masih terdapat permasalahan yang masih dihadapi ke depan.

Permasalahan belum optimalnya layanan upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perwujudan keluarga berkualitas didasarkan pada beberapa indikator pembangunan yang mengalami tren penurunan ataupun capaian realisasi yang masih rendah. Indikator yang menjadi latar belakang permasalahan, meliputi 1) rasio akseptor KB (rata-rata -1,11% per tahun); 2) angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 (rata-rata -1,03% per tahun); 3) cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (rata-rata 7,35% per tahun); 4) persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (rata-rata -2,85% per tahun); 5) persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (rata-rata 9,33% per tahun); dan 6) cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB cenderung meningkat (rata-rata -0,28% per tahun).

Beberapa faktor penyebab terkait dengan belum optimalnya upaya penerapan keluarga berencana diantaranya adalah banyak penerima KB yang berhenti dan berganti status menjadi Ingin Anak Segera (IAS). Selain itu, terdapat Pasangan Usia Subur yang unmet need dengan jumlah anak 1, namun enggan mengikuti KB karena usianya sudah di atas 40 tahun.

2.3.1.6. Beban Kependudukan yang Semakin Berat bagi Penduduk Usia Produktif

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta diproyeksikan mengalami penurunan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Yogyakarta tercatat sebesar 416.117 jiwa dan menurun di tahun 2024 menjadi 415.605 jiwa. Penurunan jumlah penduduk di Kota Yogyakarta menyebabkan perubahan struktur demografi, yaitu semakin sedikitnya jumlah penduduk usia produktif serta semakin bertambahnya jumlah penduduk usia non produktif. Bahkan, Kota Yogyakarta diproyeksikan akan masuk pada struktur aging population dengan jumlah penduduk lansia yang mengalami peningkatan secara progresif, sementara tingkat kelahiran menunjukkan tren penurunan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan angka ketergantungan yang menggambarkan beban kependudukan. Secara konseptual, semakin tinggi angka ketergantungan penduduk, maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia non produktif.

Peningkatan beban kependudukan di Kota Yogyakarta dapat diukur dari tren meningkatnya angka ketergantungan sebesar 40,91 pada tahun 2020 hingga menjadi 41,15 pada tahun 2024 dengan laju rata-rata kenaikan sebesar 0,15% per tahun. Permasalahan beban kependudukan tersebut perlu

menjadi perhatian karena akan mempengaruhi kualitas dan produktivitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan di masa mendatang.

Dengan semakin besarnya beban kependudukan, maka menjadi tantangan bagi penduduk usia produktif yang berpotensi terjebak dalam konteks *sandwich generation*, yaitu kondisi berada di posisi "terjepit" antara dua tanggung jawab finansial dan emosional, merawat anak-anak selaku generasi penerus serta merawat orang tua yang sudah lanjut usia selaku generasi sebelumnya. Tantangan tersebut bahkan ditambah dengan kebutuhan untuk mendapatkan hunian layak dan terjangkau yang cenderung semakin sulit untuk dapat didapatkan di Kota Yogyakarta. Saat ini, harga tanah dan rumah di Kota Yogyakarta sudah cukup tinggi dan diproyeksikan akan terus meningkat. Selain itu, naik turunnya harga karena barang konsumsi juga menambah beban penduduk usia produktif yang perlu menanggung konsumsi dari penduduk usia non produktif.

Dengan mengacu pada kondisi meningkatnya jumlah lansia yang berpotensi menjadi beban tanggungan bagi penduduk usia produktif, maka perlu dikembangkan pendekatan pembangunan yang menuju pada penerapan konsep lansia produktif yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus hadir melalui intervensi yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan serta pemberdayaan lansia. Salah satu bentuk intervensi yang perlu dimunculkan adalah berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana perkotaan yang ramah lansia. Pada waktu bersamaan, perlu diupayakan intervensi dalam hal pengendalian laju pertumbuhan penduduk untuk mendukung tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas.

2.3.1.7. Kesenjangan antara Kualitas Angkatan Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang ditunjukkan dari tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di atas DIY dan Nasional pada tahun 2020-2024. Tingkat pengangguran terbuka Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan dengan laju rata-rata sebesar -10,8% per tahun. Kendati demikian, angka tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak pandemi Covid-19. Namun, meskipun mengalami penurunan, angka tingkat pengangguran terbuka kota Tingginya tingkat pengangguran terbuka di menjadi indikasi bahwa masih banyak angkatan kerja di Kota Yogyakarta yang belum mendapatkan pekerjaan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu karena angkatan kerja terpaksa tidak bekerja karena belum diterima kerja atau karena ketidaksesuaian kualifikasi keahlian yang dibutuhkan pasar tenaga kerja.

Dalam hal ketidaksesuaian kualifikasi keahlian yang dimiliki oleh penduduk Kota Yogyakarta dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, maka dapat dikaitkan dengan kondisi SDM penduduk Kota Yogyakarta yang berkualitas baik. Kondisi tersebut tercermin dari nilai IPM Kota Yogyakarta yang selalu dalam kategori sangat tinggi selama lima tahun terakhir. Bahkan, apabila ditarik lebih jauh pada periode 10 tahun ke belakang, Kota Yogyakarta secara

berturut-turut menjadi kota dengan nilai IPM tertinggi secara nasional. Tingginya nilai IPM tersebut memberikan gambaran bahwa SDM di Kota Yogyakarta dapat dikatakan memiliki kualitas unggul sehingga memiliki kecenderungan positif terhadap upaya untuk terus meningkatkan produktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta. Namun demikian, keunggulan kualitas SDM penduduk Kota Yogyakarta dapat menjadi permasalahan tersendiri apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai.

Dengan menambahkan konteks angka PDRB per kapita di Kota Yogyakarta yang juga cukup tinggi di atas DIY dan bahkan nasional, maka kombinasi kondisi kualitas SDM yang baik dengan tingginya PDRB per kapita tersebut mengindikasikan gambaran angkatan kerja yang berkualitas serta dalam kondisi kesejahteraan keluarga yang relatif baik. Artinya, angkatan kerja di Kota Yogyakarta dengan jumlah 181.426 terindikasi sebagian besar merupakan angkatan kerja yang berasal dari kelas ekonomi atas. Hal tersebut berdampak terhadap karakter angkatan kerja yang akan lebih selektif terhadap kualifikasi dan gaji dalam memilih lapangan pekerjaan sehingga terindikasi menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, maka dibutuhkan solusi yang berbeda dengan penanganan pengangguran pada umumnya. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih bersifat formal, profesional, atau kreatif.

2.3.1.8. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian di Kota Yogyakarta. Pariwisata juga memiliki *multiplier effect* yang besar bagi sektor lain. Pada masa pandemi covid-19, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai sektor utama pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian Kota Yogyakarta dengan kontribusi 10,97% di tahun 2020. Pada masa pasca covid-19, kontribusi sektor pariwisata di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan menjadi 11,13% di tahun 2021. Angka tersebut lebih besar dari laju pemulihan kontribusi pariwisata di DIY yaitu sebesar 4,04%. Data terakhir tahun 2024 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta sebesar 13,44%. Kontribusi sektor pariwisata tersebut lebih besar dibandingkan nasional sebesar 4,01% dan DIY sebesar 10,6%. Mengacu pada data kontribusi sektor pariwisata sebelum Covid-19 maka besar kontribusi sektor pariwisata Kota Yogyakarta berpotensi untuk terus mengalami peningkatan.

Secara komparatif, kontribusi sektor pariwisata pada PDRB Kota Yogyakarta juga masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kota Surakarta yang memiliki karakteristik sosial budaya serupa dan lokasinya relatif berdekatan. Kontribusi pariwisata di Kota Surakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,52%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Kota Denpasar yang dikenal sebagai pusat

pariwisata internasional, maka capaian Kota Yogyakarta masih jauh di bawahnya. Kontribusi sektor pariwisata di Kota Denpasar pada tahun 2024 tercatat mencapai 25,55% terhadap PDRB.

Pengembangan potensi pariwisata harus memastikan beberapa aspek. Pertama, pengembangan pariwisata harus menjadi akselerator pertumbuhan perekonomian dengan tetap menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Kedua, Kota Yogyakarta harus menetapkan visi kepariwisataan masa depan dengan menjadikan industri pariwisata yang berbasis *quality tourism* (pariwisata berkualitas). Visi pariwisata berkualitas merupakan wujud pemahaman atas kekuatan diri dan juga tantangan masa depan dimana kompetisi layanan wisata akan semakin keras.

Pariwisata berkualitas Kota Yogyakarta memiliki tiga fitur utama, yaitu: (1) belanja wisatawan yang lebih tinggi; (2) meningkatnya serapan layanan dan produk lokal dalam ekonomi wisata; dan (3) bertanggung jawab (responsible) dan berkelanjutan terhadap lingkungan (alam, sosial budaya, dan ekonomi). Dalam implementasinya, peningkatan kualitas SDM pariwisata harus ditingkatkan.

Pengembangan *quality tourism* di Kota Yogyakarta membutuhkan lebih banyak SDM yang memiliki sertifikasi profesi, khususnya bagi pelaku wisata berbasis kewilayahan. Integrasi stakeholder di wilayah seperti kampung wisata dan Pokdarwis, Kelurahan Budaya/Rintisan Kelurahan Budaya, serta Forum UMKM harus dilakukan untuk menjadi motor peningkatan kualitas pariwisata di wilayah. Hal tersebut berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pada desil 1 - 4 sehingga ekonomi pariwisata dapat dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah dan pariwisata dapat berkontribusi dalam penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Lama kunjungan wisata di Kota Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan yang cukup stagnan dengan laju rata-rata sebesar 3,63% per tahun. Lama kunjungan wisata atau Length of Stay (LoS) di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 adalah 1,63 hari dan kemudian meningkat menjadi 1,88 hari pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan dibutuhkannya strategi peningkatan atau penjagaan LoS, dimana tantangan akan bertambah dengan direncanakannya pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen atau Yogyakarta-Solo.

Menurunnya angka LoS juga dapat berpengaruh terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD). Sebab penurunan LoS berpengaruh terhadap spending money wisatawan untuk makan, belanja, dan menginap sehingga dapat menyebabkan turunnya pendapatan perhotelan dan restoran. Padahal PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2024 mencapai 67,3% berasal dari pajak daerah dan 52,52% pajak daerah bersumber dari Pajak Hotel (35,64%) serta Pajak Restoran (15,81%).

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, diproyeksikan keuangan daerah Kota Yogyakarta mengalami defisit sepanjang lima tahun ke depan. Untuk mengatasi defisit keuangan di Kota Yogyakarta, diperlukan peningkatan PAD dengan laju yang melebihi skenario

business as usual. Namun, upaya tersebut akan terkendala jika LoS terus mengalami penurunan dan spending money wisatawan masih rendah.

Tantangan lain dalam peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berasal dari Sektor Akomodasi dan Makan Minum adalah keterbatasan ruang di Kota Yogyakarta. Pertumbuhan sektor tersebut memerlukan ruang yang cukup dalam konteks pembangunan hotel, restoran, dan ruang parkir. Maka dari itu perlu sinergi antara aspek penataan ruang dengan aspek investasi (terkait akomodasi dan makan minum), sehingga keduanya dapat berjalan efektif tanpa memberikan dampak negatif antara satu sama lain.

2.3.1.9. Penurunan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan yang Menghambat Diversifikasi Ekonomi

Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan menjadi fokus utama dalam RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045 sebagai bagian dari amanat yang tertuang di RPJP Nasional maupun RPJPD DIY. Faktanya, kontribusi sektor industri pengolahan di Kota Yogyakarta justru cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Kota Yogyakarta adalah sebesar 13,01% dan kemudian turun menjadi 12,02% pada tahun 2024. Selain itu, indikator laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan menunjukkan tren pada tahun 2020-2024 sebesar -1,96%. Kendati demikian, laju pertumbuhan tersebut sudah mengalami peningkatan cukup signifikan sejak pandemi Covid-19 di tahun 2021 yang sempat mengalami laju penurunan sebesar -3,20%.

Adanya keterbatasan lahan dalam pengembangan sektor industri pengolahan menjadi salah satu pengaruh dalam penurunan kontribusi sektor tersebut dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Lahan yang terbatas di Kota Yogyakarta dan penggunaan lahan yang sebagian besar (>60%) peruntukannya untuk permukiman menyulitkan industri untuk melakukan *upscaling* terhadap usahanya. Hal ini menjadi dasar bahwa pengembangan industri menengah dan besar tidak menjadi fokus utama di Kota Yogyakarta. Fokus utama pengembangan industri pengolahan di Kota Yogyakarta adalah industri mikro dan kecil.

Pengembangan sektor industri pengolahan perlu menjadi perhatian karena kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi, terutama pada kelompok pendapatan terendah dan menengah. Industri pengolahan di Kota Yogyakarta didominasi oleh industri mikro dan kecil. Pertumbuhan industri mikro dan kecil di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dengan laju penurunan rata-rata sebesar -62,64% per tahun. Pada tahun 2020 pertumbuhan industri mikro dan kecil di Kota Yogyakarta sebesar 52,87% kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 1,03%.

Hal ini dapat ditunjukkan melalui jumlah usaha mikro dan kecil mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke 2024 dengan laju penurunan rata-rata sebesar -17,36% per tahun. Pada tahun 2020 jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta sebanyak 14.654 usaha dan kemudian turun menjadi 6.835 usaha pada tahun 2024.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas industri mikro dan kecil di Kota Yogyakarta, maka salah satu lembaga yang dapat dioptimalkan fungsinya adalah lembaga koperasi. Koperasi menjadi salah satu lembaga yang berpotensi dioptimalkan perannya sebagai pendorong produktivitas industri mikro dan kecil untuk berkembang, terutama dalam hal permodalan. Maka dari itu, perlu adanya kolaborasi antara pengembangan industri pengolahan dan pengembangan koperasi. Namun demikian, sejauh ini koperasi di Kota Yogyakarta masih belum secara optimal berkembang ditinjau dari indikator rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB di Kota Yogyakarta yang masih berkisar di bawah angka 1% selama periode 2020-2024. Pada tahun 2024 rasio tersebut sebesar 0,8. Bahkan, jika dilihat dari capaian volume usaha dan sisa usaha, selama periode tahun 2020-2024 total capaian volume dan sisa hasil usaha cenderung mengalami penurunan dari 489,5 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 416,7 miliar rupiah pada tahun 2024 dengan laju penurunan rata-rata per tahun sebesar -3,95%. Maka dari itu, perlu dilakukan pengembangan koperasi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan pengembangan industri pengolahan khususnya skala mikro dan kecil.

2.3.1.10. Tantangan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta

Ketahanan pangan menjadi tantangan yang dihadapi Kota Yogyakarta mengingat Kota Yogyakarta bukan daerah agraris yang dapat memenuhi kebutuhan pangan melalui sektor pertaniannya sendiri. Kondisi keterbatasan tersebut ditunjukkan melalui penurunan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian dari sebesar 49,76 ribu rupiah/jiwa pada tahun 2019 menjadi 25,47 ribu rupiah/jiwa pada tahun 2023 dengan laju penurunan rata-rata sebesar -15,42% per tahun. Penurunan produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian menjadi suatu karakteristik kawasan perkotaan yang perekonomiannya lebih banyak bergerak pada sektor industri atau jasa. Maka dari itu, Kota Yogyakarta sebagai kawasan perkotaan perlu memasok kebutuhan pangan dari luar wilayah Kota Yogyakarta.

Selain itu, kondisi ketahanan pangan di Kota Yogyakarta juga dapat dipotret melalui dua indikator yaitu ketersediaan pangan utama. Indikator ketersediaan pangan utama Kota Yogyakarta tercatat mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 142,19 menjadi 130,28 pada tahun 2023, dengan laju penurunan rata-rata sebesar -27,10% per tahun. Kondisi penurunan ketersediaan pangan utama tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah sebagai bagian dari evaluasi danantisipasi terhadap adanya potensi negatif yang muncul sebagai dampak terusan. Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah pandemi Covid-19 yang memberikan dampak negatif terhadap perekonomian maupun tatanan kehidupan masyarakat secara umum.

Penurunan kinerja pada dua indikator ketahanan pangan tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menghadapi permasalahan ketahanan pangan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang sulit untuk memenuhi kebutuhan energi 2.745 kalori per hari. Ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan yang harus diselesaikan dan dimitigasi secara tepat, khususnya dalam kondisi tingkat inflasi Kota

Yogyakarta yang relatif fluktuatif terutama pada komoditas pangan. Tantangan pengendalian terhadap peningkatan harga akan bertambah seiring dengan peningkatan *demand* pada komoditas pangan di hari besar keagamaan dan peak season pariwisata di mana konsumen pangan bertambah dengan hadirnya wisatawan. Dampaknya, inflasi yang terjadi dapat menyebabkan harga pangan menjadi naik dan menurunkan daya beli pangan berkualitas pada masyarakat desil 1-4. Pada kondisi tersebut, maka strategi perlindungan pada masyarakat desil 1-4 dari dampak inflasi harus dilakukan secara tepat.

Strategi penjagaan tingkat konsumsi masyarakat menengah ke bawah dapat dilakukan melalui pengembangan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga. Sebagai daerah bukan penghasil dan komoditas pangan sering menjadi penyumbang inflasi, Kota Yogyakarta harus memperpendek rantai pasok distribusi komoditas untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya pangan, dan memastikan kualitas produk yang lebih baik yang beredar di pasar Kota Yogyakarta. Kerja sama antardaerah (*g to g*) yang ditindaklanjuti dengan kerja sama bisnis (*b to b*) dapat diperluas bagi komoditas lain. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan tindaklanjut dari kerja sama tersebut. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan mendukung pasar tradisional atau komunitas agar terhubung langsung dengan petani dan produsen dari luar wilayah Kota Yogyakarta, sehingga bisa menjaga stabilitas harga dan aksesibilitas produk bagi masyarakat menengah ke bawah.

2.3.1.11. Menurunnya Kualitas Lingkungan Perkotaan

Kondisi penurunan kualitas lingkungan perkotaan di wilayah Kota Yogyakarta tergambar dari kecenderungan tren nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang menurun cukup signifikan pada periode tahun 2022-2023, dari sebesar 60,89% pada tahun 2022 menjadi 52,05% pada tahun 2023, baru kemudian meningkat kembali menjadi 55,53% pada tahun 2024. Laju pertumbuhan rata-rata per tahun juga mengalami penurunan sebesar -0,05%. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang berdampak terhadap semakin meningkatnya risiko lingkungan serta kesehatan bagi masyarakat.

Dengan melihat lebih detail terhadap dimensi yang digunakan untuk menghitung nilai IKLH, maka teridentifikasi bahwa baik kualitas air, kualitas udara maupun kualitas tutupan lahan di Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan, terutama pada periode tahun 2022 hingga 2023. Indeks kualitas air pada periode tahun 2022-2023 menurun dari 38,54 menjadi 28,91, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang mengalami penurunan dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar -4,16%. Sementara itu, indeks kualitas udara pada periode yang sama turun dari 90,74 menjadi 84,95, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,62%. Sedangkan indeks kualitas tutupan lahan turun dari 44,06 menjadi 30,93, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -8,38%. Ketiga

indeks ini sama-sama mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 meskipun angkanya tidak sebesar sebelum tahun 2023.

Terjadinya penurunan indeks kualitas air mengindikasikan peningkatan terhadap kejadian pencemaran air yang dapat berasal dari limbah rumah tangga, limbah kegiatan industri, maupun pencemaran bahan kimia di sungai atau air tanah. Sementara itu, penurunan nilai indeks kualitas udara mengindikasikan terjadinya peningkatan polusi udara yang dapat berasal dari kendaraan bermotor maupun aktivitas kegiatan industri di wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan penurunan indeks kualitas tutupan lahan mengindikasikan terjadinya degradasi lahan yang salah satunya tergambar pada terbatasnya kawasan RTH publik di Kota Yogyakarta.

Dalam konteks lain, penurunan kualitas lingkungan perkotaan juga dapat dilihat dari kondisi faktual terkait permasalahan krusial pengelolaan sampah. Dengan tingkat ketergantungan yang masih relatif tinggi terhadap operasional TPA yang berada di wilayah kabupaten lain, maka apabila TPA berhenti beroperasi dalam waktu tertentu, masyarakat Kota Yogyakarta mengalami kesulitan untuk membuang sampah. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di banyak sudut wilayah sehingga memiliki potensi dampak negatif terhadap kondisi lingkungan.

Berbagai kondisi penurunan kualitas lingkungan perkotaan akan sangat berpotensi memberikan dampak terusan yang mengancam terwujudnya pembangunan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penyelesaian permasalahan yang berbasis pada upaya integrasi dan kolaborasi sehingga dapat diselesaikan secara komprehensif. Dengan demikian, permasalahan kualitas lingkungan perkotaan dapat segera tertangani sebelum memberikan implikasi lebih jauh terhadap penurunan kualitas kesehatan penduduk atau bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta.

2.3.1.12. Belum Terpenuhinya Luasan RTH Publik Perkotaan

Luas RTH Publik Kota Yogyakarta masih belum memenuhi target 20% dari luas administrasi sesuai yang diprasyaratkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Data tahun 2024 menunjukkan, bahwa RTH Publik di Kota Yogyakarta masih berada pada angka 8,06% pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang mengalami penurunan sebesar -0,15% sejak tahun 2020. Permasalahan tersebut muncul salah satunya muncul karena keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Namun demikian, sejauh ini Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengupayakan penambahan RTH Publik dengan pola pengembangan RTH pada skala lingkungan, baik skala kelurahan, RW maupun kampung.

Program pengembangan RTH Publik selama ini difokuskan pada pelaksanaan beberapa program kegiatan terkait, antara lain melalui penataan dan revitalisasi, pembelian lahan baru untuk RTH Publik, pembangunan taman turus jalan, pembangunan biopori dan sumur resapan, pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik, serta penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah fungsi. Sementara, dalam hal pengembangan RTH Privat, maka pengembangannya difokuskan pada optimalisasi lahan pekarangan milik

masyarakat/swasta, institusi tertentu, dan/atau milik pemerintah setempat, dengan beberapa inovasi tambahan seperti instalasi RTH taman pada atap bangunan (roof garden).

Keterbatasan RTH publik dapat berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat perkotaan. RTH berfungsi sebagai paru-paru kota, penyedia ruang rekreasi, serta tempat interaksi sosial yang penting bagi masyarakat. Kurangnya RTH juga mengurangi kesempatan warga untuk beraktivitas fisik di luar ruangan. Selain itu, RTH juga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon dan pengurangan efek panas kota. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penyediaan dan pengelolaan RTH publik harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan kota yang berkelanjutan. Peran serta masyarakat, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan sehat.

2.3.1.13. Belum Tuntasnya Penanganan Kawasan Kumuh serta Pemenuhan Penyediaan Hunian Layak dan Terjangkau

Urbanisasi yang terus meningkat telah menyebabkan permintaan hunian yang tinggi, sementara penyediaan rumah terjangkau dan layak masih terbatas. Beberapa kawasan di Kota Yogyakarta, terutama di daerah padat dan kumuh, mengalami permasalahan serius terkait kualitas hunian, termasuk permasalahan sanitasi, akses terbatas terhadap infrastruktur dasar, serta kondisi rumah yang tidak layak huni. Selain itu, kondisi permukiman kumuh yang belum sepenuhnya teratasi juga menambah tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota.

Berdasarkan UN-Habitat, permukiman kumuh adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap di kawasan kota yang memiliki satu atau beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut seperti rumah yang secara permanen dapat melindungi dari kondisi iklim yang ekstrem, pembagian ruangan lebih dari 3 orang dalam satu ruang yang sama, kesulitan akses air, dan akses sanitasi yang tidak tercukupi. Indikator pada permasalahan pengelolaan kualitas permukiman perkotaan yang masih belum optimal, antara lain luas kawasan kumuh, rasio permukiman layak huni dan persentase luasan permukiman kumuh tertangani.

Pengelolaan kualitas permukiman perkotaan serta penyediaan hunian yang layak dan terjangkau perlu menjadi perhatian untuk terus diupayakan dalam kurun waktu ke depan. Upaya untuk memperbaiki kondisi ini memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk pengembangan kebijakan perumahan yang lebih inklusif, peningkatan kualitas infrastruktur, serta renovasi atau rehabilitasi kawasan kumuh secara berkelanjutan. Pembangunan hunian yang terjangkau dan berkualitas harus menjadi prioritas dengan melibatkan berbagai pihak serta adanya program pemetaan dan penilaian yang efektif untuk mengidentifikasi kawasan kumuh dan merancang intervensi yang tepat. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan masalah penyediaan hunian layak dan terjangkau, serta kondisi kawasan kumuh

dapat diatasi secara lebih menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta.

2.3.2. Isu Lingkungan Dinamis

Dalam konteks pembangunan Kota Yogyakarta ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dinamika internal wilayah, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan dan perkembangan di tingkat global, nasional, dan regional. Lingkungan eksternal yang dinamis membawa dampak yang kompleks terhadap arah pembangunan kota, baik dalam bentuk peluang maupun risiko.

Pada skala global, perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi dunia, serta dinamika geopolitik global berpotensi memberikan pengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan perkotaan. Di tingkat nasional, Kota Yogyakarta diharapkan berperan aktif dalam mendukung pencapaian program-program prioritas nasional sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. Sedangkan di tingkat regional, konteks keistimewaan DIY memberikan peranan penting bagi Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi dalam menjaga keberlanjutan dalam hal tata ruang, pelestarian budaya, maupun ketahanan lingkungan.

Memahami dinamika eksternal ini menjadi landasan penting dalam merumuskan isu-isu strategis pembangunan. Oleh karena itu, identifikasi isu lingkungan dinamis berikut dikategorikan dalam tiga tingkatan, meliputi isu global, isu nasional, dan isu regional.

2.3.2.1. Isu Global

Dalam menghadapi era global yang penuh ketidakpastian, Kota Yogyakarta perlu memahami berbagai dinamika eksternal yang memiliki potensi besar mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Berbagai risiko global yang berpotensi terjadi menunjukkan adanya tekanan besar terhadap stabilitas kondisi kehidupan perkotaan secara global, termasuk kota Yogyakarta.

2.3.2.1.1. Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global paling mendesak, sebagaimana ditegaskan dalam *Global Risks Report 2025* dan secara hukum internasional diatur dalam *Paris Agreement 2015*. Perubahan iklim ditandai dengan kenaikan suhu bumi, perubahan pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi. Laporan IPCC (*Sixth Assessment Report, 2021–2022*) memperkuat bukti bahwa intensitas perubahan iklim semakin cepat, dengan dampak yang menyebar di seluruh aspek ekosistem dan kehidupan manusia. Di Indonesia, data BMKG menunjukkan kenaikan suhu rata-rata dan perubahan pola musim yang signifikan, memperbesar risiko bencana hidrometeorologi di kawasan perkotaan.

Di Kota Yogyakarta, perubahan iklim terpantau dalam bentuk peningkatan intensitas hujan dalam waktu singkat, musim kemarau yang lebih panjang, kenaikan suhu udara, serta penurunan kualitas dan kuantitas air tanah. Hal

ini meningkatkan risiko banjir, memperburuk kondisi permukiman padat, mengancam keberlanjutan kawasan heritage, dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta produktivitas ekonomi. Sektor-sektor kunci seperti pariwisata, pendidikan, dan jasa turut mengalami tekanan akibat ketidakpastian iklim ini.

Ketahanan kota menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Integrasi kebijakan pada seluruh aspek pembangunan kota dengan prinsip adaptasi dan mitigasi iklim menjadi keharusan, termasuk dalam rangka konservasi ruang hijau, pengelolaan air berkelanjutan, transisi energi bersih, serta penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana. Tanpa pembangunan berbasis ketahanan iklim, risiko sosial-ekonomi, degradasi lingkungan, dan kerusakan warisan budaya kota berpotensi akan semakin meningkat di masa depan.

Perubahan iklim tetap menjadi ancaman utama jangka panjang di tingkat global, dengan fenomena semakin meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, perubahan pola musim, kenaikan suhu, dan kenaikan muka air laut. Kota-kota di seluruh dunia menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan badai. Dalam konteks Kota Yogyakarta, perubahan iklim menyebabkan terjadinya peningkatan kerentanan terhadap bencana banjir, terutama pada kawasan di sepanjang bantaran sungai. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada penurunan cadangan air tanah, peningkatan penyebaran penyakit menular yang bersifat musiman, serta ancaman terhadap kelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya yang sensitif terhadap fenomena perubahan iklim.

2.3.2.1.2. Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)

Pembangunan perkotaan di abad ke-21 tidak dapat dipisahkan dari komitmen global yang telah disepakati oleh komunitas internasional, khususnya melalui adopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *New Urban Agenda* (NUA). Keduanya merupakan bagian integral dari upaya membangun masa depan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan. SDGs menetapkan kerangka kerja makro pembangunan berkelanjutan lintas sektor hingga tahun 2030, sedangkan NUA memperjelas implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat kota dan kawasan perkotaan. Dalam konteks ini, Kota Yogyakarta tidak dapat mengabaikan pentingnya integrasi prinsip-prinsip SDGs dan NUA dalam seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan ke depan.

SDGs mengusung 17 tujuan dan 169 target yang mencakup penghapusan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan penguatan institusi. Secara khusus, tujuan 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) menjadi sangat relevan bagi Kota Yogyakarta, yang harus memastikan terciptanya ruang hidup yang aman, inklusif, layak huni, serta berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Selain itu, Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 6 (Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi), dan Tujuan 10 (Mengurangi Ketimpangan) menjadi dimensi penting dalam konteks tantangan pembangunan perkotaan di Kota Yogyakarta. Dengan batas waktu

pencapaian tahun 2030, Kota Yogyakarta dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mempercepat integrasi nilai-nilai SDGs ke dalam kebijakan pembangunan ke depan pada setiap sektor yang relevan.

Sementara itu, *New Urban Agenda* (NUA) sebagai hasil Konferensi Habitat III PBB tahun 2016 memberikan penekanan spesifik pada bagaimana kota-kota harus dirancang, dibangun, serta dikelola untuk mendukung pencapaian SDGs. NUA menekankan prinsip hak atas kota, yaitu bahwa ruang kota harus tersedia, diakses, dan dimanfaatkan oleh seluruh warga tanpa diskriminasi atau kota yang inklusif. Agenda ini juga menegaskan pentingnya tata kelola kota yang partisipatif dan inklusif, pengelolaan ruang publik yang adil, integrasi fungsi sosial-ekonomi-lingkungan dalam perencanaan kota, serta penguatan ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dalam konteks Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang terus mengalami perkembangan secara spasial dan fungsional, [urbanisasi](#), dan [peningkatan mobilitas antarwilayah](#), penerapan prinsip NUA menjadi tantangan krusial. Kota Yogyakarta tidak hanya perlu mengelola tekanan pembangunan [urbanisasi](#) di dalam kota, tetapi juga harus mengkoordinasikan pertumbuhan kawasan lintas wilayah [sekitar](#) secara terpadu agar tidak memicu ketimpangan spasial, degradasi lingkungan, atau fragmentasi sosial.

Dengan waktu yang semakin terbatas menuju tahun 2030, urgensi untuk mempercepat adopsi prinsip-prinsip SDGs dan NUA dalam pembangunan Kota Yogyakarta menjadi semakin penting. Tanpa adanya komitmen kuat dan terukur dalam menerjemahkan agenda global ini ke dalam kebijakan lokal untuk pembangunan ke depan, Kota Yogyakarta berisiko menghadapi tantangan serius seperti ketidakmerataan pembangunan, degradasi kualitas lingkungan hidup, krisis identitas budaya, serta melemahnya daya saing kota di tingkat nasional dan global. Oleh karena itu, penguatan komitmen [politik](#), [reformasi tata kelola kota](#), [pemberdayaan masyarakat](#), serta [inovasi](#) dalam pengelolaan ruang dan sumber daya menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Kota [visi](#) Yogyakarta yang [sebagai kota](#) berkelanjutan, inklusif, tangguh, dan berdaya saing di masa depan.

2.3.2.1.3. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global

Ketidakpastian ekonomi global merupakan kondisi ketika arah dan stabilitas perekonomian dunia sulit diprediksi akibat interaksi kompleks antara faktor geopolitik, dinamika pasar internasional, krisis energi, serta disrupsi rantai pasok. Dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpastian ini semakin meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan antarnegara, konflik bersenjata di berbagai kawasan, serta perubahan kebijakan ekonomi proteksionis dari negara-negara besar. Salah satu contoh signifikan adalah konflik yang terjadi di Eropa Timur, yang berdampak luas terhadap pasokan energi, stabilitas harga pangan, dan perdagangan global. Selain itu, ketegangan dagang yang terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam bentuk saling menaikkan tarif dan pembatasan teknologi menjadi simbol dari *geo-economic confrontation* yang kian terbuka, di mana masing-masing negara mencoba memproteksi ekonomi dalam negerinya dari pengaruh eksternal.

Di kawasan Asia Tenggara, tensi geopolitik di Laut Cina Selatan menunjukkan tren peningkatan dan dapat berdampak pada stabilitas kawasan, termasuk Indonesia. Ketegangan ini tidak hanya memicu ketidakpastian politik dan keamanan regional, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap jalur pelayaran internasional dan stabilitas hubungan dagang antarnegara. Di sisi lain, berbagai peristiwa seperti fluktuasi tajam harga komoditas global, inflasi internasional akibat krisis pasokan pasca pandemi, hingga ancaman resesi di negara-negara maju semakin memperbesar kompleksitas tantangan ekonomi global. Semua kondisi ini saling terkait dan berkontribusi terhadap suasana ekonomi yang tidak stabil dan sulit diprediksi, termasuk di tingkat domestik dan lokal.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, yang memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, jasa pendidikan, dan ekonomi kreatif, ketidakpastian ekonomi global dapat memunculkan sejumlah risiko strategis. Penurunan minat perjalanan internasional, pembatasan perdagangan barang kreatif, dan perlambatan investasi akibat kehati-hatian pelaku ekonomi dapat secara langsung menekan pertumbuhan sektor unggulan kota. Selain itu, potensi naiknya harga bahan baku impor, terbatasnya pasokan logistik, serta perubahan preferensi konsumsi masyarakat akibat tekanan inflasi global juga dapat menimbulkan dampak sosial-ekonomi di tingkat rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Ketergantungan terhadap mobilitas dan arus barang lintas wilayah menjadikan Yogyakarta rentan terhadap gangguan ekonomi eksternal, yang jika tidak diantisipasi sejak awal, berisiko memperbesar ketimpangan dan menurunkan daya saing kota di tingkat nasional maupun regional.

2.3.2.1.4. Disrupsi Informasi, Polarisasi Sosial, dan Ketimpangan yang Meningkat

Salah satu isu utama yang disoroti dalam *Global Risks Report 2025* dari World Economic Forum adalah meningkatnya risiko terkait polarisasi sosial dan penyebaran misinformasi yang meluas di berbagai belahan dunia. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengakses, menyebarkan, dan mempercayai informasi. Namun, kecepatan disrupsi teknologi ini tidak selalu diiringi dengan kesiapan masyarakat dalam membedakan informasi yang kredibel dan hoaks. Ketidaksiapan literasi digital inilah yang menyebabkan ruang publik, terutama media sosial, menjadi arena yang sangat rentan terhadap konflik narasi, disinformasi terorganisir, hingga terpolarisasinya opini masyarakat dalam berbagai isu politik, agama, dan identitas.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat global, tetapi juga sangat relevan di Indonesia. Beberapa peristiwa politik nasional seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dalam satu dekade terakhir menunjukkan pola peningkatan ketegangan sosial yang muncul dari perbedaan pilihan politik. Polarisasi ini diperkuat oleh penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dan mobilisasi dukungan yang sering kali bersifat antagonistik antar kelompok. Serangan verbal, penyebaran ujaran kebencian, dan kampanye berbasis misinformasi menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan, karena tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi,

tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kota Yogyakarta, sebagai kota pendidikan dan pusat budaya yang terbuka, juga berpotensi terpapar oleh dinamika tersebut. Terlebih lagi, dengan tingkat penetrasi internet yang cenderung tinggi, masyarakat Kota Yogyakarta menjadi kelompok pengguna aktif media sosial yang sangat mungkin terdampak oleh konten-konten provokatif dan narasi yang memecah belah. Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi, dan layanan publik di dalam kota juga berpotensi memperbesar jarak sosial antar kelompok masyarakat. Jika tidak diantisipasi, kombinasi antara disinformasi, polarisasi sosial, dan ketimpangan ini dapat melemahkan kohesi sosial, menciptakan ketegangan antar komunitas, serta memperburuk stabilitas sosial dan tata kehidupan perkotaan di Yogyakarta.

2.3.2.2. Isu Nasional

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan strategis di berbagai sektor, mulai dari transformasi pembangunan berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, hingga peningkatan daya saing pariwisata dan ketahanan sosial-ekonomi. Kota Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya, pendidikan, dan pariwisata nasional, memiliki posisi strategis dalam dinamika pembangunan nasional tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu nasional yang berdampak pada Kota Yogyakarta menjadi penting sebagai dasar dalam perumusan arah pembangunan kota ke depan.

2.3.2.2.1. Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan

Transisi menuju pembangunan rendah karbon dan kota berketahanan lingkungan merupakan salah satu konsep utama dalam pembangunan global dan nasional. Kota rendah emisi mengacu pada pengelolaan wilayah perkotaan yang menurunkan emisi gas rumah kaca melalui efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Konsep ini menjadi respons terhadap meningkatnya ancaman perubahan iklim global, degradasi lingkungan, serta krisis kualitas hidup di kawasan urban. Dalam konteks global, upaya transisi ini berakar pada komitmen internasional seperti Paris Agreement, yang juga diadopsi oleh Indonesia melalui berbagai kebijakan nasional.

Secara nasional, RPJMN 2025–2029 menegaskan target penurunan emisi nasional, integrasi pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan wilayah, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup kota-kota besar. Data BPS 2023 menunjukkan peningkatan kontribusi sektor energi dan transportasi terhadap emisi karbon nasional, mempertegas kebutuhan transformasi kota-kota menjadi lebih hijau. Isu ini menjadi semakin mendesak mengingat pertumbuhan populasi urban Indonesia yang diproyeksikan mencapai 67,1% pada tahun 2035, sehingga tekanan terhadap daya dukung lingkungan semakin besar.

Bagi Kota Yogyakarta, transisi menuju kota rendah emisi menjadi penting dalam mengantisipasi peningkatan suhu kota, penurunan kualitas udara, serta keterbatasan ruang hijau yang mendukung ketahanan iklim. Sebagai kota dengan intensitas mobilitas tinggi dan ruang perkotaan yang padat, tantangan pengelolaan lingkungan hidup urban menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, tingginya tingkat kesadaran masyarakat, adanya komunitas lingkungan yang aktif, serta dorongan inovasi sektor swasta membuka peluang bagi Yogyakarta untuk menjadi model transisi kota rendah emisi di tingkat nasional.

2.3.2.2.2. *Ketimpangan Akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya di Perkotaan*

Akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, dan ruang budaya inklusif merupakan fondasi dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Konsep ketimpangan akses merujuk pada kesenjangan antarwilayah, antarkelompok sosial, atau antar lapisan ekonomi dalam memperoleh layanan dasar tersebut. Dalam literatur pembangunan, kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada rendahnya produktivitas nasional, tetapi juga memperbesar ketidaksetaraan sosial dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Di tingkat nasional, meskipun berbagai capaian pembangunan manusia menunjukkan perbaikan, ketimpangan masih menjadi isu strategis. Data BPS 2023 menunjukkan bahwa indeks ketimpangan pendidikan nasional tetap tinggi, dengan disparitas layanan pendidikan dan kesehatan yang signifikan antar provinsi dan antar kabupaten/kota. RPJMN 2025–2029 menekankan peningkatan kualitas layanan dasar dan pengurangan ketimpangan layanan antarwilayah sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan dan budaya nasional, tantangan ketimpangan akses tetap hadir meskipun agregat indikator pembangunannya tergolong tinggi. Perbedaan akses terhadap layanan pendidikan unggul, fasilitas kesehatan preventif, serta ruang-ruang ekspresi budaya antara kawasan pusat dan pinggiran kota memperlihatkan adanya potensi ketimpangan dalam skala kota. Dinamika urbanisasi yang cepat dan perubahan demografi kota memperbesar risiko peningkatan beban layanan, sehingga penanganan ketimpangan ini menjadi penting untuk menjaga inklusivitas pembangunan Yogyakarta.

2.3.2.2.3. *Kerentanan Ketahanan Sosial-Ekonomi terhadap Krisis Pangan dan Risiko Bencana*

Ketahanan sosial-ekonomi mencerminkan kemampuan suatu komunitas atau kota untuk mempertahankan fungsi sosial dan ekonomi dasar di tengah tekanan krisis, termasuk krisis pangan dan bencana alam. Kerentanan terhadap ketahanan ini muncul ketika suatu wilayah bergantung pada faktor eksternal untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau ketika struktur sosial-ekonominya lemah dalam menghadapi shock eksternal. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, penguatan ketahanan sosial-ekonomi menjadi

kunci untuk memastikan stabilitas jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.

Secara nasional, RPJMN 2025–2029 menargetkan penguatan ketahanan pangan, percepatan pengurangan risiko bencana, serta pengembangan sistem sosial-ekonomi yang lebih adaptif terhadap perubahan global dan iklim. Data dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) menunjukkan bahwa indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah urban yang sangat bergantung pada distribusi pangan eksternal. Selain itu, BNPB mencatat lebih dari separuh kota-kota besar Indonesia, termasuk Yogyakarta, memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, terutama gempa bumi dan erupsi vulkanik.

Kota Yogyakarta, dengan ketergantungannya pada pasokan pangan dari wilayah sekitarnya dan lokasinya di jalur gempa serta dekat dengan Gunung Merapi, menghadapi kerentanan ganda terhadap krisis pangan dan bencana. Tekanan terhadap sistem distribusi pangan nasional atau terjadinya bencana besar dapat berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi kota. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan ke depan, penguatan ketahanan sosial-ekonomi menjadi isu yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan perkotaan Yogyakarta.

2.3.2.2.4. Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional

Pariwisata berbasis budaya merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang menekankan pada keberlanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan komunitas lokal. Pariwisata budaya tidak hanya berkontribusi pada pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat identitas nasional dan diplomasi budaya global. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor pariwisata budaya dipandang sebagai sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

RPJMN 2025–2029 menetapkan penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas nasional, dengan target kontribusi terhadap PDB mencapai 5,5% pada 2029. Data Kemenparekraf menunjukkan adanya tren pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang didorong oleh peningkatan minat terhadap destinasi budaya autentik. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Borobudur–Yogyakarta–Prambanan menjadi fokus pengembangan pariwisata nasional yang berbasis pada pelestarian nilai budaya dan warisan dunia.

Kota Yogyakarta, sebagai pusat budaya dan pendidikan nasional, berada dalam posisi strategis untuk mengambil peran utama dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya tersebut. Keberadaan Kraton Yogyakarta, kawasan heritage seperti Kotagede dan Kotabaru, serta kekayaan tradisi seni-budaya memberikan keunggulan kompetitif yang sulit disaingi. Namun demikian, tantangan terkait keberlanjutan pariwisata, kualitas layanan, dan pelestarian budaya di tengah dinamika pariwisata massal perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kota ke depan.

2.3.2.2.5. Peran Kota Yogyakarta dalam Mendukung Pencapaian Program Prioritas Nasional

Program prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 seperti penghapusan kemiskinan ekstrem, transformasi digital, program makan bergizi gratis, dan cek kesehatan gratis, mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan cepat. Konsep ini menekankan pentingnya peran daerah dalam mengakselerasi pencapaian target-target nasional melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi lokal.

Secara nasional, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026, digitalisasi 80% layanan publik pada 2029, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan dasar secara universal. Data BPS menunjukkan bahwa hingga 2023, angka kemiskinan ekstrem nasional masih berada di sekitar 1,5%, dengan variasi antarwilayah yang cukup tinggi. Transformasi digital juga masih menghadapi tantangan infrastruktur dan literasi digital di berbagai daerah.

Sebagai kota dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang relatif tinggi, serta basis ekonomi kreatif yang kuat, Kota Yogyakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam mendukung pencapaian program-program nasional tersebut. Dengan karakteristik masyarakat urban yang progresif dan jaringan komunitas yang aktif, Yogyakarta dapat menjadi contoh implementasi program nasional berbasis kekuatan lokal yang adaptif dan inovatif.

2.3.2.3. Isu Regional

Selain dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, pembangunan Kota Yogyakarta juga sangat terkait dengan perkembangan kebijakan, fenomena, dan agenda strategis di tingkat regional, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berbagai kebijakan kewilayahan, status warisan dunia, hingga dinamika pembangunan sosial-ekonomi di DIY menjadi faktor penting yang membentuk peluang, tantangan, dan risiko bagi Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu-isu strategis regional menjadi krusial dalam merumuskan arah pembangunan kota yang sinkron dengan konteks keistimewaan daerah dan dinamika regional.

2.3.2.3.1. Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasinya

Penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2023 menandai pengakuan internasional terhadap nilai budaya dan sejarah kawasan tersebut. Konsep Sumbu Filosofi berakar pada tata ruang kosmologis dan nilai-nilai budaya Keraton Yogyakarta yang merepresentasikan hubungan manusia dengan alam dan pencipta. Status warisan dunia membawa tanggung jawab besar untuk menjaga integritas, keaslian, dan kesinambungan nilai-nilai budaya tersebut melalui pengelolaan ruang yang sensitif dan berkelanjutan.

Di tingkat regional, Pemerintah Daerah DIY menetapkan kebijakan untuk mendukung pengelolaan Sumbu Filosofi melalui Peraturan Gubernur DIY

dan rencana pengelolaan terintegrasi lintas kabupaten/kota. Pengelolaan kawasan ini menuntut sinergi antarsektor dalam menjaga nilai budaya, kualitas ruang, dan fungsi sosial-ekonomi kawasan. Tantangan yang muncul meliputi tekanan pembangunan, pertumbuhan pariwisata massal, dan perubahan sosial di kawasan sekitarnya.

Bagi Kota Yogyakarta, yang merupakan lokasi utama Sumbu Filosofi, implikasi dari penetapan ini sangat besar. Kota harus menyesuaikan kebijakan pembangunan ruang, pengelolaan kegiatan sosial-budaya, serta tata kelola pariwisata agar tidak mengganggu integritas kawasan. Status warisan dunia juga membuka peluang untuk penguatan citra internasional Kota Yogyakarta sebagai kota budaya dunia, tetapi sekaligus menuntut konsistensi dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan ruang bersejarah.

2.3.2.3.2. Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY

Perkembangan wilayah perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat dan meluas lintas batas administrasi kota/kabupaten. Konsep Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) dalam RTRW DIY mengindikasikan pembentukan struktur metropolitan berbasis multi-nuclei yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman, Bantul, dan sebagian Kulon Progo. Fenomena ini mencerminkan proses urbanisasi regional yang cepat, disertai dengan perubahan fungsi ruang, peningkatan mobilitas, dan pertumbuhan kebutuhan layanan perkotaan.

Di tingkat regional, dinamika ini menuntut penguatan integrasi perencanaan, pengelolaan ruang, dan pembangunan infrastruktur antarwilayah. RTRW DIY 2021–2041 menekankan pentingnya pengendalian pertumbuhan urban sprawl, penguatan konektivitas kawasan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup kawasan perkotaan. Urbanisasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan masalah ketimpangan akses, degradasi lingkungan, serta tekanan terhadap sistem pelayanan kota.

Kota Yogyakarta, sebagai pusat utama Kawasan Perkotaan Yogyakarta, berada pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap dampak dinamika regional ini. Beban pelayanan, tekanan terhadap ruang kota, serta kebutuhan koordinasi antarwilayah menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Pada saat yang sama, konektivitas yang semakin baik dengan wilayah sekitar membuka peluang penguatan peran Yogyakarta sebagai pusat budaya, ekonomi kreatif, dan pendidikan regional.

2.3.2.3.3. Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta

Konsep Satuan Ruang Strategis (SRS) dalam kerangka keistimewaan DIY berfungsi untuk melindungi, mengelola, dan mengoptimalkan kawasan-kawasan dengan nilai strategis tinggi, baik dari aspek budaya, sejarah, maupun pengelolaan ruang. Di DIY, SRS menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan karakter wilayah, memperkuat identitas budaya, serta mengintegrasikan pelestarian nilai lokal dalam perencanaan pembangunan. Penetapan SRS menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan keistimewaan dalam urusan pertanahan dan tata ruang.

Di tingkat regional, kebijakan penetapan dan pengelolaan SRS telah dituangkan dalam Pergub DIY dan RTRW DIY, mencakup pengaturan ketat terhadap pemanfaatan ruang di kawasan-kawasan strategis, termasuk dalam kawasan perkotaan. Empat SRS utama di Kota Yogyakarta—yaitu KCB Kraton, KCB Pakualaman, KCB Kotagede, dan KCB Kotabaru—telah ditetapkan dan memiliki regulasi ketat terkait pemanfaatan ruang dan pelestarian budaya.

Bagi Kota Yogyakarta, pengelolaan SRS menjadi isu penting dalam pembangunan kota ke depan. Keterpaduan antara rencana tata ruang kota (RDTR Kota Yogyakarta) dengan ketentuan pelestarian dalam kawasan SRS harus terus diperkuat untuk menghindari konflik penggunaan ruang. Tantangan lain meliputi perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan bersejarah tersebut.

2.3.3. Isu Strategis Daerah

2.3.3.1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Sebagai kota pendidikan dan kebudayaan, Yogyakarta memiliki potensi besar dalam menghasilkan SDM yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Namun, untuk memastikan bahwa potensi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, ada beberapa tantangan yang perlu diselesaikan agar peningkatan kualitas SDM berjalan merata dan optimal. Isu strategis ini mencakup beberapa permasalahan utama yang saling terkait: pendidikan yang belum merata, kualitas pelayanan kesehatan yang masih rendah, serta tantangan terhadap pelestarian adat istiadat di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Meskipun Kota Yogyakarta memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain, kualitas pendidikan di beberapa kawasan masih menghadapi kesenjangan signifikan. Kesenjangan ini terlihat dalam akses dan fasilitas pendidikan yang tidak merata, serta ketimpangan dalam kualitas tenaga pendidik di berbagai sekolah. Beberapa daerah di pinggiran dan kawasan kumuh di Yogyakarta masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas yang cukup, perangkat teknologi yang dibutuhkan dalam pembelajaran, dan tenaga pendidik yang terlatih. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah, anak-anak dari keluarga miskin, serta penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, kewenangan pendidikan yang terbagi antar berbagai pihak—pemerintah kota untuk tingkat SMP ke bawah, provinsi untuk SMA/SMK, dan pusat untuk pendidikan tinggi—menjadikan koordinasi dan sinergi lintas pihak menjadi sangat penting. Untuk memastikan bahwa keluaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, sinergi lintas sektor dan

hierarki antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat harus terjalin secara efektif. Pemerintah kota, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pendidikan dasar, perlu bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelaraskan kurikulum, program pelatihan keterampilan, serta mengatasi kesenjangan antara output pendidikan dan permintaan pasar kerja, khususnya di bidang yang berhubungan dengan ekonomi kreatif dan teknologi informasi.

Selain itu, banyak lulusan dari perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, di mana teknologi informasi dan ekonomi kreatif menjadi faktor utama dalam perekonomian. Kurangnya pengintegrasian keterampilan digital dalam kurikulum pendidikan mengakibatkan lulusan tidak kompeten dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi dalam kurikulum pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Selain masalah pendidikan, tantangan penting lainnya dalam peningkatan kualitas SDM adalah semakin lemahnya kepribadian dan jatidiri masyarakat dalam hal pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah "nguri-uri budaya". Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang pesat, terjadi disrupsi nilai-nilai tradisional yang sebelumnya dijaga dengan baik oleh masyarakat. Teknologi, media sosial, dan arus globalisasi sering kali membawa informasi dan budaya yang tidak sesuai dengan kearifan lokal, yang berpotensi melemahkan rasa identitas dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya asli mereka.

Dalam konteks ini, disrupsi informasi yang terjadi seiring dengan cepatnya kemajuan teknologi memunculkan tantangan besar dalam melestarikan budaya dan adat istiadat. Hal ini bisa berdampak pada pembentukan karakter generasi muda yang lebih cenderung terpengaruh oleh budaya luar dan mengurangi kepedulian terhadap tradisi lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pelajaran tentang budaya lokal dalam pendidikan sejak dini, serta mendorong generasi muda untuk tetap menjaga dan mengembangkan kearifan lokal di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Pelestarian budaya ini akan menjadi bagian dari penguatan karakter bangsa, yang tidak hanya mengedepankan kecakapan akademik, tetapi juga kesadaran akan pentingnya identitas budaya yang kuat.

Di sisi lain, masalah kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam konteks peningkatan kualitas SDM. Meskipun usia harapan hidup di Kota Yogyakarta cukup tinggi, masalah terkait dengan aging population (populasi yang semakin menua) menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Peningkatan jumlah lansia, yang diperkirakan akan terus meningkat, memerlukan perhatian khusus terhadap penyediaan layanan kesehatan yang memadai, serta penguatan program kesejahteraan sosial untuk kelompok usia lanjut.

Meningkatnya angka usia harapan hidup yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta semakin tua, namun sering kali mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan khusus lansia. Ini menciptakan tantangan dalam hal perawatan kesehatan yang sesuai

dengan kebutuhan lansia, baik itu perawatan medis rutin maupun dukungan sosial dan psikologis. Program kesehatan untuk lansia perlu diperkuat agar mereka dapat tetap aktif dan produktif dalam masyarakat, serta dapat mengurangi beban sosial-ekonomi akibat ketergantungan yang tinggi pada layanan kesehatan. Penyuluhan mengenai pola hidup sehat yang lebih aktif dan penyediaan fasilitas yang ramah lansia akan sangat berperan dalam menjaga kualitas hidup mereka.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sinergi yang lebih erat antara sektor pendidikan dan kesehatan dalam memastikan kualitas SDM yang holistik—tidak hanya terdidik tetapi juga sehat secara fisik dan mental. Dengan adanya kolaborasi antar berbagai tingkat pemerintahan, sektor swasta, serta masyarakat, Kota Yogyakarta dapat mengembangkan program-program kesehatan yang lebih inklusif dan terjangkau, serta memastikan keberlanjutan kualitas SDM di berbagai aspek kehidupan.

2.3.3.2. Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Kota Yogyakarta merupakan isu strategis yang harus segera diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun Kota Yogyakarta memiliki PDRB per kapita yang relatif tinggi, tantangan besar tetap ada dalam memastikan distribusi ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu masalah utama yang mengemuka adalah tingginya tingkat ketimpangan ekonomi yang tercermin pada angka Indeks Gini yang relatif tinggi. Ketimpangan ekonomi yang besar dapat berimplikasi negatif pada banyak hal, seperti peningkatan ketegangan sosial, rendahnya mobilitas sosial, dan berkurangnya akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan yang semakin sulit diatasi, di mana kelompok berpendapatan tinggi terus berkembang sementara kelompok berpendapatan rendah semakin terpinggirkan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang tidak merata. Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, meskipun penting, masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas distribusi dan ketepatan sasaran. Belum optimalnya program pengentasan kemiskinan untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan kemudian mengurangi dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Selain itu, akses terhadap lapangan kerja yang layak juga belum merata, dengan sebagian besar pekerjaan bergaji tinggi tersedia di sektor formal, sementara banyak masyarakat masih mengandalkan sektor informal yang pendapatannya tidak stabil dan rentan terhadap ketidakpastian ekonomi.

Pada perspektif lain, pemberdayaan sektor UMKM menjadi kunci dalam mendorong kemandirian ekonomi kota. Namun, pelaku UMKM faktanya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dalam akses permodalan, kurangnya *skill*, maupun rendahnya tingkat literasi keuangan. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki keterampilan dalam manajemen

keuangan yang efektif, sehingga kesulitan dalam memperbesar skala usaha mereka. Tanpa dukungan yang memadai, sektor UMKM jelas akan kesulitan untuk berkembang dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal di Kota Yogyakarta.

Dalam konteks pariwisata, Kota Yogyakarta memiliki potensi besar berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis kewilayahan yang belum sepenuhnya digali. Keberagaman budaya bersama dengan kreativitas masyarakatnya, menjadi aset penting yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketidaksiapan untuk memaksimalkan potensi kewilayahan ini salah satunya berkaitan dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata yang dimiliki. Kondisi tersebut menjadi penghambat dalam mengembangkan pariwisata berbasis kewilayahan secara berkelanjutan dan inklusif. Pengelolaan pada hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih terkoordinasi untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas dan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kota Yogyakarta juga memiliki potensi besar sebagai pusat kegiatan festival dan *event*, baik pada skala lokal, regional, nasional, maupun internasional. Keberagaman budaya dan kreativitas masyarakat Yogyakarta memberikan ruang bagi penyelenggaraan berbagai jenis acara yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Festival seni dan budaya yang diselenggarakan setiap tahun telah menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, sekaligus menciptakan kesempatan kerja dan memperkenalkan produk-produk ekonomi kreatif lokal.

Namun, tantangannya selama ini adalah kurangnya sinergi dan integrasi seluruh pihak yang terkait. Festival-festival yang selama ini terselenggara cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya didukung oleh ekosistem yang kuat. Dalam konteks tersebut, tantangan ke depan adalah terkait dengan fasilitasi dalam mengembangkan ekosistem festival yang meliputi manajemen acara, pengelolaan sumber daya, serta promosi yang lebih efektif. Selain itu, kolaborasi antara sektor kreatif, pariwisata, dan pemerintahan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas festival sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian kota.

Dengan memaksimalkan potensi ekonomi kreatif dan menjadikan Yogyakarta sebagai pusat kegiatan festival, Kota Yogyakarta dapat memperkuat posisi sebagai kota kreatif yang berdaya saing global, sambil memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sinergi antara sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan kebudayaan akan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial di Kota Yogyakarta.

2.3.3.3. Pengelolaan Layanan Infrastruktur Perkotaan Berkualitas untuk Mewujudkan Ruang Kota yang Berkelanjutan

Pengelolaan layanan infrastruktur perkotaan berkualitas di Kota Yogyakarta menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung keberlanjutan kota yang

inklusif dan berdaya saing. Infrastruktur yang baik tidak hanya memperlancar aksesibilitas, tetapi juga harus mampu menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan sosial di tengah pesatnya perkembangan kota. Dengan keterbatasan ruang yang dimiliki Yogyakarta, serta peran pentingnya sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pariwisata, pengelolaan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar berbagai wilayah dan tingkatan pemerintahan.

Seiring dengan pembangunan jalan tol Jogja-Solo, Jogja-Bawen, dan Jogja-YIA, konektivitas antar wilayah akan meningkat pesat, yang berpotensi mempercepat pergerakan barang, wisatawan, dan tenaga kerja. Peningkatan aksesibilitas ini dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi, namun di sisi lain, semakin terbukanya akses menuju Yogyakarta membawa tantangan besar terkait dengan kemacetan dan peningkatan volume kendaraan, terutama di kawasan pusat-pusat daya tarik wisata. Kemacetan lalu lintas ini dapat menurunkan kualitas udara dan kesehatan masyarakat, serta mendegradasi lingkungan kota secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan transportasi publik yang efisien dan penataan sirkulasi lalu lintas menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang semakin meningkatkan kepadatan.

Kota Yogyakarta memiliki karakter ruang yang khas, sebagai kota bersejarah dengan dominasi kawasan cagar budaya yang sangat penting untuk keberlanjutan kota. Lebih dari 45% dari wilayah Kota Yogyakarta merupakan kawasan yang terkait dengan cagar budaya dan pelestarian lingkungan. Pengelolaan ruang yang berkelanjutan harus memperhatikan kapasitas daya dukung kawasan-kawasan tersebut, agar pembangunan infrastruktur tidak justru merusak nilai sejarah dan budaya yang menjadi karakteristik Kota Yogyakarta. Hal ini semakin penting mengingat penetapan sumbu filosofi sebagai *World Heritage* oleh UNESCO pada tahun 2023 yang menuntut pembangunan perkotaan secara lebih terukur dan hati-hati.

Dalam konteks pelaksanaannya, sinergi lintas tingkatan dan lintas wilayah menjadi sangat penting. Misalnya, pengelolaan transportasi publik, yang kewenangannya berada di tingkat provinsi, jelas memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah kota, provinsi, dan kabupaten yang masuk dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur di Kota Yogyakarta tidak bisa dipandang secara terpisah dari wilayah sekitarnya, karena aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata di Kota Yogyakarta berpengaruh langsung terhadap wilayah kabupaten lain di sekitarnya.

Selain itu, secara spesifik, pengelolaan sampah dan limbah menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan. Timbulan sampah yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang tidak sebanding dengan kapasitas pengolahan yang ada, berpotensi mencemari lingkungan dan mengganggu kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan sampah yang lebih baik, terutama dalam pemilahan sampah 3R dan peningkatan kapasitas pengolahan, harus menjadi prioritas agar Kota Yogyakarta tetap terjaga kebersihannya, terutama di kawasan-kawasan wisata utama yang menjadi daya tarik

wisatawan. Pengelolaan air tanah juga memerlukan perhatian serius, karena penurunan kualitas air tanah akan mempengaruhi ketersediaan air bersih untuk masyarakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan layanan infrastruktur perkotaan berkualitas di Kota Yogyakarta tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologis, pelestarian budaya, dan keberlanjutan sosial. Pengelolaan transportasi, penataan ruang, dan pembangunan infrastruktur yang melibatkan sinergi lintas wilayah akan menciptakan ruang kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat posisi Yogyakarta sebagai kota yang berdaya saing global dan tetap menjaga karakter budaya serta sejarah yang dimilikinya.

2.3.3.4. Tantangan Peningkatan Kualitas Layanan Publik untuk Mewujudkan *Good Government Governance*

Mewujudkan *good government governance* di Kota Yogyakarta menjadi tantangan utama dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berintegritas. Kota Yogyakarta, sebagai pusat pelayanan pada skala regional bahkan nasional, berperan sebagai kota yang menghubungkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata, hingga ekonomi. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi hal yang sangat penting.

Penerapan prinsip *good government governance* harus dapat diterjemahkan dalam pengelolaan keuangan daerah, manajemen sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil menjadi sangat penting dalam menjaga akuntabilitas serta mencegah praktik korupsi yang bisa merusak kepercayaan masyarakat. Begitu pula, penguatan literasi digital dan kapasitas manajerial aparatur pemerintah perlu menjadi perhatian, agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat mengatasi tantangan yang ada dengan lebih efektif.

Salah satu tantangan yang signifikan adalah terkait dengan digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi merupakan elemen kunci untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Meskipun beberapa langkah telah dilakukan untuk menerapkan teknologi digital, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaannya menjadi belum optimal. Selain itu, keterbatasan literasi digital di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat juga menjadi hambatan yang mengurangi potensi besar dari digitalisasi layanan publik tersebut.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan penegakan hukum yang lebih baik. Kota Yogyakarta, sebagai kota dengan mobilitas tinggi, baik dari wisatawan maupun penduduk lokal, memerlukan sistem penegakan hukum yang efektif untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondisi kondusif yang

mendukung kualitas pelayanan publik. Gangguan terhadap ketertiban umum seperti penggunaan ruang secara ilegal, parkir liar, maupun gangguan keamanan lainnya, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, tantangan dalam mewujudkan *good government governance* di Kota Yogyakarta terletak pada kemampuan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan, mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan digitalisasi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan responsif. Di samping itu, penguatan penegakan hukum yang solid akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapainya. Dengan langkah-langkah ini, Kota Yogyakarta dapat menjadi kota yang lebih modern, transparan, dan berintegritas, yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat serta memperkuat daya saing di tingkat nasional dan bahkan tingkat global.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Visi pembangunan daerah merupakan pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Visi ini harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan serta mengakomodasi isu-isu strategis yang perlu ditangani dalam jangka menengah. Selain itu, visi harus selaras dengan arah pembangunan jangka panjang agar terwujud kesinambungan perencanaan yang efektif.

Dalam konteks perencanaan daerah, RPJMD berperan sebagai dokumen strategis yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih. RPJMD merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan yang memuat serangkaian program dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi visi dalam RPJMD dituangkan ke dalam misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan daerah.

Visi yang dimuat dalam RPJMD bersumber dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen pendaftaran di KPUD pada saat pemilihan kepala daerah. Visi ini mencerminkan kondisi masa depan yang ingin diwujudkan dalam masa kepemimpinan lima tahun dan menjadi acuan penerjemahan ke dalam kebijakan yang lebih konkret sehingga menghasilkan dokumen pembangunan yang dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Perumusan visi pembangunan Kota Yogyakarta juga mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah, meliputi:



Gambar 3.1 Visi Pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan yang Relevan

Berdasarkan berbagai dokumen perencanaan tersebut serta mempertimbangkan kondisi, tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Yogyakarta, dirumuskanlah Visi Pembangunan Kota Yogyakarta 2025-2029 sebagai berikut:

"Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban"

Visi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 mencakup tiga kata kunci sebagai cerminan cita-cita, harapan, dan amanat Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Pembangunan Kota Yogyakarta hingga tahun 2029, yaitu "Adil Makmur", "Lestari" dan "Berkeadaban". Visi tersebut menjadi pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan seluruh Masyarakat Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Yogyakarta yang terus bertumbuh dan berkembang, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya, etika, dan moral sebagai identitas khas kota yang berlandaskan kearifan lokal serta semangat kebersamaan.

Visi "***Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban***" mencerminkan komitmen penuh untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kota yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga memiliki keseimbangan dalam aspek keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta nilai-nilai budaya dan moral yang kuat.

Visi pembangunan ini menegaskan pentingnya pertumbuhan yang inklusif, di mana setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki akses yang adil terhadap

peluang ekonomi. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi pilar utama sehingga penyediaan layanan dasar yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, keadilan sosial dimaknai tidak hanya dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, mendorong inklusivitas, serta memastikan bahwa pembangunan yang terjadi berdampak positif bagi seluruh warga masyarakat Kota Yogyakarta.

Selain itu, visi "**Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban**" menekankan pembangunan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Artinya, Kota Yogyakarta harus mampu terus bertumbuh tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan, sehingga tetap menjadi ruang kota yang aman, nyaman, produktif, inklusif, inovatif, berkelanjutan serta mendukung nilai keistimewaan.

Lebih dari itu, visi ini juga menggarisbawahi pentingnya pelestarian budaya dan penguatan moral sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai kota dengan warisan budaya yang kaya, Yogyakarta harus mempertahankan identitasnya melalui perlindungan situs-situs budaya, penguatan nilai-nilai kearifan lokal, serta pembangunan yang tetap menghormati sejarah dan tradisi.

Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Kota Yogyakarta tidak hanya berkembang secara fisik dan ekonomi tetapi juga tetap menjadi kota yang *berhati nyaman*, tempat di mana kesejahteraan, keadilan, serta harmoni sosial budaya dan lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Secara spesifik, visi pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 "**Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban**" memiliki keterkaitan erat dengan visi pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta 2025-2045 "**Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan**". Penjabaran makna dan keterkaitan visi pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kata kunci "*Adil Makmur*" dalam visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pemaknaannya, yang memiliki korelasi dengan konsep *Maju* dalam visi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. *Adil Makmur* menekankan bahwa kesejahteraan hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang berkeadilan, di mana pemerataan akses terhadap layanan publik, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan peningkatan kualitas hidup menjadi elemen yang saling mendukung. Konsep ini menegaskan bahwa keadilan sosial dan kemakmuran ekonomi tidak dapat dipisahkan, melainkan harus berjalan beriringan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Selaras dengan konsep *Maju* dalam RPJPD, pembangunan Kota Yogyakarta diarahkan pada transformasi untuk menjadi pusat ekonomi kreatif, jasa, dan pariwisata berbasis budaya berskala global, dengan tujuan utama menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

2. Kata kunci "Lestari" dalam visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 memiliki hubungan langsung dengan konsep "Berkelanjutan" dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Pembangunan yang lestari mengacu pada upaya mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan dan budaya. Dalam RPJPD, "Berkelanjutan" dimaknai sebagai penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana perwujudan kota yang unggul dan maju harus didukung dengan infrastruktur yang ramah lingkungan serta tata kelola pembangunan yang baik. Oleh karena itu, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 harus mengintegrasikan strategi pembangunan hijau, pengelolaan risiko bencana, serta pemanfaatan energi terbarukan dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah.
3. Kata kunci "Berkeadaban" dalam visi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 selaras dengan konsep "Unggul" dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. Kota yang berkeadaban menekankan nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045, "Unggul" mencerminkan keunggulan kompetitif, komparatif, dan kolaboratif dalam sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan yang berkeadaban tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pembangunan tetap berakar pada nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta.

Selain itu, konteks "budaya dan nilai-nilai keistimewaan" yang menjadi landasan utama dalam visi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 juga merupakan konsep yang melandasi seluruh aspek dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029. Pembangunan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan berbasis pada landasan kebudayaan dan keistimewaan, yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus selaras dengan filosofi keistimewaan dan adat istiadat khas Yogyakarta. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknokratis, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam memastikan bahwa pembangunan tetap mempertahankan identitas Yogyakarta sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata yang istimewa.

3.2. Misi

Misi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah, yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam mengarahkan kebijakan pembangunan. Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan melalui proses yang sistematis, dengan mempertimbangkan keselarasan antara perencanaan jangka panjang dan janji politik kepala daerah terpilih.

Secara teknis, perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 dilakukan dengan menyinergikan misi pembangunan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 dengan misi kepala daerah yang terpilih. Pendekatan ini bertujuan

untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun tetap berorientasi pada kesinambungan pembangunan, relevan dengan kondisi daerah, serta mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang.

Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang sistematis ini, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan kesinambungan pembangunan, serta memastikan pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

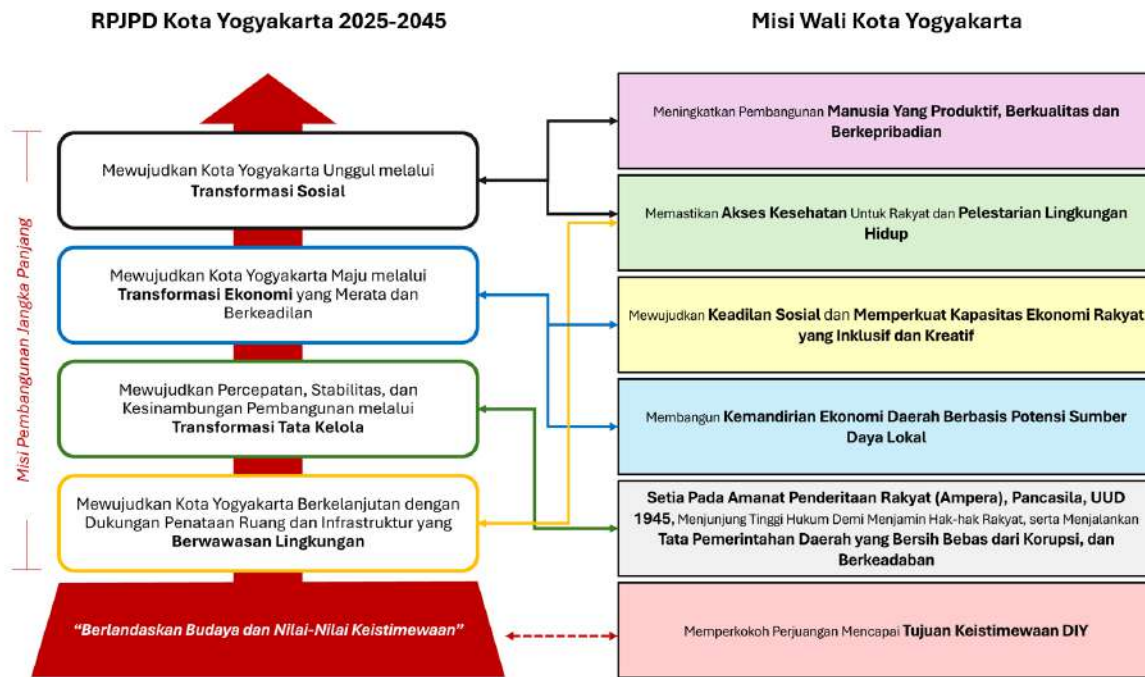
RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 telah menetapkan empat Misi pembangunan sebagai penjabaran Visi, yaitu:

1. Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial
2. Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesinambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Dukungan Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Di sisi lain, Wali Kota terpilih telah merumuskan enam Misi pembangunan yang termuat dalam dokumen resmi pendaftaran di KPUD sebagai janji politik bagi masyarakat, meliputi:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian
2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat dan pelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat yang inklusif dan kreatif
4. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal
5. Menjalankan tata pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan menjunjung tinggi hukum serta hak-hak rakyat
6. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY

Dengan melakukan analisis keterkaitan muatan antara misi Wali Kota terpilih dengan muatan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045, maka dapat ditarik konteks keterkaitan seperti dalam skema berikut:



Gambar 3.2 Keterkaitan Misi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 dengan Misi Wali Kota

Dengan mempertimbangkan aspek relevansi serta integrasi antara Misi RPJPD 2025-2045 dengan Misi Wali Kota terpilih, maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 dirumuskan lebih lanjut dengan mengacu pada hasil elaborasi berikut:

- Misi 1 dan Misi 2 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 1 RPJPD (Transformasi Sosial) digabung menjadi satu Misi Pembangunan
- Misi 2 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 4 RPJPD (Infrastruktur dan Lingkungan) menjadi satu Misi Pembangunan
- Misi 3 dan Misi 4 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 2 RPJPD (Transformasi Ekonomi) digabung menjadi satu Misi Pembangunan
- Misi 5 Wali Kota Terpilih yang selaras dengan Misi 3 RPJPD (Transformasi Tata Kelola) menjadi satu Misi Pembangunan
- Misi 6 Wali Kota Terpilih selaras dengan konteks landasan pembangunan dalam RPJPD (Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan) menjadi satu Misi Pembangunan

Hasil elaborasi sebagaimana dijelaskan di atas menjadi rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 yang terdiri dari lima Misi, meliputi:

1. Misi 1: "**Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas, dan Berkepribadian melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Akses Kesehatan**"
2. Misi 2: "**Mewujudkan Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Lestari**"

3. Misi 3: **"Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui Pembangunan yang Inklusif, Kreatif, dan Berbudaya, Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal"**
4. Misi 4: **"Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah yang Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban, dengan Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945"**
5. Misi 5: **"Memperkokoh Perjuangan Mencapai Tujuan Keistimewaan DIY"**



Gambar 3.3 Skema Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta 2025-2029

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029. Tahap ini akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan *ultimate outcome* yang tidak menurunkan indikator kinerja lebih lanjut.

Tujuan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pernyataan mengenai langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai visi dan menjalankan misi, serta mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, serta dirancang untuk dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun.

Perumusan tujuan berperan sebagai dasar dalam merancang strategi pembangunan dan mencerminkan dampak keberhasilan yang ingin dicapai melalui berbagai program prioritas. Tujuan ini dapat mencakup berbagai fokus pembangunan, seperti pembangunan ekonomi, infrastruktur,

peningkatan produktivitas, daya saing sumber daya manusia (SDM), lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan, dan realistis dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Sasaran ini diturunkan dari tujuan dan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu periode 2025-2029 seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kerja RPJMD Kota Yogyakarta

Visi/Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
Visi “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban” 1. Misi 1 : Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan 2. Misi 2 : Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari 3. Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif dan berbudaya berbasis potensi sumber daya lokal 4. Misi 4 : Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945 5. Misi 5 : Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY	Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	
				Harapan lama Sekolah	
				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup
		Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana	Indeks Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur perkotaan	Indeks Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur
			IKLH		
			Indeks Resiko Bencana (IRB)		
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan	PDRB Per Kapita	Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal	Pertumbuhan Ekonomi
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
			Rasio Gini (Indeks)	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat
				Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat Kemiskinan
	Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP	
		Indeks Pelayanan Publik			Meningkatnya kondusivitas daerah

3.4. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

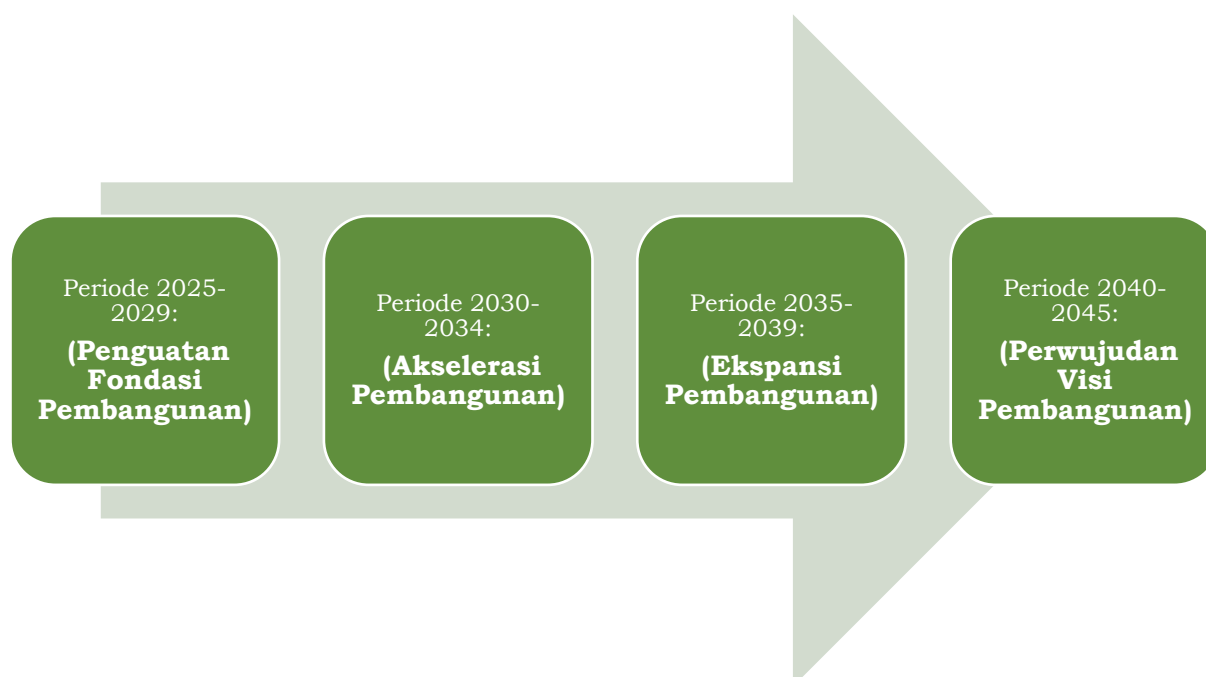
Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangsan menengah Kota Yogyakarta 2025-2029, yaitu **“Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”** memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sebagai dasar acuan pengelolaan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Strategi pembangunan menjadi bagian dari proses mengelola setiap program kegiatan pembangunan melalui rumusan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah, perlu manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Strategi pembangunan dijabarkan dalam tahapan pembangunan, lokus pembangunan prioritas, arah kebijakan serta program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

3.4.1. Penahapan Pembangunan

Sebagai bagian dari siklus perencanaan, RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam implementasi RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045. RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai tahapan awal dalam perodesasi pembangunan jangka panjang 2025-2045. Periode ini difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya.

Pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kota Yogyakarta 2025-2045 terbagi ke dalam empat tahapan periode pembangunan yang mencerminkan strategi bertahap dalam mencapai visi pembangunan daerah seperti dalam skema berikut:



RPJMD 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan strategis yang menghubungkan visi pembangunan jangka panjang dengan kondisi kewilayahan serta janji politik kepala daerah terpilih. Proses perumusannya tidak hanya berlandaskan pada analisis teknokratis dan kebijakan strategis nasional, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat, potensi lokal, serta dinamika sosial-ekonomi daerah.

Dalam penjabarannya, arah kebijakan prioritas sebagai tema pembangunan pada periode 2025-2029 juga telah ditetapkan sebagai upaya keselarasan dengan pembangunan jangka panjang sesuai dengan rumusan Misi pembangunan yang berfokus pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.

Visi Pembangunan Jangka Panjang	Misi Pembangunan Jangka Panjang	Arah Kebijakan Prioritas sebagai Tema Pembangunan 2025-2029 (Perkuatan Fondasi Pembangunan)
Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan	Mewujudkan Kota Yogyakarta Unggul melalui Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
	Mewujudkan Kota Yogyakarta Maju melalui Transformasi Ekonomi yang Merata dan Berkeadilan	Penguatan potensi daerah pada sektor ekonomi produktif
	Mewujudkan Percepatan, Stabilitas, dan Kesenambungan Pembangunan melalui Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, dan digitalisasi pelayanan publik
	Mewujudkan Kota Yogyakarta Berkelanjutan dengan Penataan Ruang dan Dukungan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Pemerataan layanan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan rencana tata ruang

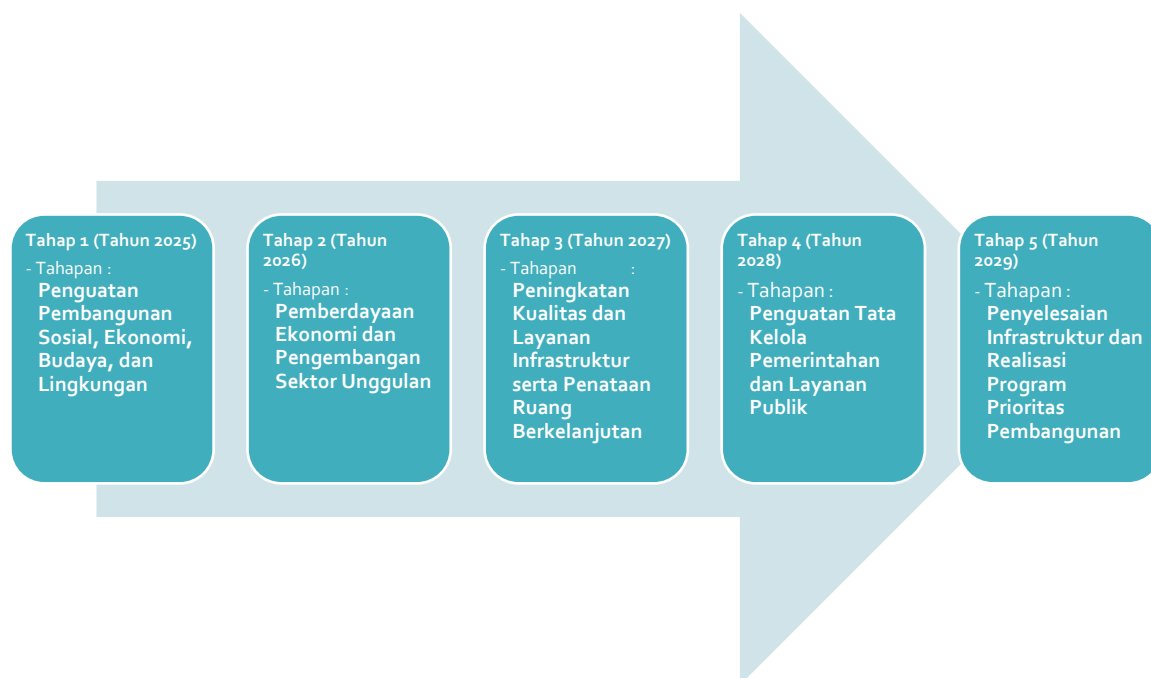
RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi besar pembangunan Kota Yogyakarta dalam dua dekade mendatang. Kesuksesan tahap awal ini akan menentukan kelancaran transisi menuju fase akselerasi, ekspansi, hingga akhirnya mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Tahapan pembangunan mencerminkan kerangka waktu tematik yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Yogyakarta. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik yang berorientasi pada sektor-sektor prioritas yang dianggap strategis dan mendesak untuk dikembangkan pada tahun-tahun tersebut. Namun, penting untuk dipahami bahwa penahapan ini bukan berarti sektor-sektor lain tidak menjadi perhatian. Pembangunan Kota Yogyakarta tetap bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, sehingga

seluruh sektor pembangunan akan terus diperhatikan dan dikembangkan sepanjang periode ini.

Penahapan ini bertujuan untuk memberikan kerangka acuan yang jelas dan terfokus dalam pencapaian tujuan pembangunan. Dengan penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan seluruh kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing tahun. Tahun pertama hingga tahun kelima akan saling mendukung dalam proses pembangunan yang holistik, sehingga pada akhir periode 2029, Kota Yogyakarta dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi jangka panjang yang mencakup pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam menentukan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-masing sektor. Penekanan pada fokus tematik tahunan tidak berarti sektor lain akan diabaikan, melainkan setiap sektor akan berkembang secara seimbang, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Dengan demikian, pada akhir periode pembangunan diharapkan dapat tercapai secara utuh “Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban” sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.



1. Tahap 1 (Tahun 2025)

- a. Tahapan : Penguatan Pembangunan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan

- b. Prioritas Tematik : Penguatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian budaya dan pengelolaan lingkungan.
- c. Penjelasan : Pada tahun pertama, tahapan pembangunan akan fokus pada penguatan aspek sosial dan ekonomi yang sudah berjalan, dengan penekanan pada pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pelestarian budaya melalui penguatan sektor seni dan budaya serta pengelolaan lingkungan akan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan sosial dan ekonomi berjalan seiring dengan keberlanjutan budaya dan lingkungan. Program-program peningkatan akses pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, pelayanan kesehatan yang lebih merata, serta pemanfaatan potensi sumber daya lokal akan menjadi bagian penting dari tahap ini, yang akan memperkuat fondasi pembangunan secara menyeluruh.

2. Tahap 2 (Tahun 2026)

- a. **Tahapan : Pemberdayaan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Unggulan**
- b. Prioritas Tematik : Penguatan sektor UMKM, pariwisata, dan industri kreatif.
- c. Penjelasan : Tahun kedua akan lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis pada potensi sumber daya lokal dan penguatan sektor-sektor unggulan seperti UMKM, pariwisata, dan industri kreatif. Program seperti Revitalisasi Kampung Wisata dan Pemajuan Ekonomi Kreatif akan memperkuat perekonomian daerah melalui kolaborasi antar sektor, sementara sektor pariwisata dan industri kreatif akan menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Peningkatan daya saing produk lokal, modernisasi pasar tradisional, dan digitalisasi usaha mikro akan membuka peluang pasar yang lebih luas, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat ekonomi daerah.

3. Tahap 3 (Tahun 2027)

- a. **Tahapan : Peningkatan Kualitas dan Layanan Infrastruktur serta Penataan Ruang Berkelanjutan**
- b. Prioritas Tematik : Peningkatan kualitas dan layanan infrastruktur, penataan ruang yang berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan lestari.
- c. Penjelasan : Pada tahun ketiga, fokus akan diberikan pada peningkatan kualitas dan layanan infrastruktur, seperti aksesibilitas jalan, transportasi publik, serta pengelolaan

sampah dan limbah yang lebih efisien. Program yang terkait dengan penataan ruang akan menjadi bagian dari prioritas untuk menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan air tanah, ruang terbuka hijau, dan pemanfaatan energi terbarukan akan menjadi bagian integral dari pembangunan kota yang berkelanjutan. Selain itu, akan ditekankan integrasi infrastruktur hijau dan pengelolaan ruang yang ramah lingkungan guna meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan kota.

4. Tahap 4 (Tahun 2028)

a. Tahapan : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik

- b. Prioritas Tematik : Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik berbasis teknologi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
- c. Penjelasan : Memasuki tahun keempat, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi akan menjadi fokus utama. Penguatan kapasitas SDM pemerintah, sistem pengelolaan keuangan yang transparan, serta digitalisasi layanan publik akan memperkuat efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Penyempurnaan sistem pengawasan internal dan penguatan akuntabilitas publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penggunaan teknologi dalam perizinan, administrasi publik, dan keuangan daerah akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan, sementara koordinasi antar instansi akan diperkuat untuk memastikan efektivitas setiap kebijakan yang diterapkan.

5. Tahap 5 (Tahun 2029)

a. Tahapan : Penyelesaian Infrastruktur dan Realisasi Program Prioritas Pembangunan

- b. Prioritas Tematik : Penyelesaian pembangunan infrastruktur fisik dan penuntasan program prioritas.
- c. Penjelasan : Tahun kelima akan difokuskan pada penyelesaian pembangunan infrastruktur yang belum tuntas dan penuntasan program-program prioritas yang telah ditetapkan selama periode RPJMD 2025-2029. Hal tersebut mencakup pembangunan infrastruktur mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, pengentasan kemiskinan, penataan permukiman, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan menjadi fokus utama agar hasil pembangunan yang telah dilakukan dapat dinikmati secara merata. Pada akhir periode ini, evaluasi dan pengawasan program pembangunan akan

dilakukan untuk memastikan bahwa semua komitmen pembangunan tercapai, serta keberlanjutan program di masa mendatang dapat terjamin.

3.4.2. Lokus Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Pada periode 2025–2029, Kota Yogyakarta difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, sehingga menjadi dasar bagi percepatan pembangunan pada periode-periode selanjutnya. Pembangunan wilayah Kota Yogyakarta pada periode ini bertumpu pada upaya mendorong pembentukan manusia yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kreatif, perwujudan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

3.4.2.1. Orientasi Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang

Arah pembangunan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 ditetapkan selaras dengan orientasi pembangunan kewilayahan yang tertuang dalam rencana tata ruang (RTRW dan RDTR) Kota Yogyakarta. Secara teknis, hal tersebut tertuang melalui penguatan struktur ruang, penataan pola ruang, serta pengembangan kawasan strategis.

1. Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang merupakan susunan permukiman dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat. Penataan wilayah Kota Yogyakarta 2021–2041 bertujuan mengakomodasi fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pengembangan kota sesuai kebijakan Provinsi dan Kota. Struktur ruang memberikan arah fisik bagi pengembangan kota yang terencana dan berkelanjutan, serta memastikan keterpaduan antara pemanfaatan ruang dengan prioritas pembangunan wilayah.

Rencana pengembangan struktur ruang perkotaan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem perkotaan di Kota menggunakan hierarki tingkat pelayanan. Pusat pelayanan terdiri dari beberapa fungsi yaitu (i) pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang berada di Kawasan Malioboro dan Kawasan Jalan Solo, (ii) pusat pelayanan kegiatan budaya di Kawasan Kraton dan Kawasan Pakualaman, dan (iii) pusat pelayanan administrasi di Kawasan Balaikota, Kawasan Kantor Kecamatan, dan Kawasan Kantor Kelurahan.
- b. Sebagai antisipasi terhadap potensi perubahan orientasi Kota Yogyakarta setelah pembangunan YIA, disarankan pembentukan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Barat sebagai kawasan prioritas pembangunan bersama dengan kawasan Yogyakarta Selatan.
- c. Upaya meningkatkan aksesibilitas dan mendukung Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Yogyakarta Barat, dilakukan perubahan fungsi jalan pada beberapa ruas, termasuk Jalan Bantul, Jalan Imogiri, sebagian ruas Jalan Pramuka, dan sebagian ruas Jalan

Gambiran menjadi Jalan Arteri Sekunder. Jalan Letjen. MT. Haryono, Jalan Mayjend. Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Menteri Supeno, dan Jalan Perintis Kemerdekaan diturunkan fungsinya menjadi Jalan Kolektor kota.

2. Rencana Pola Ruang

Sejalan dengan pengembangan struktur ruang, penataan pola ruang juga memegang peranan penting dalam mendukung arah pembangunan Kota Yogyakarta. Pola ruang mencerminkan distribusi pemanfaatan ruang dalam wilayah kota, mencakup fungsi lindung dan fungsi budidaya, yang disusun untuk mewujudkan kota yang layak huni dan selaras dengan fungsi strategis yang dimilikinya.

a. Kawasan Lindung

- Kawasan perlindungan setempat diarahkan pada pengembangan kawasan sempadan Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajahwong.
- Ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta berupa taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, dan pemakaman di seluruh Kota Yogyakarta.
- Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Kota Yogyakarta yang meliputi KCB Kotabaru, KCB Kotagede, KCB Kraton, dan KCB Pakualaman.

b. Kawasan Budidaya

- Kawasan Permukiman :
 - Kawasan Perumahan, yang tersebar di seluruh wilayah kemantren.
 - Kawasan Perdagangan dan Jasa, luas yang tersebar di sepanjang koridor jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder. Kawasan perdagangan dan jasa dilengkapi dengan penyediaan lokasi parkir dalam halaman atau gedung sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak mengganggu kelancaran sirkulasi pergerakan pada kawasan-kawasan strategis tersebut.
 - Kawasan Perkantoran yang tersebar merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
- Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, terdiri dari:
 - Kawasan pendidikan di Kemantren Jetis, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Mergangsan, Kemantren Danurejan, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Kraton, Kemantren Gendongtengen, Kemantren Gondokusuman, Kemantren Ngampilan, dan Kemantren Umbulharjo. Pengembangan dilakukan secara tersebar berdasarkan tingkat lingkup skala pelayanannya.

- Kawasan kesehatan di Kemantren Gondokusuman, Kemantren Gondomanan, Kemantren Ngampilan, dan Kemantren Umbulharjo.
- Kawasan olahraga di Stadion Mandala Krida di Kemantren Umbulharjo, Gedung Olah Raga Amongrogo di Kemantren Umbulharjo, dan sarana olahraga lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
- Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau yang meliputi tempat khusus parkir Ngabean di Kemantren Ngampilan dan tempat khusus parkir Gembira Loka di Kemantren Umbulharjo.
- Kawasan Transportasi yang terletak di Terminal Giwangan, Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, Stasiun penumpang yang tersebar di sepanjang jalur pengembangan angkutan massal berbasis rel, dan depo kereta api.
- Kawasan Campuran, diperuntukkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran perdagangan/jasa. Kawasan campuran Kota Yogyakarta yang tersebar di Kemantren Danurejan, Kemantren Gondokusuman, dan Kemantren Umbulharjo.
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Kota Yogyakarta yang tersebar di Kemantren Danurejan, Kemantren Gondokusuman; Kemantren Gondomanan; Kemantren Jetis; Kemantren Umbulharjo; dan Seluruh wilayah Kemantren di Kota Yogyakarta.

c. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis kota adalah area yang diprioritaskan karena memiliki peran penting bagi ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan Kota Yogyakarta. Dalam RTRW 2021–2041, kawasan strategis ditetapkan untuk membentuk citra kota, mendukung kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara sejarah dan masa depan kota. Pada periode pembangunan ini, kawasan strategis juga dibagi menjadi tiga sudut pandang kepentingan.

- Pertumbuhan Ekonomi, mencakup pusat kota, kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan, dan pengembangan ekonomi terpadu, meliputi:
 - Kawasan Simpul Transportasi di Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan, dan Terminal Giwangan;
 - Kawasan Ekonomi Yogyakarta Selatan yang terdiri dari Kawasan Prawirotaman, Kawasan Koridor Jalan Tamana Siswa, Kawasan Koridor Jalan Glagah Sari, Kawasan

Koridor Tegal Turi-Sorogenen, serta Kawasan Koridor Jalan Imogiri; dan

- Kawasan Ekonomi Yogyakarta Barat yang terdiri dari Kawasan Koridor Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Bugisan, Kawasan Koridor Jalan Sugeng Jeroni, dan Kawasan Koridor Jalan Bantul.
- Sosial dan budaya, meliputi:
 - KCB Kotabaru;
 - KCB Kotagede;
 - KCB Kraton; dan
 - KCB Pakualaman
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang difokuskan pada kawasan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, meliputi:
 - Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Winongo;
 - Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Code; dan
 - Kawasan di Sepanjang Aliran Sungai Gajahwong.

3.4.2.2. Lokus Pembangunan Prioritas

Dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, terdapat beberapa lokus prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus utama untuk mendukung pencapaian visi jangka panjang. Lokus-lokus ini mencakup Kawasan Sumbu Filosofi, Pengembangan Kawasan Yogya Selatan, dan Penataan Kawasan Kumuh di Bantaran Sungai. Masing-masing kawasan ini memiliki karakteristik dan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang terintegrasi, serta sinergi antara berbagai sektor. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing lokus prioritas tersebut:

1. Kawasan Sumbu Filosofi

Kawasan Sumbu Filosofi yang ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO pada tahun 2023, memiliki posisi strategis sebagai struktur ruang utama dan pusat Kota Yogyakarta. Penetapan kawasan ini sebagai warisan dunia membawa tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan budaya dan sejarah kota, serta mengatur perkembangan kawasan ini agar tetap selaras dengan prinsip pelestarian nilai-nilai warisan budaya.

Penetapan ini tentu saja mengandung beberapa konsekuensi besar yang harus diperhatikan, terutama terkait dengan sektor-sektor berikut:

- a. Permasalahan Regulasi: Pengelolaan kawasan Sumbu Filosofi memerlukan penyesuaian regulasi yang lebih ketat, guna memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung dalam kawasan ini. Penetapan sebagai warisan dunia menuntut adanya standar

- pengelolaan yang lebih tinggi, baik terkait dengan zoning maupun pembangunan infrastruktur yang ada di kawasan tersebut.
- b. Dampak Sosial Penataan Sumbu Filosofi: Penataan kawasan Sumbu Filosofi akan berdampak pada pola hidup sosial masyarakat, terutama yang berada di kawasan inti dan penyangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan partisipasi masyarakat untuk mengurangi potensi konflik sosial akibat pembatasan ruang atau perubahan fungsi lahan yang mungkin terjadi sebagai bagian dari penataan kawasan ini.
 - c. Transportasi dan Lalu Lintas: Dengan status kawasan Sumbu Filosofi yang merupakan pusat kegiatan kota, peningkatan aksesibilitas dan penataan transportasi menjadi sangat penting. Kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kawasan ini perlu dikelola dengan baik melalui pengembangan sistem transportasi umum yang lebih efisien, serta penyediaan jalan alternatif yang mendukung kelancaran mobilitas.
 - d. Penataan Infrastruktur: Penataan infrastruktur kawasan Sumbu Filosofi juga harus mendukung keberlanjutan kawasan tersebut sebagai pusat budaya dan pariwisata. Infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mengakomodasi kebutuhan modern masyarakat kota, seperti fasilitas perkantoran, tempat wisata, dan area publik.

2. Pengembangan Kawasan Yogya Selatan

Pengembangan Kawasan Yogya Selatan menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan utara dan selatan Kota Yogyakarta. Pendekatan berbasis kepariwisataan akan menjadi motor penggerak utama dalam pengembangan kawasan ini, dengan mengintegrasikan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi yang akan mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan kawasan ini adalah peningkatan kemudahan akses menuju lokasi wisata. Oleh karena itu, pembangunan jalur transportasi yang lebih baik dan terintegrasi menjadi sangat penting. Hal ini mencakup peningkatan akses jalan menuju kawasan wisata dan peningkatan layanan transportasi publik yang menghubungkan berbagai titik utama di Yogyakarta.

Fasilitas pendukung seperti penginapan, restoran, dan fasilitas wisata lainnya harus diperhatikan agar pengunjung dapat menikmati pengalaman yang lebih nyaman dan menyeluruh. Pengembangan ekosistem pariwisata yang mendukung kebutuhan wisatawan baik lokal maupun mancanegara akan menjadi faktor penting dalam menarik lebih banyak pengunjung ke kawasan ini.

Penguatan daya tarik utama yang dapat menarik wisatawan untuk datang ke kawasan Yogya Selatan sangat krusial. Oleh karena itu, pengembangan potensi lokal seperti Kawasan Kotagede, Taman Budaya Embung Giwangan (TBEG), XT Square, dan Gembira Loka Zoo akan menjadi fokus dalam meningkatkan kualitas kawasan ini. Kombinasi dari atraksi wisata

sejarah, budaya, dan alam akan memperkaya pengalaman wisata di kawasan selatan Yogyakarta. Terminal Tipe A Giwangan sebagai fasilitas transportasi juga akan menjadi penghubung vital yang memudahkan aksesibilitas dari dan ke kawasan wisata, serta mendukung pengembangan kawasan ini menjadi destinasi wisata utama di Yogyakarta.

3. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai

Penataan kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai menjadi salah satu isu pembangunan yang sangat penting dalam rangka menciptakan Kota Yogyakarta yang ramah lingkungan dan layak huni. Program ini akan mengedepankan prinsip M3K (Mundur Munggah Madhep Kali) yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di kawasan kumuh, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penanganan kawasan kumuh akan dilakukan dengan pemugaran dan peremajaan kawasan, menggunakan konsep konsolidasi lahan yang memungkinkan pengembangan kawasan menjadi lebih tertata dengan baik dan lebih nyaman untuk dihuni. Penataan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak.

Implementasi konsep konsolidasi lahan akan menjadi salah satu upaya strategis dalam penanganan kawasan kumuh. Melalui konsolidasi ini, tanah yang tidak teratur dan tidak tertata dengan baik akan dikelola menjadi kawasan yang lebih fungsional dan teratur, yang pada akhirnya dapat mendukung ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3.4.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari aspek strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 selaras dengan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta 2025-2045 yang telah dirumuskan untuk pelaksanaan periode pembangunan jangka panjang tahap 1. Rumusan arah kebijakan sebagai turunan dari Misi dan Aspek Strategi dalam pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta 2025-2029 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Meningkatkan kualifikasi pendidik melalui Pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan partisipasi peserta didik (Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ; Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah) sesuai kewenangan pemerintah daerah ; Peningkatan cakupan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau bagi yang memiliki prestasi ; Peningkatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik)
			Pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
			Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, inklusi, dan berkeadilan
			Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar dan aman bencana
			Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK
			Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan
		Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan	Meningkatkan kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter
			Meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga
		Peningkatan prestasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
		Meningkatkan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Perpustakaan
			Meningkatkan Penguatan Budaya Gemar Membaca
			Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
		Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat dan siklus hidup termasuk aktivitas fisik/olahraga	
			Percepatan penurunan dan pencegahan stunting melalui Peningkatan kualitas gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	
			Pemerataan akses penjaminan dan pembiayaan kesehatan	
			Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular	
			Meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat melalui Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	
			Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar	
			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	
			Meningkatkan cakupan Rekomendasi sertifikasi bidang kesehatan	
			Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas melalui Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan nonkesehatan	
			Implementasi transformasi teknologi kesehatan	
			Implementasi transformasi sistem ketahanan kesehatan	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta	Meningkatkan Mutu Tata Kelola Administrasi dan Keuangan RSUD Kota Yogyakarta
				Meningkatkan Mutu Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang dan Asuhan Keperawatan RSUD Kota Yogyakarta
Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pratama	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Layanan Penunjang dan Kefarmasian di Rumah Sakit			
2	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial	Penguatan branding Kota Yogyakarta sebagai "City of Festivals" serta	Peningkatan infrastruktur dan kebijakan untuk mendukung industri kreatif	
			Akselerasi transformasi digital dengan pembangunan kapasitas penggunaan teknologi	

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal	Pengembangan kebijakan dan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan festival berskala besar (mega event)	
		Penataan dan Penguatan quality tourism sebagai fondasi industri pariwisata berskala global	Peningkatan kontribusi masyarakat terhadap pariwisata melalui penguatan UMKM dan pariwisata berbasis wilayah
			Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan kampung wisata dengan pendekatan terpadu yang mencakup aspek perencanaan, kapasitas lokal, dan pengelolaan yang berkelanjutan
			Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Wisata
			Meningkatkan Kualitas Pemasaran Pariwisata
			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Penguatan kebudayaan pada kehidupan dalam mendukung perekonomian masyarakat	Meningkatkan Pelindungan Objek Warisan Budaya
			Meningkatkan Kemandirian RKB dan Sanggar/Lembaga Budaya
			Meningkatkan Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra dan Sejarah
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya
			Meningkatkan Pelayanan Pemanfaatan Taman Budaya dan Taman Pintar
		Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian	Meningkatkan Kualitas Layanan BLUD Pusat Bisnis
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri Bagi Pelaku Usaha Binaan
		Peningkatan Perlindungan Konsumen	Meningkatkan Tertib Niaga Pelaku Usaha Sektor Perdagangan
			Pengembangan sistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan Standardisasi Metrologi Legal
			Peningkatan pengendalian dan penanggulangan dampak inflasi daerah
	Peningkatan Produktivitas Sektor UMKM		Meningkatkan Wirausaha Baru
			Meningkatkan UMKM naik kelas
	Pemberdayaan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan		Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi
			Meningkatkan akuntabilitas koperasi
			Meningkatkan kesehatan koperasi
			Meningkatkan koperasi yang berkembang usahanya
	Peningkatan Produktivitas sektor Industri		Identifikasi dan pengkajian kebijakan untuk Pembangunan dan perkuatan kebijakan dan infrastruktur untuk implementasi praktik berkelanjutan dalam industri dan pembangunan
			Meningkatkan IKM yang berizin industri
			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Industri
			Meningkatkan pemanfaatan data informasi industri
	Peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku perikanan		Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku pertanian
			Meningkatkan nilai produksi perikanan
			Menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis
			Meningkatkan pendayagunaan aset pertanian , perikanan dan kesehatan hewan
	Peningkatan Nilai Investasi		Pengembangan riset dan penyusunan rencana yang komprehensif untuk penyiapan ruang bagi peningkatan investasi
			Meningkatkan Investor Baru di Kota Yogyakarta
			Meningkatkan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan Pelayanan Perizinan
			Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling	Meningkatkan Perencanaan Tenaga Kerja
			Pengembangan lapangan kerja melalui peningkatan Kualitas Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Penempatan tenaga kerja serta dan perlindungan tenaga kerja bagi seluruh kelompok masyarakat
		Peningkatan Keluarga yang Berkualitas melalui Implementasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan
			Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
			Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
			Pengendalian kuantitas penduduk untuk mewujudkan keserasian keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk pada berbagai segmen tingkat ekonomi serta lingkungan hidup yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan
			Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender
		Peningkatan perkembangan pembangunan Kemantren	Meningkatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemantren
			Meningkatkan Peran Serta dan Sinergitas Lembaga Masyarakat
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Kemantren
			Meningkatkan Sinergitas Stakeholder Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kemantren
		Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Implementasi perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			Meningkatkan Pemberdayaan PSKS	
			Meningkatkan Rehabilitasi Sosial	
			Meningkatkan layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	
			Meningkatkan layanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia terlantar di luar panti	
			Meningkatkan layanan Rehabilitasi Sosial anak terlantar di luar panti	
			Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	
			Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	
			Meningkatkan Akurasi Data Sasaran Intervensi Kemiskinan	
			Peningkatan kemampuan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan	
			Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	
			Meningkatkan Penempatan transmigran	
			Pemenuhan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat dan Peningkatan Ketercukupan Konsumsi Pangan Masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan Pangan
				Meningkatkan Ketersediaan Pangan
				Meningkatkan Kemanfaatan Pangan
Meningkatkan Kemanfaatan Pangan				
Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan				
Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan				
3	Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan	Peningkatan Kualitas Prasarana Umum Wilayah	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kota	
			Meningkatkan kualitas lampu penerangan jalan umum kota yang ramah lingkungan	

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
	lingkungan hidup yang lestari		Meningkatkan sistem drainase kondisi baik	
			Meningkatkan talud sungai dan saluran irigasi kondisi baik	
			Meningkatkan Bangunan Gedung Pemerintah dengan Kondisi Baik	
			Meningkatkan pengendalian bangunan gedung melalui layanan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tepat waktu	
			Meningkatkan kapasitas jasa konstruksi	
			Percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi perkotaan yang aman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat	
			Percepatan penyediaan infrastruktur air minum melalui penguatan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder	
			Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman	Percepatan penyediaan rumah layak huni untuk mendukung lingkungan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan
				Meningkatkan luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani
				Meningkatkan kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik
				Meningkatkan pengembangan perumahan
			Peningkatan tata kelola dan penyediaan infrastruktur pendukung kualitas air, udara dan tutupan lahan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup
				Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
				Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan hidup
	Meningkatkan pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)			
	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
	Meningkatkan penerbitan rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi			

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan pengelolaan RTH
			Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah menuju zero solid waste city	Meningkatkan Pengurangan Sampah
			Meningkatkan Penanganan Sampah
		Peningkatan Kualitas Penataan Ruang	Percepatan penyusunan dan penyesuaian panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim
			Meningkatkan Pemenuhan Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang
			Meningkatkan Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang
			Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Peningkatan tata kelola, sistem, dan sarana prasarana transportasi yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan
			Meningkatkan aksesibilitas angkutan umum
			Meningkatkan tata kelola perparkiran
			Meningkatkan kendaraan laik jalan
			Meningkatkan kepatuhan lalu lintas
		Peningkatan ketahanan daerah terhadap	Meningkatkan pencegahan terhadap resiko kebakaran
			Meningkatkan penanggulangan kebakaran

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		keselamatan dan resiko kebakaran	Meningkatkan penanganan penyelamatan yang membahayakan manusia
			Meningkatkan layanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan penegakan standar keandalan infrastruktur yang berketahanan bencana	Meningkatkan efektivitas mitigasi bencana
			Mengembangkan Kebijakan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana
			Meningkatkan kualitas Penanganan Darurat bencana
			Meningkatkan kualitas Sistem Pemulihan Bencana
4	Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945	Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah	Percepatan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi
			Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat
			Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian
			Meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan
			Meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan
			Meningkatkan kualitas kebijakan pelayanan publik dan administrasi umum
			Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah sesuai dengan kebutuhan daerah
			Perluasan kerja sama lintas wilayah dan sinergi lintas pemerintahan maupun dengan stakeholder lainnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan
		Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Peningkatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas berbasis riset dan inovasi menuju penyelenggaraan	Peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
			Meningkatkan Ketercapaian Kinerja Pembangunan
			Meningkatkan Ketercapaian Kinerja Bidang Perekonomian
			Meningkatkan Ketercapaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi serta Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas daerah dan nasional	Meningkatkan Ketercapaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			Meningkatkan Kemanfaatan Riset
			Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah
		Peningkatan akuntabilitas keuangan dan Aset daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah
			Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah
			Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
			Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah
		Peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan produktivitas BUMD, penguatan pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran daerah dengan prioritas nasional
			Meningkatkan Ketercapaian Pajak Daerah
			Meningkatkan tunggakan pajak daerah yang dibayarkan
			Meningkatkan pengembangan PAD
		Terwujudnya Manajemen ASN yang Berkualitas melalui Pengembangan	Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan ASN
			Meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian
			Meningkatkan layanan kesejahteraan ASN Kota Yogyakarta

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		karier ASN daerah berbasis meritokrasi	Meningkatkan pengelolaan manajemen ASN berbasis Sistem Informasi yang terintegrasi
			Meningkatkan redistribusi Pejabat Pelaksana dan Fungsional
			Meningkatkan kualitas pengisian jabatan manajerial
			Meningkatkan kualitas pengisian jabatan fungsional
			Meningkatkan kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN
			Meningkatkan hasil pengukuran kinerja PNS Kota Yogyakarta
			Meningkatkan kualitas layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN
			Menurunnya Pelanggaran Disiplin ASN
			Meningkatkan pengembangan kompetensi
		Terwujudnya efektifitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan	Mewujudkan kepatuhan PD terhadap saran dan rekomendasi pemeriksaan
			Meningkatkan Ketaatan Pengelolaan keuangan & aset
			Meningkatkan Kualitas SPIP Perangkat Daerah
			Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah
			Meningkatkan Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah
			Meningkatkan Responsivitas PD
			Meningkatkan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi PD
			Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif) di Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan
		Peningkatan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi legislasi
	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi budgeting		
	Meningkatkan dukungan fasilitasi terhadap agenda DPRD sebagai fungsi pengawasan		

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dalam rangka fasilitasi terhadap agenda DPRD
	Percepatan digitalisasi layanan publik melalui Peningkatan Layanan Komunikasi dan Informatika		Meningkatkan Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemkot Yogyakarta
			Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik
			Penyelenggaraan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
			Pemanfaatan TIK sebagai upaya mitigasi risiko di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity)
			Pengembangan transformasi digital yang memperhatikan harmonisasi teknologi, manusia, dan lingkungan
			Meningkatkan Pelayanan Administrasi Rekomendasi Telekomunikasi
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Meningkatkan Kematangan Statistik Sektoral Perangkat Daerah
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Data Sektoral
	Peningkatan Keamanan Informasi		Meningkatkan Hasil Penilaian Keamanan Informasi
	Peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan masyarakat dan pemanfaatan data kependudukan		Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan
			Meningkatkan kepemilikan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil
			Meningkatkan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan
			Meningkatkan Pengetahuan & Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai SOP SMKI
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Arsip		Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan
			Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			Meningkatkan Penyelesaian Arsip Tertutup
	Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan		Meningkatkan Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah
			Meningkatkan Tertib Administrasi Penatausahaan Pertanahan

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan Tertib Administrasi Pemanfaatan Pertanahan
			Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatkan Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
			Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada
			Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Satpol PP
			Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat
			Peningkatan kerja sama penegakan hukum
		Peningkatan Penyelesaian Potensi Konflik Sosial di Masyarakat	Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan melalui Implementasi nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berdasarkan kepada Pancasila
			Meningkatkan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
			Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Meningkatkan Penyelesaian Potensi Konflik Sosial di Wilayah
5	Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY	Peningkatan pemanfaatan dana keistimewaan	Menguatkan kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
			Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
			Mengembangkan tata ruang keistimewaan
			Memperkokoh pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan

No	MISI RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga

3.4.4. Program Prioritas

Program prioritas merupakan hasil dari proses *cascading* kinerja, yaitu mekanisme perumusan kebijakan pembangunan yang berawal dari visi, dijabarkan ke dalam misi, hingga mencapai level *outcome* yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Program-prioritas disusun untuk memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah dirancang tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dengan adanya instansi pengampu yang melekat sesuai dengan ketugasan dari Perangkat Daerah terkait.

Program prioritas dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029 mengacu pada 8 (delapan) program strategis dari Wali Kota terpilih sebagaimana tercantum dalam dokumen Visi-Misi calon kepala daerah di KPUD, meliputi:

1. Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:
 - a. Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana
 - b. Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian
 - c. Penumbuhan Wirausaha Muda
2. Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:
 - a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat
 - b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga; dan
 - c. Satu Kampung Satu Bidan
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:
 - a. Bela Beli Produk Warga
 - b. Pemajuan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Modernisasi Pasar Tradisional.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:
 - a. Revitalisasi Kampung Wisata
 - b. Ekonomi Olahraga; dan
 - c. Penguatan akses pendanaan pembangunan
5. Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:
 - a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi.
 - b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif; dan
 - c. Perlindungan Hukum bagi Warga
6. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui melalui program unggulan:

- a. Bapak Asuh Keluarga Miskin
 - b. Kampung Layak Huni
 - c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan
7. Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:
- a. Memperkuat kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan
 - b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat
 - c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan
 - d. Memperkokoh pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan
 - e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga
8. Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:
- a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah
 - b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan
 - c. Jogja Tangguh Bencana

Delapan program strategis Wali Kota terpilih tersebut kemudian diselaraskan dengan indikasi program yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang relevan sebagai pengampu. Penyelarasan tersebut dilakukan sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan strategis dapat diimplementasikan secara efektif sehingga program prioritas yang telah ditetapkan memiliki dasar operasional yang kuat dan berorientasi pada hasil seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Rumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Strategis	OPD Pengampu	Program Prioritas
1	Meningkatkan derajat pendidikan warga, melalui program unggulan:		
	• Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Sosial
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan
	• Pengarusutamaan Kurikulum Kepribadian	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengelolaan Pendidikan
		Dinas Kebudayaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
• Penumbuhan Wirausaha Muda	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
2	Meningkatkan kualitas dan keadilan pelayanan kesehatan rakyat, melalui program unggulan:		
	a. Posyandu Paripurna: Gerakan Warga Sehat	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	b. Kartu Keluarga: Jaminan Kesehatan Warga	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	c. Satu Kampung Satu Bidan	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk ekonomi rakyat, melalui program unggulan:		

No.	Program Strategis	OPD Pengampu	Program Prioritas
	a. Bela Beli Produk Warga	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	b. Pemajuan Ekonomi Kreatif	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Bagian Perekonomian dan Kerjasama	Program Perekonomian dan Pembangunan
	c. Modernisasi Pasar Tradisional	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

4	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah, melalui program unggulan:		
	a. Revitalisasi Kampung Wisata	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	b. Ekonomi Olahraga	Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	c. Penguatan akses pendanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			

No.	Program Strategis	OPD Pengampu	Program Prioritas
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

5	Meningkatkan kualitas layanan publik dan kepastian hukum, melalui program unggulan:		
	a. ASN Sejahtera: Peningkatan kesejahteraan, kompetensi, kualitas, dan bersih dari korupsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	b. Penataan Kelembagaan yang Adaptif	Bagian Organisasi – Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
c. Perlindungan Hukum bagi Warga	Bagian Hukum – Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	

6	Meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga, melalui melalui program unggulan:		
	a. Bapak Asuh Keluarga Miskin	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pemberdayaan Sosial
	b. Kampung Layak Huni	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	

No.	Program Strategis	OPD Pengampu	Program Prioritas
	c. Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan	Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Rehabilitasi Sosial

7	Mewujudkan tujuan keistimewaan DIY, melalui program unggulan:		
	a. Memperkuat kelembagaan dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Keistimewaan	Bagian Organisasi – Sekretariat Daerah	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan
	b. Pemajuan kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat	Dinas Kebudayaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
	c. Mengembangkan tata ruang keistimewaan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang
		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
d. Memperkokoh pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan sosial, dan pengembangan kebudayaan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	

No.	Program Strategis	OPD Pengampu	Program Prioritas
	e. Memperkuat akses dana keistimewaan untuk warga	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

8	Meningkatkan kualitas lingkungan dan ketangguhan warga, melalui program unggulan:		
	a. Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan
	b. Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			

No.	Program Strategis	OPD Pengampu	Program Prioritas
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Program Penataan Bangunan Gedung
			Program Penyelenggaraan Jalan
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	c. Jogja Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program pembangunan, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Program ini disusun berdasarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunannya, program-program pembangunan daerah dirancang dengan mempertimbangkan janji politik kepala daerah serta memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia. Dengan demikian, target pembangunan dan alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga implementasi program menjadi lebih realistis dan berkelanjutan.

Sesuai dengan arsitektur perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu:

- Program/Kegiatan Strategis: Program yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap pembangunan daerah. Karena urgensinya yang tinggi, program ini mendapat prioritas dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi. Program strategis juga menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Perangkat Daerah dan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.
- Program/Kegiatan Operasional: Program yang bersifat teknis dan mendukung implementasi kebijakan strategis. Meskipun cakupannya lebih terbatas, program operasional tetap penting untuk menunjang pencapaian target pembangunan daerah.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, setiap program pembangunan daerah harus disertai dengan indikasi kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif. Pagu indikatif merupakan alokasi dana yang telah diproyeksikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah. Penyusunan program pembangunan Kota Yogyakarta juga mempertimbangkan kondisi keuangan yang tersedia agar penetapan target dan anggaran tetap realistis dan berkelanjutan.

Dalam proses ini, dilakukan perumusan indikasi program pembangunan yang mencakup kebutuhan pendanaan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah. Indikasi kebutuhan pendanaan ini juga menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta merinci kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahap awal dalam penyusunan program pembangunan daerah dimulai dengan evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup identifikasi permasalahan di seluruh urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan. Hasil evaluasi tersebut menjadi

acuan dalam merumuskan program yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perencanaan program tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga harus memastikan kesinambungan pembangunan. Program yang dirancang untuk tahun 2030, menjadi landasan bagi penyusunan RKPD 2030 yang akan diterapkan oleh kepala daerah periode berikutnya. Dengan pendekatan ini, kesinambungan pembangunan daerah dapat terjaga dengan baik.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB	
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pendidikan														
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik yg memenuhi kualifikasi												Dinas Pendidikan dan Olahraga	
	Persentase Kelulusan Warga Belajar												Dinas Pendidikan dan Olahraga	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD SMP												Dinas Pendidikan dan Olahraga	
	APM SD SMP												Dinas Pendidikan dan Olahraga	
	Persentase kelulusan warga belajar												Dinas Pendidikan dan Olahraga	
	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD												Dinas Pendidikan dan Olahraga	
	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD												Dinas Pendidikan dan Olahraga	
	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP												Dinas Pendidikan dan Olahraga	
	Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP												Dinas Pendidikan dan Olahraga	
	Angka Partisipasi Kasar SD													Dinas Pendidikan dan Olahraga
	Angka Partisipasi Murni SD													Dinas Pendidikan dan Olahraga
	Angka Partisipasi Kasar SMP													Dinas Pendidikan dan Olahraga
Angka Partisipasi Murni SMP													Dinas Pendidikan dan Olahraga	

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka Partisipasi Kasar PAUD												Dinas Pendidikan dan Olahraga
	Angka Partisipasi Murni PAUD												Dinas Pendidikan dan Olahraga
	Angka Putus sekolah												Dinas Pendidikan dan Olahraga
Kesehatan													
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Posyandu ILP Aktif	16,24%	60%		70%		80%		90%		100		Dinas Kesehatan
	Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas	85%	88%		90%		93%		95%		98		Dinas Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	100%	100%		100%		100%		100%		100		Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATA	Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	100%	100%		100%		100%		100%		100		Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Penerbitan rekomendasi Sertifikat Bidang Kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100%		100%		100%		100%		100		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Dinas Kesehatan	97,34%	85%		85%		85%		85%		85%		Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap	93,36%	84,79%		85,00%		85,21%		85,42%		85,63%		Dinas PUPKP
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	Persentase penerangan jalan	81,53%	83,87%		86,28%		88,68%		91,06%		93,43%		Dinas PUPKP

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	umum ramah lingkungan												
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	88,44%	88,49%		88,52%		88,56%		88,59%		88,62%		Dinas PUPKP
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik	92,63%	92,64%		92,65%		92,66%		92,67%		92,68%		Dinas PUPKP
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung pemerintah Dengan Kondisi Baik	91,92%	92,27%		92,76%		93,22%		93,69%		94,24%		Dinas PUPKP
	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	100%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		Dinas PUPKP
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan kapasitas jasa konstruksi	99,58%	88,42%		89,44%		90,74%		92,04%		93,33%		Dinas PUPKP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	23,80%	23,81%		23,83%		23,84%		23,88%		23,93%		Dinas PUPKP
	Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	19,87%	20,11%		20,43%		20,63%		20,89%		21,16%		Dinas PUPKP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas PUPKP
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	96,13%	97,16%		97,84%		98,51%		99,18%		100,00%		Dinas PUPKP
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemenuhan kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	100%	66,67%		73,33%		80%		86,67%		93,33%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	100%	55,80%		64,64%		73,48%		82,32%		91,16%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	85,26%	85,265%		85,270%		85,272%		85,274%		85,276%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman													
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	50,19%	63,27%		71,98%		80,70%		89,42%		100,00%		Dinas PUPKP
	Persentase pemenuhan rumah layak huni	98,70%	98,86%		99,02%		99,18%		99,34%		99,50%		Dinas PUPKP
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas PUPKP
	Presentase rumah susun yang dipelihara	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas PUPKP
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat													
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		100%		100%		100%		100%		100%		Satpol PP
	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkara		100%		100%		100%		100%		100%		Satpol PP
	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparaturnya Satpol PP		71,49%		76,67%		81,85%		86,93%		92,01%		Satpol PP
	Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat		82,67%		84,43%		86,59%		88,75%		90,91%		Satpol PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	Nilai Indeks Kepuasan												Satpol PP

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja												
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana		0,74333333 3		0,75333333 3		0,76333333 3		0,77333333 3		0,78333333 3		BPBD
	Nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana		0,87666666 7		0,88666666 7		0,89666666 7		0,90666666 7		0,91666666 7		BPBD
	Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana		0,6875		0,6975		0,7075		0,7175		0,7275		BPBD
	Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana		0,46		0,47		0,48		0,49		0,5		BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran		17,75%		35,50%		53,25%		71,01%		88,76%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase kampung yang sudah dibangun Hidran kering sesuai DED		62,96%		66,67%		70,37%		74,07%		77,78%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respon time (15 menit dalam kota)		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai dengan respon time		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	respon time (15 menit)												
	Persentase terlaksananya pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sosial													
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya		93,29		94,59		95,09		95,59		96,09		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi PPKS		83,17%		83,17%		83,17%		83,17%		83,17%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi
	Persentase jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi
	Persentase jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi
	Persentase jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi
	Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	pengemis di luar panti												
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi
	Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		93,24%		93,66%		94,06%		94,47%		94,88%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Imigrasi
Tenaga Kerja													
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja		69,23%		69,23%		69,23%		69,23%		69,23%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal		92,31%		92,49%		92,78%		93,06%		93,61%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja		53,15%		53,08%		53,02%		52,95%		52,97%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rerata persentase Perusahaan yang mewujudkan Kesejahteraan Pekerja		50,69%		51,30%		51,91%		52,23%		52,86%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Transmigrasi													

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peminat Transmigrasi yang ditempatkan		16%		17,78%		18,60%		19,05%		19,51%		Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Berdaya												
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Ketercapaian Indikator Kota Layak Anak												
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Capaian KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)												
Pangan													
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari		28		29		30		31		32		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi (AKE)		2775,43		2777,13		2778,83		2780,53		2782,23		Dinas Pertanian dan Pangan
	Angka Kecukupan Energi (AKE)		2332,3		2334,0		2335,7		2337,4		2339,1		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)		95,5		95,5		95,5		97,8		97,8		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman		70,04		70,31		70,58		70,84		71,11		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman		84,58		85,00		85,42		85,83		86,25		Dinas Pertanian dan Pangan
Pertanian													

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah	83,58%	83,58%		83,82%		84,06%		84,29%		84,51%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	79,30%	80,44%		82,43%		82,81%		83,19%		83,48%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai rekomendasi	0,00%	6%		12%		18%		20%		26%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	49,17%	68,44%		74,72%		81,01%		83,80%		86,59%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	83,58%	89,71%		92,68%		94,66%		96,64%		98,42%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100%	39,61%		51,69%		63,77%		75,85%		87,92%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP		44,44%		55,56%		66,67%		77,78%		88,89%		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Lingkungan Hidup													
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah disusun, dilakukan pemantauan dan evaluasi, dan dilakukan pengendalian.		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup		77,33%		78,17%		79,00%		79,83%		80,67%		Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku		60,53%		61,40%		62,28%		63,16%		64,04%		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3		18,47%		19,07%		19,65%		20,23%		20,79%		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup		33,30		33,43		33,55		33,68		33,8		Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan		77,58		78,04		78,48		78,9		7,31		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>		23,346%		23,347%		23,349%		23,351%		23,351%		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Presentase kampung ProKlim												
	Presentase sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata												
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah		19,09%		19,16%		19,24%		19,31%		19,39%		Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Penanganan Sampah		66,53%		67,16%		67,78%		68,41%		69,03%		Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase pemanfaatan data kependudukan												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase SOP SMKI yang diimplementasikan dalam Pengelolaan Informasi dan Keamanan SIAK												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate												
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Tertangani												
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani												
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna												
Perhubungan													
Program Penyelenggaraan Lalu	Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio)												Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum												Dinas Perhubungan
	Persentase pendukung penyelenggaraan perparkiran yang dikelola secara resmi dan memenuhi standart												Dinas Perhubungan
	Persentase kendaraan laik jalan												Dinas Perhubungan
	Persentase kepatuhan lalu lintas												Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika													
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta		76,60		76,80		77,00		77,20		77,40		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif		47,16		56,6		66,03		75,47		84,90		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai domain layanan Indeks SPBE		4,36		4,38		4,40		4,42		4,50		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Nilai sub domain teknologi informasi SPBE		3,80		3,90		4,00		4,10		4,20		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	Nilai Domain Manajemen SPBE		1,6		1,8		2		2,2		2,4		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik		15		17,5		20		22,5		25		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan		590		600		605		610		615		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANANAN INFORMASI	Nilai Keamanan Informasi		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah													
PEMBERDAYAAN UMKM	Jumlah Wirausaha Baru												
PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM naik kelas												
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM koperasi yang tersertifikasi												
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik												
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Jumlah koperasi sehat												
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi sehat												
Penanaman Modal													
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor baru tahun n		6.898		7.174		7.439		7.715		8.000		DPMPTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor baru tahun n		6.898		7.174		7.439		7.715		8.000		DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase LKPM yang dilaporkan investor pada tahun n		46,17%		47,42%		48,67%		49,92%		51,17%		DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		B (Nilai)		B (Nilai)		B (Nilai)		B (Nilai)		B (Nilai)		DPMPTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengunjung yang memanfaatkan data		80%		80%		82%		82%		84%		DPMPTSP
Kelautan dan Perikanan													
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya		99,62%		99,69%		99,77%		99,85%		99,92%		Dinas Pertanian dan Pangan

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		99,94%		99,95%		99,96%		99,98%		99,99%		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular strategis		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PAD Perikanan		100.000.000		100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		Dinas Pertanian dan Pangan
Pertanian													
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi petani tanaman pangan/padi		1,6%		1,8%		2,3%		2,5%		2,9%		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYULUAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi petani tanaman hortikultura		5%		9,52%		10,87%		11,76%		12,28%		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali bencana zoonosis prioritas		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang memadai		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PAD Pertanian		152.672.000		153.785.000		155.866.000		157.130.000		160.590.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PAD Kesehatan Hewan		414.425.000		427.675.000		443.765.000		459.659.000		477.128.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase hasil pengawasan peredaran obat hewan yang sesuai peraturan		21%		22%		23%		24%		25%		Dinas Pertanian dan Pangan
Kebudayaan													

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi		54,54%		59,86%		65,58%		70%		73.34%		
	Persentase Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya		39,11%		41,56%		44,01%		46,45%		48,89%		
	Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra dan Sejarah		82,77%		83,27%		83,77%		84,27%		84,77%		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya		84%		84,50%		85%		85,50%		86%		
	Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan		10		15		20		25		30		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Taman Pintar		750.000		755.000		760.000		765.000		770.000		
Pariwisata													
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima												
	Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi												
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara												
	Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara												
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan Kompetensinya												
	Persentase Lembaga Pariwisata Berbasis Masyarakat yang Meningkatkan												

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Perpusatakaan dan Kearsipan													
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase Perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)		44,91%		49,54%		54,17%		58,80%		64,43%		
	Indeks kepuasan layanan perpustakaan		83,97		84,47		84,97		85,45		85,97		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Nusantara yang didayagunakan		50		100		150		200		250		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori memuaskan		50%		54%		58%		62%		66%		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan		2400		3400		4400		5400		5500		
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	persentase arsip statis tertutup yang dilayankan		100%		100%		100%		100%		100%		
Perdagangan													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan BLUD Pusat Bisnis												
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat												
	Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola												
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usah yang meningkat omsetnya												
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga												

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rasio Ketersediaan Bapokting Terhadap Kebutuhan Bapokting												
	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting												
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas Perdagangan												
Sekretariat Daerah													
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis bina mental		90%		91%		92%		93%		94%		Sekretariat Daerah
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kesejahteraan sosial		90%		91%		92%		93%		94%		Sekretariat Daerah
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kesejahteraan masyarakat		90%		91%		92%		93%		94%		Sekretariat Daerah
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif		82,35%		88,24%		90,00%		91%		92%		Sekretariat Daerah
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD		90%		91%		92%		93%		94%		Sekretariat Daerah
	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik		84,62%		88,46%		92,31%		92,31%		96,15%		Sekretariat Daerah

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(berdasarkan laporan)												
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan		90%		91%		92%		93%		94%		Sekretariat Daerah
	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan		98,57%		98,60%		98,63%		98,66%		98,69%		Sekretariat Daerah
	Indeks tata kelola pengadaan		84,5		85		85,5		86		86,5		Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sekretariat Daerah
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan		75%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan		90%		91%		92%		93%		94%		Sekretariat Daerah
	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah		Cepat Berkembang (nilai 395)		Cepat Berkembang (nilai 396)		Cepat Berkembang (nilai 396,5)		Cepat Berkembang (nilai 397)		Cepat Berkembang (nilai 397,5)		Sekretariat Daerah
	Indeks Reformasi Hukum		AA		AA		AA		AA		AA		Sekretariat Daerah
	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti		95,25%		95,93%		96,00%		96,50%		97,00%		Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik		90%		91%		92%		93%		94%		Sekretariat Daerah
	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum		90%		91%		92%		93%		94%		Sekretariat Daerah
	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan		81,6		81,7		81,8		81,9		82,0		Sekretariat Daerah

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Setda		B (Baik)		B (Baik)		B (Baik)		B (Baik)		B (Baik)		Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD													
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu		%		81,82%		84,62%		86,67%		88,24%		Sekretariat DPRD
	Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi		%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat DPRD
	Persentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi		%		85,71%		88,54%		90,86%		93,34%		Sekretariat DPRD
	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD		%		91,80%		93,44%		95,08%		96,72%		Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai AKIP, Nilai SPIP		A		A		A		A		A		Sekretariat DPRD
	Nilai Penguatan Keuangan dan aset Sekretariat DPRD		%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat DPRD
	Indeks kepuasan masyarakat Sekretariat DPRD		%		81%		83%		85%		87%		Sekretariat DPRD
Perencanaan													
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja		92,87		92,88		92,89		92,9		92,91		Bappeda
	Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah		60,00%		70,00%		80,00%		80,00%		80,00%		Bappeda
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian		90,47%		91,81%		93,16%		94,50%		95,85%		Bappeda
	Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat		84,31%		85,84%		87,36%		88,89%		90,41%		Bappeda

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												
	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		81,07%		83,84%		86,60%		89,36%		92,12%		Bappeda
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti		90%		90,50%		91%		91,50%		92%		Bappeda
	Skor Rata-Rata Hasil Inovasi Perangkat Daerah		76,00		77,00		78,00		79,00		80,00		Bappeda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A		A		A		A		A		Bappeda
	Nilai Penguatan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												Bappeda
	Nilai IKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah												
Keuangan													
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dokumen penganggaran												BPKAD
	Persentase kesesuaian DPA dengan APBD												BPKAD
	Persentase penyerapan belanja daerah												BPKAD
	Persentase realisasi pendapatan dana transfer												BPKAD
	Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik												BPKAD

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB	
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD													BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD kategori baik													BPKAD
	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)													BPKAD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi pajak daerah													BPKAD
	Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar													BPKAD
	Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD													BPKAD
Kepegawaian														
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan		100		100		100		100		100		100	BKPSDM
	Persentase keterisian jabatan manajerial sesuai kompetensi		100		100		100		100		100		100	BKPSDM
	Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi		100		100		100		100		100		100	BKPSDM
	Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan		100		100		100		100		100		100	BKPSDM
	Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai		90		92		93,99		96,01		98,01			BKPSDM

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian		100		100		97,73		100		100		BKPSDM
	Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi		100		100		100		100		100		BKPSDM
	Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah		100		100		100		100		100		BKPSDM
	Persentase ASN yang melanggar disiplin		97,01		97,5		98		98,51		99		BKPSDM
	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN		100		100		100		100		100		BKPSDM
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi		88,35		90,2		90,6		91,29		92,16		BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Hasil Penilaian AKIP dan SPIP oleh Inspektorat		A		A		A		A		A		BKPSDM
Inspektorat													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal		95,50%		96,00%		96,25%		97,00%		97,25%		Inspektorat
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset		92,00%		96%		95,00%		96,6%		96,6%		Inspektorat
	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00		61,90%		66,67%		71,43%		78,57%		85,71%		Inspektorat
	Persentase Jumlah PD dengan		64,29%		73,81%		83,33%		92,86%		100,00%		Inspektorat

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	capaian evaluasi SAKIP > 86,0												
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM		11,90%		11,90%		14,29%		16,67%		19,05%		Inspektorat
	Persentase PD dengan tingkat responsivitas > 90%		93,75%		93,75%		100,00%		100,00%		100,00%		Inspektorat
	Persentase PD dengan nilai MRI >3,00		97,62%		97,62%		100,00%		100,00%		100,00%		Inspektorat
	Persentase PD dengan IEPK > 2,8		52,38%		57,14%		61,90%		66,67%		71,43%		Inspektorat
	Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		Inspektorat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan		1,99		2,08		2,1		2,14		2,18		Inspektorat
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta		89,91		89,93		89,95		89,95		89,97		Inspektorat
Kewilayahan													
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren												Kemantren
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan												Kemantren
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti												Kemantren
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti												Kemantren

Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kesatuan Bangsa dan Politik													
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM Peningkatan Kelembagaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi wilayah												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai alat ukur. IKU berfungsi sebagai ukuran keberhasilan strategis, yang dikompilasi dari indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur utama pencapaian pembangunan secara menyeluruh. IKD mencerminkan capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih luas yang diklasifikasikan ke dalam Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Baik IKU maupun IKD berlaku dalam periode 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai tahun transisi. Pada tahun tersebut, indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 tetap berlaku, tetapi pencapaiannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Oleh karena itu, indikator tahun 2030 juga menjadi dasar penyusunan RPJMD lima tahun berikutnya, guna memastikan kesinambungan kebijakan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Tidak semua indikator dalam urusan pemerintahan dimasukkan dalam RPJMD. Hanya indikator yang strategis, berdampak luas, serta berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan layanan publik yang dimasukkan dalam dokumen RPJMD. Indikator lainnya tetap digunakan dalam Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai bagian dari perencanaan operasional masing-masing sektor.

Setiap indikator yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Dengan sistem ini, kebijakan yang dirancang tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Rincian IKU dan IKD, beserta baseline data tahun 2024 dan target tahunan hingga akhir periode perencanaan, disajikan dalam Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029

Misi	Sasaran	Indikator
Misi 1 Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan akses Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah Harapan laman Sekolah
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup
Misi 2 Mewujudkan	Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas,	Indeks Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Misi	Sasaran	Indikator
infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari	lingkungan hidup yang lestari serta ketahanan iklim dan bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)
		IKLH
Misi 3 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan kreatif berbasis potensi sumber daya lokal	Menurunnya kemiskinan masyarakat	Angka Kemiskinan
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Rata-rata tingkat perkembangan kewilayahan
	Meningkatnya perekonomian yang merata dan berkeadilan	Angka Pertumbuhan Ekonomi
Angka Pengangguran		
Misi 4 Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi dan berkeadilan, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945	Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan	Nilai AKIP
	Meningkatnya kondusivitas daerah	Indeks Harmoni
Misi 5 Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY pemerintahan daerah yang bersih		

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		Target Tahun				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	89,10	89,11	89,12	89,13	89,14	89,15	89,16
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	12,12	12,13	12,14	12,15	12,16	12,17	12,18
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	17,66	17,67	17,68	17,69	17,70	17,71	17,72
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,73	75,74	75,75	75,76	75,77	75,78	75,79
5	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	20.603	20.613	20.623	20.633	20.643	20.653	20.663
6	Indeks Gini	Nilai	0,453	0,385 - 0,450	0,381 - 0,446	0,380 - 0,445	0,379 - 0,444	0,378 - 0,443	0,377 - 0,442
7	Angka Kemiskinan	Persen	6,26	5,84 - 6,26	5,55 - 6,25	5,54 - 6,24	5,53 - 6,23	5,47 - 6,22	5,46 - 6,21
	Indeks Keberdayaan Masyarakat								
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	75,70	75,71	75,72	75,73	75,74	75,75	75,76
9	Rata-rata Tingkat Perkembangan Wilayah	Angka	393,91	393,92	393,93	393,94	393,91	393,91	393,91
10	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,05 - 6,02	5,06 - 6,03	5,07 - 6,04	5,08 - 6,05	5,09 - 6,06	5,10 - 6,07
11	Angka Pengangguran	Persen	5,80	5,42 - 5,80	5,41 - 5,71	5,30 - 5,61	5,20 - 5,51	5,10 - 5,41	5,00 - 5,31

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun						
			BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Indeks Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Nilai	-	-	-	-	-		
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	55,53	55,54	55,55	55,56	55,57	55,58	55,59
14	Indeks Risiko Bencana	Nilai	66,62	66,61	66,60	66,59	66,58	66,57	66,56
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A	A	A	A	A	A	A
16	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	A	A	A	A	A	A	A
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,58	85,59	85,60	85,61	85,62	85,63	85,64
18	Nilai AKIP	Kategori	A	A	A	A	A	AA	AA
19	Indeks Harmoni	Kategori	Sangat Bagus Sekali	Sangat Bagus Sekali	Sangat Bagus Sekali	Sangat Bagus Sekali	Sangat Bagus Sekali	Sangat Bagus Sekali	Sangat Bagus Sekali

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	%	85,26					
2	Indeks Ketahanan Pangan		84,21					
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan							
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	55,53					
5	Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman	%	100					
6	Timbulan sampah yang dikelola melalui 3R	%	50,3					
7	Indeks Risiko Bencana	Angka	64,22					
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,69					
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,05					
2	PDRB Per Kapita							
3	Indeks Gini	Angka	0,449					
4	Angka Kemiskinan	%	6,26					
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,8					
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	89,1					
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,73					
8	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,22					
9	Persentase balita gizi kurang	%	5,48					
10	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,447					
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Rata-Rata Lama Sekolah		12,12					
2	Harapan Lama Sekolah		17,66					
3	Angka Literasi/Numerasi		88,43					
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		93,11					
5	Indeks Masyarakat Digital Indonesia		50,64					
6	Persentase Pekerja yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan	%	45,4					
7	Indeks Pembangunan Olahraga	Angka	0,387					
8	Rasio Lulusan S1/S2/S3		0,18					
9	Angka Ketergantungan		41,15					
10	Rasio Penduduk yang Bekerja		0,99					
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		59,96					
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		64,19					
13	Indeks Inovasi Daerah	Angka	62,38					
14	Rasio PDRB Industri Pengolahan		12,02					
15	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	12,02					
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	3,12					
17	Ekspor Barang dan Jasa	%	-4,46					
18	Kecepatan Rata-Rata Kendaraan	km/jam	25,76					
19	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	1,17					
20	Tingkat Kriminalitas (Crime Rate)	Kasus/jiwa	153,27					
21	Angka Kriminalitas Tertangani	%	80,88					
22	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100					
23	Persentase Penegakan PERDA	%	100					

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
24	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan perlindungan masyarakat	%	100					
25	Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100					
26	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha		4					
27	Tingkat Inflasi	Angka	1,73					
IV	PELAYANAN UMUM							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	89,16					
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,53					
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	85,19					
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,5					
5	Indeks Reformasi Hukum	Angka						
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,39					
	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
A	Pendidikan							
1	% pendidik yg memenuhi kualifikasi							
2	APK SD SMP							
3	APM SD SMP							
4	% kelulusan warga belajar							
B	Kesehatan							
1	Persentase Posyandu ILP Aktif	%		60	70	80	90	100

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
2	Persentase pengendalian penyakit menular dan tidak menular prioritas	%		88	90	93	95	98
3	Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	%		100	100	100	100	100
4	Persentase ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai standar	%		100	100	100	100	100
5	Persentase kemantren yang melaksanakan Germas	%		100	100	100	100	100
6	Persentase Penerbitan rekomendasi Sertifikat Bidang Kesehatan	%		100	100	100	100	100
7	Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%		100	100	100	100	100
8	IKM Dinas Kesehatan	%		85	85	85	85	85
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase jalan dan jembatan kondisi mantap	%	93,36	84,79	85	85,21	85,42	85,63
2	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	%	81,53	83,87	86,28	88,68	91,06	93,43
3	Persentase pemenuhan drainase kondisi baik	%	88,44	88,49	88,52	88,56	88,59	88,62
4	Persentase talud sungai dan saluran irigasi dalam kondisi baik	%	92,63	92,64	92,65	92,66	92,67	92,68
5	Persentase Bangunan Gedung pemerintah Dengan Kondisi Baik	%	91,92	92,27	92,76	93,22	93,69	94,24
6	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase peningkatan kapasitas jasa konstruksi	%	99,58	88,42	89,44	90,74	92,04	93,33
8	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	%	23,8	23,81	23,83	23,84	23,88	23,93
9	Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	%	19,87	20,11	20,43	20,63	20,89	21,16

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
10	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	%	96,13	97,16	97,84	98,51	99,18	100
12	Persentase Pemenuhan kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	%		66,67	73,33	80	86,67	93,33
13	Persentase Ketaatan Terhadap Kebijakan dan Peraturan Tata Ruang	%		55,8	64,64	73,48	82,32	91,16
14	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%		85,265	85,27	85,272	85,274	85,276
D	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
1	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%	50,19	63,27	71,98	80,7	89,42	100
2	Persentase pemenuhan rumah layak huni	%	98,7	98,86	99,02	99,18	99,34	99,5
3	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	%	100	100	100	100	100	100
	Presentase rumah susun yang dipelihara	%	100	100	100	100	100	100
E	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Pengendalian Potensi Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%		100	100	100	100	100
2	Persentase penyelesaian pelanggaran perda dan perkada	%		100	100	100	100	100
3	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparaturn Satpol PP	%		71,49	76,67	81,85	86,93	92,01
4	Persentase masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam turut Mewujudkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat	%		82,67	84,43	86,59	88,75	90,91
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Angka						

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
6	Nilai indeks prioritas Efektivitas Mitigasi Bencana	Angka		0,743	0,753	0,763	0,773	0,783
7	Nilai indeks prioritas Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Angka		0,877	0,887	0,897	0,907	0,917
8	Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Penanganan Darurat bencana	Angka		0,6875	0,6975	0,7075	0,7175	0,7275
9	Nilai indeks prioritas Peningkatan kualitas Sistem Pemulihan Bencana	Angka		0,46	0,47	0,48	0,49	0,5
10	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	%		100	100	100	100	100
11	Persentase edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	%		17,75	35,5	53,25	71,01	88,76
12	Persentase kampung yang sudah dibangun Hidran kering sesuai DED	%		62,96	66,67	70,37	74,07	77,78
13	Persentase penanggulangan kebakaran sesuai respontime (15 menit dalam kota)	%		100	100	100	100	100
14	Persentase keterlibatan REDKAR dalam pemadaman kebakaran sesuai dengan respontime	%		100	100	100	100	100
15	Persentase penyelamatan yang membahayakan manusia dalam kota sesuai respontime (15 menit)	%		100	100	100	100	100
16	Persentase terlaksananya pelayanan penunjang keselamatan dan resiko kebakaran dalam kota dan luar kota	%		100	100	100	100	100
F	Sosial							
1	Persentase PSKS yang berdaya	%		93,29	94,59	95,09	95,59	96,09
2	Persentase Rehabilitasi PPKS	%		83,17	83,17	83,17	83,17	83,17
3	Persentase jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%		100	100	100	100	100

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
4	Persentase jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	%		100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	%		100	100	100	100	100
6	Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	%		100	100	100	100	100
7	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	%		100	100	100	100	100
8	Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan	%		100	100	100	100	100
9	Persentase Masyarakat Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%		93,24	93,66	94,06	94,47	94,88
10	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%		100	100	100	100	100
G	Tenaga Kerja							
1	Persentase Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	%		69,23%	69,23%	69,23%	69,23%	69,23%
2	Persentase penempatan tenaga kerja peserta pelatihan pada sektor formal dan non formal	%		92,31%	92,49%	92,78%	93,06%	93,61%
3	Persentase penempatan tenaga kerja	%		53,15%	53,08%	53,02%	52,95%	52,97%
4	Rerata persentase Perusahaan yang mewujudkan Kesejahteraan Pekerja	%		50,69%	51,30%	51,91%	52,23%	52,86%
H	Transmigrasi							
1	Persentase Peminat Transmigrasi yang ditempatkan							

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
		%		16%	17,78%	18,60%	19,05%	19,51%
I	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase Perempuan Berdaya							
2	Ketercapaian Indikator Kota Layak Anak							
3	Capaian KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)							
J	Pangan							
1	Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari	%		28	29	30	31	32
2	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Angka		2775,43	2777,13	2778,83	2780,53	2782,23
3	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Angka		2332,3	2334,0	2335,7	2337,4	2339,1
4	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)	%		95,5	95,5	95,5	97,8	97,8
5	Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman	%		70,04	70,31	70,58	70,84	71,11
6	Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman	%		84,58	85,00	85,42	85,83	86,25
K	Pertanahan							
1	Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Tanah	%	83,58%	83,58%	83,82%	84,06%	84,29%	84,51%
2	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot	%	79,30%	80,44%	82,43%	82,81%	83,19%	83,48%
3	Persentase Pemanfaatan Tanah Negara sesuai rekomendasi	%	0,00%	6%	12%	18%	20%	26%
4	Persentase Permasalahan Pertanahan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	%	49,17%	68,44%	74,72%	81,01%	83,80%	86,59%
6	Persentase Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	%	83,58%	89,71%	92,68%	94,66%	96,64%	98,42%

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
7	Persentase Pengawasan Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	%	100%	39,61%	51,69%	63,77%	75,85%	87,92%
8	Persentase Permasalahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%		44,44%	55,56%	66,67%	77,78%	88,89%
L	Lingkungan Hidup							
1	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah disusun, dilakukan pemantauan dan evaluasi, dan dilakukan pengendalian.	%		100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	%		77,33%	78,17%	79,00%	79,83%	80,67%
3	Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku	%		60,53%	61,40%	62,28%	63,16%	64,04%
4	Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	%		18,47%	19,07%	19,65%	20,23%	20,79%
5	Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup	%		33,30	33,43	33,55	33,68	33,8
6	Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	%		77,58	78,04	78,48	78,9	7,31
7	<i>Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	%		23,346%	23,347%	23,349%	#####	#####
8	Persentase kampung ProKlim	%						
9	Persentase sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata	%						
10	Persentase Pengurangan Sampah	%		19,09%	19,16%	19,24%	19,31%	19,39%
11	Persentase Penanganan Sampah	%		66,53%	67,16%	67,78%	68,41%	69,03%
M	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan							
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil							
3	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan							
4	Persentase pemanfaatan data kependudukan							
5	Persentase SOP SMKI yang diimplementasikan dalam Pengelolaan Informasi dan Keamanan SIAK							
6	Persentase Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
N	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Total Fertility Rate							
2	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Tertangani							
3	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Tertangani							
4	Persentase Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera Paripurna							
O	Perhubungan							
1	Kinerja ruas jalan perkotaan (VC ratio)							
2	Persentase ketersediaan infrastruktur angkutan umum							
3	Persentase pendukung penyelenggaraan perparkiran yang dikelola secara resmi dan memenuhi standart							
4	Persentase kendaraan laik jalan							
5	Persentase kepatuhan lalu lintas							
P	Komunikasi dan Informatika							

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Nilai persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta	Angka		76,60	76,80	77,00	77,20	77,40
2	Persentase perangkat daerah dengan predikat informatif	%		47,16	56,6	66,03	75,47	84,90
3	Nilai domain layanan Indeks SPBE	Angka		4,36	4,38	4,40	4,42	4,50
4	Nilai sub domain teknologi informasi SPBE	Angka		3,80	3,90	4,00	4,10	4,20
5	Persentase rekomendasi infrastruktur pasif telekomunikasi yang dapat dilayani	%		100	100	100	100	100
6	Nilai Domain Manajemen SPBE	Angka		1,6	1,8	2	2,2	2,4
7	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektor (IKSS) minimal baik	%		15	17,5	20	22,5	25
8	Persentase Data Statistik Sektor yang Dipublikasikan	%		590	600	605	610	615
9	Nilai Keamanan Informasi	Angka		100	100	100	100	100
Q	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Jumlah Wirausaha Baru							
2	Jumlah UMKM naik kelas							
3	Jumlah SDM koperasi yang tersertifikasi							
4	Jumlah koperasi yang memiliki akuntabilitas baik							
5	Jumlah koperasi sehat							
R	PENANAMAN MODAL							
1	Jumlah investor baru tahun n	Angka		6.898	7.174	7.439	7.715	8.000
2	Jumlah investor baru tahun n	Angka		6.898	7.174	7.439	7.715	8.000
3	Persentase LKPM yang dilaporkan investor pada tahun n	%		46,17%	47,42%	48,67%	49,92%	51,17%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		B (Nilai)	B (Nilai)	B (Nilai)	B (Nilai)	B (Nilai)
5	Persentase pengunjung yang memanfaatkan data	%		80%	80%	82%	82%	84%

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
S	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Prestasi cabang olahraga							
2	Persentase sarana prasarana olahraga yang representatif							
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan							
T	STATISTIK							
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kematangan Statistik Sektoral (IKSS) minimal baik	%		15	17,5	20	22,5	25
2	Persentase Data Statistik Sektoral yang Dipublikasikan	Data		590	600	605	610	615
U	Persandian							
1	Nilai Keamanan Informasi	Nilai		100	100	100	100	100
V	Kebudayaan							
1	Persentase Objek Warisan Budaya yang Diapresiasi	%		54,54%	59,86%	65,58%	70%	73.34%
2	Persentase Keaktifan Sanggar/ Lembaga Budaya	%		39,11%	41,56%	44,01%	46,45%	48,89%
3	Tingkat Literasi Masyarakat terhadap Bahasa Sastra dan Sejarah	%		82,77%	83,27%	83,77%	84,27%	84,77%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	%		84%	84,50%	85%	85,50%	86%
5	Jumlah Pemanfaatan Ruang-ruang Ekspresi Budaya di Taman Budaya Embung Giwangan	Angka		10	15	20	25	30
6	Jumlah Pengunjung Taman Pintar	Pengunjung		750.000	755.000	760.000	765.000	770.000

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
W	Perpustakaan							
1	persentase Perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	%		44,91%	49,54%	54,17%	58,80%	64,43%
	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	Angka		83,97	84,47	84,97	85,45	85,97
X	Kearsipan							
1	Jumlah Naskah Nusantara yang didayagunakan	Naskah		50	100	150	200	250
2	persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori memuaskan	%		50%	54%	58%	62%	66%
3	jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Arsip		2400	3400	4400	5400	5500
4	persentase arsip statis tertutup yang dilayankan	%		100%	100%	100%	100%	100%
Y	Kelautan dan Perikanan							
1	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya							
2	Persentase kenaikan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan							
3	PAD Perikanan							
Z	Pariwisata							
1	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang Berstandar Layanan Prima							
2	Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi yang Tersertifikasi							
3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara							
4	Jumlah Pergerakan Wisatawan Mancanegara							

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
5	Persentase Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan Kompetensinya							
6	Persentase Lembaga Pariwisata Berbasis Masyarakat yang Meningkatkan							
A A	Pertanian							
1	Cakupan pengembangan Kawasan Pangan Lestari	Angka		28	29	30	31	32
2	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Angka		2775,43	2777,13	2778,83	2780,53	2782,23
3	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Angka		2332,3	2334,0	2335,7	2337,4	2339,1
4	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan (FSVA)	%		95,5	95,5	95,5	97,8	97,8
5	Persentase pangan asal tumbuhan yang bermutu dan aman	%		70,04	70,31	70,58	70,84	71,11
6	Persentase pangan asal hewan dan perikanan yang bermutu dan aman	%		84,58	85,00	85,42	85,83	86,25
B B	Perdagangan							
1	Pendapatan BLUD Pusat Bisnis							
2	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar rakyat							
3	Pendapatan retribusi sektor perdagangan yang dikelola							
4	Persentase pelaku usaha yang meningkatkan omsetnya							
5	Persentase pelaku usaha yang tertib niaga							
6	Rasio Ketersediaan Bapokting Terhadap Kebutuhan Bapokting							
7	Persentase kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting							
8	Persentase Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah							

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
9	Nilai IKM Dinas Perdagangan							
C C	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis bina mental	%		90%	91%	92%	93%	94%
2	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kesejahteraan sosial	%		90%	91%	92%	93%	94%
3	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kesejahteraan masyarakat	%		90%	91%	92%	93%	94%
4	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis perekonomian, UMKM, dan ekonomi kreatif	%		82,35%	88,24%	90,00%	91%	92%
5	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis kebijakan BUMD dan BLUD	%		90%	91%	92%	93%	94%
6	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	%		84,62%	88,46%	92,31%	92,31%	96,15%
7	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan	%		90%	91%	92%	93%	94%
8	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	%		98,57%	98,60%	98,63%	98,66%	98,69%
9	Indeks tata kelola pengadaan	%		84,5	85	85,5	86	86,5
10	Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah	Nilai		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
11	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan	%		75%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis tata pemerintahan	%		90%	91%	92%	93%	94%
13	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Nilai		Cepat Berkemb	Cepat Berkemb	Cepat Berkemb	Cepat Berkemb	Cepat Berkemb

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
				ang (nilai 395)	ang (nilai 396)	ang (nilai 396,5)	ang (nilai 397)	ang (nilai 397,5)
14	Indeks Reformasi Hukum	Nilai		AA	AA	AA	AA	AA
15	Persentase kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	%		95,25%	95,93%	96,00%	96,50%	97,00%
16	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pelayanan publik	%		90%	91%	92%	93%	94%
17	Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis administrasi umum	%		90%	91%	92%	93%	94%
18	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Angka		81,6	81,7	81,8	81,9	82,0
	IKM Setda	Angka		B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)	B (Baik)
D D	Sekretariat DPRD							
1	Persentase fasilitasi pengesahan perda yang tepat waktu	%		%	81,82%	84,62%	86,67%	88,24%
2	Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi	%		%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pengesahan dokumen pengawasan yang di fasilitasi	%		%	85,71%	88,54%	90,86%	93,34%
4	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD	%		%	91,80%	93,44%	95,08%	96,72%
5	Nilai AKIP, Nilai SPIP	Nilai		A	A	A	A	A
6	Nilai Penguatan Keuangan dan aset Sekretariat DPRD	%		%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks kepuasan masyarakat Sekretariat DPRD	%		%	81%	83%	85%	87%
E E	PERENCANAAN							

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Persentase Capaian Target Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja	%		92,87	92,88	92,89	92,9	92,91
2	Persentase Ketercapaian Sasaran Daerah	%		60,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%
3	Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian	%		90,47%	91,81%	93,16%	94,50%	95,85%
4	Persentase Ketercapaian Sasaran Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		84,31%	85,84%	87,36%	88,89%	90,41%
5	Persentase Ketercapaian Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%		81,07%	83,84%	86,60%	89,36%	92,12%
6	Persentase Hasil Riset yang Ditindaklanjuti	%		90%	90,50%	91%	91,50%	92%
7	Skor Rata-Rata Hasil Inovasi Perangkat Daerah	%		76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
8	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Angka		A	A	A	A	A
9	Nilai Penguatan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
10	Nilai IKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
F	KEUANGAN							
F								
1	Persentase ketepatan waktu penetapan dokumen penganggaran							
2	Persentase kesesuaian DPA dengan APBD							
3	Persentase penyerapan belanja daerah							
4	Persentase realisasi pendapatan dana transfer							
5	Persentase perangkat daerah dengan laporan keuangan kategori baik							
6	Persentase ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD							

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
7	Persentase perangkat daerah dengan pengelolaan BMD kategori baik							
8	Persentase pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)							
9	Persentase realisasi pajak daerah							
10	Persentase tunggakan pajak daerah yang terbayar							
11	Persentase ketercapaian PAD non pajak, non denda, non bunga, non BLUD, non BUMD							
G G	KEPEGAWAIAN							
1	Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan perencanaan	%		100	100	100	100	100
2	Persentase keterisian jabatan manajerial sesuai kompetensi	%		100	100	100	100	100
3	Persentase keterisian jabatan fungsional sesuai kompetensi	%		100	100	100	100	100
4	Persentase Ketepatan waktu layanan kesejahteraan	%		100	100	100	100	100
5	Persentase pegawai dengan hasil penilaian pengukuran kinerja minimal Menguasai	%		90	92	93,99	96,01	98,01
6	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi kepegawaian	%		100	100	97,73	100	100
7	Persentase modul sistem informasi yang terintegrasi	%		100	100	100	100	100
8	Persentase pemenuhan formasi pegawai Perangkat Daerah	%		100	100	100	100	100
9	Persentase ASN yang melanggar disiplin	%		97,01	97,5	98	98,51	99
10	Persentase ketepatan waktu layanan administrasi pengembangan kompetensi ASN	%		100	100	100	100	100
11	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi	%		88,35	90,2	90,6	91,29	92,16
12	Hasil Penilaian AKIP dan SPIP oleh Inspektorat	Angka		A	A	A	A	A

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
H H	INSPEKTORAT							
1	Rata-rata Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal	%		95,50%	96,00%	96,25%	97,00%	97,25%
2	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Yang Terkait Keuangan & Aset	%		92,00%	96%	95,00%	96.6%	96.6%
3	Persentase OPD dengan nilai SPIP > 3,00	%		61,90%	66,67%	71,43%	78,57%	85,71%
4	Persentase Jumlah PD dengan capaian evaluasi SAKIP > 86,0	%		64,29%	73,81%	83,33%	92,86%	100,00%
5	Persentase PD yang diusulkan WBK/WBBM	%		11,90%	11,90%	14,29%	16,67%	19,05%
6	Persentase PD dengan tingkat responsivitas > 90%	%		93,75%	93,75%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Persentase PD dengan nilai MRI >3,00	%		97,62%	97,62%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Persentase PD dengan IEPK > 2,8	%		52,38%	57,14%	61,90%	66,67%	71,43%
9	Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Aktifitas dan Kualitas Pengawasan	Angka		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
10	Nilai Kapabilitas APIP Pada Komponen Dukungan Pengawasan	Angka		1,99	2,08	2,1	2,14	2,18
11	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta	Angka		89,91	89,93	89,95	89,95	89,97
II	UNSUR KEWILAYAHAN							
2	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Pemerintahan Kemantren							
3	Nilai Evaluasi Kinerja Bidang Kemasyarakatan							
4	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti							

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
5	Persentase hasil koordinasi stakeholder penyelenggara pemerintah tingkat kemantren yang ditindaklanjuti							
JJ	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan							
2	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik							
3	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta							
4	Presentase peningkatan ketahanan ekonomi sosial dan budaya di wilayah							
5	Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi wilayah							

BAB V

PENUTUP

Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan pedoman strategis dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, yaitu:

“Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari, dan Berkeadaban.”

RPJMD ini merupakan turunan dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang dirancang sebagai langkah konkret dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mengacu pada RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, serta mempertimbangkan keterkaitannya dengan RPJMN 2025-2029 di tingkat nasional dan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat provinsi, maupun dokumen perencanaan pembangunan lain yang terkait.

Dalam penyusunannya, RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 menggunakan berbagai pendekatan yang komprehensif, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top-down bottom-up*, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan ini memastikan bahwa dokumen perencanaan tidak hanya mencerminkan visi kepala daerah, tetapi juga didasarkan pada analisis teknokratis, melibatkan koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintahan, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029, diperlukan sinergi dan tanggung jawab bersama dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat. Pemerintah berperan dalam merancang kebijakan dan memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, sektor swasta berkontribusi melalui investasi dan inovasi dalam pembangunan ekonomi, sementara masyarakat berperan aktif dalam mendukung kebijakan serta mengawal transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

Dengan adanya perencanaan yang matang, dukungan berbagai pihak, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong kesejahteraan, pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkeadaban.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO